



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah berperan penting dalam mewujudkan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok serta sebagai panduan strategis bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, Polri, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
8. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh).
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
17. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkai analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
19. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Demak dimasa yang akan datang.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.
24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
25. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
27. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
28. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
29. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumberdaya pembangunan.
30. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
31. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomi.
32. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 2

- (1) Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk merumuskan cita-cita pembangunan daerah dalam mewujudkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok serta panduan strategis bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. menjaga arah kebijakan pembangunan Daerah selama kurun waktu tahun 2025-2045;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan jangka panjang antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
 - c. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam RPJMD; dan
 - d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) Rincian dan Program RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJPD mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

Pasal 5

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJPD

- (1) Dokumen RPJPD terdiri atas sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. BAB IV : Visi dan Misi;
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok;
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Penjabaran RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (13 - 281 / 2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak



Konstanti Inani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, arah kebijakandan sasaran pokok daerah serta agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Demak dalam kurun waktu 20 tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pemilihan Bupati Kabupaten Demak secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka Pemerintah Kabupaten Demak menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun (2025 – 2045).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Demak adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Demak yang merupakan jabaran dari dibentuknya Pemerintah Kabupaten Demak dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun kedepan dari tahun 2025 – 2045. Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJPD Kabupaten Demak digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Demak pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Wali Kabupaten Demak yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2045 adalah (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah Pusat maupun Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DEMAK



RPJPD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN DEMAK
2025-2045

KATA PENGANTAR

Dokumen ini disusun sebagai bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Demak. Tujuannya adalah untuk menyediakan kerangka kerja strategis yang akan memandu proses pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam merumuskan rencana ini, kami mempertimbangkan tantangan serta potensi yang ada di Kabupaten Demak, guna mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan lokal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Kabupaten Demak, dengan kekayaan sejarah dan budaya yang dimilikinya, memiliki potensi besar di berbagai sektor, terutama pertanian, perikanan, industri, UMKM dan pariwisata. Oleh sebab itu, rencana pembangunan jangka panjang ini menitikberatkan pada pengembangan sektor-sektor tersebut melalui pendekatan yang inovatif serta adaptif terhadap dinamika global.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi pembangunan jangka panjang di Kabupaten Demak memerlukan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, rencana ini juga disusun untuk mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas, baik dalam tahap perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah yang sejahtera dan berdaya saing.

Akhir kata, kami berharap bahwa dokumen ini dapat berfungsi sebagai pedoman yang efektif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Demak. Dengan kerja sama yang sinergis dan dedikasi yang tinggi, kami optimis bahwa pembangunan jangka panjang ini akan membawa perubahan yang signifikan bagi kemajuan daerah. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, dan semoga rencana ini dapat diimplementasikan dengan sukses untuk kepentingan bersama.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I	1
	1.1 Latar Belakang	I	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	I	4
	1.4 Hubungan Antar Dokumen	I	5
	1.5 Sistematika Penulisan	I	7
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II	1
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II	1
	2.1.1 Geografi	II	1
	2.1.2 Demografi	II	33
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II	36
	2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II	36
	2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	II	47
	2.3 Aspek Daya Saing	II	54
	2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	II	54
	2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	II	59
	2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II	61
	2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	II	64
	2.4 Aspek Pelayanan Umum	II	67
	2.5 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006-2026	II	71
	2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II	78
	2.6.1 Proyeksi Demografi	II	79
	2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	II	81
	2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II	85
	2.7.1 Kabupaten Demak sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional	II	85
	2.7.2 Kawasan Strategis sebagai Pusat Pertumbuhan	II	89
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III	1
	3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	III	1
	3.2 Isu-Isu Strategis	III	7
	3.2.1 Isu Strategis Internasional	III	7
	3.2.2 Isu Strategis Nasional	III	11



3.2.3 Isu Strategis Daerah	III	15
3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Demak	III	31
BAB IV VISI DAN MISI	IV	1
4.1 Visi RPJPD Kabupaten Demak	IV	1
4.2 Misi RPJPD Kabupaten Demak	IV	11
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V	1
5.1 Arah Kebijakan Daerah	V	1
5.2 Sasaran Pokok Kabupaten Demak 2025-2045	V	7
BAB VI PENUTUP	VI	1
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan antara RPJPD Kabupaten Demak dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I	6
Gambar II.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Demak	II	2
Gambar II.2	Ketahanan Pangan Kabupaten Demak Tahun 2017-2023	II	6
Gambar II.3	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2015-2023	II	8
Gambar II.4	Persentase Klasifikasi Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan	II	9
Gambar II.5	Peta Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Kabupaten Demak	II	10
Gambar II.6	Persentase Klasifikasi Jasa Lingkungan Penyediaan Air	II	10
Gambar II.7	Peta Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Demak	II	12
Gambar II.8	Persentase Klasifikasi Jasa Lingkungan Pengatur Iklim	II	13
Gambar II.9	Peta Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kabupaten Demak	II	14
Gambar II.10	Persentase Klasifikasi Jasa Lingkungan Pengatur Air	II	15
Gambar II.11	Peta Jasa Lingkungan Pengatur Air	II	16
Gambar II.12	Persentase Klasifikasi Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir	II	17
Gambar II.13	Peta Jasa Lingkungan Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Demak	II	18
Gambar II.14	Persentase Klasifikasi Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Tanah Longsor	II	18
Gambar II.15	Peta Jasa Lingkungan Mitigasi Bencana Longsor Kabupaten Demak	II	19
Gambar II.16	Persentase Klasifikasi Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	II	20
Gambar II.17	Peta Jasa Lingkungan Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	II	21
Gambar II.18	Peta Daya Dukung Air Berbasis Grid Kabupaten Demak	II	23
Gambar II.19	Skenario Daya Dukung Air Tahun 2023-2045	II	24
Gambar II.20	Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Demak	II	26
Gambar II.21	Skenario Daya Dukung Pangan Tahun 2023-2045	II	26
Gambar II.22	Skenario Daya Dukung Lahan Terbangun Tahun 2023-2045	II	28
Gambar II.23	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Demak Tahun 2015-2023	II	29
Gambar II.24	Peta Rawan Bencana Kabupaten Demak	II	30
Gambar II.25	Jenis Bencana Kabupaten Demak Tahun 2023	II	31
Gambar II.26	Peta Perkembangan Banjir Rob Kabupaten Demak	II	32
Gambar II.27	Jumlah Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2005-2023 (Ribuan Jiwa)	II	33
Gambar II.28	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Demak Tahun 2018-2023 (%)	II	35
Gambar II.29	Piramida Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2023	II	35

Gambar II.30	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Demak Tahun 2011-2023 menurut Lapangan Usaha (%)	II	37
Gambar II.31	Laju Inflasi di Kabupaten Demak Tahun 2008-2023	II	39
Gambar II.32	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya di Kabupaten Demak Tahun 2005-2023	II	40
Gambar II.33	Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Demak Tahun 2005-2023	II	41
Gambar II.34	Indeks Gini Kabupaten Demak Tahun 2005-2023	II	43
Gambar II.35	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%) Tahun 2005-2023	II	44
Gambar II.36	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Demak Tahun 2005-2023 (%)	II	45
Gambar II.37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Demak Tahun 2010-2023 (%)	II	46
Gambar II.38	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Demak Tahun 2019-2023	II	47
Gambar II.39	Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Demak Tahun 2021-2023 (%)	II	48
Gambar II.40	Pembangunan Gender Kabupaten Demak Tahun 2005-2023	II	49
Gambar II.41	Indikator Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016-2023	II	51
Gambar II.42	Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2005-2023	II	52
Gambar II.43	Lima Kategori Lapangan Usaha yang Memiliki Kontribusi Tertinggi Pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Demak Tahun 2010-2023(%)	II	55
Gambar II.44	Kontribusi PDRB Kabupaten Demak Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2023 (%)	II	56
Gambar II.45	PDRB per Kapita di Kabupaten Demak Tahun 2005-2023 (Juta Rupiah)	II	56
Gambar II.46	Rasio Kewirausahaan (%) Kabupaten Demak Tahun 2007-2023	II	57
Gambar II.47	Indikator Daya Saing Ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2023	II	57
Gambar II.48	Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Rasio Pajak Terhadap PDRB di Kabupaten Demak Tahun 2005-2023 (%)	II	59
Gambar II.49	Perkembangan Pendidikan di Kabupaten Demak Tahun 2007-2023 (%)	II	59
Gambar II.50	Perkembangan Literasi dan Numerasi Pendidikan Kabupaten Demak Tahun 2022-2023 (%)	II	60
Gambar II.51	Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum serta Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Demak	II	62
Gambar II.52	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Demak Tahun 2022-2023	II	63
Gambar II.53	Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya Kabupaten Demak Tahun 2022-2023	II	67
Gambar II.54	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Demak Tahun 2019-2023	II	68
Gambar II.55	Indeks Integritas Nasional Kabupaten Demak Tahun 2019-2023	II	70

Gambar II.56	Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Demak	II	70
Gambar II.57	Deliniasi Kawasan Tertentu Kedungsepur (Bahan Tayang, Kerangka Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, KemenPUPR)	II	86
Gambar II.58	Cakupan 6 Kabupaten/Kota KSN Kedungsepur dan hirarki sistem pusat perkotaan (RKP Provinsi Jawa Tengah, 2019)	II	86
Gambar II.59	Peta Proyek Nasional Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Rehabilitasi di Klambu di Kabupaten Demak	II	87
Gambar II.60	Masjid Agung Demak Sebagai Simpul Daya Tarik Wisata Religi di Pusat Perkotaan Demak	II	90
Gambar II.61	Peta Kawasan Industri di Sepanjang Koridor Arteri Primer, Khususnya KI Sayung	II	91
Gambar III.1	Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak	III	2
Gambar III.2	Tantangan Global Pembangunan Jangka Panjang Nasional	III	8
Gambar III.3	Visi Indonesia Emas 2045	III	12
Gambar III.4	17 (tujuh belas) arah pembangunan Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045	III	14
Gambar III.5	Visi Pembangunan Jangka Panjang Jawa Tengah 2025-2045	III	16
Gambar III.6	Tema RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045	III	20
Gambar III.7	Keterkaitan Permasalahan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Demak	III	21
Gambar III.8	Keterkaitan Isu Strategis RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Demak	III	27
Gambar III.9	Konstelasi/Kedudukan Kabupaten Demak sebagai PKN	III	28
Gambar III.10	Ilustrasi Struktur Ruang Kabupaten Demak	III	28
Gambar III.11	Alokasi Pola Ruang di Kabupaten Demak	III	29
Gambar III.12	Fenomena Urban Sprawl di Kabupaten Demak	III	30
Gambar III.13	Isu terkait bencana Rob dan Land Subsidence	III	32
Gambar III.14	DAS Terkait Pesisir Demak	III	33
Gambar III.15	Tipologi Kawasan Pesisir	III	33
Gambar IV.1	Kerangka Logis Perumusan Visi Kabupaten Demak 2025-2045	IV	2
Gambar IV.2	Keterkaitan Antar Pokok Visi RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045	IV	3
Gambar IV.3	Keterkaitan Visi dengan Sasaran Visi Kabupaten Demak	IV	6
Gambar IV.4	Keterkaitan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJD Kabupaten Demak	IV	8
Gambar IV.5	Keterhubungan Antara Strategi Transformasi Nasional, Pokok Misi RPJPD, dan Pokok Visi RPJPD Kabupaten Demak 2025-2045	IV	11
Gambar IV.6	Keterkaitan antara Misi RPJPD Kabupaten Demak dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2045	IV	13
Gambar V.1	Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak	V	1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Demak Tahun 2023	II	3
Tabel II.2	Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Demak Tahun 2019-2023	II	5
Tabel II.3	Ketersediaan Air tiap Kecamatan	II	22
Tabel II.4	Luas Daya Dukung Air Berbasis <i>Grid</i>	II	23
Tabel II.5	Skenario Daya Dukung Air Tahun 2023-2045	II	24
Tabel II.6	Daya Dukung Pangan Kabupaten Demak	II	25
Tabel II.7	Skenario Daya Dukung Pangan Tahun 2023-2045	II	27
Tabel II.8	Skenario Daya Dukung Lahan Terbangun Tahun 2023-2045	II	27
Tabel II.9	Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2019-2023	II	30
Tabel II.10	Panjang Garis Pantai dan Luas Wilayah Terdampak Rob	II	32
Tabel II.11	Kependudukan Kabupaten Demak Tahun 2005-2023	II	34
Tabel II.12	Kondisi Infrastruktur Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2019-2023	II	53
Tabel II.13	Kondisi Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Demak Tahun 2018-2023	II	61
Tabel II.14	Capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Demak Tahun 2018-2023	II	62
Tabel II.15	Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2019-2023	II	64
Tabel II.16	Indikator Urusan Ketenteraman dan Ketertiban di Kabupaten Demak Tahun 2018-2023	II	65
Tabel II.17	Capaian Kinerja Pada Urusan Penanaman Modal Kabupaten Demak Tahun 2018-2023	II	66
Tabel II.18	Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Demak Tahun 2019-2023	II	69
Tabel II.19	Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2006-2022	II	71
Tabel II.20	Kriteria Penilaian Kinerja di Kabupaten Demak Tahun 2010-2023 (%)	II	73
Tabel II.21	Rekap Tingkat Capaian Kinerja RPJMD pada Capaian Indikator Misi RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2005-2025	II	74
Tabel II.22	Proyeksi Penduduk Kabupaten Demak 2025-2045 (Ribu Jiwa)	II	79
Tabel II.23	di Kabupaten Demak Tahun 2005-2023 (Tahun) Proyeksi Penduduk Kabupaten Demak 2025-2045 (Ribu Jiwa)	II	80
Tabel II.24	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Demak (Ribu Jiwa)	II	80
Tabel II.25	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Demak	II	81
Tabel II.26	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Demak	II	82
Tabel II.27	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Demak	II	83
Tabel II.28	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Demak	II	83
Tabel II.29	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Demak	II	84
Tabel II.30	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Demak	II	84

Tabel III.1	Penyelarasan Kelompok Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Permasalahan RPJPD Kabupaten Demak	III	23
Tabel III.2	Perbandingan Antara Tujuan RTRW	III	25
Tabel III.3	Keterkaitan Isu Strategis RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Demak	III	39
Tabel IV.1	Penyelarasan Pokok Visi RPJPD Kabupaten Demak dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	IV	5
Tabel IV.2	Sasaran Visi, Indikator, dan Target RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045	IV	7
Tabel IV.3	Persandingan Indikator Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045	IV	9
Tabel V.1	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Sehat	V	9
Tabel V.2	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Meningkatnya Aspek Kebudayaan Dalam Pengembangan Daya Saing dan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat	V	13
Tabel V.3	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Responsif dan Adaptif	V	16
Tabel V.4	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Daerah	V	20
Tabel V.5	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	V	23
Tabel V.6	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Menurunnya Angka Kemiskinan Diiringi Pemerataan Kesejahteraan	V	26
Tabel V.7	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Pembangunan yang Ramah Lingkungan dan Mengarusutamakan Pembangunan Berkelanjutan	V	28
Tabel V.8	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terbangunnya Infrastruktur Dasar, Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas	V	30
Tabel V.9	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terciptanya Kondisi Lingkungan dan Masyarakat yang Tangguh Bencana	V	32
Tabel V.10	Keterkaitan Visi, Misi, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Target Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2025-2045	V	33



PENDAHULUAN



01

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Demak yang terletak di pesisir utara Jawa ditopang oleh tiga lapangan usaha antara lain lapangan usaha pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Demak memiliki komoditas utama yaitu padi, jagung, kacang hijau, bawang merah, cabai, dan tembakau. Demak juga memiliki varietas unggulan seperti belimbing dan jambu merah. Produksi padi di Kabupaten Demak terbesar ke empat di Jawa Tengah (BPS, 2024). Selanjutnya, sektor perikanan juga memiliki peluang yang sangat besar mengingat keberadaan Kabupaten Demak yang berada di pesisir utara Jawa.

Industri pengolahan menempati urutan pertama pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Demak dengan kawasan industri yang terpusat di Sayung dan Karangawen. Jumlah industri kategori besar dan sedang di Kabupaten Demak sebanyak 143 (BPS, 2023) unit. Dengan lebih dari 39.103 (Dindagkop UKM, 2024) unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kabupaten Demak berhasil mencatat prestasi yang mengesankan. UMKM seperti Batik Demak, Alat Musik Terbang dan Beduk, Kerajinan Tembaga, Kerajinan Yong Sua, dan Sangkar Burung sudah merambah pasar ekspor. Hal ini menunjukkan keberhasilan Kabupaten Demak dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal dan memperkuat posisinya di pasar internasional.

Kabupaten Demak sering disebut juga sebagai "Kota Wali" karena menjadi tempat berkumpulnya Wali Songo (Sembilan Wali) dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Julukan tersebut menjadi sebuah kekhasan dan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Keistimewaan ini telah menjadikan Kabupaten Demak sebagai tujuan peziarah dari berbagai wilayah. Kondisi ini berkontribusi dalam peningkatan sektor wisata religi yang terus dikembangkan. Beberapa destinasi religi yang menonjol di Kabupaten Demak adalah Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga, makam terapung Syekh Mudzakir, dan makam raja-raja Demak.

Dengan menggali potensi, memanfaatkan sumber daya, dan meraih prestasi yang telah diperoleh, Pemerintah Kabupaten Demak harus mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Kebijakan tersebut seharusnya sejalan dengan program pemerintah provinsi dan pusat, menciptakan sinergi yang harmonis dalam mencapai tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; dan daya saing daerah.

Pentingnya peran signifikan dari perencanaan pembangunan daerah menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan. Perencanaan yang matang dan terukur tidak hanya mencakup aspek infrastruktur fisik, tetapi juga mengakomodasi aspek sosial, ekonomi, dan

lingkungan. Dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, perencanaan tersebut dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang lebih besar. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Demak perlu memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diambil tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini dapat dicapai dengan fokus pada sektor-sektor kunci yang memiliki potensi untuk memberikan dampak positif jangka panjang. Dengan cara ini, Pemerintah Kabupaten Demak dapat memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil tidak hanya bersifat progresif tetapi juga berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Demak.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Nasional adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang menyeluruh untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan. Rencana Pembangunan ini melibatkan jangka waktu yang terbagi menjadi perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh semua unsur penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pemantauan dan evaluasi dianggap sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 juga menegaskan bahwa untuk mendukung pengendalian pembangunan, perlu dilakukan pemantauan guna memantau perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul. Evaluasi perencanaan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang membandingkan realisasi pelaksanaan terhadap pencapaian kegiatan (*output/outcome*) dari rencana yang telah ditetapkan.

Penyusunan RPJPD ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 18, yang menetapkan bahwa Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus disusun paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD sebelumnya. Penyusunan dokumen RPJPD bertujuan untuk memberikan dasar acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan. Dokumen ini esensialnya mencakup arah kebijakan dan sasaran utama pembangunan daerah. Secara teknis, RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang dua puluh tahun harus disusun dengan mengacu dan memperhatikan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, perencanaan dari bawah (*bottom up planning*), dan arahan kebijakan Pemerintah (*top down planning*). Dalam penyusunannya, RPJPD 2025-2045 mengikuti tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, konsultasi publik, konsultasi rancangan awal ke Provinsi, penyusunan rancangan, Pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, penyampaian rancangan akhir ke DPRD, Penyampaian rancangan akhir ke Provinsi, dan penetapan Ranperda RPJPD. Rancangan awal RPJPD juga disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik yang dihadiri pemangku kepentingan untuk memberi masukan teknokratik permasalahan dan prioritas pembangunan jangka panjang. Rancangan akhir RPJPD juga telah melewati reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk menjaga keselarasan antar dokumen perencanaan. Dalam pelaksanaannya, Bappelitbangda Kabupaten Demak sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menerima masukan terkait penyusunan RPJPD.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Demak diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah. Dengan demikian, perumusan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Kabupaten Demak untuk dua puluh tahun mendatang dapat direalisasikan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Undang-Undang Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor (...) Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031; dan
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 memiliki peran penting dalam membimbing upaya pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati secara bersama-sama. Melalui inisiatif ini, diharapkan tercipta sinergi, koordinasi, dan upaya untuk saling melengkapi di antara semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Maksud dari disusunnya RPJPD Kabupaten Demak 2025-2045 sebagai berikut:

- a. Menjadi acuan bagi keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Demak dalam 20 tahun mendatang kurun 2025-2045;

- b. Menyelaraskan arah kebijakan dan pembangunan daerah dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

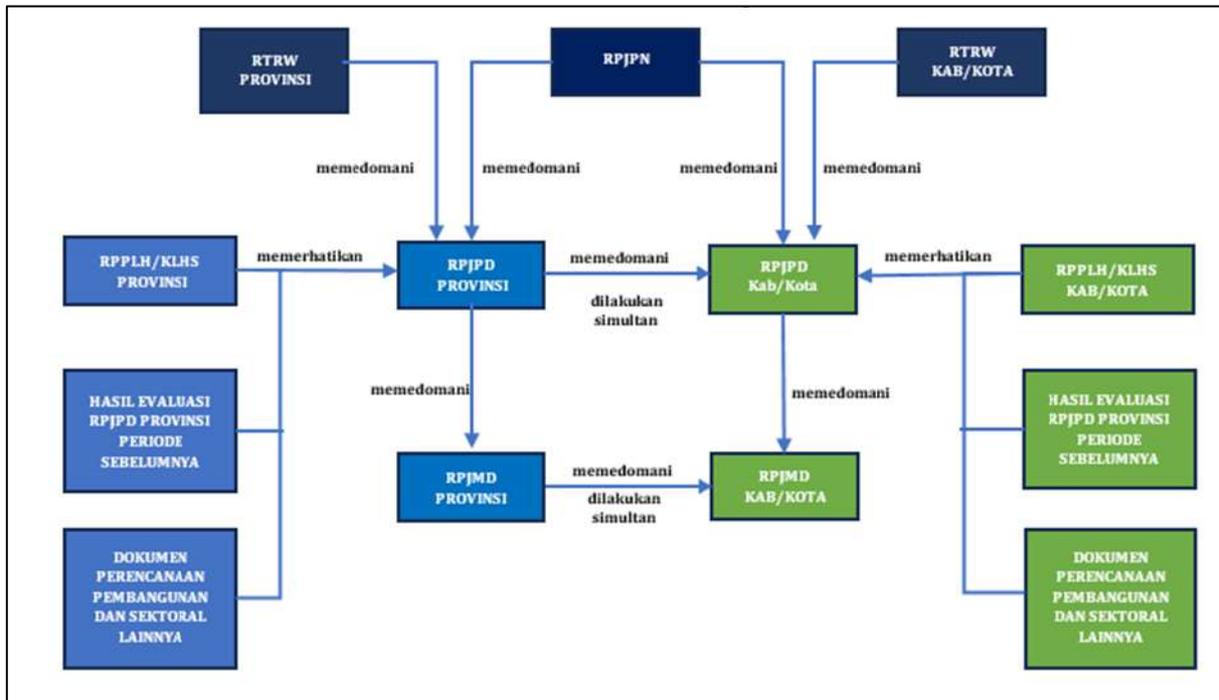
RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan landasan dan pedoman bagi calon kepala daerah dalam mengikuti pemilihan kepala daerah;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Demak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan;
4. Menjelaskan gambaran umum kondisi Kabupaten Demak, analisis isu-isu strategis, visi dan misi nasional, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Demak;
5. Merumuskan visi dan misi daerah yang relevan dan dapat tercapai;
6. Merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang dapat dipedomani dalam penyusunan visi, misi, dan program Bupati setiap 5 tahun; dan
7. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 perlu disesuaikan dengan dokumen-dokumen Provinsi dan Nasional agar menghasilkan dokumen yang bersinergi dan terpadu. Sistem perencanaan pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 memiliki keterkaitan dan integrasi dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, termasuk RTRW, KLHS, dan RPJPD wilayah sekitar. Hal ini dikarenakan adanya hubungan dan keterkaitan yang erat antar dokumen perencanaan. Secara singkat, dokumen RPJPD diimplementasikan melalui RPJMD, kemudian RPJMD dijalankan melalui RKPD, dan selanjutnya RKPD diikuti oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Gambar I.1
Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024

1. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Demak dan RPJPN

Penyusunan RPJPD Kabupaten Demak mengacu pada RPJPN untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang langsung terkait dengan wilayah Kabupaten Demak. Dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah, sinkronisasi kebijakan harus didasarkan pada isu-isu dan strategi pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan RPJPN tahun 2025-2045 melalui Penyelarasan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan.

2. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Demak dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah

RPJPD Kabupaten Demak mengikuti dan melakukan penyesuaian dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah untuk menciptakan sinergi dan keselarasan dalam kebijakan serta prioritas pembangunan. Keselarasan tersebut disesuaikan dengan Surat Edaran Nomor: 000.7/0002940 tentang panduan Penyesuaian RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan Surat Nomor 000.7/1030 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyesuaian RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Surat tersebut memuat pencapaian indikator sasaran Provinsi Jawa Tengah yang diturunkan ke Kabupaten/Kota.

3. Hubungan Antara RPJPD dan RTRW Kabupaten Demak

Penyusunan RPJPD Demak mempertimbangkan RTRW Kabupaten Demak. Hal ini dikarenakan strategi dan kebijakan pengembangan wilayah yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Demak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RTRW. RTRW Kabupaten berfungsi sebagai panduan dalam menentukan lokasi pembangunan daerah berdasarkan potensi wilayahnya.

Pendekatan ini sejalan dengan skema perencanaan pembangunan yang berdimensi kewilayahan, di mana perhatian khusus diberikan pada pembangunan di kawasan terpilih atau strategis. Penilaian ini harus didasarkan pada perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu, mempertimbangkan kondisi dan potensi wilayah, serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

4. Hubungan Antara RPJPD dan KLHS RPJPD

Penyusunan RPJPD Kabupaten Demak mengintegrasikan KLHS RPJPD yang di dalamnya memuat isu-isu pembangunan berkelanjutan dan rekomendasi tindakan maupun target yang harus dicapai dalam perencanaan jangka panjang di Kabupaten Demak.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Demak.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Demak sebagai salah satu pertimbangan perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; mencantumkan hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025; menyajikan tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik; dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil olahan data atas kinerja dan informasi pembangunan lainnya yang diperlukan untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis. Penjelasan ini diperlukan sebagai bagian dari upaya pemecahan masalah pembangunan daerah hingga akhir masa periode pembangunan disertai oleh isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi dan nasional).

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah yaitu selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK



Memuat usaha dan upaya yang harus dilakukan melalui arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok dari setiap strategi terpilih. Narasi yang disampaikan menguraikan arah, tahapan, dan prioritas pembangunan daerah. Tahapan pembangunan yang dimaksud adalah tahapan rencana lima tahunan yang membagi RPJPD menjadi 4 (empat) RPJMD secara berkesinambungan dengan masing-masing menegaskan prioritas.

BAB VI PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan yang perlu menjadi fokus setiap penanggung jawab dari unit pelaksana terkait serta menghimpun saran agar implementasi RPJPD Kabupaten Demak dapat terlaksana dengan baik.



GAMBARAN

UMUM

KONDISI

DAERAH



02

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah berisikan berbagai hasil pembangunan yang telah diraih Kabupaten Demak baik capaian positif maupun sebaliknya. Gambaran Umum ini menyajikan capaian pembangunan periode sebelumnya secara umum, namun masih pada nilai yang komprehensif dari tahun analisis yang disesuaikan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah di tahun yang telah berlalu. Susunan gambaran umum kondisi daerah dilakukan melalui pemetaan secara objektif tentang kondisi geografis, potensi pengembangan wilayah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, evaluasi RPJPD periode sebelumnya, serta proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana selama periode pembangunan jangka panjang. Analisis gambaran umum kondisi daerah diharapkan mampu memberikan pemahaman awal sejauh mana keberhasilan pembangunan yang selama ini telah dilakukan di Kabupaten Demak.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi dan demografi sangat memiliki keterkaitan yang kuat. Kondisi geografi memberikan dasar fisik bagi suatu wilayah, sementara demografi menggambarkan karakteristik penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Keduanya penting dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Demak sebagai pijakan awal perumusan kebijakan.

2.1.1 Geografi

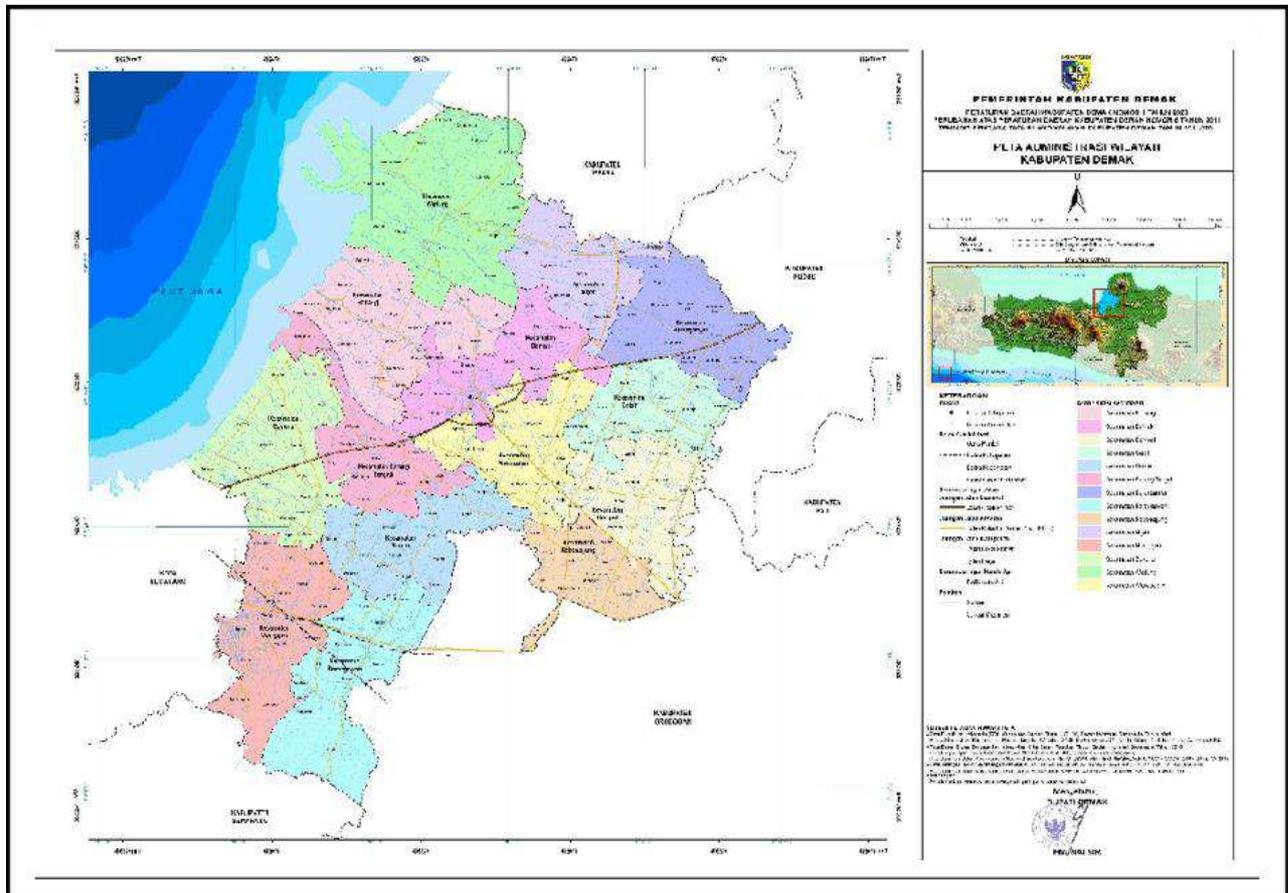
Aspek geografi menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah kurang lebih 99.531 Ha. Batas-batas administrasi Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- sebelah Utara: Kabupaten Jepara dan Laut Jawa;
- sebelah Timur: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan;
- sebelah Selatan: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang;
- sebelah Barat: Kota Semarang.

Gambar II.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Demak



Sumber: Pemkab Demak

Wilayah administratif Kabupaten Demak terdiri dari 14 kecamatan, 6 kelurahan, 243 desa, terbagi menjadi 786 dusun, 1.324 Rukun Warga (RW) dan 6.942 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Wedung merupakan kecamatan terluas, yaitu dengan wilayah seluas 12.942 ha atau 13% dari luasan Kabupaten Demak. Kecamatan yang memiliki luasan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kebonagung yakni 4.446 ha atau sebesar 4,47% dari luasan Kabupaten Demak. Semua wilayah kecamatan di Kabupaten Demak mudah dijangkau dan memiliki akses transportasi umum, terutama pusat-pusat perkembangan perekonomian daerah. Secara rinci, luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Demak Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas Kecamatan (Ha)	Jumlah Kelurahan/Desa	Persentase Luas (%)
1.	Mranggen	7.759	19	7,80
2.	Karangawen	8.171	12	8,21
3.	Guntur	6.428	20	6,46
4.	Sayung	8.597	20	8,64
5.	Karantengah	5.644	17	5,67
6.	Bonang	8.706	21	8,75
7.	Demak	6.305	19	6,33
8.	Wonosalam	6.279	21	6,31
9.	Dempet	6.394	16	6,42
10.	Kebonagung	4.446	14	4,47
11.	Gajah	5.373	18	5,40
12.	Karanganyar	6.987	17	7,02
13.	Mijen	5.500	15	5,53
14.	Wedung	12.942	20	13,00
Jumlah		99.531	249	100,00

Sumber: BPS Kab. Demak Dalam Angka

2. Letak Astronomis dan Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Demak terletak pada koordinat 6°43'26"-7°09'43" LS dan 110°27'58"-110°48'47" BT. Luas wilayah Kabupaten Demak tercatat sebesar 99.531 Ha dengan sebagian besar wilayahnya merupakan lahan sawah yaitu seluas 57,47% dan selebihnya adalah kebun, bangunan, dan tambak seluas 42,53%. Sawah yang ada terdiri dari sawah berpengairan teknis 37,25% dan sawah hujan 19,33%. Sedangkan untuk lahan kering 14,93% digunakan untuk perkebunan, 17,12% digunakan untuk bangunan dan lahan, serta 10,63% digunakan untuk tambak.

3. Topografi

Wilayah Kabupaten Demak terdiri atas dataran rendah, kawasan pantai/pesisir serta perbukitan, dengan rata-rata ketinggian permukaan antara 0-100 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten Demak dibatasi atas 3 region, sebagai berikut:

- a. Region A: 0-3 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, Karantengah, Mijen, Sayung dan Wedung;
- b. Region B: 3-10 meter, meliputi sebagian besar di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Demak; 10-25 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Dempet, Karangawen dan Mranggen; 5-100 meter, meliputi sebagian besar Kec. Karangawen dan Mranggen;

- c. Region C: lebih dari 100 meter, meliputi sebagian kecil Kecamatan Karangawen dan Mranggen.

Kemiringan lahan di Kabupaten Demak sebagian besar relatif datar, yaitu berada pada lahan dengan kemiringan 0-8%. Sedangkan pada bagian selatan Kabupaten Demak memiliki kemiringan lahan yang sangat bervariasi terutama di wilayah Desa Banyumeneng dan Sumberejo. Kedua desa ini memiliki lahan dengan kemiringan 0-2%, 2-8%, 8-15%, 15-40%, dan lebih besar dari 40%.

4. Geologi

Secara geologis, Kabupaten Demak terbagi beberapa jenis tanah, di antaranya:

- a. Aluvial hidromorf, terdapat di sepanjang pantai;
- b. Regosol, terdapat di sebagian besar Kecamatan Karangawen dan Mranggen;
- c. Gromosol kelabu tua, terdapat di Kecamatan Bonang, Wedung, Kebonagung, Mijen, Karanganyar, Gajah, Demak, Wonosalam, Dempet dan Sayung, dan;
- d. Mediteran, terdapat di sebagian besar Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Mranggen.

Sebagian besar kondisi tanah di Kabupaten Demak pada musim kemarau menjadi keras dan retak-retak, sehingga tidak dapat ditanami secara intensif untuk pertanian. Ketika musim penghujan, tanah bersifat lekat, volumenya membesar, serta lembab sehingga sulit ditanami dan memerlukan sistem drainase yang memadai. Pada beberapa daerah tertentu kondisi air tanah yang asin dapat mempengaruhi usaha pertanian. Gejala-gejala yang disebabkan oleh air tanah yang asin terutama terjadi pada wilayah dekat pantai dan sungai/saluran pembuangan yang pada musim kemarau dimasuki air laut. Struktur geologi Kabupaten Demak terdiri dari:

- a. Struktur Aluvium terdapat hampir semua Kecamatan di Kabupaten Demak yaitu di Kecamatan Mijen, Bonang, Demak, Gajah, Karanganyar, Wonosalam, Karangtengah, Dempet, Sayung, Guntur, Mranggen dan Karangawen;
- b. Miosen, fasies sedimen terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragung dan sebagian di Kecamatan Mranggen;
- c. Pliosen, fasies sedimen terdapat di sebagian kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragug dan sebagian di Kecamatan Mranggen;
- d. Plistosen, fasies gunung api terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen (Desa Margohayu dan Wonosekar) dan terdapat di Kecamatan Mranggen (Desa Sumberejo); dan
- e. Pliosen, fasies batu gamping yaitu hanya terdapat di Kecamatan Mranggen.

5. Klimatologi

Kabupaten Demak mengalami musim penghujan pada bulan Desember sampai dengan Maret. Pada bulan-bulan tersebut, angin bertiup dari Asia dan Samudra Pasifik. Pada bulan Juni sampai dengan September, angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga Kabupaten Demak mengalami musim kemarau. Di antara kedua musim tersebut, terdapat masa peralihan yaitu pada bulan Oktober-November dan April-Mei.

Tabel II.2
Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan
di Kabupaten Demak Tahun 2019-2023

Tahun	Rata-rata Hari Hujan (hari)	Rata-rata Curah Hujan (mm)
2019	N/A	N/A
2020	126	2.404
2021	122	2.567
2022	182	2.663
2023	120	1.904

Sumber: BPS Kab. Demak

Catatan: NA = data tidak dirilis

Data hari hujan dan curah hujan di atas dihitung berdasarkan penjumlahan rata-rata hari hujan dan rata-rata curah hujan per bulan selama satu tahun. Berdasarkan data dari stasiun Klimatologi Semarang, rata-rata hari hujan terbanyak terjadi pada tahun 2023 yaitu 120 hari dan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu 1.904 mm. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Demak tahun 2023 berkisar antara 26,70 derajat *celcius* sampai dengan 30,40 derajat *celcius*.

6. Hidrologi

Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Demak terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air. Sumber air meliputi air permukaan (sungai, embung dan bendungan) dan air tanah pada cekungan air tanah. Kabupaten Demak dilewati 12 sungai yaitu Sungai Serang, Kali Wulan, Kali Kenceng, Kali Loben, Kali Jajar, Kali Tuntang Lama, Kali Jragung, Kali Setu, Kali Dolog, Kali Daleman, Kali Mondoliko dan Kali Babon. Cekungan air tanah yang terdapat di Kabupaten Demak yaitu cekungan air tanah Kudus dan cekungan air tanah Semarang-Demak. Namun demikian, rata-rata kualitas air tanah dangkal (sumur gali) dan air tanah dalam (sumur bor) di Demak kurang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai air minum. Hal tersebut akibat air tanah di Demak banyak mengandung unsur besi dan pada musim kemarau kapasitasnya tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Prasarana sumber daya air terdiri atas sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir dan rob, jaringan untuk air bersih dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna. Dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, Kabupaten Demak pada tahun 2021-2022 telah mengembangkan

Daerah Irigasi Suka Baru yang digunakan untuk mengairi areal persawahan Kecamatan Bonang. Hingga tahun 2023, Kabupaten Demak memiliki sistem jaringan irigasi primer yang berada di 14 daerah irigasi (DI) yaitu:

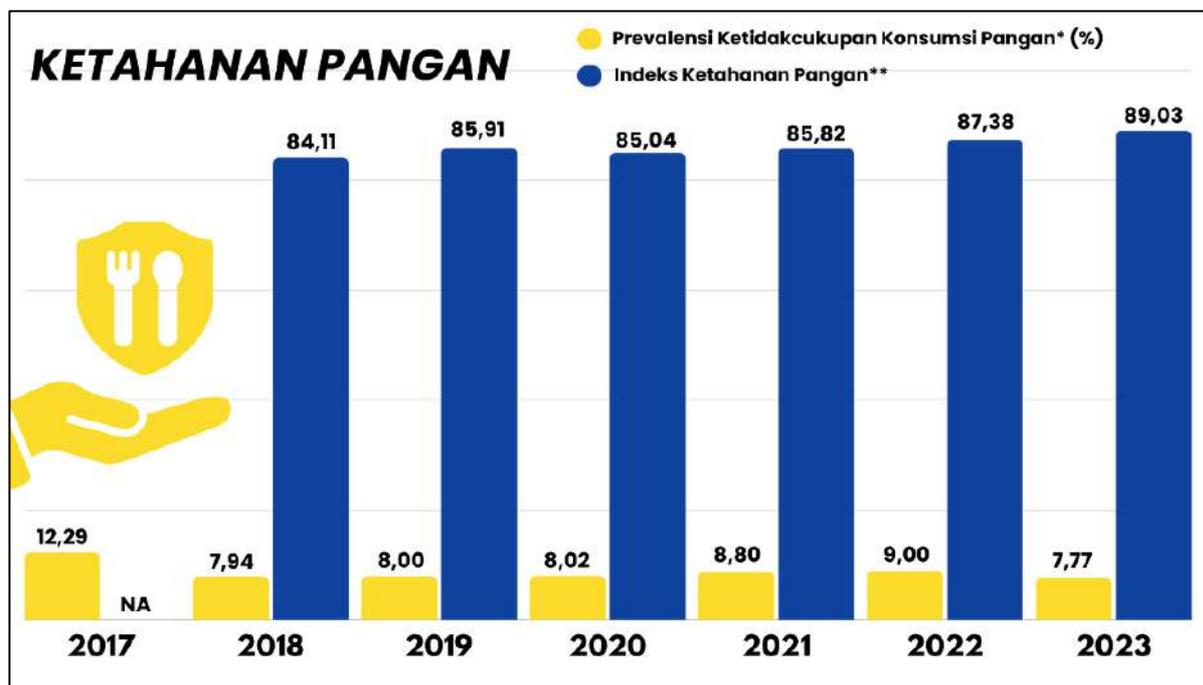
- 1) Daerah Irigasi Sedadi;
- 2) Daerah Irigasi Glapan Timur;
- 3) Daerah Irigasi Glapan Barat;
- 4) Daerah Irigasi Klambu Kiri;
- 5) Daerah Irigasi Jragung;
- 6) Daerah Irigasi Guntur;
- 7) Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Baru;
- 8) Daerah Irigasi Penggaron;
- 9) Daerah Irigasi Sumberejo;
- 10) Daerah Irigasi Polder Batu;
- 11) Daerah Irigasi Gablok;
- 12) Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran;
- 13) Daerah Irigasi Dolok; dan
- 14) Daerah Irigasi Batu.

7. Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor.

Gambar II.2

Ketahanan Pangan Kabupaten Demak Tahun 2017-2023



Sumber:

*BPS, data 2005-2016 tidak tersedia (mulai rilis tahun 2017)

**Dinpartan Pangan, data 2005-2017 belum dilakukan perhitungan

Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Secara umum, kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Demak sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan yang mengindikasikan proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan pangan mengalami penurunan hingga mencapai 7,77 persen di tahun 2023. Selain itu, Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Demak juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai 89,03 pada tahun 2023.

8. Lingkungan Hidup

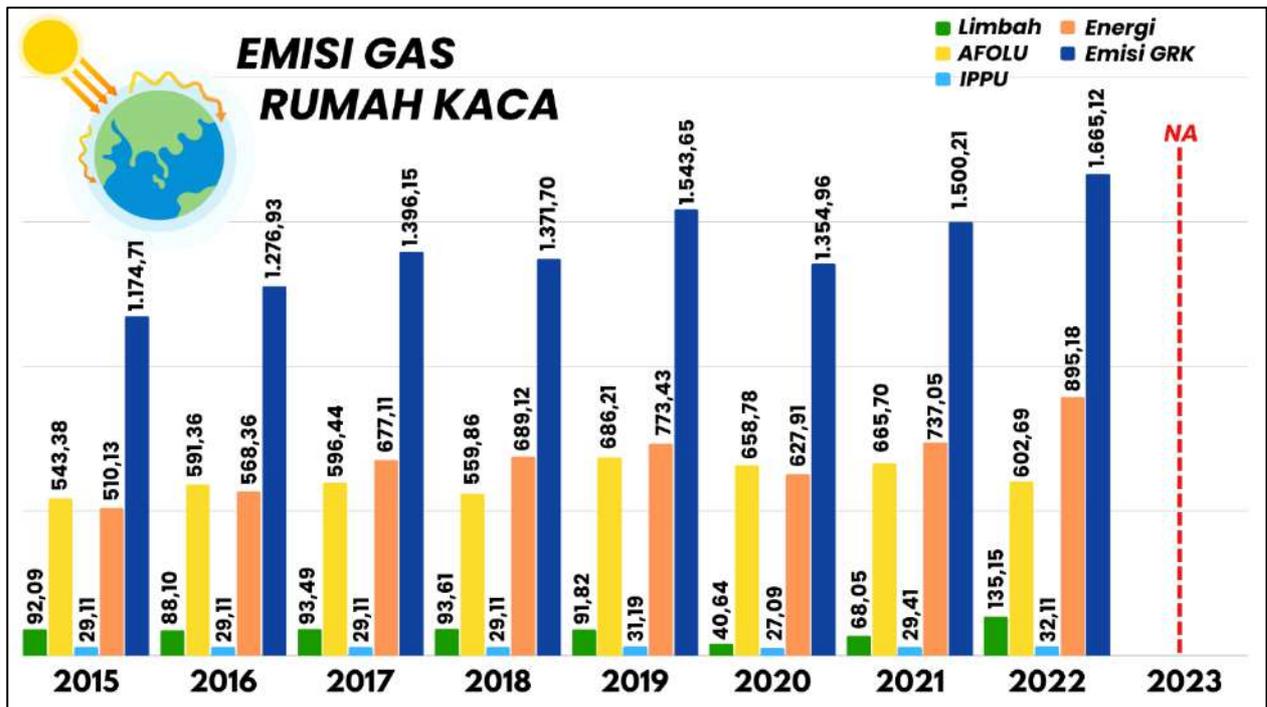
Sumber daya alam diperlukan mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan. Pengelolaan sumber daya alam memiliki tujuan yang sama yaitu agar terus tersedianya sumber daya alam yang dapat diperbaharui, menghemat dan meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui serta mencari substitusi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Diketahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Demak tahun 2022 adalah 54,84, kemudian meningkat menjadi 65,79 pada tahun 2023. Peningkatan tersebut disebabkan adanya perubahan perhitungan dari Permen LHK Nomor P.78/SETJEN/SET.1/9/2016 menjadi Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berdasarkan Surat Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024 Tentang Penyampaian Hasil *Expose* IKLH Tahun 2023, nilai IKLH dikonversi menjadi 72,26.

Pelestarian lingkungan dapat pula diketahui dari analisis indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten Demak mulai dirilis pada tahun 2021 pada aplikasi SIPSN (Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional). Indikator tersebut mengindikasikan bagaimana sampah yang dihasilkan masyarakat maupun swasta diolah di fasilitas pengolahan sampah. Kondisi di Kabupaten Demak sendiri dalam pengolahan sampah masih belum optimal. Namun, setiap tahun upaya pengolahan sampah terus dilakukan dan ditingkatkan kualitasnya hingga mencapai 10,75 persen pada tahun 2023. Selain itu, penurunan emisi GRK di Kabupaten Demak

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian lima tahun lalu, namun meningkat dalam dua tahun terakhir. Pencapaian ini perlu diwaspadai karena pembangunan lingkungan hidup akan meningkatkan kualitas pembangunan hijau untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Gambar II.3
Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Demak Tahun 2015-2023



Sumber: DinLH Kab. Demak, 2024

*tahun 2023 data EGRK belum dirilis

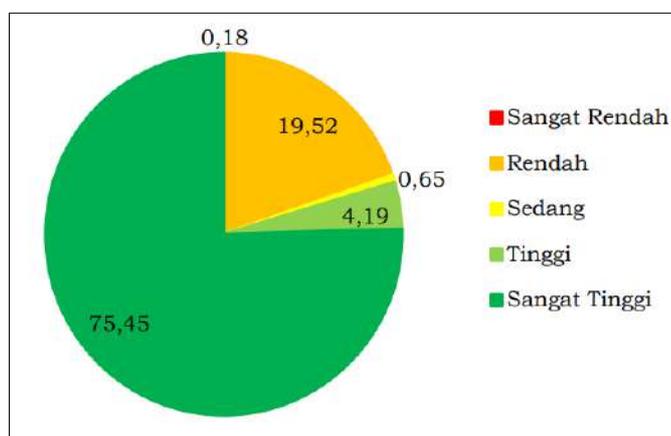
9. Daya Dukung dan Daya Tampung

A. Jasa Lingkungan

1. Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis Jasa lingkungan penyediaan pangan merupakan kemampuan ekosistem dalam memberikan manfaat kepada manusia berupa tersedianya bahan pangan bagi manusia. Penyediaan bahan pangan yang dimaksud berupa sumber pangan hayati dan hewani.

Gambar II.4
Persentase Klasifikasi Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan

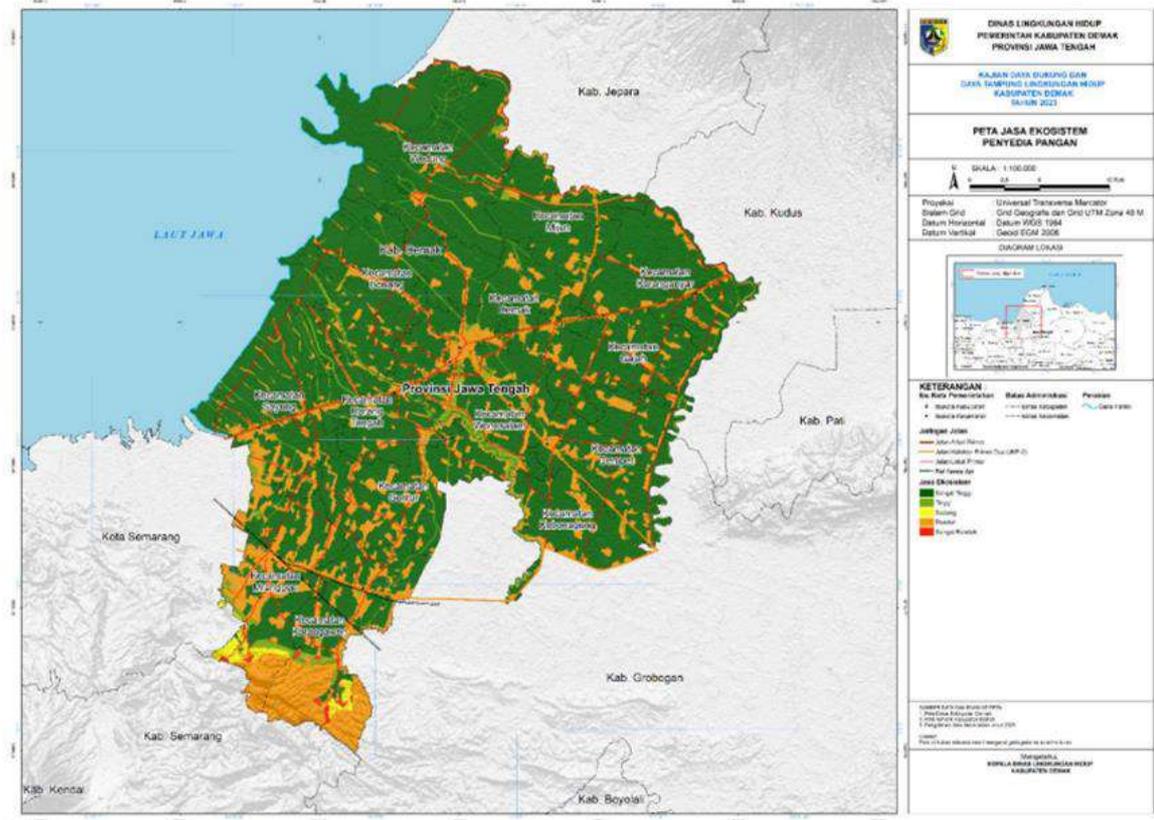


Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

Jasa penyediaan pangan di Kabupaten Demak didominasi oleh kelas sangat tinggi dengan persentase 75,45% atau 75.101 ha. Kelas rendah menempati peringkat kedua dengan luasan 19.432 ha atau 19,52%. Kelas tinggi mempunyai luasan tertinggi ketiga dengan persentase 4,19% sedangkan kelas sangat rendah hanya 0,18%. Hal ini dikarenakan penggunaan lahan sawah mendominasi di Demak sehingga jasa untuk penyediaan pangannya relatif tinggi. Karakteristik geografis Demak yang berada di hilir DAS menyebabkan mempunyai jenis ekoregion dataran aluvial. Dataran aluvial memiliki tanah subur yang berasal dari endapan mineral dari tanah yang terbawa oleh aliran sungai. Selain itu, tanah aluvial mudah untuk penyerapan dan mengalirkan air. Aspek kesuburan tanah dan ketersediaan air melimpah menyebabkan sesuai untuk tanaman semusim seperti padi. Kawasan lain yang mempunyai kelas tinggi untuk penyediaan pangan adalah tambak. Tambak menghasilkan ikan yang menjadi salah satu sumber pangan.

Hasil analisis jasa lingkungan dengan data pola ruang RTRW Demak 2011-2031 menunjukkan kelas sangat tinggi mengalami penurunan dari 75,25% menjadi 60%. Kelas sedang luasannya meningkat dibandingkan dengan menggunakan data penggunaan lahan *existing* yaitu dari 0,65% menjadi 18%. Sedangkan kelas tinggi, rendah dan sangat rendah tidak mengalami perubahan signifikan. Arah pemanfaatan lahan menjadi faktor adanya perubahan kelas untuk jasa penyedia pangan. Lahan sawah atau tambak diubah menjadi permukiman atau industri sehingga mengurangi kemampuan untuk menghasilkan pangan. Salah satu perubahan terbesar adalah arahan kawasan industri di Kecamatan Sayung yang dahulu berupa tambak dan sawah.

Gambar II.5
Peta Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Kabupaten Demak

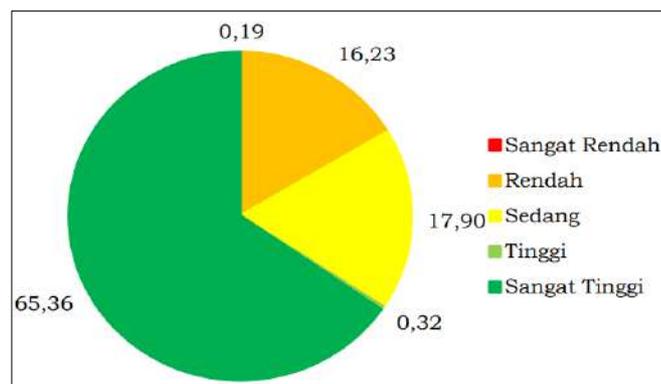


Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

2. Jasa Lingkungan Penyediaan Air

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis Jasa lingkungan penyediaan air bersih menunjukkan kemampuan ekosistem dalam memberikan manfaat kepada manusia berupa tersedianya air bersih. Penyediaan air bersih tersebut berupa air yang bersumber dari air tanah, air hujan, maupun air permukaan. Ketersediaan air bersih tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai hal baik itu dari jenis tanah, jenis batuan, intensitas hujan, hingga tutupan lahan. Oleh karena itu, Jasa lingkungan penyediaan air bersih ini akan berbeda pada tiap ekoregion.

Gambar II.6
Persentase Klasifikasi Jasa Lingkungan Penyediaan Air



Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

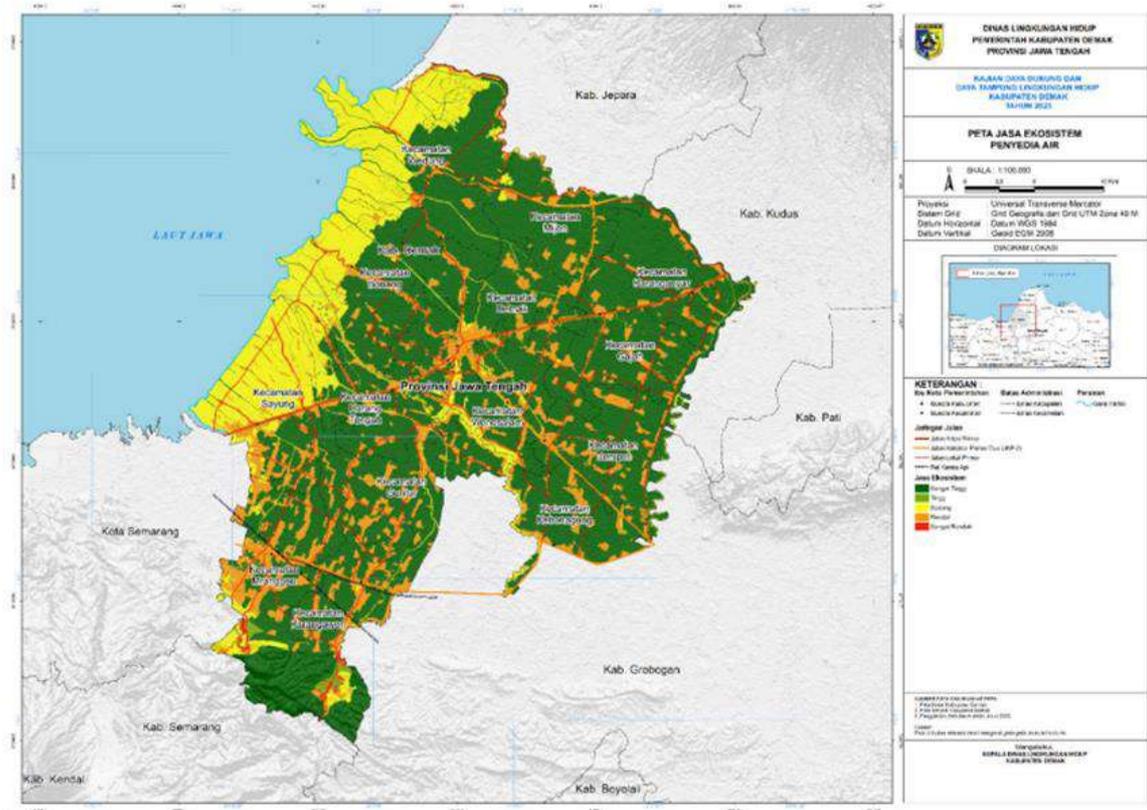
Jasa penyediaan air di Kabupaten Demak didominasi oleh kelas sangat tinggi. Luasannya mencapai 65.055 ha atau 65,36%. Kelas sedang



menempati peringkat kedua dengan persentase 17,9% atau 17.817 ha sedangkan kelas rendah mencapai 16,23% atau 16.155 ha. Kelas tinggi dan sangat rendah persentasenya hanya di bawah 1%. Karakteristik geografis Demak yang berupa dataran aluvial dan terletak di bagian hilir DAS menyebabkan ketersediaan air melimpah. Jenis tanah aluvial mempunyai pori – pori yang lebar sehingga mudah untuk menyerap dan mengalirkan air. Selain itu, penggunaan lahan masih didominasi oleh sawah sehingga penyerapan air masih optimal. Kelas rendah dan sangat rendah berada di penggunaan lahan permukiman atau wilayah terbangun lainnya. Kondisi ini dikarenakan luasan lahan untuk penyerapan air sudah berkurang sehingga sebagian justru menjadi limpasan.

Hasil analisis jasa lingkungan menggunakan data pola ruang RTRW Kabupaten Demak tahun 2011 – 2031 tidak menunjukkan perubahan secara signifikan, kelas sangat tinggi masih mendominasi sedangkan kelas rendah mengalami peningkatan. Kelas sangat tinggi mencapai 65,14% atau 64.834 ha. Penambahan kelas rendah untuk penyediaan air dari 16% menjadi 19% dengan menggunakan pola ruang. Arahkan kawasan industri di Kecamatan Sayung merupakan salah satu penyebab penambahan tersebut. Alih fungsi kawasan menyebabkan luas lahan untuk penyerapan air semakin berkurang sehingga berdampak pada pasokan air tanah. Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena kawasan industri membutuhkan air yang banyak untuk produksi. Pengendalian pemanfaatan air tanah bertujuan untuk menjaga keseimbangan neraca air di Kabupaten Demak.

Gambar II.7
Peta Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Demak

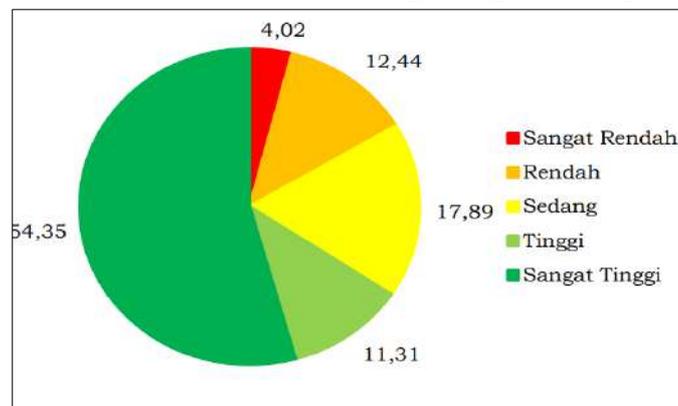


Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

3. Jasa Lingkungan Pengatur Iklim

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis Jasa lingkungan pengaturan iklim menunjukkan kemampuan ekosistem dalam mengatur berbagai unsur iklim seperti suhu, hujan dan penguapan, kelembapan dan hujan serta angin. Iklim antara satu wilayah dan wilayah lainnya berbeda. Hal itu disebabkan ada berbagai hal yang mempengaruhi kondisi iklim di suatu daerah, misalnya kondisi topografi, bentuk lahan hingga tutupan vegetasi. Wilayah yang berada pada elevasi yang tinggi seperti pegunungan lebih berkontribusi tinggi dalam jasa lingkungan pengaturan iklim apabila persentase tutupan vegetasi masih tinggi. Akan tetapi, wilayah yang berada pada dataran rendah pun dapat berkontribusi tinggi dalam jasa lingkungan pengaturan iklim apabila persentase tutupan vegetasi tinggi.

Gambar II.8
Persentase Klasifikasi Jasa Lingkungan Pengatur Iklim

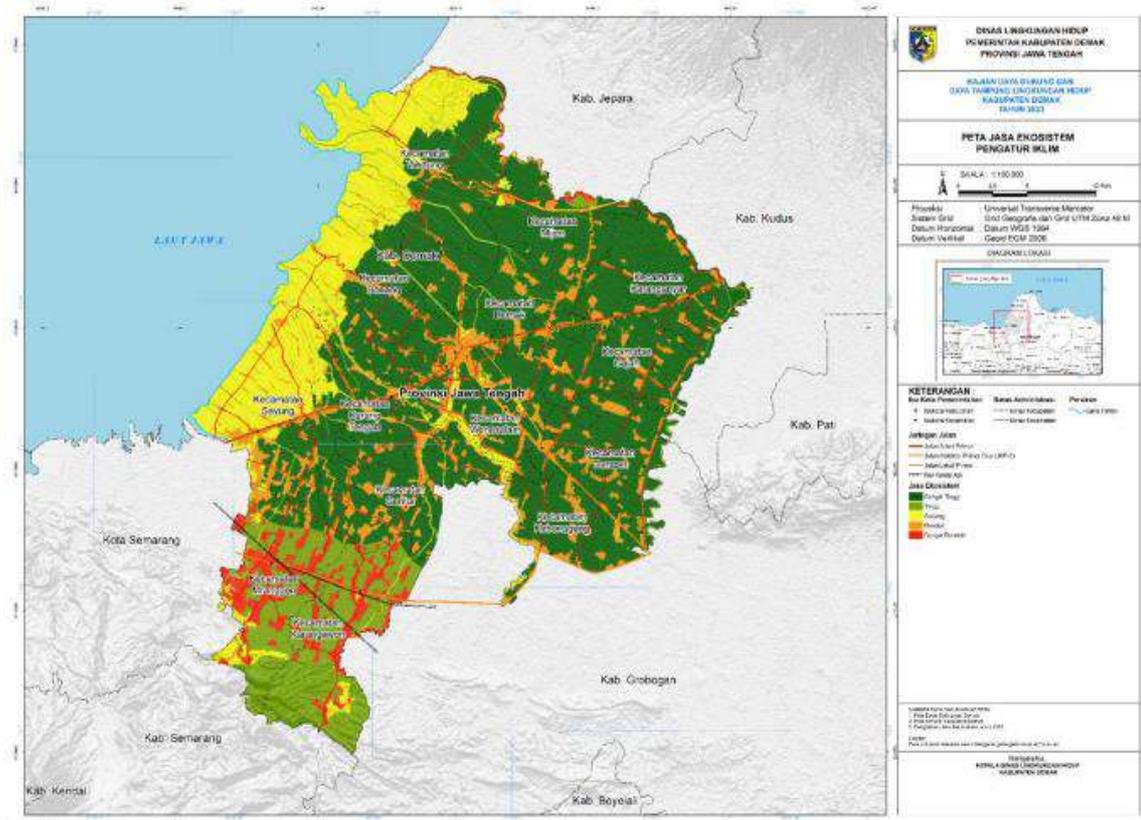


Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

Hasil analisis menunjukkan jasa lingkungan pengatur iklim di Kabupaten Demak didominasi oleh kelas sangat tinggi. Persentase kelas sangat tinggi mencapai 54,35% atau 54.092,23 ha. Kelas sedang menempati peringkat kedua dengan persentase 17,89% dengan luasan 17.803,26 ha. Kelas rendah dan tinggi memiliki persentase masing-masing sebesar 12,44% dan 11,31%. Penggunaan lahan yang masih didominasi vegetasi menyebabkan dominasi kelas sangat tinggi untuk pengatur iklim. Vegetasi di ekosistem sawah maupun hutan produksi menghasilkan oksigen yang mampu menetralisasi zat karbon yang ada di udara. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas udara dapat terjaga. Kelas rendah dan sangat rendah berada di penggunaan lahan berupa permukiman dan kawasan terbangun lainnya. Kemampuan untuk menjaga kualitas udara menurun karena lahan ruang terbuka hijau sudah berkurang. Selain itu, Kabupaten Demak menjadi salah satu jalur utama di Pantai Utara Jawa. Kondisi tersebut menyebabkan tekanan lingkungan dari mobilitas kendaraan semakin tinggi.

Hasil analisis jasa lingkungan pengatur iklim menggunakan pola ruang RTRW Kabupaten Demak menunjukkan beberapa perubahan. Salah satu perubahan kelas rendah dan sedang dibandingkan analisis menggunakan penggunaan lahan *existing*. Persentase kelas rendah meningkat dari 12,44% menjadi 16,67% sedangkan kelas sedang meningkat dari 17,89% menjadi 21,8%. Arah pemanfaatan dalam pola ruang mengubah lahan yang dahulu sawah atau perkebunan menjadi permukiman atau industri. Kondisi tersebut mengurangi luasan lahan dengan vegetasi dan berdampak pada produksi oksigen yang dihasilkan. Ketidakseimbangan antara produksi oksigen dengan zat karbon di udara dapat mengurangi kualitas udara di Kabupaten Demak.

Gambar II.9
Peta Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kabupaten Demak

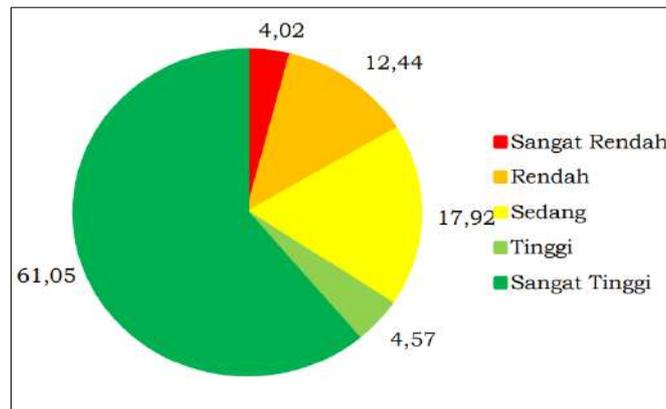


Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

4. Jasa Lingkungan Pengatur Air

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan pengatur air menunjukkan kemampuan ekosistem dalam mengatur siklus hidrologi pada suatu wilayah. Siklus hidrologi tersebut berlangsung secara kontinu mulai dari terjadinya penguapan air, kondensasi, turunnya hujan hingga mengalirnya air hujan di permukaan tanah dan infiltrasi air ke tanah. Tata aliran air tersebut dapat berjalan baik apabila lahan memiliki tutupan vegetasi, karena vegetasi tersebut memiliki peran untuk menyimpan cadangan air. Semakin rapat vegetasi maka pengaturan tata air akan semakin baik. Selain itu, pengaturan tata air tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kondisi topografi suatu wilayah karena air dapat mengalir pada permukaan sehingga ketika tidak terdapat vegetasi yang mampu menyerap air, air tersebut akan lebih cepat mengalir ke permukaan yang lebih rendah. Pengaturan tata air tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan air serta mengendalikan air agar tidak terjadi banjir.

Gambar II.10
Persentase Klasifikasi Jasa Lingkungan Pengatur Air

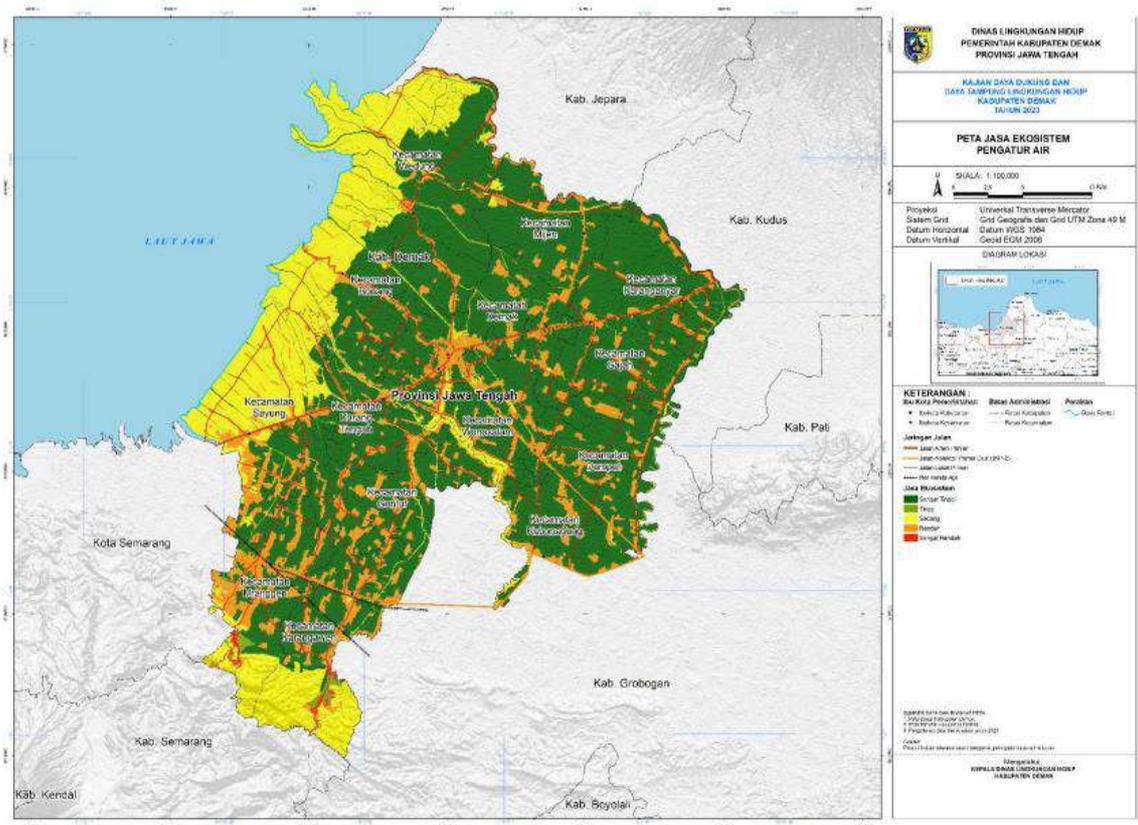


Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

Hasil analisis menunjukkan jasa pengatur air didominasi oleh kelas sangat tinggi yaitu 61,05%. Kelas sedang menempati peringkat kedua dengan persentase sebesar 17,92% sedangkan kelas rendah mempunyai persentase 12,44%. Kelas sangat tinggi berada di penggunaan lahan sawah dan hutan produksi. Vegetasi mampu menyerap air hujan dan mengalirkan ke dalam sistem air tanah. Hal ini akan mencegah terjadi limpasan yang mampu menyebabkan banjir. Penggunaan lahan perumahan atau wilayah terbangun lainnya termasuk dalam kelas rendah atau sangat rendah. Lahan untuk penyerapan air sudah berkurang karena terjadi alih fungsi. Pengurangan lahan resapan mampu meningkatkan limpasan yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Hasil analisis menggunakan pola ruang RTRW Kabupaten Demak 2011-2031 menunjukkan adanya perubahan kelas jasa pengatur air. Salah satu perubahan adalah peningkatan persentase kelas rendah. Persentase kelas rendah meningkat dari 12,44% menjadi 14,77%. Arahkan kawasan industri merupakan salah satu perubahan antara penggunaan lahan *existing* dengan pola ruang RTRW. Perubahan tersebut dapat mengurangi kemampuan untuk pengaturan air. Lahan resapan air akan semakin berkurang karena difungsikan untuk lahan terbangun. Pengurangan akan meningkatkan potensi limpasan dari air hujan. Volume dan aliran limpasan perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan genangan dan bencana banjir.

Gambar II.11
Peta Jasa Lingkungan Pengatur Air



Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

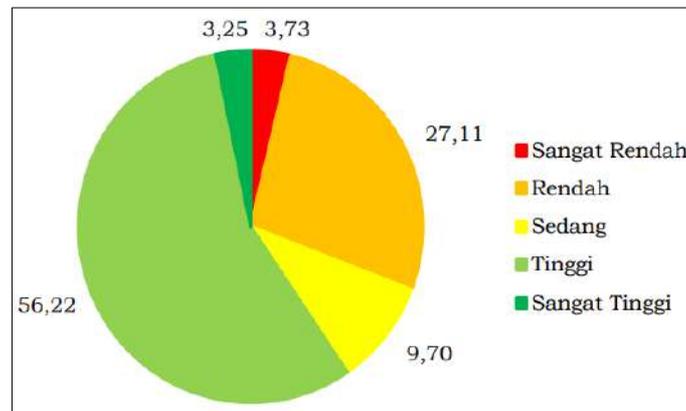
5. Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir

Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut, wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air, pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai, aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah, serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Jenis tutupan lahan mempengaruhi kemampuan untuk menyerap air dan mengurangi potensi limpasan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Demak termasuk kelas tinggi untuk perlindungan bencana banjir yaitu 56,22%. Kelas rendah menempati peringkat kedua dengan persentase 27,11%, kemudian kelas sedang 9,7%. Kelas sangat rendah memiliki persentase 3,73% sedangkan kelas sangat tinggi hanya 3,25%. Hal ini dikarenakan sebagian penggunaan lahan sebagian besar masih berupa sawah. Kemampuan untuk menyerap air relatif masih baik sehingga mengurangi potensi limpasan. Kelas rendah dan sangat rendah berada di penggunaan lahan permukiman maupun industri. Sebagian lahan sudah menjadi terbangun sehingga kemampuan untuk menyerap air hujan berkurang sehingga potensi limpasan meningkat. Limpasan akan menimbulkan genangan dan mengakibatkan bencana banjir.

Ketersediaan ruang terbuka hijau merupakan salah satu solusi untuk mengurangi potensi banjir di wilayah terbangun.

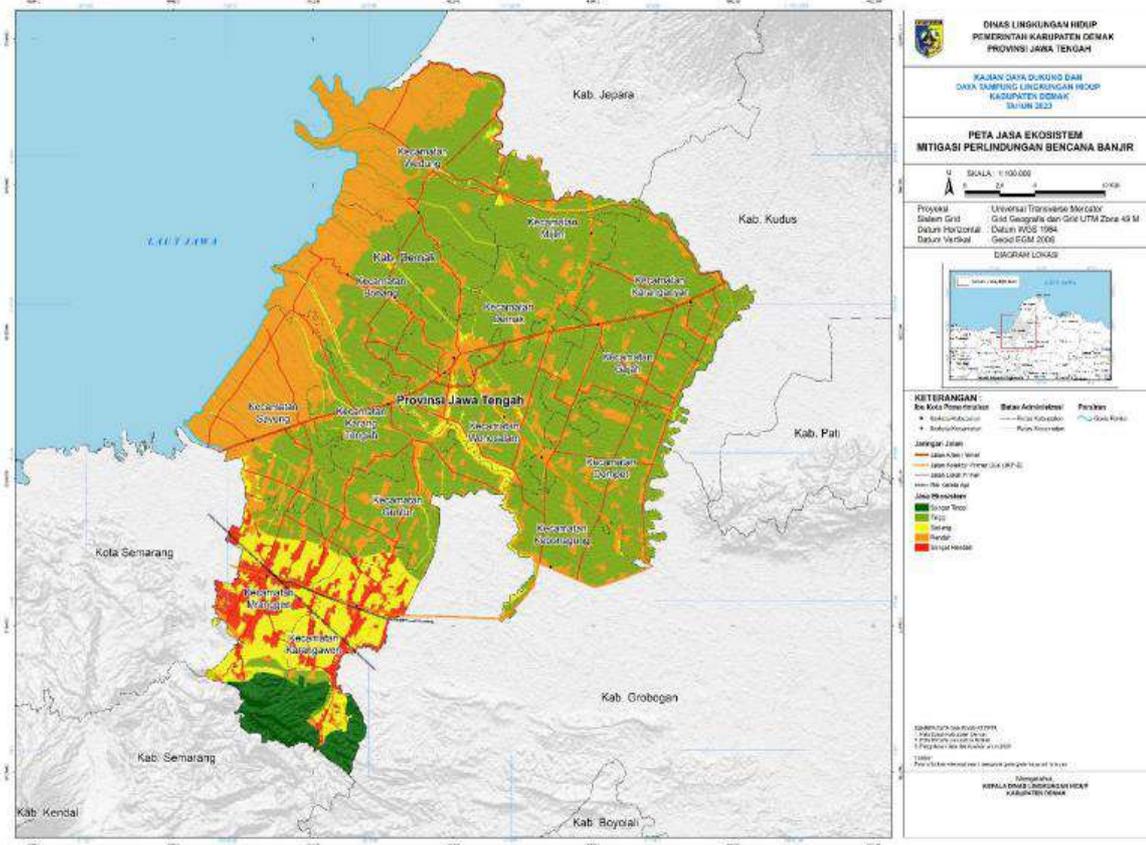
Gambar II.12
Persentase Klasifikasi Jasa Lingkungan Mitigasi
Perlindungan Bencana Banjir



Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

Analisis jasa perlindungan bencana banjir menggunakan data pola ruang RTRW 2011-2031 menunjukkan bahwa ada peningkatan untuk kelas rendah dari 27,11% menjadi 29,25%. Terdapat beberapa lokasi yang diarahkan untuk industri atau permukiman sedangkan kondisi *existing* berupa sawah atau kebun. Perubahan tersebut akan berdampak pada kemampuan untuk menyerap air hujan. Kemampuan penyerapan akan menurun seiring dengan meluasnya lahan terbangun. Kondisi tersebut mampu meningkatkan volume limpasan apabila terjadi hujan sehingga dapat menimbulkan bencana banjir. Apalagi, Kabupaten Demak merupakan hilir bagi daerah aliran sungai, yang mana hulunya berada di kabupaten lain.

Gambar II.13
Peta Jasa Lingkungan Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Demak

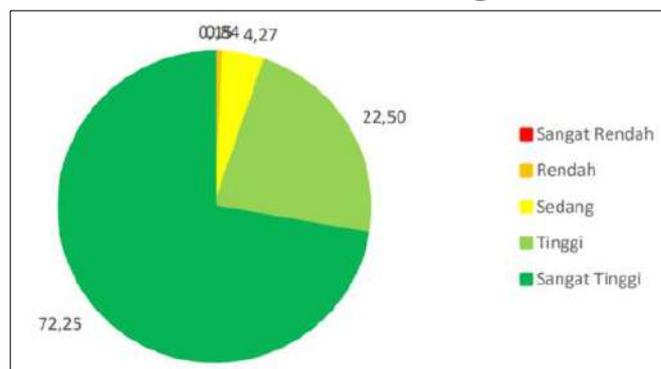


Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

6. Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan. Jenis tutupan lahan dan vegetasi berdampak pada kemampuan untuk menyerap air hujan. Penyerapan menjadi penting agar mengurangi beban tanah akibat adanya limpasan.

Gambar II.14
Persentase Klasifikasi Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Tanah Longsor

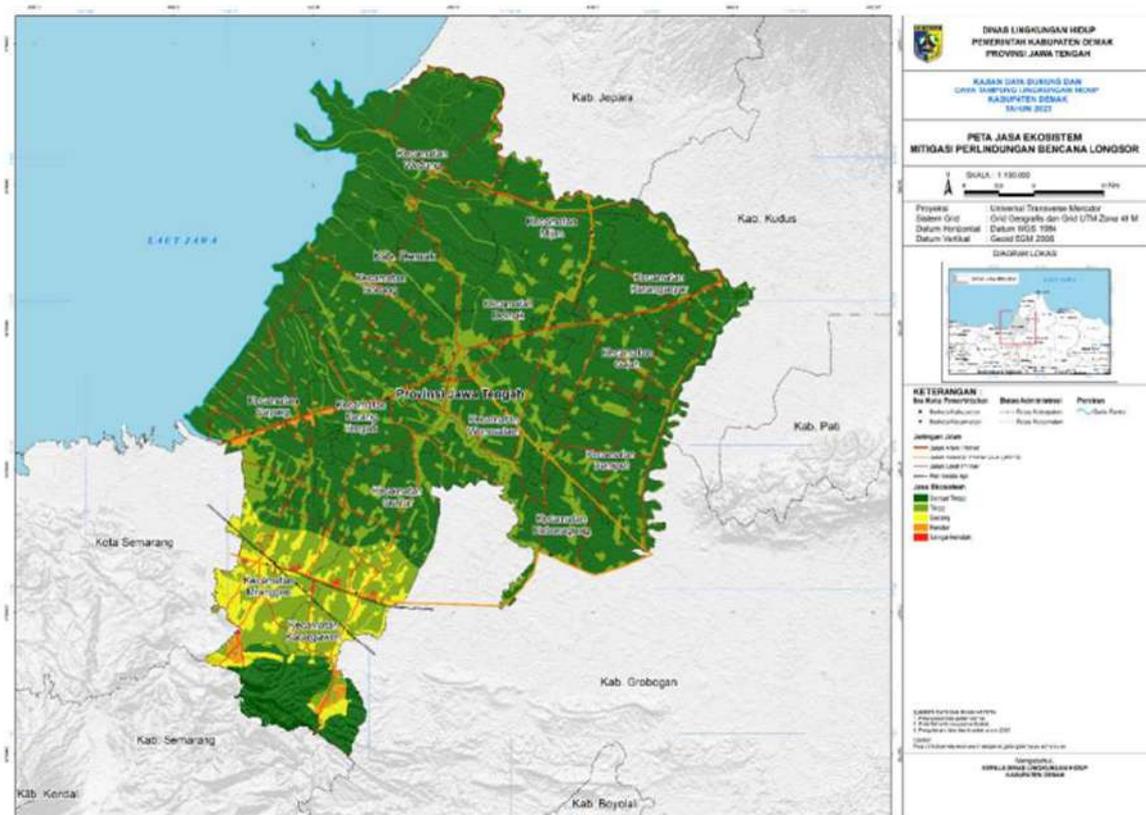


Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

Hasil analisis menunjukkan jasa lingkungan perlindungan mitigasi bencana tanah longsor didominasi oleh kelas sangat tinggi dengan persentase 72,25%. Kelas tinggi menempati peringkat kedua dengan persentase 22,5% atau 2.394 ha. Hasil analisis dengan menggunakan pola ruang RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 menunjukkan tidak ada perubahan signifikan. Karakteristik geografis Kabupaten Demak yang didominasi oleh dataran rendah membuat kawasan rawan bencana tanah longsor relatif rendah. Potensi longsor berada di perbukitan bagian barat daya Kabupaten Demak. Penggunaan lahan di perbukitan berupa hutan produksi. Kondisi tersebut baik untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Vegetasi tegakan keras berfungsi mengikat tanah sehingga tidak mudah terkikis oleh air hujan. Kelas rendah merupakan penggunaan lahan permukiman di bagian perbukitan. Kemampuan untuk menahan tanah akan berkurang karena vegetasi telah berubah menjadi bangunan. Kandungan air dalam tanah akan lebih mudah jenuh karena air hujan tidak mampu diserap masuk ke dalam tanah. Tanah yang sudah terlalu jenuh dapat meningkatkan potensi terjadinya tanah longsor.

Gambar II.15

Peta Jasa Lingkungan Mitigasi Bencana Longsor Kabupaten Demak



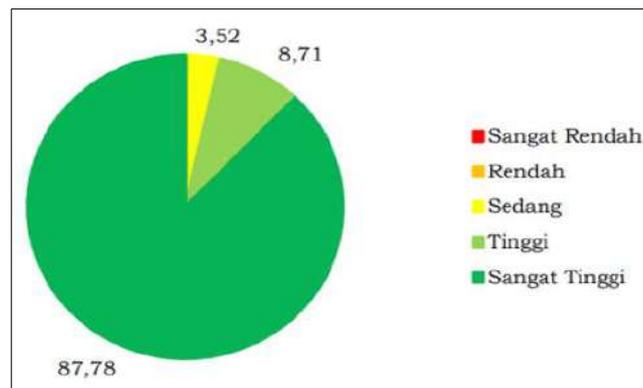
Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

7. Jasa Lingkungan Perlindungan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan

kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Kebakaran hutan bisa disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor manusia dan faktor alami. Faktor alami misalnya pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau panjang sehingga tanaman menjadi kering dan mudah terbakar. Faktor manusia contohnya berupa pembukaan lahan dengan cara membakar sehingga menyambar pepohonan atau semak dan menyebabkan kebakaran.

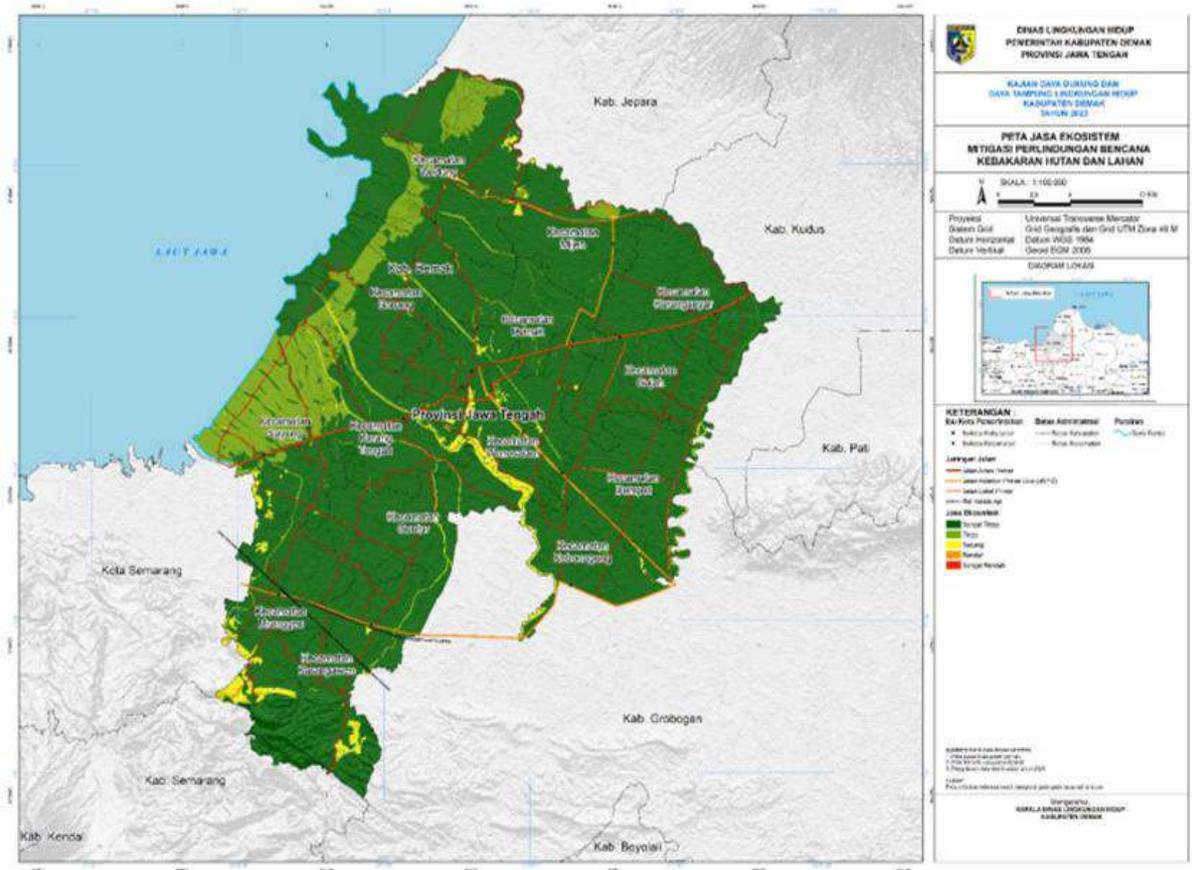
Gambar II.16
Persentase Klasifikasi Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan
Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan



Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

Hasil analisis menunjukkan jasa perlindungan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Demak didominasi oleh kelas sangat tinggi yaitu 87,78%. Kelas tinggi memiliki persentase 8,71% sedangkan kelas sedang hanya 3,52%. Analisis menggunakan data pola ruang RTRW tahun 2011-2031 juga menunjukkan bahwa kondisi jasa perlindungan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan masih didominasi kelas sangat tinggi dengan persentase 91,64% sedangkan tinggi 6,85% dan kelas sedang 1,85%. Perubahan ini akibat arahan pola ruang menjadi wilayah terbangun sehingga potensi untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan sangat tinggi.

Gambar II.17
Peta Jasa Lingkungan Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan



Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

B. Daya Dukung Air Berbasis Grid

Daya dukung air dianalisis berdasarkan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan air. Apabila ketersediaan air lebih tinggi dibandingkan kebutuhan maka masih belum terlampaui. Sebaliknya apabila kebutuhan lebih tinggi dibandingkan ketersediaan maka terlampaui. Daya dukung air dibagi menjadi dua perhitungan yaitu ketersediaan dan kebutuhan air.

Ketersediaan Air diasumsikan dengan data jasa penyedia air dan potensi air daerah aliran sungai maupun sumber air permukaan. Semakin tinggi nilai koefisien jasa lingkungan penyedia air dan potensi DAS maka semakin tinggi. Hasil perhitungan dari menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Demak berdasarkan metode *grid* sebesar 706.419.709 m³ per tahun. Kecamatan Wedung mempunyai ketersediaan air paling tinggi yaitu 76 juta m³ sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Kebonagung, yaitu hanya 35 juta m³. Kecamatan Wedung mempunyai luasan jasa penyedia air kelas sangat tinggi yaitu 6.276 ha. Angka tersebut tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya sehingga tingkat ketersediaan airnya juga tinggi.

Tabel II.3
Ketersediaan Air Tiap Kecamatan

Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³)	Kebutuhan Air (m ³)
Bonang	62.682.191,25	75.245.673,15
Demak	47.451.809,13	61.539.202,04
Dempet	47.912.435,65	61.399.008,45
Gajah	41.075.185,42	52.320.496,21
Guntur	49.771.276,89	59.589.332,36
Karang Tengah	41.419.478,27	49.748.485,66
Karanganyar	51.114.245,16	70.762.612,64
Karangawen	62.301.902,68	49.691.238,87
Kebonagung	35.808.964,19	41.191.830,08
Mijen	39.525.620,76	55.907.796,45
Mranggen	53.687.683,51	61.277.371,09
Sayung	50.804.632,20	51.688.817,91
Wedung	76.412.065,64	93.458.643,50
Wonosalam	46.452.219,07	58.249.594,00
Total	706.419.709,88	842.070.102,45

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

Kebutuhan air digambarkan dengan penutup lahan, jalan dan jumlah penduduk. Kebutuhan air Kabupaten Demak relatif tinggi karena tutupan lahannya didominasi oleh sawah dan permukiman. Sawah membutuhkan pasokan air untuk pengairan tanaman padi, apalagi pola tanamnya dalam setahun tiga kali. Permukiman perkotaan, perdesaan atau bangunan industri dan ekonomi membutuhkan air untuk mendukung kegiatan masyarakat dan kegiatan komersial. Kebutuhan air Kabupaten Demak setiap tahunnya mencapai 842 juta m³. Kecamatan Wedung mempunyai kebutuhan air paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Kecamatan Wedung membutuhkan 93 juta m³ setiap tahunnya. Luas sawah di kecamatan tersebut menempati peringkat kedua terluas sehingga membutuhkan air banyak. Kecamatan Bonang, Karanganyar, Mranggen, Demak dan Dempet juga memiliki kebutuhan air relatif tinggi. Kebutuhan air tinggi karena luasnya wilayah permukiman, sawah dan jumlah penduduk. Jumlah penduduk kecamatan-kecamatan tersebut di atas 100 ribu jiwa. Kebutuhan air di Kabupaten Demak akan terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan perubahan pemanfaatan lahan.

Hasil perbandingan ketersediaan dan kebutuhan air menunjukkan bahwa sebagian lahan sudah terlampaui untuk daya dukung air. Luas wilayah dengan status terlampaui secara keseluruhan adalah 68,35% atau 68.033 ha. Wilayah yang belum terlampaui mendominasi dengan persentase ha. Kecamatan Sayung memiliki persentase wilayah kelas belum terlampaui 31,498 ha atau 31,65% tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya.

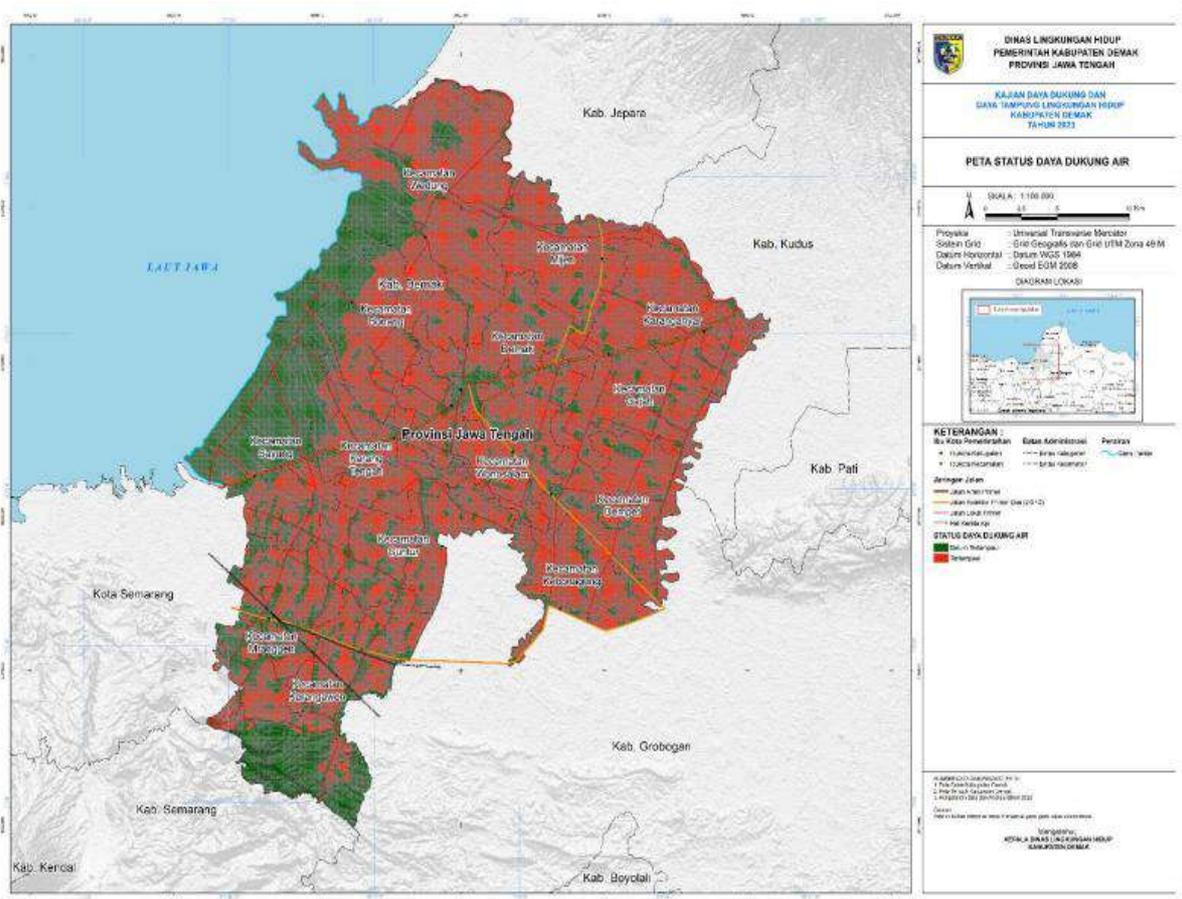
Kecamatan Karanganyar mempunyai persentase wilayah terlampaui tertinggi yaitu 87,76%. Pemanfaatan air merupakan salah satu hal yang perlu di perhatikan oleh pemangku kebijakan.

Tabel II.4
Luas Daya Dukung Air Berbasis Grid

Kecamatan	Belum Terlampaui	%	Terlampaui	%	Total
Bonang	3.334,86	38,31	5.371,17	61,69	8.706,03
Demak	1.448,71	22,98	4.856,40	77,02	6.305,11
Dempet	1.137,26	17,79	5.256,75	82,21	6.394,01
Gajah	869,48	16,18	4.503,72	83,82	5.373,20
Guntur	1.533,78	23,86	4.894,35	76,14	6.428,13
Karang Tengah	1.931,34	34,22	3.712,55	65,78	5.643,88
Karanganyar	855,01	12,24	6.132,47	87,76	6.987,48
Karangawen	4.267,93	52,24	3.902,67	47,76	8.170,60
Kebonagung	910,26	20,47	3.535,91	79,53	4.446,17
Mijen	727,99	13,24	4.771,91	79,53	5.499,90
Mranggen	3.359,29	43,29	4.400,20	56,71	7.759,49
Sayung	6.242,68	72,62	2.353,6	27,38	8.596,64
Wedung	3.457,48	26,71	9.484,82	73,29	12.942,30
Wonosalam	1.422,34	22,65	4.857,08	77,35	6.279,42
Total	31.498,40	31,65	68.033,95	68,35	99.532,35

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

Gambar II.18
Peta Daya Dukung Air Berbasis Grid Kabupaten Demak

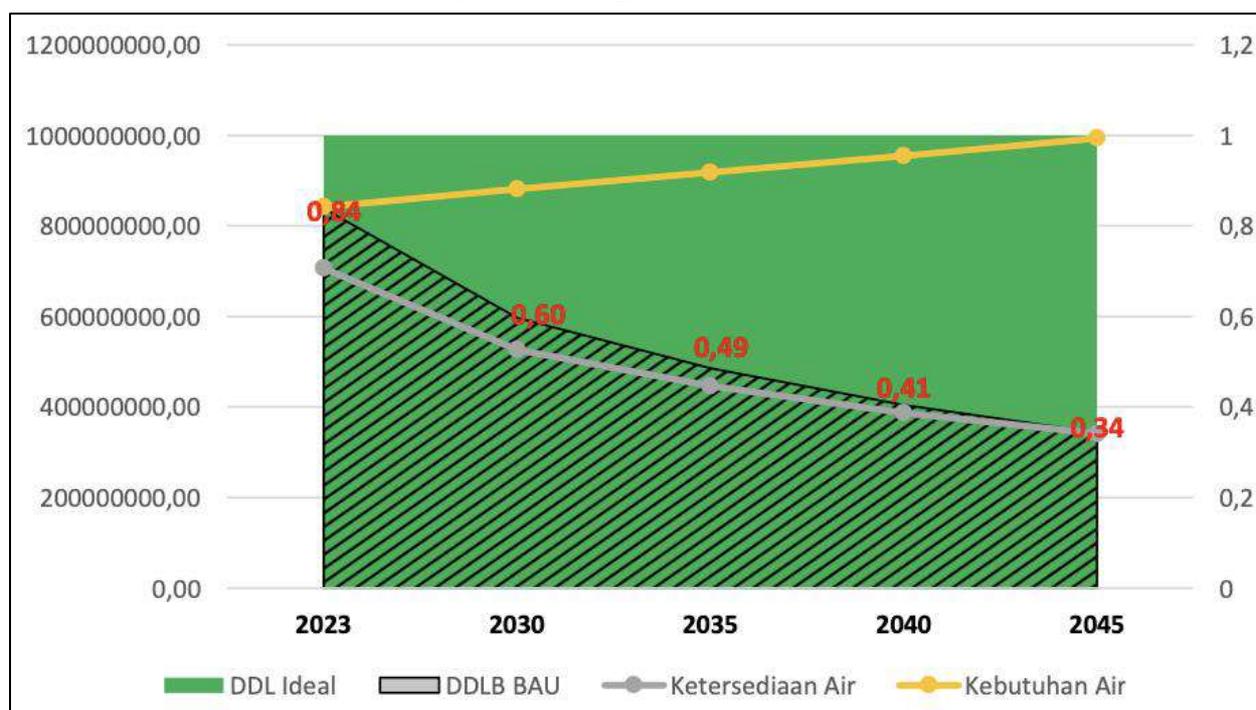


Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

Perhitungan daya dukung air dipengaruhi beberapa faktor di antaranya yaitu jumlah penduduk dan kebutuhan air. Berdasarkan skenario BAU (*Business As Usual*) daya dukung air Kabupaten Demak Tahun 2023 hingga

tahun 2045, dapat diketahui bahwa daya dukung air Kabupaten Demak mengalami penurunan dan berada di bawah kondisi ideal daya dukung air. Kondisi ideal daya dukung air di suatu wilayah berada pada minimal 1. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh hasil bahwa pada tahun 2023 daya dukung air berada pada angka 0,84. Jika dilihat dari hasil proyeksi, pada tahun 2045 daya dukung air Kabupaten Demak menjadi 0,34.

Gambar II.19
Skenario Daya Dukung Air Tahun 2023-2045



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Demak Tahun 2025-2045

Tabel II.5
Skenario Daya Dukung Air Tahun 2023-2045

Daya Dukung Air	2023	2030	2035	2040	2045
DDAir BAU	0,84	0,60	0,49	0,41	0,34
DDAir Ideal	1	1	1	1	1
Ketersediaan Air (liter)	706.419.709,80	527.209.433,50	446.331.569,70	386.967.817,10	341.541.528,30
Kebutuhan Air (liter)	842.070.102,45	882.282.273,00	917.993.878,70	955.150.961,60	993.812.029,10

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Demak Tahun 2025-2045

C. Daya Dukung Pangan

Konsep ambang batas pada DDLH digunakan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk. Komponen perhitungan daya dukung terdiri dari dua yaitu kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*). Kebutuhan dicerminkan oleh jumlah penduduk di suatu wilayah sedangkan produksi dan luas lahan pertanian menggambarkan ketersediaan. Rumus yang digunakan merujuk pada PermenLH nomor 17 tahun 2009 tentang

penentuan daya dukung untuk penataan ruang. Rumus daya dukung pangan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan.

Hasil perhitungan menunjukkan hampir semua kecamatan di Kabupaten Demak masih memiliki daya dukung untuk pangan. Hanya terdapat dua kecamatan yang sudah terlampaui yaitu Mranggen dan Sayung. Ketersediaan lahan pertanian dan jumlah penduduk yang masif menjadi salah satu alasan daya dukungnya sudah terlampaui. Luas panen dua kecamatan tersebut paling rendah dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Demak. Luas panen di Kecamatan Sayung hanya 1.039 ha sedangkan Mranggen 2.949 ha, padahal kecamatan lainnya di atas 5.000 ha. Selain itu jumlah penduduk di dua kecamatan tersebut relatif tinggi di Kabupaten Demak. Kecamatan Mranggen memiliki jumlah penduduk 177.837 jiwa, terbanyak se-kabupaten, sedangkan Kecamatan Sayung sebanyak 106.503, tertinggi ke-4. Hal ini ada ketidakseimbangan antara kebutuhan pangan semakin naik, sedangkan lahan pertanian semakin sempit.

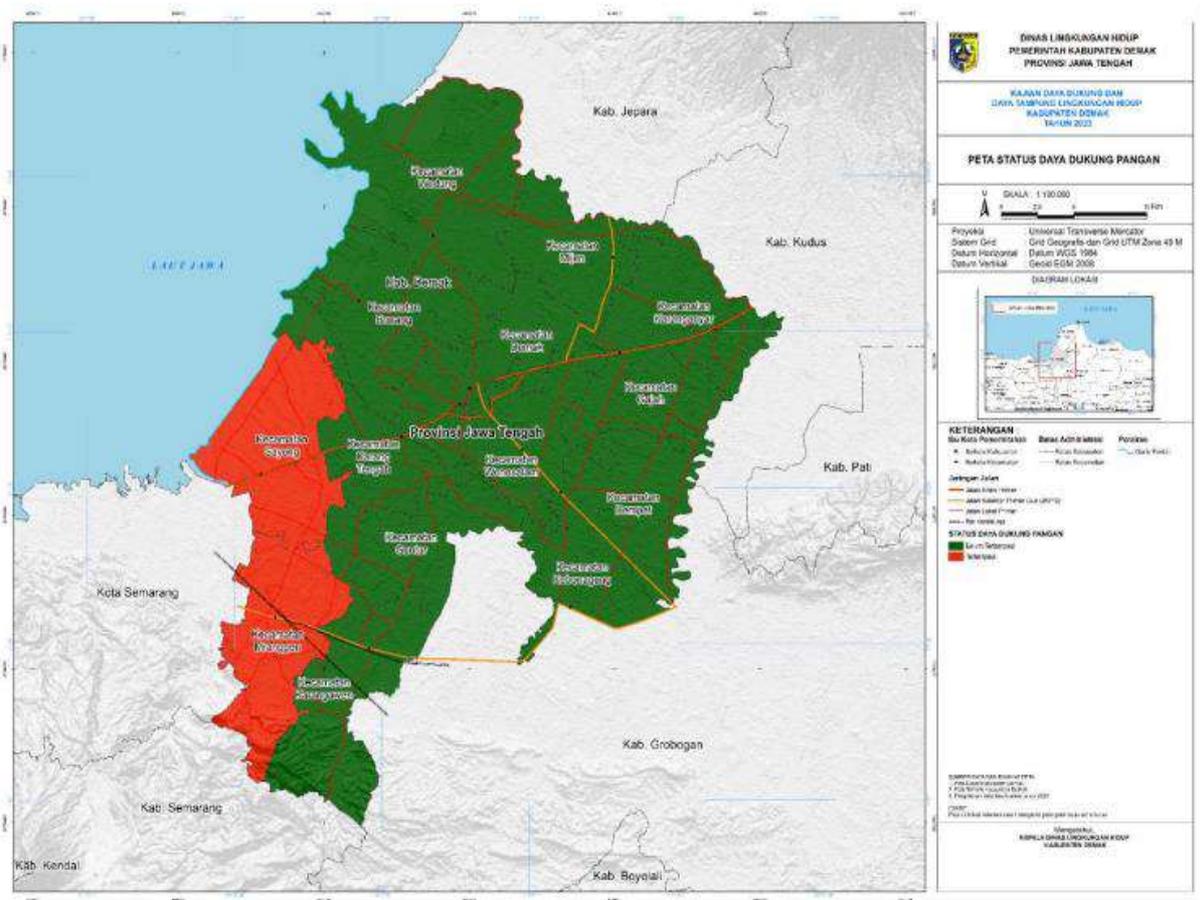
Fenomena alih fungsi lahan perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Demak. Alih fungsi yang tidak terkontrol dapat mengurangi lahan sawah produktif di masa yang akan datang. Pengurangan lahan akan berdampak pada kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, padahal Kabupaten Demak merupakan wilayah penyuplai pangan cukup penting di tingkat regional dan nasional.

Tabel II.6
Daya Dukung Pangan Kabupaten Demak

Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Layak	Kebutuhan Lahan (Ha)	Selisih	Status
Demak	8.295	55,02	6632.89	111,576	113,48	1,909	6,386	Belum Terlampaui
Bonang	9.322	56,682	6080.49	107,915	113,48	2,014	7,308	Belum Terlampaui
Wonosalam	7.525	48,087	6390.31	86,638	113,48	1,539	5,986	Belum Terlampaui
Dempet	8.248	55,466	6724.76	60,921	113,48	1,028	7,22	Belum Terlampaui
Kebonagung	6.971	46,78	6710.64	41,955	113,48	709	6,262	Belum Terlampaui
Karangtengah	3.968	22,525	5676.58	70,154	113,48	1,402	2,566	Belum Terlampaui
Guntur	5.77	34,701	6014.06	88,228	113,48	1,665	4,105	Belum Terlampaui
Sayung	1.039	6,16	5928.70	106,503	113,48	2,039	1000	Terlampaui
Mranggen	2.949	18,948	6425.10	177,837	113,48	3,141	192	Terlampaui
Karangawen	5.285	33,683	6373.24	96,198	113,48	1,713	3,572	Belum Terlampaui
Mijen	6.894	44,086	6394.88	59,395	113,48	1,054	5,84	Belum Terlampaui
Wedung	10.585	67,209	6349.47	84,073	113,48	1,503	9,082	Belum Terlampaui
Gajah	8.782	57,676	6567.49	53,101	113,48	918	7,864	Belum Terlampaui
Karanganyar	10.224	67,924	6643.57	78,723	113,48	1,345	8,879	Belum Terlampaui

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

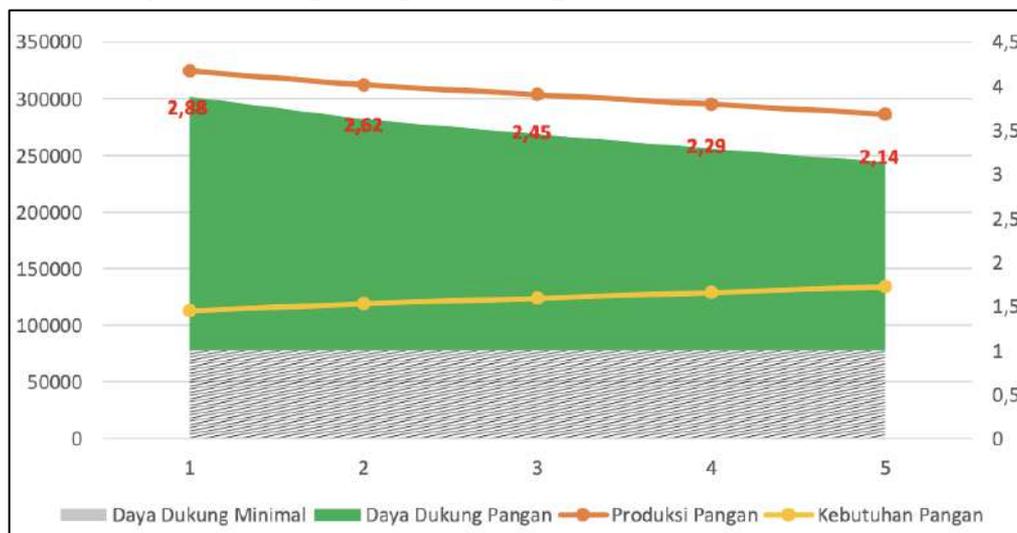
Gambar II.20
Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Demak



Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

Perhitungan daya dukung pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya angka produksi padi, angka konsumsi beras, dan jumlah penduduk di suatu wilayah. Berdasarkan perhitungan daya dukung pangan, dapat diketahui bahwa daya dukung pangan di Kabupaten Demak Tahun 2023 berada pada angka 2,88. Berdasarkan skenario BAU, daya dukung pangan di Kabupaten Demak terus mengalami penurunan mulai tahun 2023 hingga tahun 2045.

Gambar II.21
Skenario Daya Dukung Pangan Kabupaten Demak Tahun 2023-2045



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Demak Tahun 2025-2045

Tabel II.7

Skenario Daya Dukung Pangan Kabupaten Demak Tahun 2023-2045

Daya Dukung Pangan	2023	2030	2035	2040	2045
Daya Dukung Minimal	1	1	1	1	1
Produksi Pangan (Ton/Tahun)	324.272,87	312.180,82	303.543,64	294.906,47	286.269,30
Daya Dukung Pangan	2,88	2,62	2,45	2,29	2,14
Kebutuhan Pangan (Ton/Tahun)	112.621,59	118.939,85	123.754,11	128.763,23	133.975,10

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Demak Tahun 2025-2045

D. Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung lahan untuk kawasan terbangun Kabupaten Demak mempertimbangkan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, dan luas lahan terbangun, berikut hasil perhitungannya.

Tabel II.8

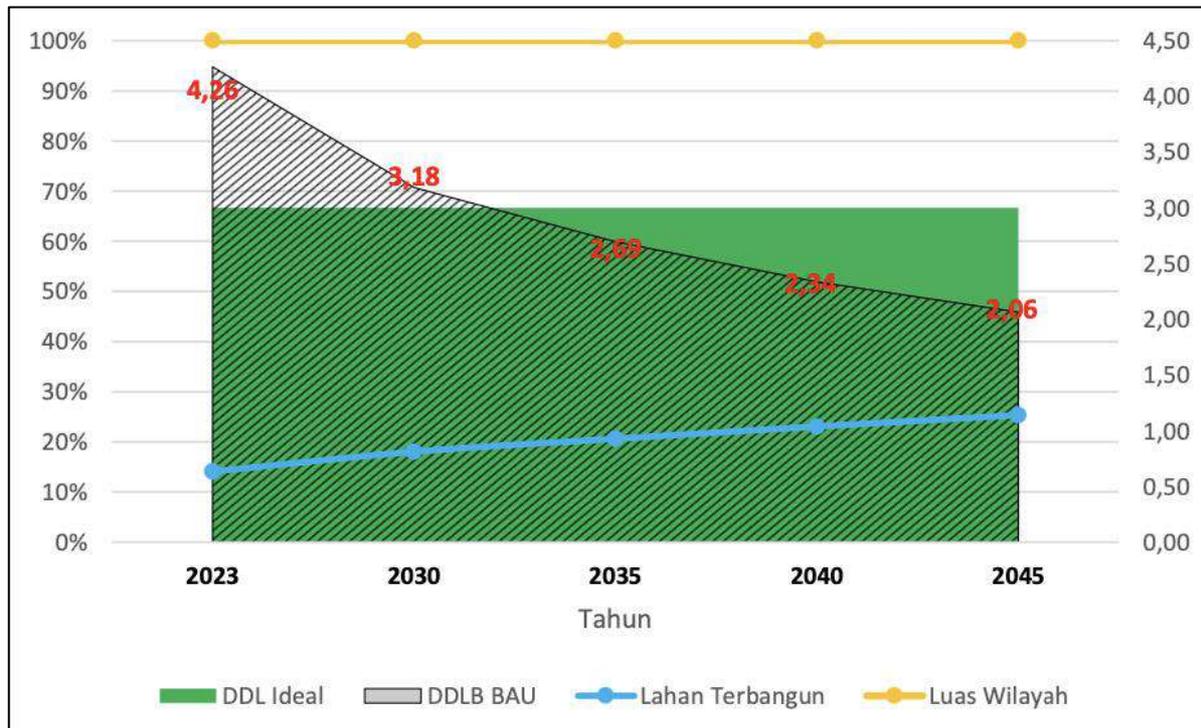
Skenario Daya Dukung Lahan Terbangun Kabupaten Demak Tahun 2023-2045

DDL	2023	2030	2035	2040	2045
Luas Lahan Terbangun (Ha)	16.336,14	21.889,16	25.855,61	29.822,05	33.788,49
DDL Ideal	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
DDL BAU	4,26	3,18	2,69	2,34	2,06
Luas Wilayah (Ha)	99.532,35	99.532,35	99.532,35	99.532,35	99.532,35

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Demak Tahun 2025-2045

Perhitungan daya dukung lahan terbangun menggunakan luasan lahan terbangun pada RTRW Kabupaten Demak, menunjukkan hasil bahwa pada tahun 2023 DDLB Kabupaten Demak sebesar 4,26 yang termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan skenario daya dukung lahan terbangun Kabupaten Demak tahun 2023-2045, dapat diketahui tren daya dukung lahan total, tren daya dukung lahan terbangun BAU, dan tren lahan terbangun pada tahun 2023 hingga tahun 2045. Selama tahun 2023 hingga tahun 2045, tren daya dukung lahan terbangun BAU mengalami penurunan dari 4,26 pada tahun 2023 hingga menjadi 2,06 pada tahun 2045. Pada tahun 2035 hingga tahun 2045 daya dukung lahan terbangun BAU berada pada angka di bawah daya dukung lahan ideal. Kondisi daya dukung lahan pada suatu wilayah dikatakan baik jika minimal berada pada angka 3.

Gambar II.22
Skenario Daya Dukung Lahan Terbangun Kabupaten Demak Tahun 2023-2045



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Demak Tahun 2025-2045

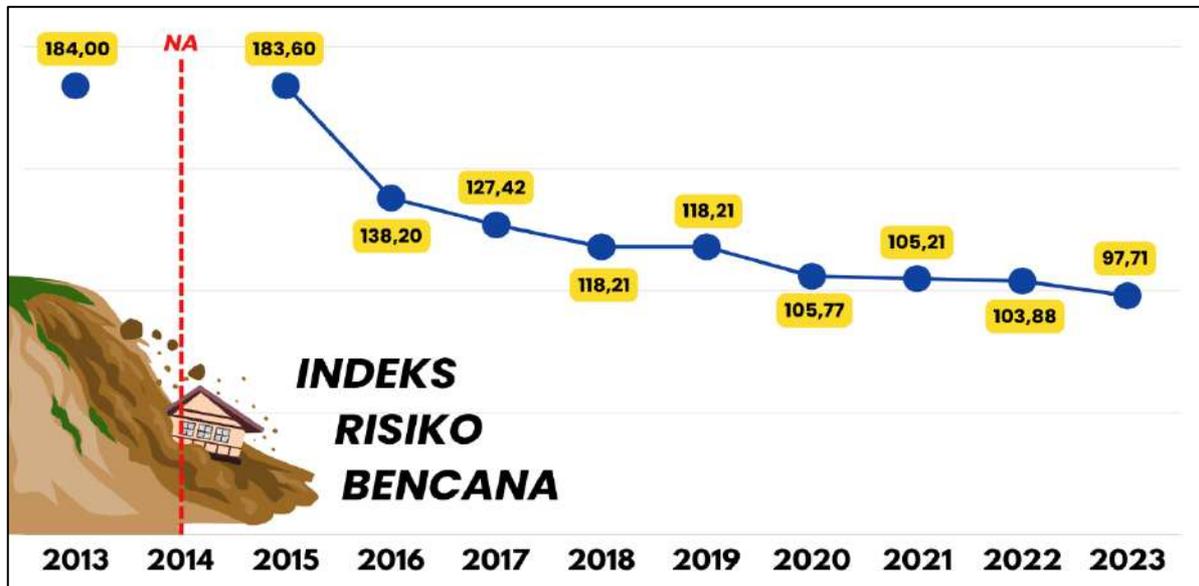
10. Kebencanaan

Indeks Risiko Bencana (IRB) memegang peranan krusial dalam konteks pembangunan daerah. Indikator ini dipengaruhi oleh *hazard* (bahaya) yang dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Selain itu, IRB juga dipengaruhi oleh *Vulnerability* (kerentanan) yang dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan dan *Capacity* (kapasitas) yang dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

IRB di Kabupaten Demak mengalami penurunan secara berkala dari tahun 2013 hingga tahun 2023. Pada tahun 2013 IRB Kabupaten Demak sebesar 184 dan terus mengalami perbaikan hingga tahun 2023 sebesar 97,71. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan ketahanan dan ketangguhan terhadap bencana tetap harus ditingkatkan mengingat Kabupaten Demak merupakan wilayah yang berisiko terhadap kejadian bencana alam.

Gambar II.23

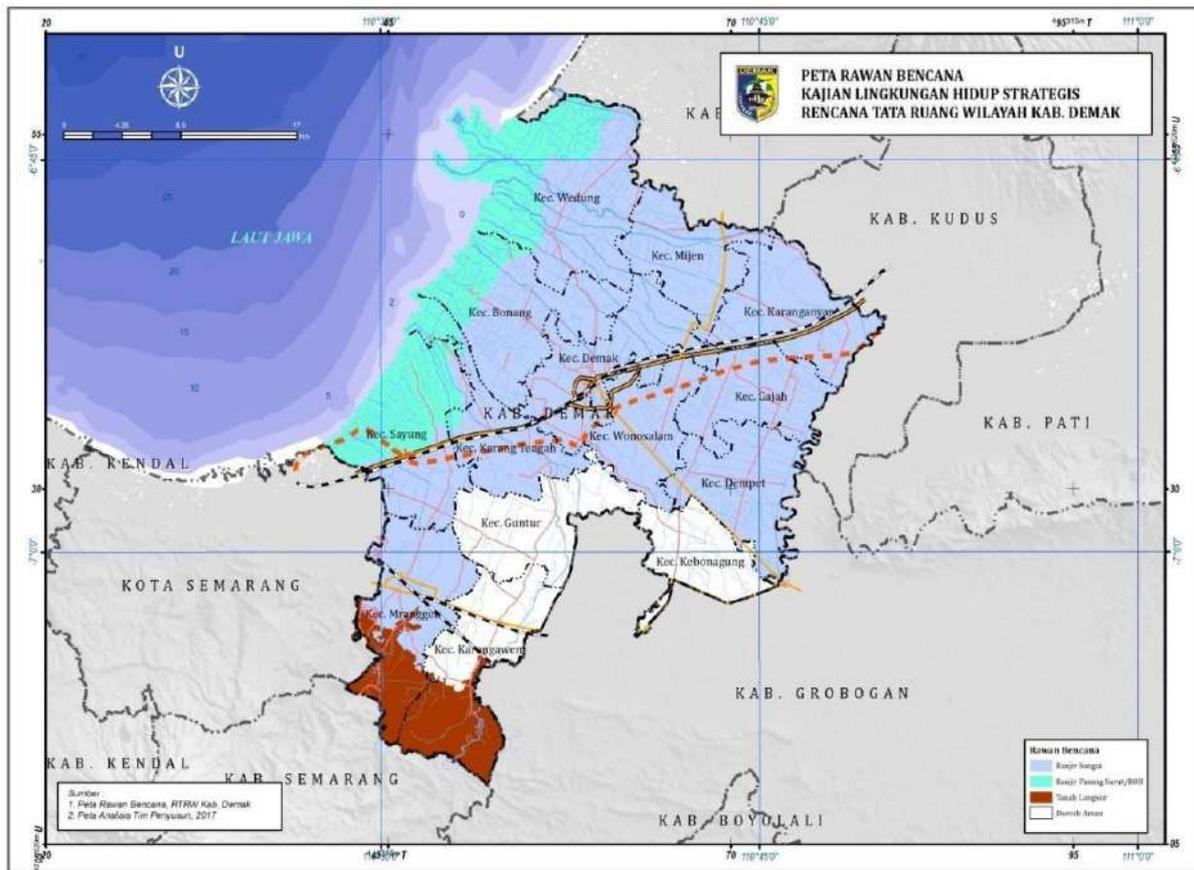
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Demak Tahun 2015-2023



Sumber: BPBD Kab. Demak, Catatan: data 2014 tidak rilis

Wilayah Kabupaten Demak sebagian besar berada di daerah cekungan bekas rawa sehingga memiliki karakteristik tanah berlumpur. Saat musim hujan, sebagian wilayah di Kabupaten Demak mudah tergenang air dan saat musim kemarau tanah menjadi retak dan mengalami kekeringan. Kabupaten Demak dialiri oleh sejumlah sungai yang turut menyumbang potensi bencana banjir. Sungai-sungai tersebut antara lain: Sungai Wulan yang melintas di Kecamatan Karanganyar, Mijen dan Wedung; Sungai Cabean yang melintas di Kecamatan Karangawen dan Mranggen; Sungai Cabean yang melintas di Kecamatan Dempet, Karangtengah, Demak dan Bonang; Sungai Dolok yang melintas di Kecamatan Guntur dan Sayung; dan sejumlah sungai lainnya. Berikut gambar peta rawan bencana Kabupaten Demak:

Gambar II.24
Peta Rawan Bencana Kabupaten Demak



Sumber: DinLH Kabupaten Demak, 2019

Selain banjir dan kekeringan, Kabupaten Demak juga mengalami rawan bencana angin puting beliung dan kebakaran. Bencana gelombang pasang dan abrasi rawan terjadi di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang dan Wedung, sedangkan potensi longsor terjadi di Kecamatan Mranggen dan Karangawen. Secara statistik, bencana yang terjadi di Kabupaten Demak selama periode 2019 - 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II.9
Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2019-2023

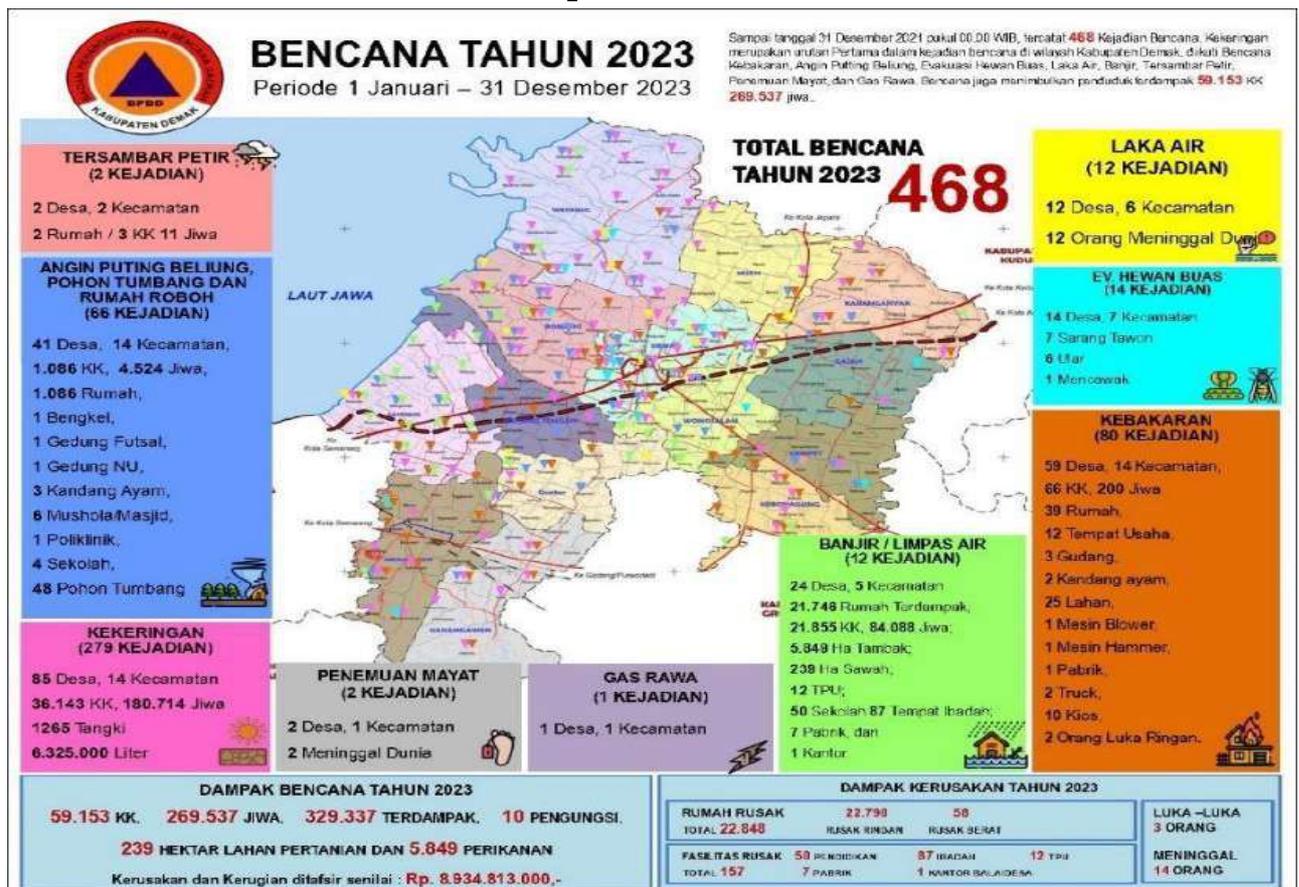
Jenis Bencana	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Banjir	Kejadian	17	16	22	8	12
Angin Puting Beliung / Pohon Tumbang / Angin Kencang	Kejadian	72	66	60	78	66
Kebakaran	Kejadian	76	43	37	39	80
Kekeringan	Kejadian	85	-	18	7	279
Kecelakaan Air	Kejadian	10	7	4	9	12
Tersambar Petir	Kejadian	-	4	1	2	2
Korban Terdampak	Jiwa	147.214	32.691	19.319	184.368	269.537
Meninggal Dunia	Jiwa	18	18	15	13	14

Jenis Bencana	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Taksiran kerugian	(Rp.000)	28.787.624	7.466.282	24.751.020.946	228.166.325.490	8.934.813

Sumber: BPBD Kab. Demak, 2023

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kejadian bencana alam yang memiliki intensitas cukup tinggi adalah angin puting beliung/pohon tumbang/angin kencang. Berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Demak, total bencana tahun 2023 sebanyak 468 kejadian. Kekeringan menyumbang angka terbanyak sepanjang tahun 2023 yaitu 279 kejadian. Kemarau panjang mengakibatkan sejumlah desa mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih, yaitu 85 desa, 36.143 KK dengan 180.714 jiwa.

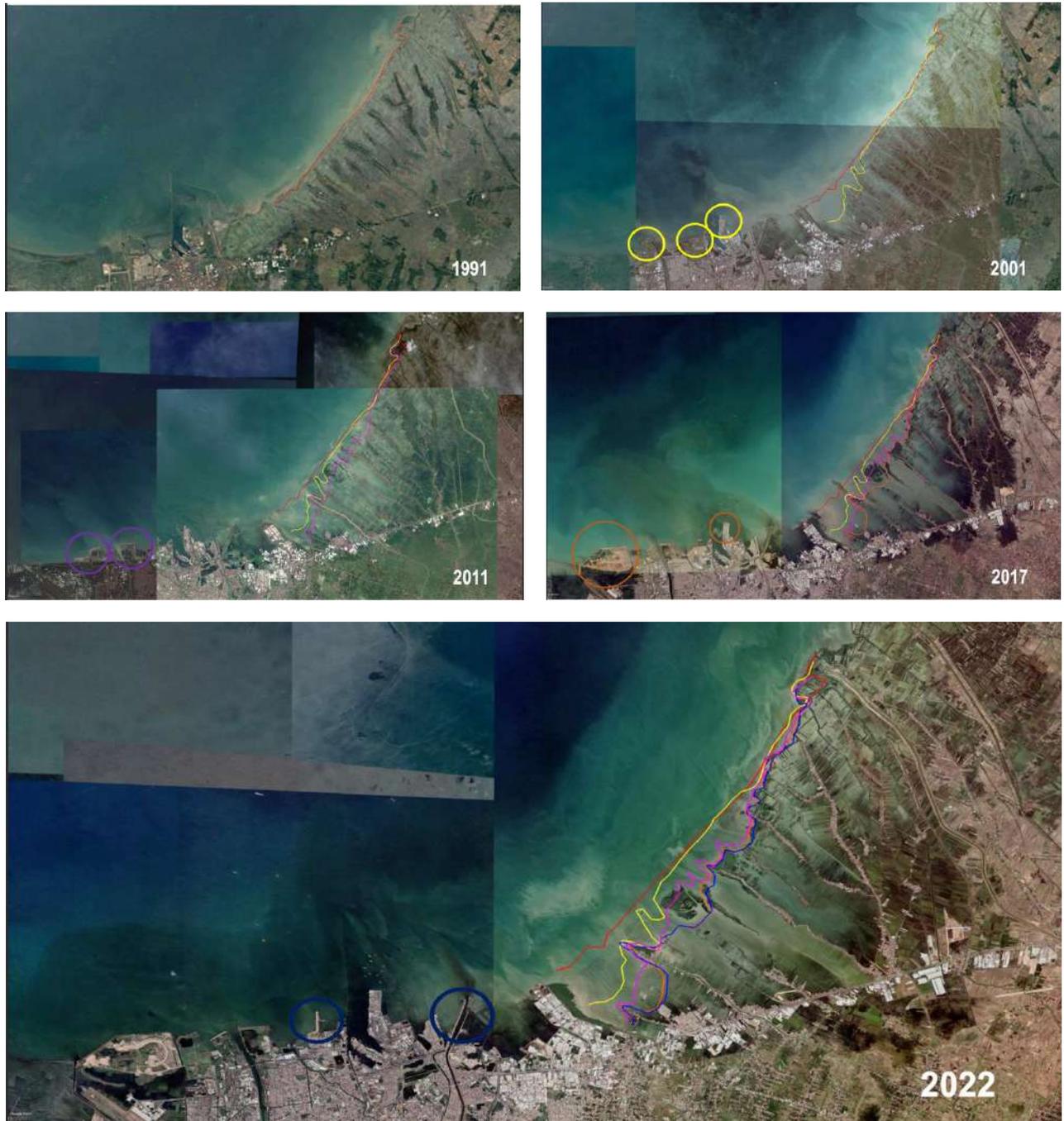
Gambar II.25
Jenis Bencana Kabupaten Demak Tahun 2023



Sumber: BPBD Kab. Demak, 2023

Selain bencana alam di atas Kabupaten Demak juga mengalami ancaman serius berupa banjir rob. Banjir rob merupakan banjir yang terjadi akibat naiknya permukaan air laut. Adanya banjir rob mengakibatkan abrasi yang ditandai dengan bertambahnya garis pantai dan berkurangnya luas daratan. Pada tahun 2013 garis pantai Kabupaten Demak sepanjang 51,55 km dan akibat adanya banjir rob menjadi 102,03 km pada tahun 2021.

Gambar II.26
Peta Perkembangan Banjir Rob Kabupaten Demak



Sumber: Dinputaru Kab. Demak

Tabel II.10
Panjang Garis Pantai dan Luas Wilayah Terdampak Rob

No	Kecamatan	Panjang Garis Pantai (km)		Luas Wilayah (ha)	
		2013	2021	2013	2021
1	Kecamatan Bonang	7,5	7,7	8.713	8.726
2	Kecamatan Karang Tengah	4,9	5,3	5.648	5.628
3	Kecamatan Sayung	11,6	57,4	8.603	6.679
4	Kecamatan Wedung	27,5	31,6	12.952	13.052
TOTAL		51,55	102,03	35.916	34.085
SELISIH		50,5		-1.831	

Sumber: Dinputaru Kab. Demak, Asumsi batas daerah menggunakan Permendagri, Batas kecamatan menggunakan RTRW

2.1.2 Demografi

Data demografi merupakan suatu hal penting dalam perencanaan pembangunan untuk memberikan dasar informasi dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan solusi yang sesuai.

1. Kondisi Kependudukan

Kondisi kependudukan Kabupaten Demak dapat dilihat dari jumlah penduduk, persentase penduduk menurut tingkat pendidikan, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, distribusi penduduk, serta piramida penduduk. Gambaran ini dapat memberikan pemahaman tentang kelompok sasaran pembangunan yang akan dituju sehingga mampu menciptakan kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi SDM berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan data konsolidasi bersih (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, 2023), jumlah penduduk Kabupaten Demak tahun 2023 sebanyak 1.246.059 jiwa.

Gambar II.27
Jumlah Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2005-2023



Sumber: Kab. Demak Dalam Angka, 2004-2017

Catatan: Dindikcapil Kab. Demak, 2017-2023

Jika dilihat dari sisi kepadatan penduduk mengalami peningkatan dalam kurung tahun 20 tahun. Pada tahun 2005 sebanyak 1.036,52 jiwa/km² meningkat menjadi 1.246,36 jiwa/km² pada tahun 2023. Rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) Kabupaten Demak pada tahun 2023 yaitu 44,53 persen yang berarti 100 orang usia produktif menanggung setidaknya 44 orang non produktif. Meskipun masih di bawah 50%, tetapi beban tanggungan menunjukkan tren kenaikan pada tahun sebelumnya yaitu 43,16 persen.

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator *sex ratio* berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir selalu lebih banyak daripada perempuan, dengan *sex ratio* di atas 101. Artinya, terdapat sekitar 101 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Tabel II.11

Kependudukan Kabupaten Demak Tahun 2005-2023

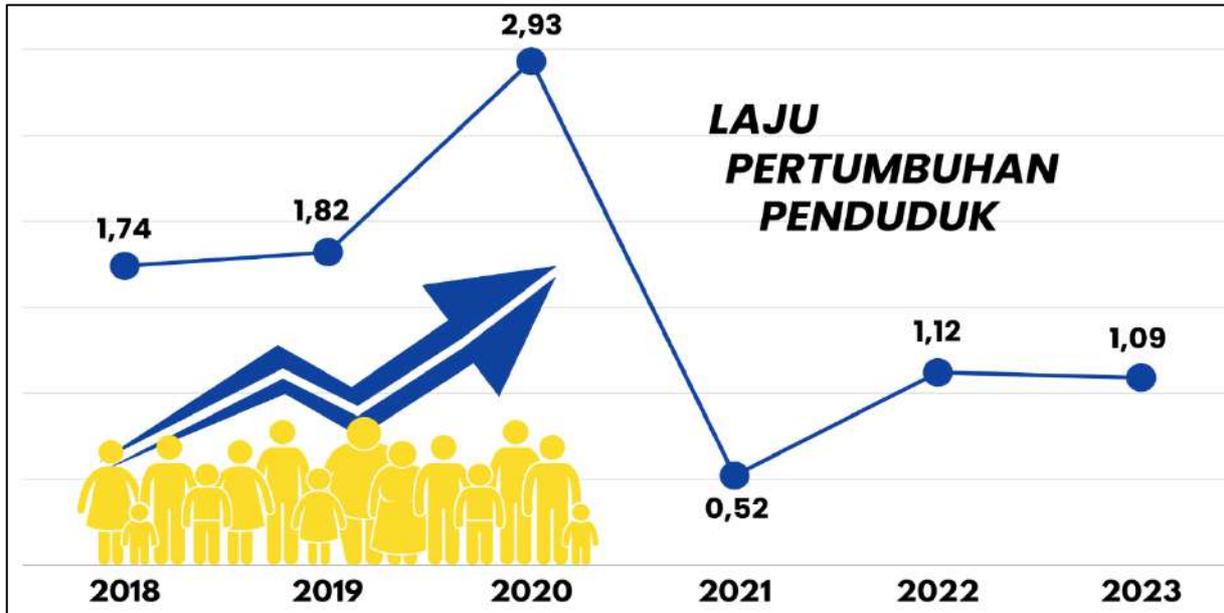
Tahun	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)	Rasio Beban Ketergantungan	Rasio Jenis Kelamin
2023	1.246,34	44,53	101,85
2022	1.228,96	43,16	101,90
2021	1.218,07	44,51	101,90
2020	1.341,56	44,23	101,81
2019	1.295,71	43,89	101,67
2018	1.283,44	41,22	101,65
2017	1.271,05	46,14	98,18
2016	1.258,37	47	98,19
2015	1.245,67	47,3	98,2
2014	1.232,64	NA	98,2
2013	1.219,59	48,02	98,21
2012	1.206,22	46,639	98,22
2011	1.192,64	47,86	98,2
2010	1.178,58	49,02	98,19
2009	1.210	NA	97,54
2008	1.180	NA	97,49
2007	1.176	NA	98,16
2006	1.162	NA	97,52
2005	1.154	NA	97,69

Sumber: Kab.Demak Dalam Angka, 2006-2024

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas publik dan sebagainya. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2018 hingga tahun 2013 mengalami fluktuasi, dengan capaian laju pertumbuhan penduduk tertinggi di tahun 2020 sebesar 2,93%,

sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah di tahun 2021 sebesar 0,52%.

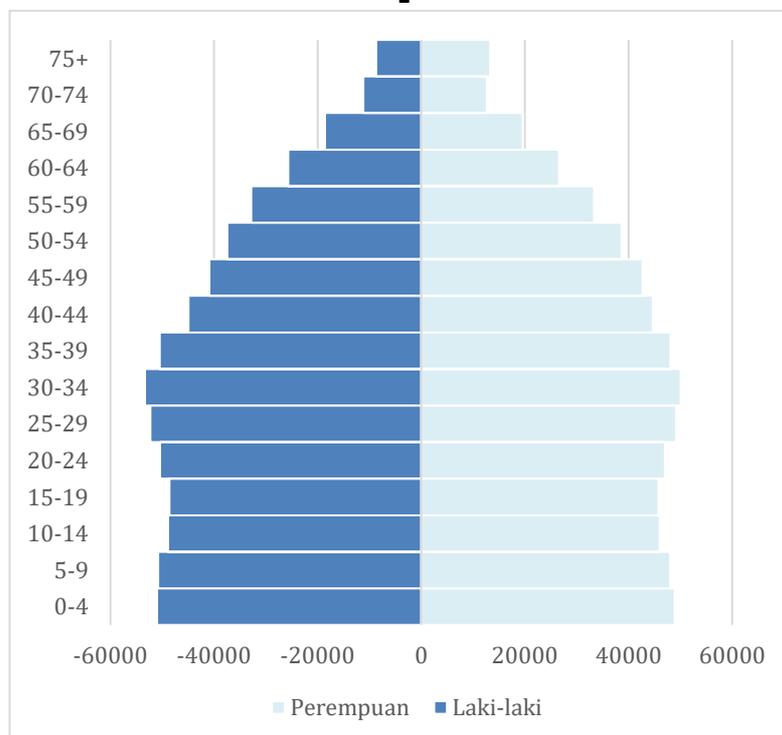
Gambar II.28
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Demak
Tahun 2018-2023 (%)



Sumber: BPS Kab. Demak Dalam Angka

Piramida penduduk Kabupaten Demak cenderung berkarakter stasioner yaitu jumlah penduduk di tiap kelompok umur hampir sama. Hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian laju pertumbuhan penduduk di masa lalu sudah cukup baik. Meskipun demikian, terjadi tren kenaikan jumlah penduduk pada kelompok umur muda (0-14 tahun) dalam tiga tahun terakhir. Keadaan ini perlu disikapi agar beban tanggungan penduduk tidak semakin bertambah.

Gambar II.29
Piramida Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2023



Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka, 2024

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Beberapa kondisi kesejahteraan masyarakat selama tiga tahun terakhir ini cukup rentan akibat dampak pandemi Covid-19. Hal ini cukup terlihat jelas dari adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga dampak negatif lainnya terhadap masyarakat dari ketenagakerjaan hingga sosial. Pandemi Covid-19 sendiri mulai masuk Indonesia pada akhir triwulan I tahun 2020 di mana pandemi ini menyerang kesehatan masyarakat dan menyebar cukup signifikan di setiap harinya hingga masyarakat yang meninggal bertambah di setiap harinya. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 ini juga mengena di aspek pembangunan perekonomian karena adanya pembatasan-pembatasan ruang gerak masyarakat baik dari sisi mobilisasi maupun sosialisasi.

Dari segi perekonomian masyarakat dalam membantu melewati masa sulit, pemerintah melakukan pemantauan sembako, operasi pasar dan pasar murah. Selain itu juga dilakukan pemberian bantuan melalui jaring pengaman sosial, baik program bantuan sosial, perluasan bantuan sembako, dan bantuan langsung tunai. Adapun dari aspek lainnya terlihat pemerintah menyusun kebijakan dalam hal *social distancing* melalui pembubaran kerumunan, pembatasan beribadah di fasilitas ibadah umum, termasuk larangan hajatan/pengumpulan masa.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis perekonomian daerah tersebut. Selain itu, perekonomian menjadi modal pembangunan dengan mendorong komoditas potensial daerah sehingga mampu menyejahterakan masyarakat di wilayah tersebut.

Fokus kesejahteraan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Demak utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian Kabupaten Demak. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

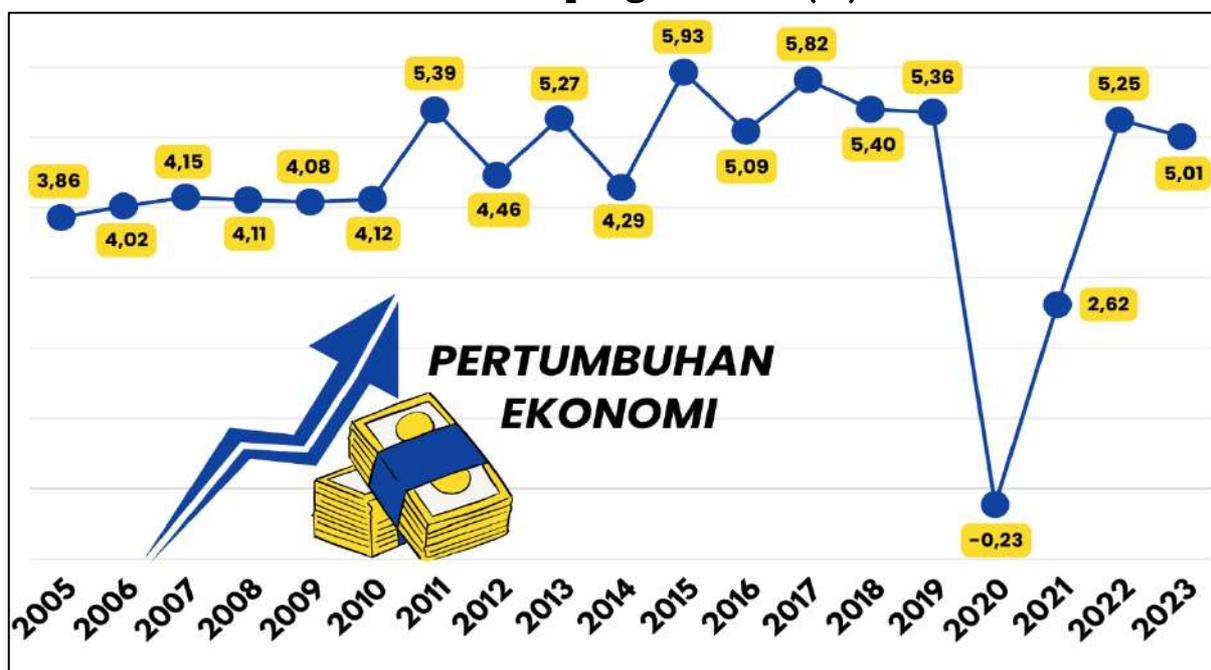
Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Demak antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah,

hingga laju pertumbuhan ekonomi. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

1. Pertumbuhan Ekonomi

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Sebagai informasi, berikut *data series* capaian PDRB Kabupaten Demak tahun 2005-2023.

Gambar II.30
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2005-2023
Menurut Lapangan Usaha (%)



Sumber: BPS Kab. Demak

Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005-2010 menggunakan harga konstan tahun 2000, sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun 2011-2023 menggunakan harga konstan tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak sangat dinamis dan fluktuatif. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,86 persen. Tahun 2020, nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak berada pada titik terendah hingga mencapai -0,23 persen, hal tersebut diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang turut berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Demak.



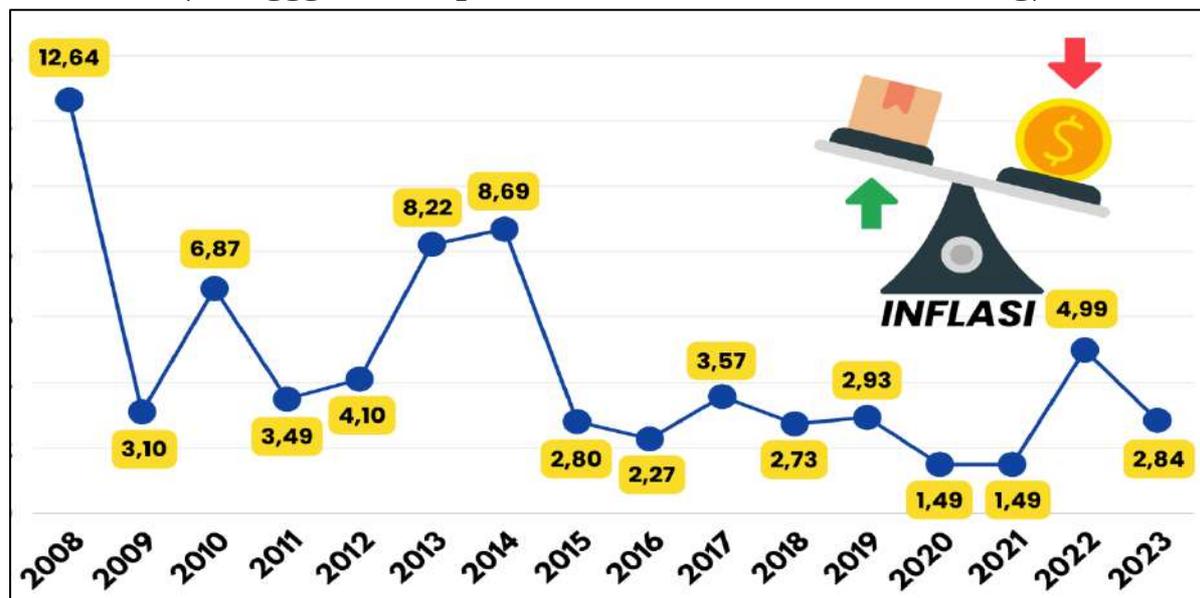
Selanjutnya pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,01 persen. Pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak tahun 2023, pendorong terbesar berasal dari Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,73 persen, kemudian disusul oleh Lapangan Usaha Penyedia Akomodasi Makan dan Minum sebesar 12,13 persen, serta Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,35 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami perlambatan berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar -1,48 persen.

2. Inflasi

Kondisi perekonomian daerah turut dipengaruhi oleh inflasi. Laju inflasi merupakan tolok ukur kestabilan perekonomian yang menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi diukur oleh BPS dengan menggunakan ukuran berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman dan tembakau; kelompok perumahan; kelompok sandang; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan dan olahraga; serta kelompok transportasi dan komunikasi.

Pada tahun 2008 inflasi di Kabupaten Demak berada di angka yang sangat tinggi yaitu sebesar 12,64 persen karena adanya lonjakan harga energi dan pangan. Inflasi kemudian menurun menjadi 2,73 persen pada tahun 2018. Sejak tahun 2019 data inflasi menggunakan pendekatan inflasi Kota Semarang karena inflasi Kabupaten Demak sudah tidak dihitung. Pada tahun 2020 dan 2021 angka inflasi sebesar 1,49 persen di mana penurunan angka inflasi disebabkan oleh daya beli yang menurun dampak pandemi Covid-19. Sementara pada masa pemulihan pasca pandemi, inflasi di Kabupaten Demak mengalami kenaikan ekstrem, salah satu penyebabnya adalah dampak lanjutan kenaikan BBM pada tahun 2022 sebesar 4,99 persen. Laju inflasi Kabupaten Demak terkendali pada tahun 2023 sebesar 2,84 persen.

Gambar II.31
Laju Inflasi di Kabupaten Demak Tahun 2008-2023
(menggunakan pendekatan inflasi Kota Semarang)



Sumber: BPS Kab. Demak (2023), BPS Prov. Jateng (2023), BPS (2023)

Catatan: data tahun 2005-2007 tidak tersedia; data 2008-2018 menggunakan data Kab. Demak; data 2019-2023 menggunakan pendekatan Kota Semarang

Pengendalian inflasi perlu dilakukan guna menstabilkan perekonomian. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak guna menekan angka inflasi di antaranya: peta jalan pengendalian inflasi Kabupaten Demak Periode 2022-2024, melaksanakan operasi pasar murah, gerakan tanam pangan cepat panen, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, Kerja sama Antar Daerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antar wilayah (Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara), serta kerja sama dengan BPS untuk mengumumkan angka inflasi tiap bulan.

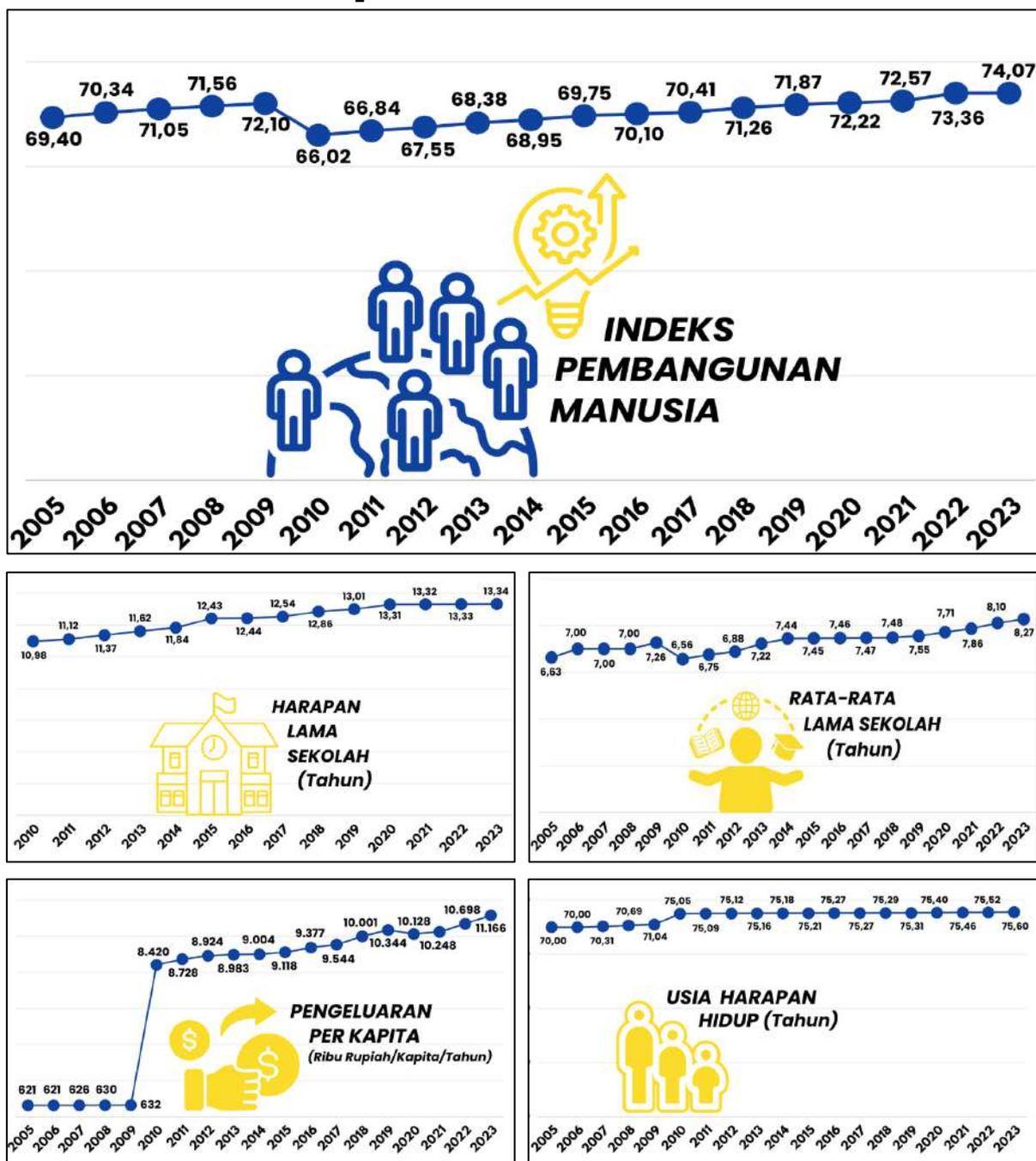
3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah suatu ukuran kualitas kehidupan manusia yang ditandai dengan ukuran-ukuran kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan lainnya. Indeks Pembangunan Manusia selalu disesuaikan dengan ketimpangan suatu daerah. pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan kebebasan berpolitik, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, pilihan untuk berpendidikan, bertahan hidup dan sehat, serta menikmati standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Demak berdasarkan grafik mengalami pergerakan positif selama kurun waktu 2005-2023. Pada tahun 2005 IPM berada di angka 69,40. Adapun pada tahun 2009 ke 2010 yaitu semula sebesar 72,10 menurun menjadi 66,02. Hal tersebut terjadi dikarenakan perubahan metodologi penghitungan yang cukup signifikan. Pada penghitungan metode baru, IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan

keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Indeks tersebut dapat disederhanakan menjadi tiga dimensi, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Indeks kesehatan dicerminkan melalui indikator Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH). Indeks pendidikan dikonstruksi dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan indeks pengeluaran digambarkan melalui indikator pengeluaran per kapita. Adapun pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia mencapai puncak tertingginya sebesar 74,07. Berikut merupakan penggambaran Indeks Pembangunan Manusia dan komponen penyusunnya.

Gambar II.32
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya
di Kabupaten Demak Tahun 2005-2023



Sumber: BPS Kab. Demak

Catatan: HLS mulai dihitung tahun 2010, pada tahun 2010 terjadi perubahan metode perhitungan IPM

4. Tingkat Kemiskinan

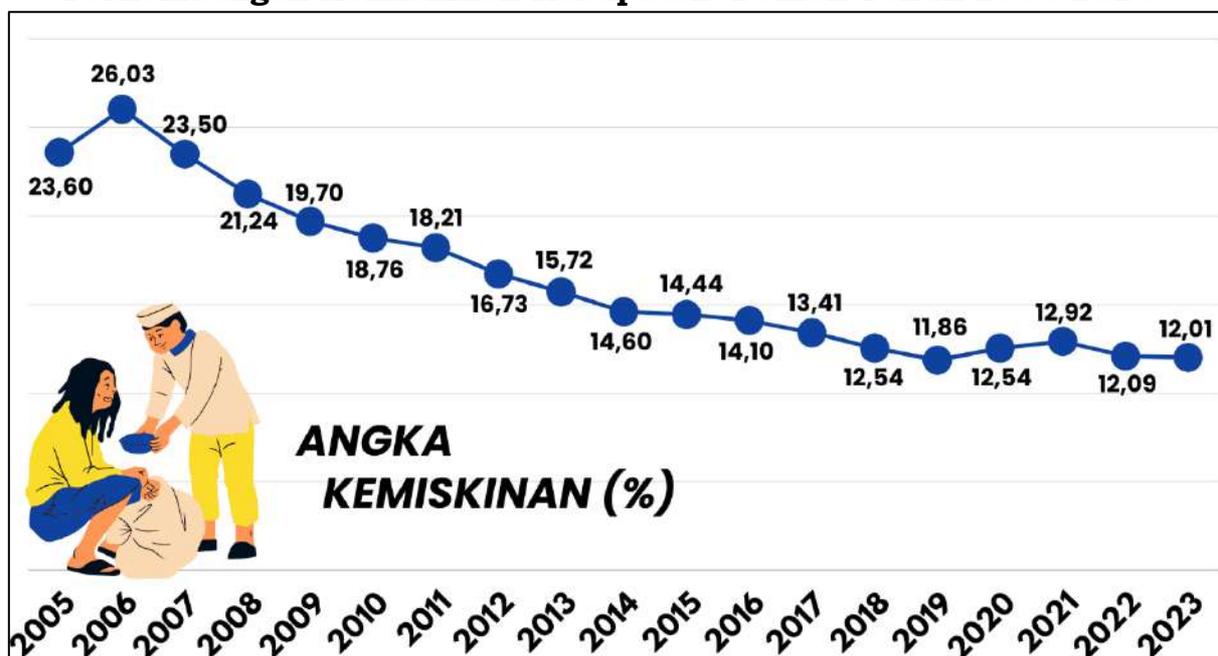
Kemiskinan digambarkan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan begitu diartikan bahwa penduduk miskin adalah penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan menjadi permasalahan kompleks yang multidimensional karena berkaitan dan saling mempengaruhi antara aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya.

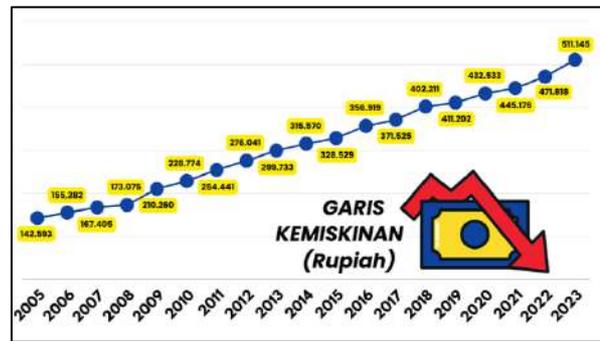
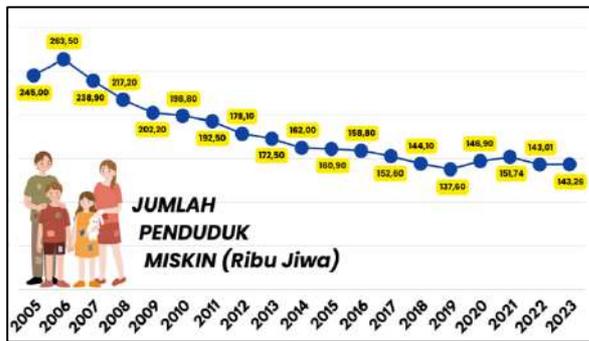
Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Terdapat berbagai pendekatan dalam mendefinisikan kemiskinan. BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang kemudian batasan dari sisi pengeluaran ini disebut sebagai Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 (tiga) indikator kemiskinan yang digunakan yaitu:

1. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan, yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan
3. Indeks Keparahan Kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar II.33

Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Demak Tahun 2005-2023





Sumber: BPS Kab. Demak

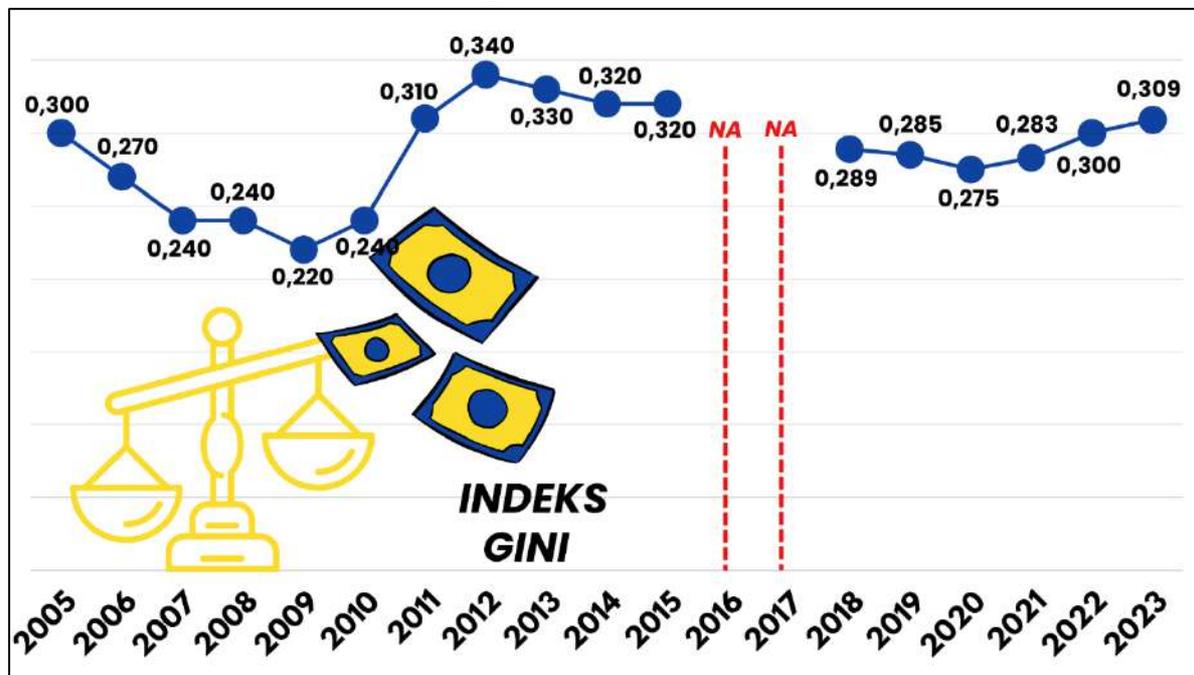
Catatan: data 2005 tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan tidak dirilis

Tingkat kemiskinan Kabupaten Demak berdasarkan gambar di atas mengalami penurunan dari tahun 2009 sampai 2019, kemudian menunjukkan tren yang sedikit meningkat pada tahun 2020 dan 2021. Kenaikan tersebut merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang terjadi. Kenaikan ini juga terlihat secara absolut dari jumlah penduduk miskin yang mencapai 151,74 ribu jiwa pada tahun 2021. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2022 hingga 2023, kemiskinan Kabupaten Demak menunjukkan perkembangan positif dilihat dari capaian tingkat kemiskinan yang semakin menurun hingga menjadi 12,01 persen.

5. Indeks Gini

Pembangunan dapat dikatakan berhasil salah satunya apabila telah mampu mengurangi kesenjangan di lingkungan masyarakat. Kesenjangan ini dapat diukur menggunakan indeks gini atau tingkat ketimpangan. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila indeks gini bernilai 0 mengartikan bahwa pemerataan terjadi secara sempurna, sebaliknya apabila indeks gini mendekati angka 1 maka ketimpangan telah terjadi. Indeks gini penting untuk dijadikan bahan pertimbangan *policy makers* dalam menentukan kebijakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Gambar II.34
Indeks Gini Kabupaten Demak Tahun 2005-2023



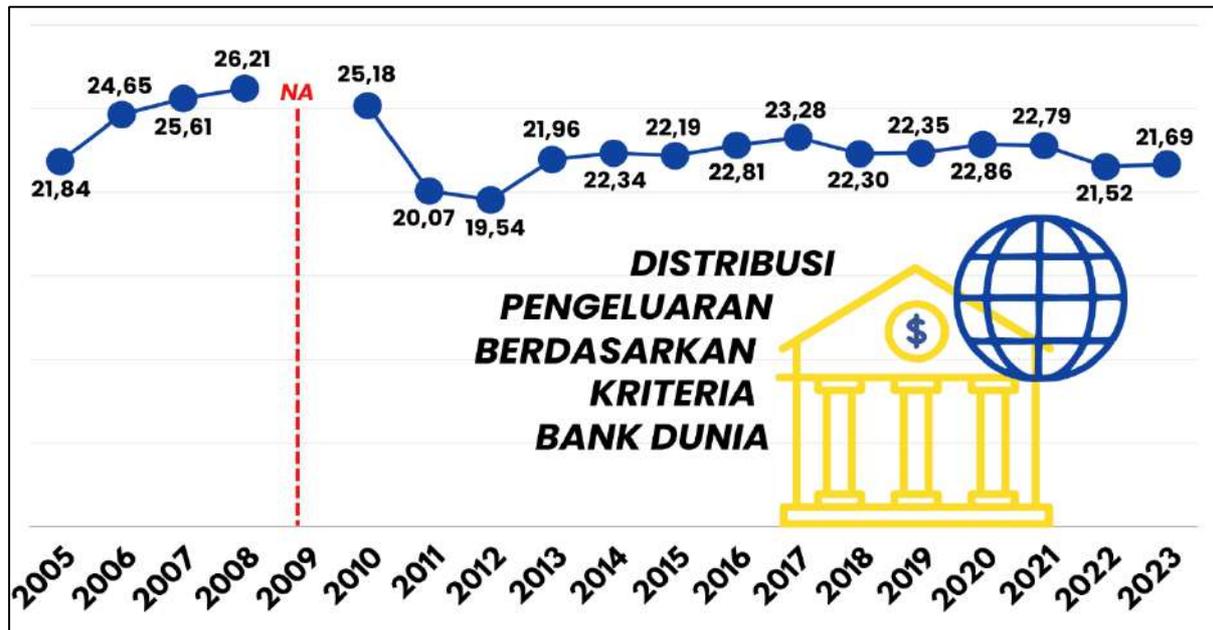
Sumber: BPS Kab. Demak

Catatan: data tahun 2016-2017 tidak dirilis

Nilai indeks gini Kabupaten Demak tahun 2020 mencapai angka terendah selama lima tahun terakhir yaitu 0,275 kemudian meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 0,283 disusul tahun 2022 sebesar 0,300 dan pada tahun 2023 sebesar 0,309 atau dalam kategori merata. Artinya pandemi Covid-19 membawa dampak negatif terhadap taraf perekonomian masyarakat kelas menengah. Melandainya kasus Covid-19 pada tahun 2022 memberikan kesempatan untuk bangkit kembali, termasuk kelompok menengah dan atas menguasai faktor-faktor produksi sehingga pendapatan mereka lebih tinggi dibandingkan kelompok pendapatan rendah.

Kabupaten Demak telah melakukan upaya untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan ekonomi dengan membangun infrastruktur seperti kawasan permukiman, sarana prasarana umum, irigasi, dan jalan penghubung. Dengan infrastruktur yang memadai, usaha ekonomi masyarakat di seluruh wilayah dapat terhubung dengan baik sehingga potensi ekonomi dapat berkembang secara merata. Selain itu, sentra perdagangan juga diperluas untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan adanya upaya ini, diharapkan disparitas dapat berkurang dan masyarakat Kabupaten Demak dapat merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur yang merata.

Gambar II.35
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%)
Tahun 2005-2023



Sumber: BPS Kab. Demak

Catatan: pada tahun 2009 data tidak dirilis

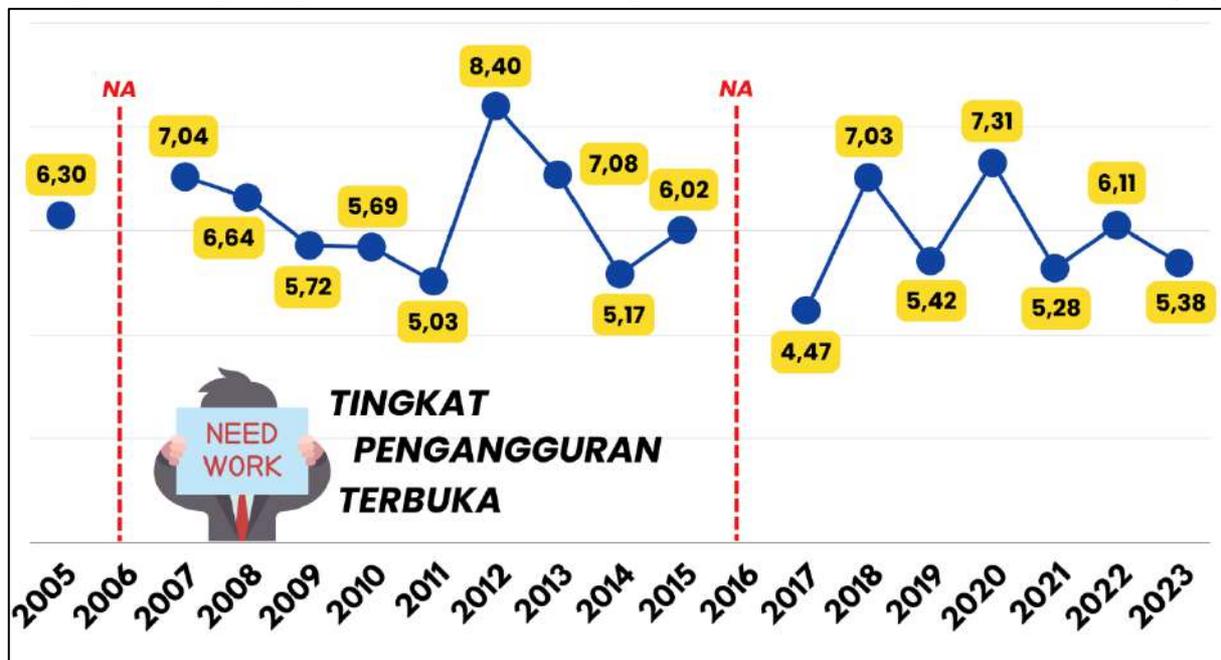
Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia adalah alat yang digunakan untuk mengukur bagaimana pendapatan atau konsumsi masyarakat di suatu negara terdistribusi di antara berbagai kelompok ekonomi. Indikator ini penting dalam menganalisis ketimpangan ekonomi dan membantu mengidentifikasi seberapa merata kekayaan didistribusikan dalam suatu populasi. Distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada tahun 2023 sebesar 21,69 persen dari seluruh pengeluaran penduduk di Kabupaten Demak. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada tahun 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Demak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Demak pada tahun 2022 meningkat dari capaian tahun 2021, sedangkan pada tahun 2023, capaian TPT mengalami penurunan menjadi 5,38 persen. Penurunan tersebut merupakan indikasi positif kinerja pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Kabupaten Demak.

Gambar II.36

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Demak Tahun 2005-2023 (%)



Sumber: BPS Kab. Demak, 2024; dan RPJPD Kab. Demak, 2006-2025

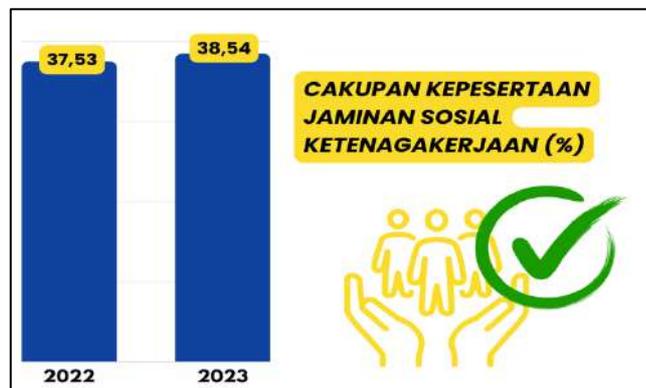
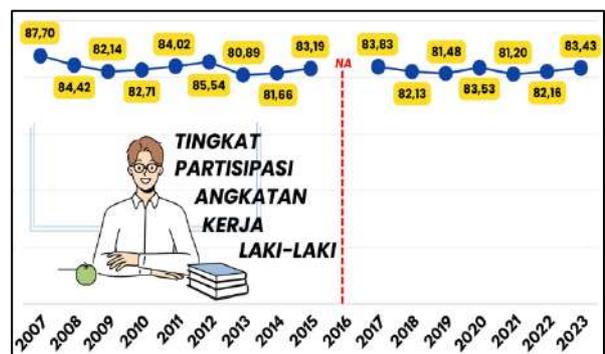
Catatan: data tahun 2006 dan 2016 tidak dirilis BPS

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Sebaliknya, tingkat yang rendah mungkin mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan dalam angkatan kerja. Adapun penduduk yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

TPAK dapat dihitung dengan memersentasekan jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Pada tahun 2023, TPAK Kabupaten Demak mencapai 70,76 persen atau mengalami peningkatan signifikan sebanyak 3,79 persen dari tahun 2022. Adapun TPAK perempuan di Kabupaten Demak pada tahun 2023 mencapai 57,99 persen serta TPAK laki-laki mencapai 83,43 persen. TPAK yang memiliki pola meningkat mengindikasikan adanya peningkatan potensi tenaga kerja yang akan mempengaruhi produktivitas kinerja ekonomi daerah. Hal ini dikarenakan, penduduk bekerja juga akan mengalami peningkatan sehingga dalam mewujudkan kualitas tenaga kerja memerlukan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan bagi tenaga kerja.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Demak mencapai 38,54 persen pada tahun 2023. Capaian ini masih belum optimal sehingga perlu adanya akselerasi dalam perwujudan perlindungan kepada pekerja dengan meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut.

Gambar II.37
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Demak
Tahun 2010-2023 (%)



Sumber: BPS Kab. Demak, BPJS Kanwil Jateng-DIY

Catatan: data TPAK tahun 2016 tidak dirilis BPS, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersedia mulai tahun 2022

7. Kemandirian Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

Peningkatan jumlah desa mandiri dapat menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Jumlah desa di Kabupaten Demak sebanyak 243 desa. Adapun pada rentang tahun 2019-2023 persentase desa mandiri Kabupaten Demak mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase desa mandiri sebesar 1,23 persen meningkat menjadi 12,35 persen pada tahun 2023.

Penghitungan tersebut menggunakan data yang berasal dari Indeks Desa Membangun. Pada tahun 2024, Indeks Desa Membangun berubah menjadi Indeks Desa karena perbedaan parameter penghitungan. Perbedaan tersebut berpotensi mengubah persentase desa mandiri di tahun-tahun berikutnya. Dalam penentuan target persentase desa mandiri pada RPJPD 2025-2045 akan menggunakan data yang berasal dari Indeks Desa.

Gambar II.38
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Demak
Tahun 2019-2023



Sumber: Dinpermades P2KB Kab. Demak

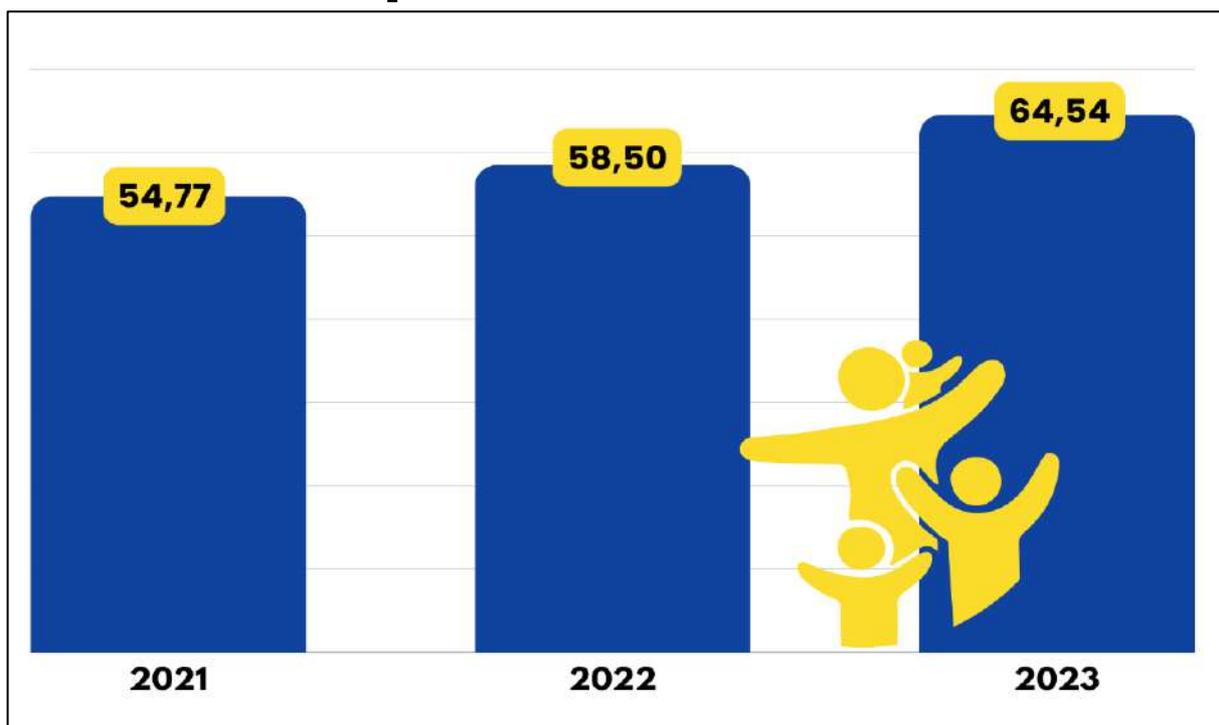
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan keberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka panjang tentu saja menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya.

1. Kualitas Keluarga

Pembangunan kualitas keluarga merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga melalui berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta hubungan antar anggota keluarga. Pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan kualitas keluarga di Kabupaten Demak mengalami peningkatan dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 64,54 yang menandakan bahwa pembangunan keluarga di Kabupaten Demak masuk kategori cukup baik (berkembang).

Gambar II.39
Indeks Pembangunan Keluarga
Kabupaten Demak Tahun 2021-2023



Sumber: Dinpermades P2KB

Catatan: Ibangga dilaksanakan perhitungan mulai tahun 2021

2. Pembangunan Gender

Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan di Kabupaten Demak. Selain IPG, hasil/*outcome* pembangunan berperspektif gender juga dilihat pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

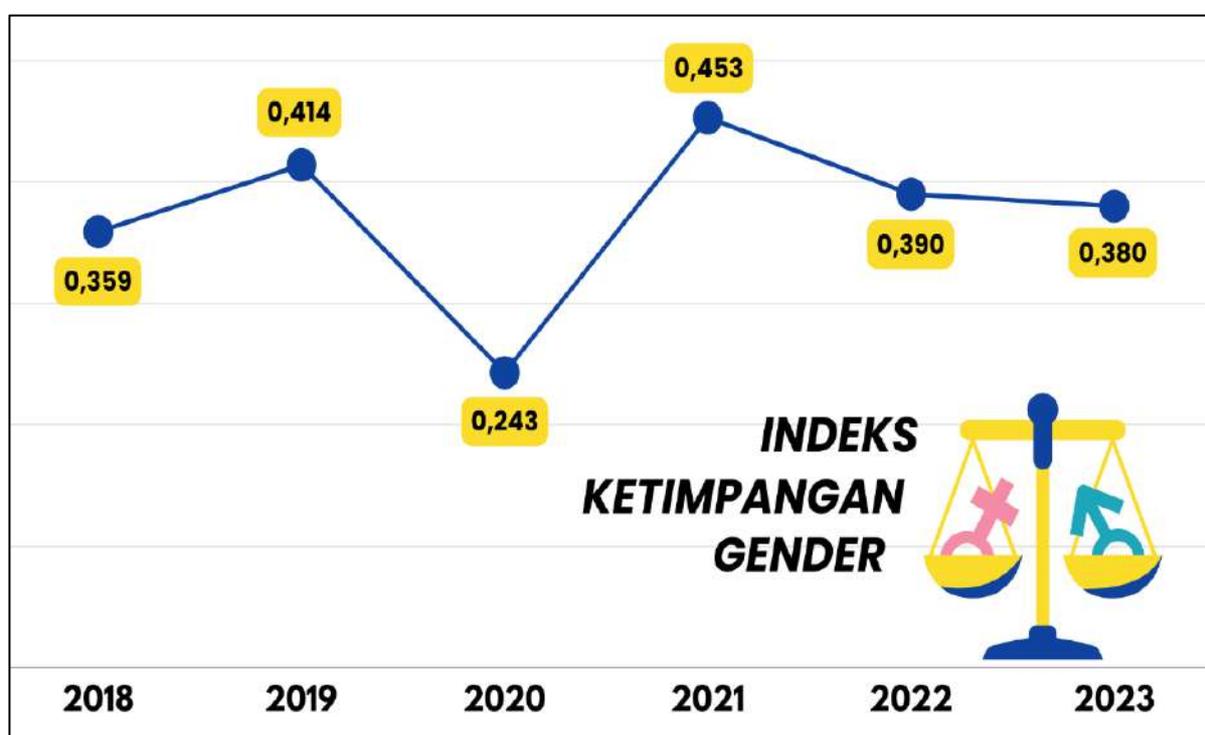
Berdasarkan data dari BPS, realisasi IPG tahun 2023 sebesar 91,17 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu 91,30. Di tahun 2020, Kabupaten Demak telah menerima penghargaan Anugerah Parahita

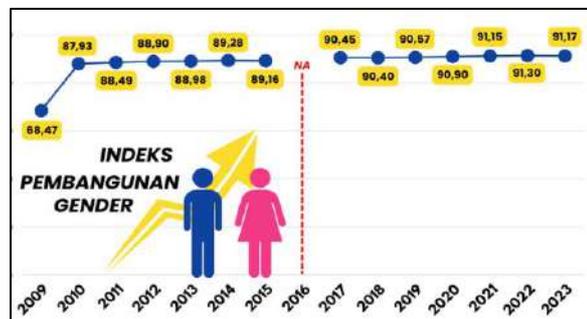
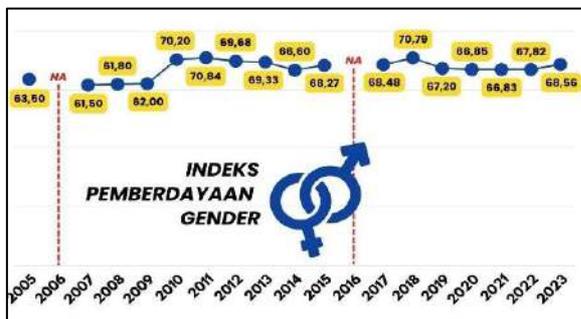
Ekapraya Tingkat Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga capaian IPG hampir mendekati angka 100 persen, yaitu mencapai 90,90 persen, yang menandakan bahwa kualitas pemberdayaan manusia terpilah perempuan dan laki-laki di lihat dari gender dan sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi perempuan dan laki-laki hampir tidak ada kesenjangan.

Begitu pun dengan realisasi IDG tahun 2022 sama dengan 2021 yaitu sebesar 66,83. Jika dilihat dari tahun 2019, 2020 dan 2021, maka capaian IDG mengalami penurunan, hal itu dikarenakan dari 3 komposit pendukung IDG, yang mengalami penurunan adalah perempuan sebagai tenaga profesional sebesar 53,15 (2019), 54,55 (2020) dan menjadi 48,85 (2021). Sumbangan pendapatan perempuan sebesar 38,77 (2019), 38,74 (2020) menjadi 37,83 (2021). Hal tersebut dikarenakan dari 3 komposit pendukung IDG, yang mengalami penurunan adalah keterlibatan perempuan di parlemen, yaitu 16 persen (2018) menjadi 12 persen (2021). Pada tahun 2023 IDG mengalami penurunan menjadi 68,56. Ke depannya diharapkan terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam parlemen sebesar 30 persen agar lebih akomodatif dan substansial dalam pengambilan keputusan, khususnya memperhatikan kesetaraan gender.

Selain IPG dan IDG, terdapat Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender yang dilihat dari aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi ekonomi. Data IKG Kabupaten Demak mulai tersedia pada tahun 2018. Dalam tiga tahun terakhir terdapat penurunan angka IKG Kabupaten Demak menjadi 0,380 pada tahun 2023 yang menunjukkan perbaikan yang stabil dalam kesetaraan gender.

Gambar II.40
Pembangunan Gender Kabupaten Demak Tahun 2005-2023





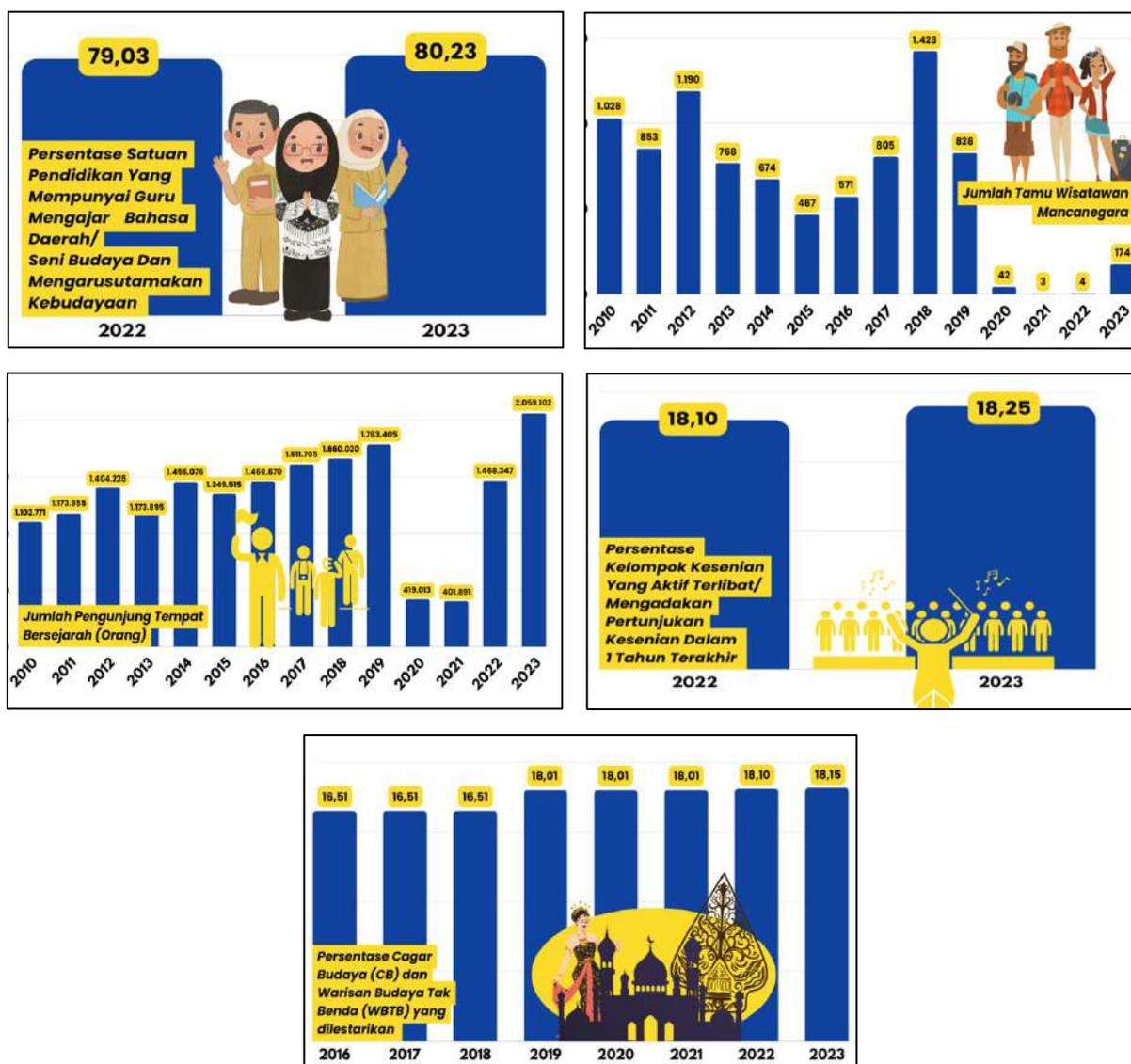
Sumber: BPS Kab. Demak

Catatan: data IPG tahun 2016 tidak dirilis, data IDG tahun 2006 dan 2016 tidak dirilis

3. Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan merupakan proses yang bertujuan untuk memperkuat, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya suatu masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai, tradisi, seni, dan praktik budaya, serta memastikan bahwa budaya tersebut dapat terus hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman. Pencapaian pembangunan kebudayaan di Kabupaten Demak terus ditingkatkan sebagai upaya menjaga warisan budaya bangsa maupun lokal. Penanaman kecintaan dan penjagaan terhadap budaya dimulai sejak masa sekolah di mana sebanyak 80,23 persen satuan pendidikan di tahun 2023 memiliki guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan. Selain itu dari sisi objek budaya, sebanyak 18,15 persen Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) telah dilestarikan. Pengunjung tempat bersejarah juga meningkat hingga mencapai lebih dari dua juta orang pada tahun 2023, meskipun sempat menurun di tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak pandemi Covid-19 termasuk penurunan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun yang sama. Dari sisi seni budaya terlihat adanya kenaikan pada kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dan kebudayaan dimana di tahun 2022 sebesar 18,10 meningkat sebanyak 18,25 persen di tahun 2023.

Gambar II.41
Indikator Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Demak
Tahun 2016-2023



Sumber: Dinparta Kab. Demak, Dindikbud Kab. Demak

4. Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah khususnya Kabupaten Demak. Jumlah kasus kematian ibu dalam rentang tahun 2007 hingga 2023 mengalami kecenderungan penurunan jumlah kasus. Pada tahun 2007 sebanyak 18 kasus menurun menjadi 12 kasus pada tahun 2023. Prevalensi stunting pada balita mengalami penurunan sebesar 9,50 persen di tahun 2023 dibandingkan pada tahun awal 2013 sebesar 50,30 persen. Pada tahun 2023, lokus desa stunting Kabupaten Demak terdapat di 6 kecamatan dan 34 desa yang tersebar di kecamatan Demak, Bonang, Wedung, Sayung, Guntur, dan Wonosalam.

Faktor keberhasilan penurunan Angka Kematian Ibu dan stunting di antaranya:

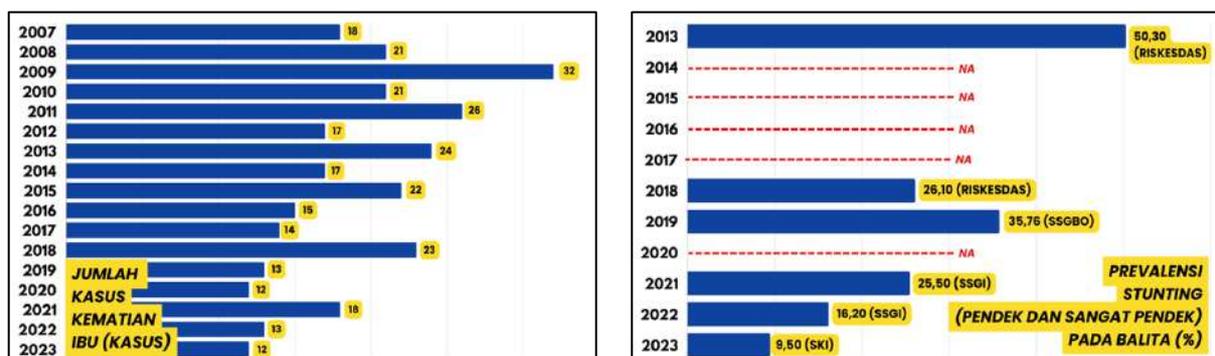
- a. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) primer dan rujukan yang terakreditasi minimal Madya. Kabupaten Demak

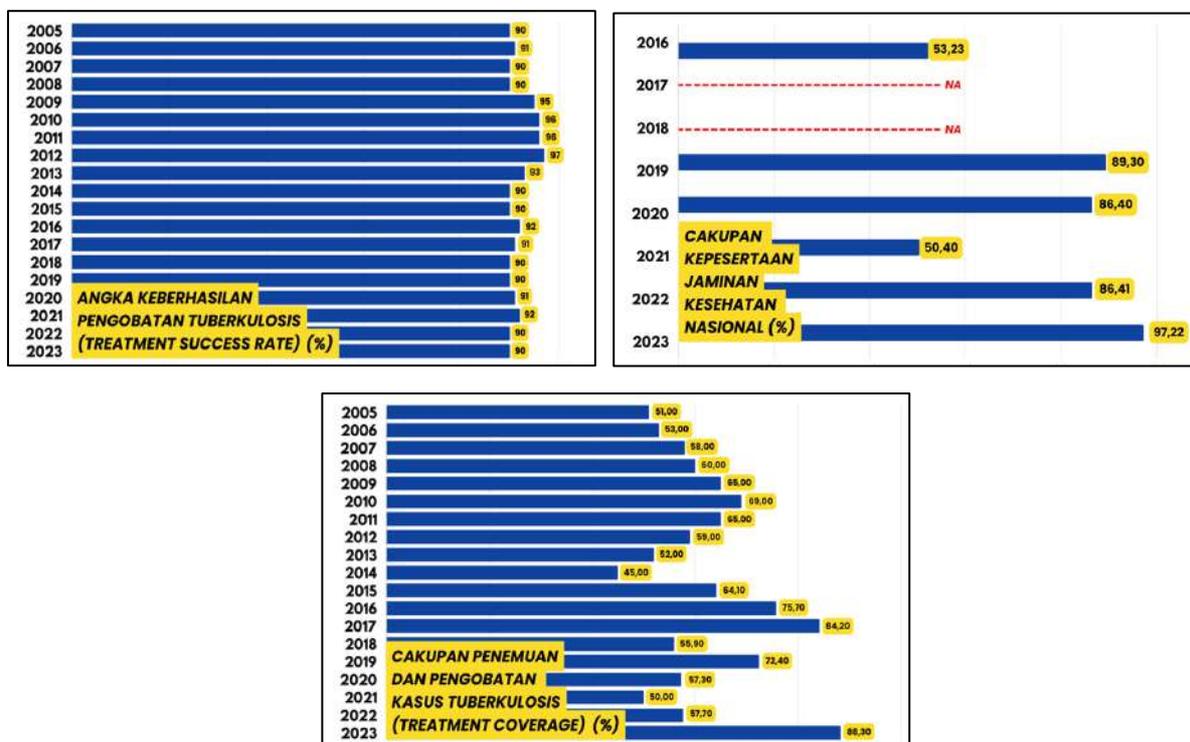
- mempunyai 29 fasilitas primer dan rujukan, yang terdiri dari 27 Puskesmas dan 2 rumah sakit umum daerah. Tahun 2022, tercatat ada 27 fasyankes yang mempunyai akreditasi minimal madya. Pada tahun 2023 tercatat adanya 27 fasyankes yang terakreditasi Paripurna;
- Adanya peningkatan Desa Siaga aktif mandiri, dari tahun 2022 sebanyak 152 desa menjadi 206 desa di tahun 2023;
 - Pemanfaatan SDM yang ada, peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dan dengan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir, dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi melalui peningkatan kompetensi tenaga bidan desa dan tenaga PONEC (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar), peningkatan pengetahuan keluarga dengan ibu maternal;
 - Edukasi kepada masyarakat tentang stunting khususnya kepada remaja putri dan calon pasangan suami istri;
 - Pemberian tablet penambah darah kepada remaja putri dan ibu hamil, mendorong pemberian ASI eksklusif dan MPASI tinggi protein; dan
 - Peningkatan akses air minum dan sanitasi.

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Demak juga dilihat dari angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) sebesar 90 persen dari total jumlah cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) sebesar 88,30 persen pada tahun 2023. Meskipun temuan *tuberculosis* pada tahun 2023 meningkat, tetapi Kabupaten Demak berkomitmen untuk mengeliminasi *tuberculosis* pada tahun 2030.

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kabupaten Demak telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2023 tentang Jaminan Kesehatan Daerah. Perda tersebut diperlukan dalam rangka mendukung kebijakan transformasi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah. Pada tahun 2023 Kabupaten Demak telah meraih *Universal Health Coverage* (UHC) dengan capaian jumlah masyarakat yang sudah terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejumlah 97,22 %.

Gambar II.42
Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten Demak
Tahun 2005-2023





Sumber: Dinkes Kab. Demak
 Catatan: data NA = tidak dirilis

Fasilitas kesehatan mengalami peningkatan dari sisi kuantitas. Pada tahun 2023 jumlah rumah sakit sebanyak 5 unit dengan kondisi ini telah memenuhi standar kebutuhan rumah sakit sebesar 1:240.000. Puskesmas di Kabupaten Demak juga telah memenuhi standar kebutuhan infrastruktur kesehatan di mana pada tahun 2023 terdapat 27 unit (standar rasio 1:120.000). Selain fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan di Kabupaten Demak juga turut mengalami kenaikan sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2023. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik bidang kesehatan dilakukan khususnya dalam upaya pemberian layanan yang terjangkau masyarakat dan penanganan rujukan pada kasus kegawatdaruratan secara cepat dan tepat, sehingga dapat memperkecil angka kesakitan dan kematian.

Tabel II.12

Kondisi Infrastruktur Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Sakit	Unit	3	4	5	5	5
Puskesmas Rawat Inap	Unit	15	15	15	15	15
Puskesmas Non Rawat Inap	Unit	12	12	12	12	12
Puskesmas Pembantu	Unit	52	49	50	52	45

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Klinik Pratama	Unit	40	40	42	44	56
Posyandu	Unit	1.263	1.279	1.290	1.287	1.295
Apotek	Unit	106	106	124	121	159
Dokter	Orang	169	115	372	175	193
Dokter Gigi	Orang	34	37	61	56	70
Perawat	Orang	794	860	1.029	973	1.032
Bidan	Orang	599	621	781	664	661
Ahli Gizi	Orang	53	55	56	58	60
Apoteker	Orang	69	31	24	85	67

Sumber: Dinkes Kab. Demak

2.3 ASPEK DAYA SAING

Era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat menuntut suatu daerah untuk memiliki keunggulan yang ditentukan oleh adanya penguatan daya saing daerah. Dengan begitu, diperlukan penguatan daya saing yang mampu mengakselerasi pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan 2045.

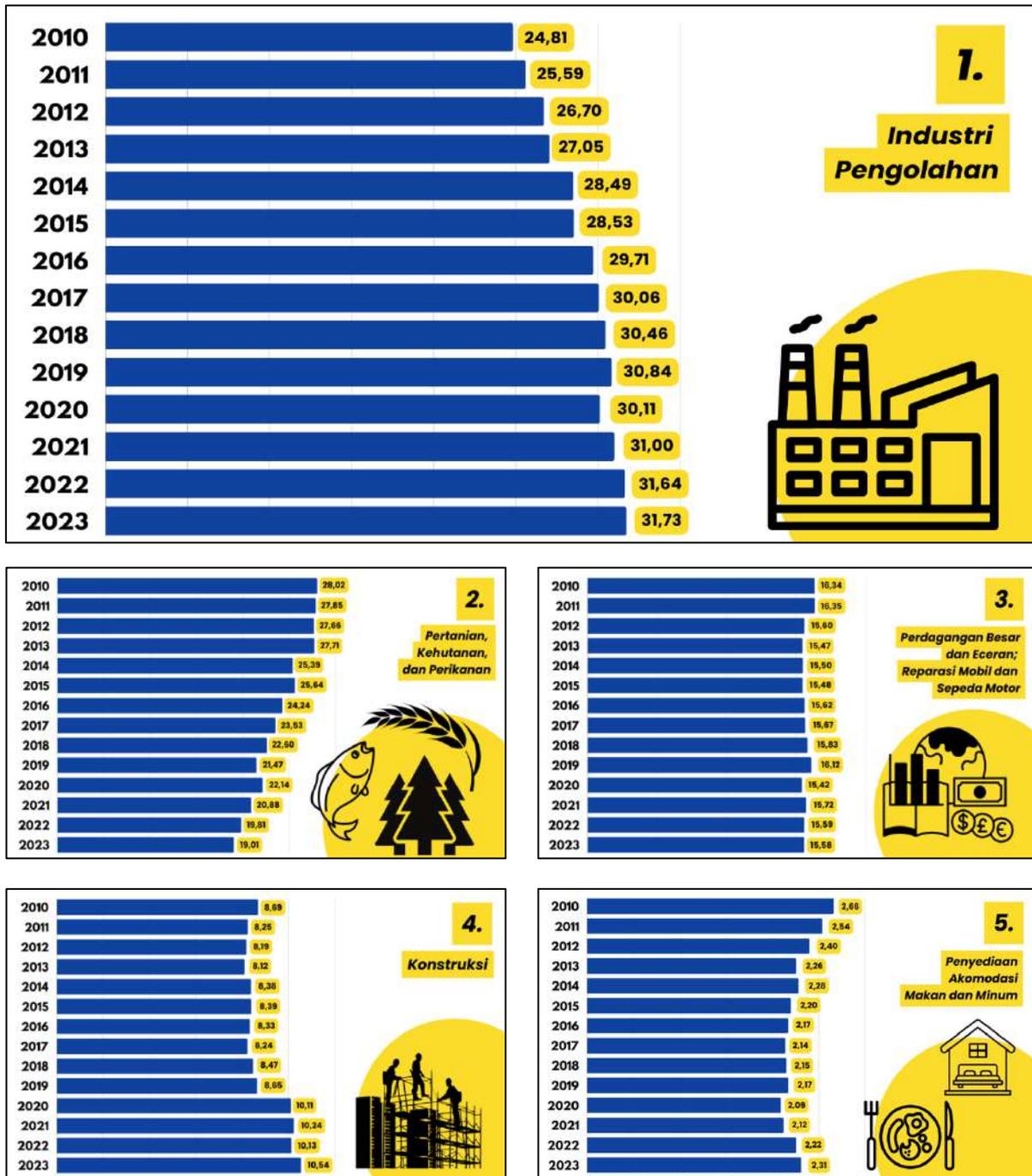
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Suatu daerah memiliki karakteristik, pola, struktur masing-masing yang menjadi keunggulan daerah untuk menciptakan daya saing daerah. Keunggulan ini menjadi daya tarik atau potensi yang dapat mengangkat daya perekonomian. Hal inilah yang disebut sebagai potensi ekonomi.

Salah satu indikator yang menggambarkan daya saing ekonomi daerah adalah PDRB. Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku di setiap tahun sedangkan PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun tertentu sebagai dasar. Untuk melihat struktur serta pergeseran ekonomi menggunakan PDRB ADHB sedangkan ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.

PDRB digunakan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran. PDRB Kabupaten Demak tahun 2023 memiliki capaian nilai sebesar 33.016.807 juta rupiah (ADHB). Berdasarkan lapangan usahanya, struktur ekonomi Kabupaten Demak lima tahun terakhir masih disokong oleh lima kategori lapangan usaha utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor konstruksi; serta sektor penyediaan akomodasi makan dan minum. Berikut secara rinci lima kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi tertinggi pada PDRB ADHB Kabupaten Demak:

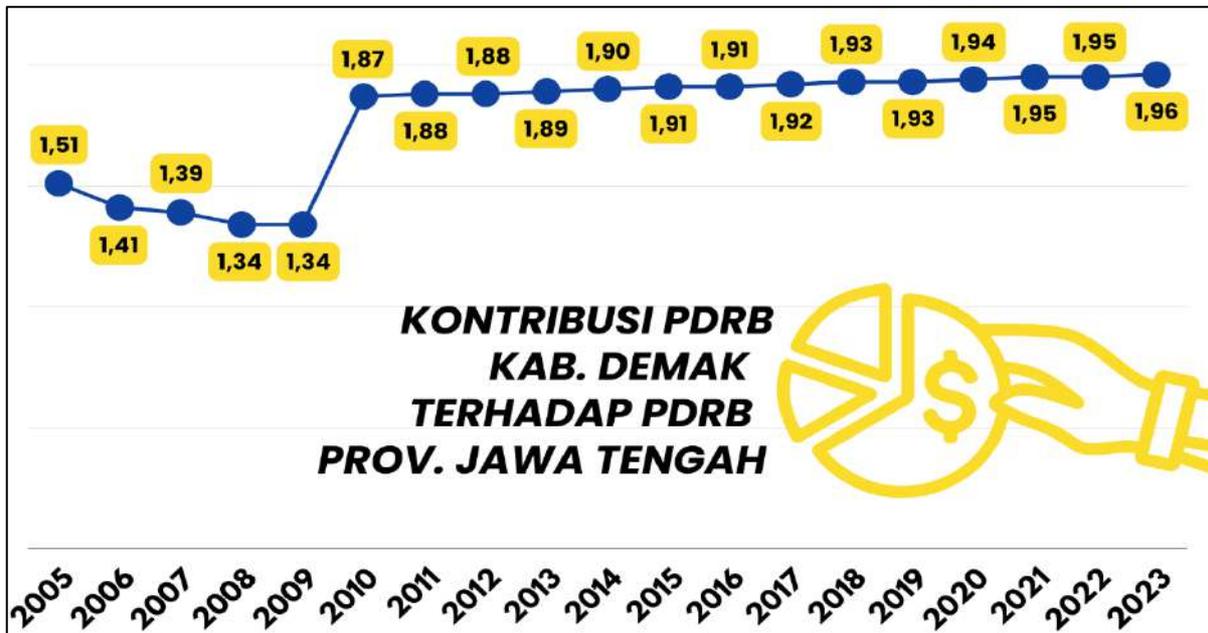
Gambar II.43
Lima Kategori Lapangan Usaha yang Memiliki Kontribusi Tertinggi
Pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Demak
Tahun 2010-2023(%)



Sumber: BPS Kab. Demak

Pencapaian PDRB di Kabupaten Demak belum mampu meningkatkan kontribusi PDRB Kabupaten Demak terhadap capaian ekonomi Provinsi Jawa Tengah di mana pada tahun 2023, dimana kontribusi PDRB Kabupaten Demak terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,96 persen. Angka ini tidak terlalu banyak meningkat dibanding capaian pada tahun 2005 yang memiliki nilai kontribusi sebesar 1,51 persen. Adapun capaian kontribusi PDRB terendah berada di tahun 2009 dengan capaian 1,34 persen dari PDRB Provinsi Jawa Tengah.

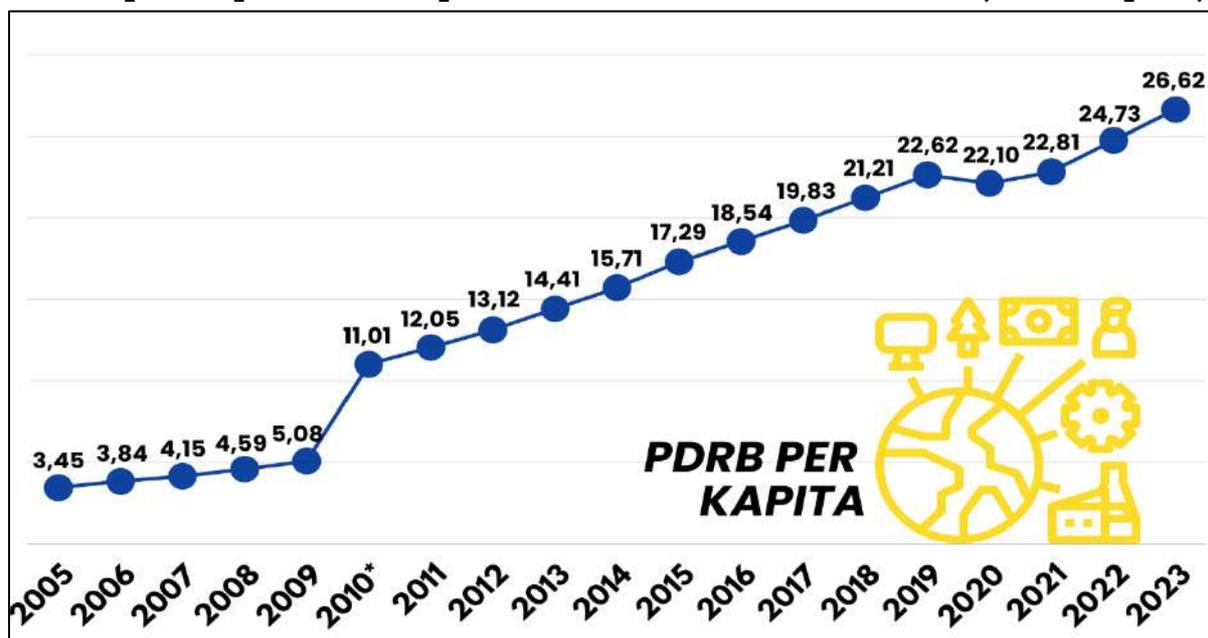
Gambar II.44
Kontribusi PDRB Kabupaten Demak Terhadap PDRB
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2023 (%)



Sumber: BPS Kab. Demak

PDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga representatif dalam menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk. Nilai PDRB per kapita dihitung menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Asumsi awal adalah semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Hal ini dikarenakan peningkatan PDRB per kapita merupakan sinyal awal adanya peningkatan perekonomian daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun tidak secara langsung.

Gambar II.45
PDRB per Kapita di Kabupaten Demak Tahun 2005-2023 (Juta Rupiah)



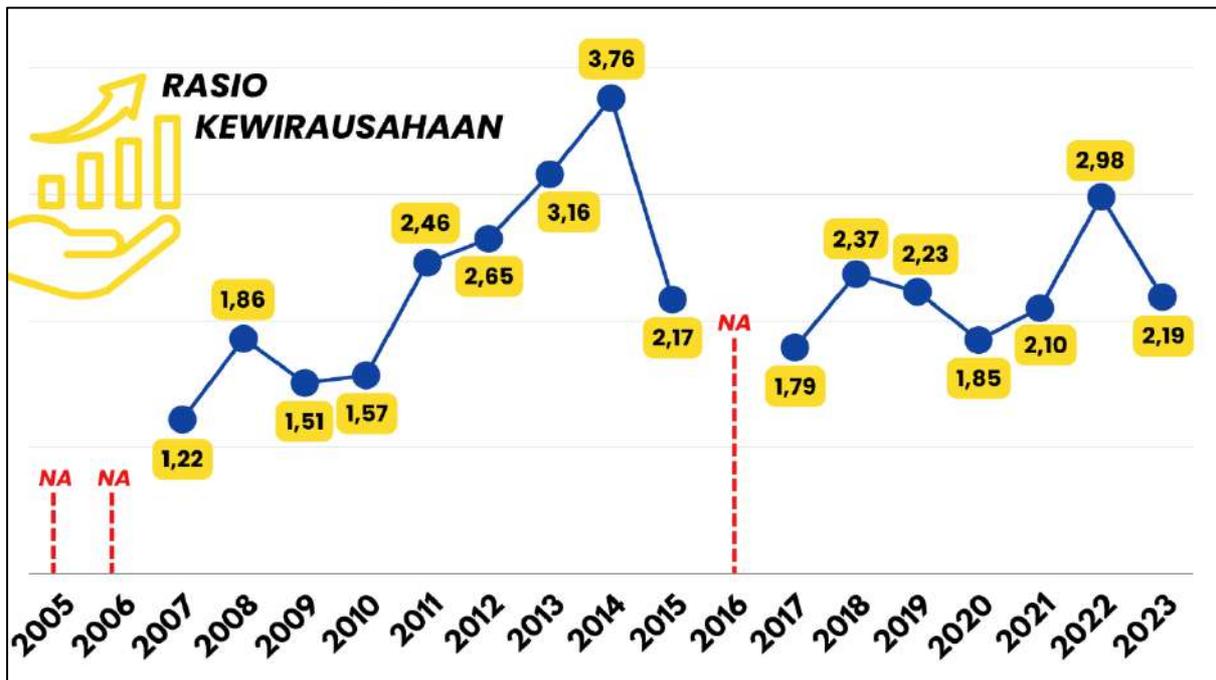
Sumber: BPS Kab. Demak

Catatan: data mulai tahun 2010 dan seterusnya terjadi perubahan metode perhitungan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, PDRB per kapita Kabupaten Demak meningkat dari 21,22 juta rupiah di tahun 2018 menjadi 24,73 juta rupiah di tahun 2022. Selama pandemi Covid-19, PDRB per kapita Kabupaten Demak masih mampu meningkat pada masa pemulihan ekonomi di tahun 2022. Pada tahun 2023 PDRB per kapita sebesar 26,62 juta rupiah.

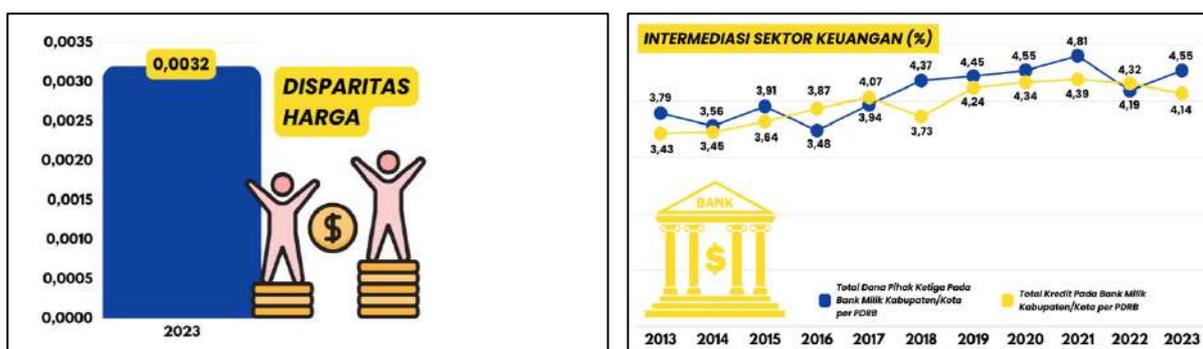
Dari sisi pembangunan kewirausahaan daerah, Kabupaten Demak cukup perhatian dalam meningkatkan kondisi kewirausahaan daerah, khususnya usaha mikro dan kecil. Pembangunan kewirausahaan sendiri adalah proses pengembangan dan penguatan kemampuan individu atau kelompok untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha atau bisnis baru. Adapun pencapaian kewirausahaan daerah terlihat dari rasio kewirausahaan yang merupakan proporsi suatu wirausaha di suatu wilayah. Rasio kewirausahaan di Kabupaten Demak mengalami fluktuasi dari tahun 2007 hingga 2023. Rasio kewirausahaan tertinggi berada pada tahun 2014 dengan capaian 3,76 persen, namun setelahnya mengalami penurunan hingga mencapai 2,19 persen pada tahun 2023.

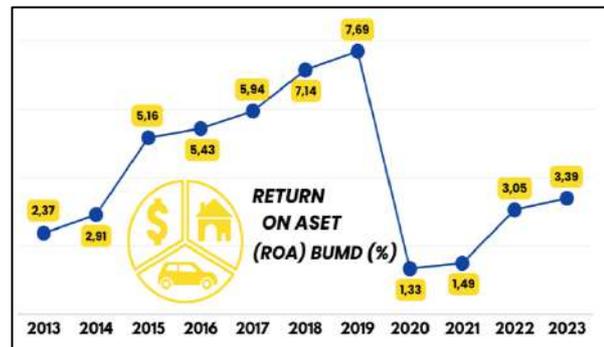
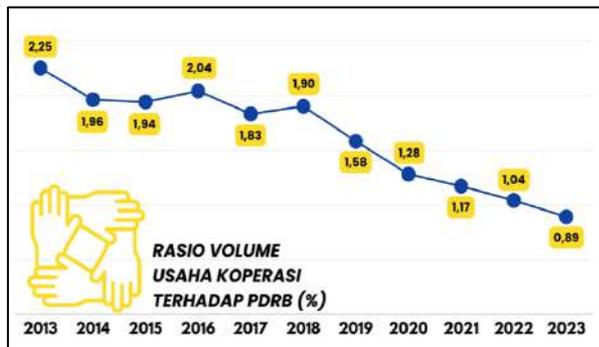
Gambar II.46
Rasio Kewirausahaan (%)
Kabupaten Demak Tahun 2007-2023



Sumber: BPS Kab. Demak, Dinnakerind Kab. Demak

Gambar II.47
Indikator Daya Saing Ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2023





Sumber: Bag. Perekonomian Setda Kab. Demak, Dindagkop Kab. Demak

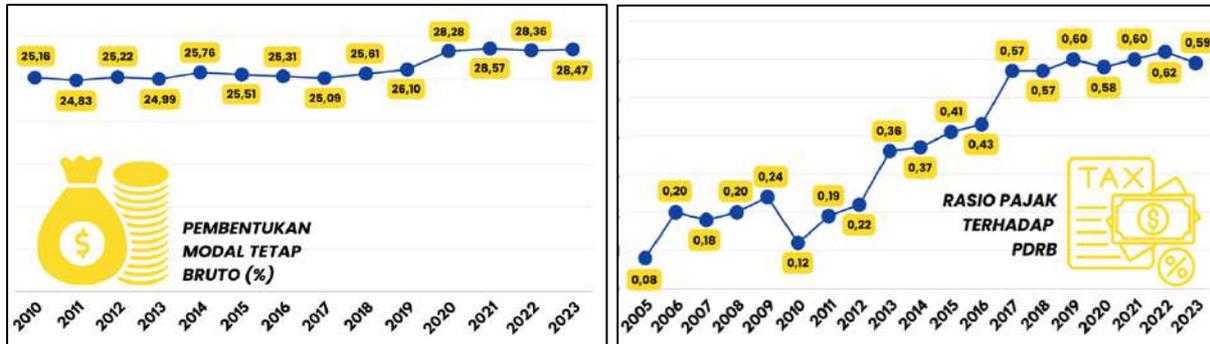
Daya saing ekonomi dapat diukur dari beberapa indikator dalam Indikator Utama Pembangunan. Salah satu indikatornya adalah Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di mana capaian sebesar 0,89 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian Kabupaten Demak hanya sebesar 0,89 persen. Indikator lain yang menggambarkan daya saing ekonomi terdapat juga Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Daerah dibandingkan nilai PDRB Kabupaten Demak yang mencapai 4,55 persen dan Total Kredit pada Bank Milik Daerah dibandingkan nilai PDRB yang mencapai 4,84 persen pada tahun 2023. *Return on aset* (ROA) pada BUMD di Kabupaten Demak sebesar 3,39 persen di tahun 2023 yang mengindikasikan dari aset BUMD yang dimiliki Kabupaten Demak hanya mampu menghasilkan laba 3,39 persen. Daftar BUMD yang berada di Kabupaten Demak yaitu:

1. PT. LKM Demak Sejahtera,
2. PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Demak,
3. PT. Demak Sarana Sehat,
4. PT. Demak Aneka Wira Usaha (Anwusa),
5. Perumda Air Minum

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu indikator penting dalam ekonomi yang mengukur investasi dalam aset tetap oleh suatu wilayah atau sektor ekonomi dalam periode tertentu. Aset tetap ini meliputi infrastruktur, peralatan, bangunan, dan fasilitas lainnya yang digunakan untuk kegiatan produksi selama lebih dari satu tahun. Di Kabupaten Demak, PMTB memberikan kontribusi yang terus meningkat di setiap tahunnya hingga mencapai 28,47 persen dari struktur ekonomi di Kabupaten Demak.

Rasio pajak terhadap PDRB Kabupaten Demak mengalami kecenderungan kenaikan dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Namun sejak tahun 2019 mengalami stagnasi dan belum optimal dalam pencapaiannya di mana pada tahun 2023 rasio pajak terhadap PDRB memiliki capaian sebesar 0,59 persen. Hal ini terjadi karena belum adanya objek pajak baru yang mampu meningkatkan rasio pajak secara signifikan.

Gambar II.48
Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Rasio Pajak Terhadap PDRB
di Kabupaten Demak Tahun 2005-2023 (%)

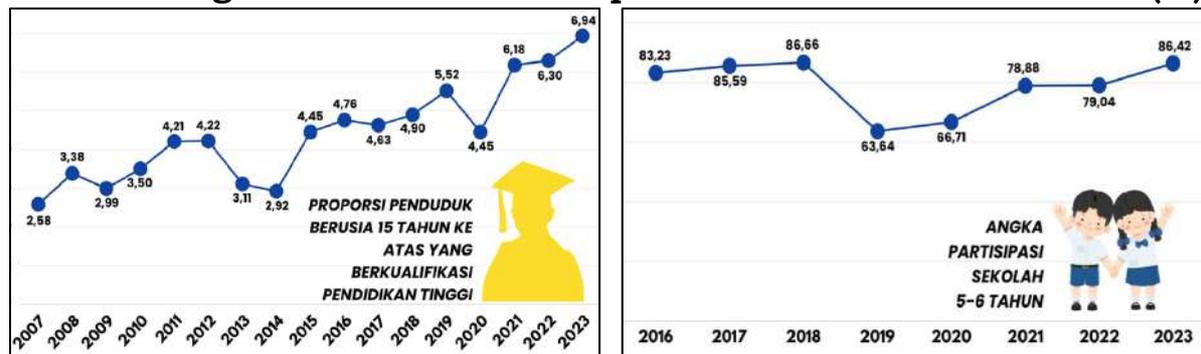


Sumber: BPS Kab. Demak, DPM PTSP Kab. Demak, BPKPAD Kab. Demak

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu komponen terpenting dari pembangunan suatu daerah yaitu sumber daya manusia yang berperan sebagai kelompok sasaran juga sebagai pelaksana pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang terstruktur dan teratur. Hal ini guna memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk berkehidupan layak dan berkompentensi unggul. Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat daya saing SDM adalah Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah sebagai komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Harapan lama sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Gambar II.49
Perkembangan Pendidikan di Kabupaten Demak Tahun 2007-2023 (%)



Sumber: Dindikbud Kab. Demak, BPS Kab. Demak

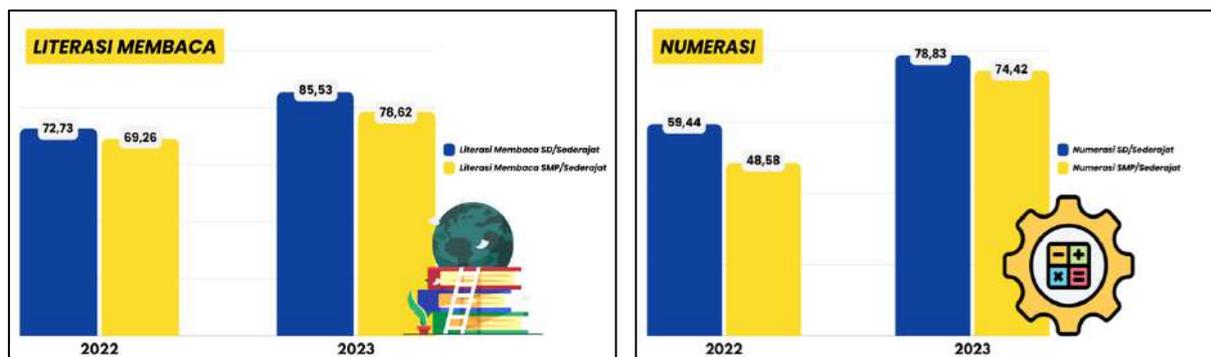
Potret pendidikan di Kabupaten Demak dilihat dari Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (Gambar II.26). HLS selama kurun waktu lima tahun terakhir meningkat setiap tahunnya pada kisaran 12 – 13 tahun, artinya anak usia 7 tahun berpeluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA dan D1. RLS Kabupaten Demak tahun 2023 berada di angka 8,27 tahun atau meningkat 0,17 persen dari tahun sebelumnya, artinya rata-rata penduduk Demak usia di atas 25 tahun berhenti bersekolah formal di pertengahan kelas 8, atau kelas 2 SMP sederajat.

Secara umum juga terjadi peningkatan kualitas pendidikan penduduk khususnya penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang memiliki pendidikan hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Sebanyak 6,94 persen penduduk telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi di mana angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2007 yang sebesar 2,58 persen. Selain itu juga perhatian terhadap pendidikan anak usia dini terus ditingkatkan dengan adanya partisipasi sekolah penduduk usia 5-6 tahun meningkat hingga 86,42 persen di tahun 2023.

Literasi pendidikan merujuk pada kemampuan individu dalam memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan berinteraksi dengan berbagai bentuk informasi yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam lingkungan pendidikan. Sedangkan numerasi adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan konsep serta keterampilan matematika dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan lebih dari sekadar kemampuan dasar untuk menghitung. Pengembangan literasi maupun numerasi pendidikan yang kuat sangat penting untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan dunia modern dan berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Pencapaian literasi maupun numerasi di Kabupaten Demak sudah cukup baik dan meningkat signifikan di mana capaian pada tahun 2023 pada literasi membaca SD/Sederajat mencapai 85,53; literasi membaca jenjang SMP/ sederajat sebesar 78,62; numerasi SD/ sederajat sebesar 78,83; dan numerasi SMP/ sederajat sebesar 74,42. Adapun peningkatan pada tingkat pemanfaatan perpustakaan di mana pada tahun 2022 sebesar 0,12 persen menjadi 0,63 persen pada tahun 2023.

Gambar II.50

**Perkembangan Literasi dan Numerasi Pendidikan
Kabupaten Demak Tahun 2022-2023 (%)**





Sumber: Dindikbud Kab. Demak, Dinperpusar Kab. Demak

Catatan: assesment literasi dan numerasi baru dilaksanakan mulai tahun 2022

Sebagai pendukung pendidikan, ketersediaan infrastruktur pendidikan memegang peranan strategis. Infrastruktur di bidang pendidikan di Kabupaten Demak sepanjang tahun 2018-2023 dengan indikator jumlah sekolah mengalami fluktuasi. Jumlah guru dan jumlah murid di Kabupaten Demak pada tahun 2018-2023 juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini didukung oleh upaya peningkatan pemerataan pembangunan pendidikan dari segi fisik untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Tabel II.13

**Kondisi Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Demak
Tahun 2018-2023**

Indikator		2018	2019	2020	2021	2022	2023
SD/ Sederajat	Jumlah Sekolah	626	623	625	629	628	631
	Jumlah Guru	7.163	6.432	6.809	6.378	6.455	6.408
	Jumlah Murid	118.090	118.818	119.084	117.799	120.043	120.710
SMP/ Sederajat	Jumlah Sekolah	217	219	216	215	219	219
	Jumlah Guru	4.415	3.822	4.313	4.122	4.182	4.185
	Jumlah Murid	54.855	53.782	56.318	55.447	54.863	55.331
SMA/ Sederajat	Jumlah Sekolah	170	170	168	166	169	170
	Jumlah Guru	2.949	2.969	3.401	3.308	3.545	3.485
	Jumlah Murid	46.317	45.504	46.389	48.059	47.716	48.321

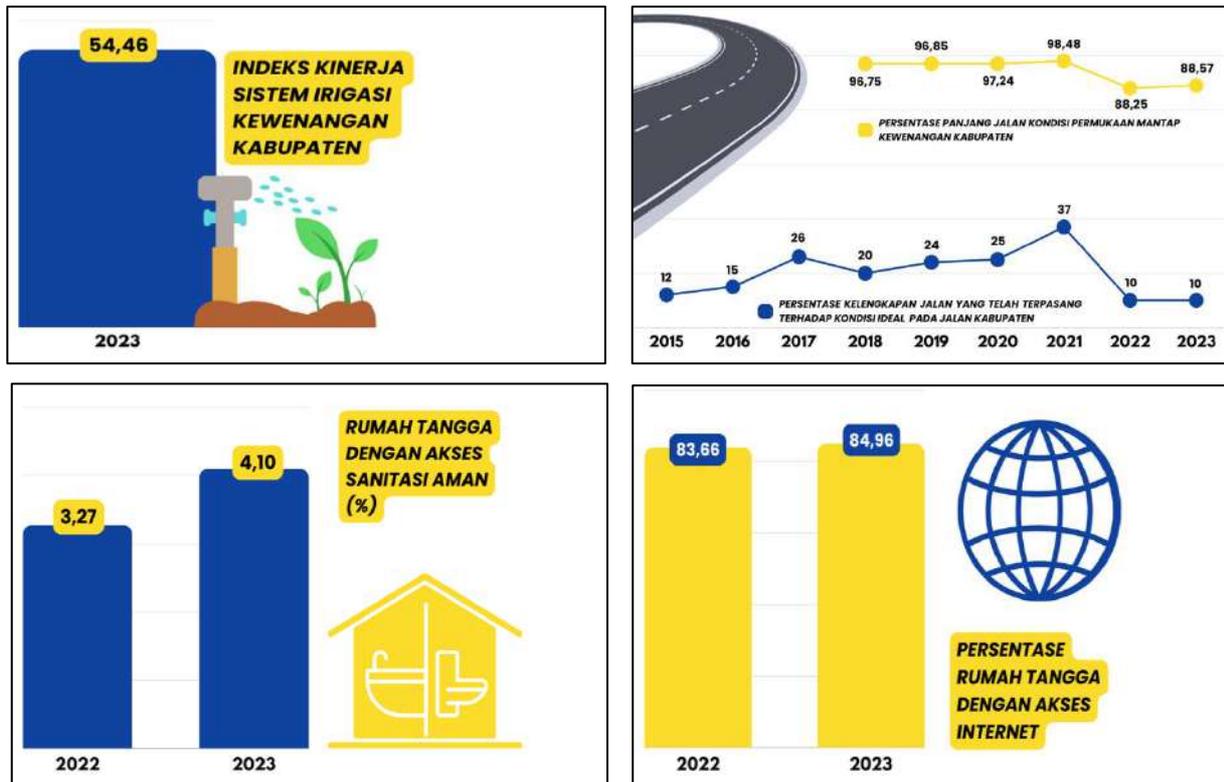
Sumber: BPS Kab. Demak Dalam Angka

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan semua fasilitas berbentuk fisik maupun non fisik yang dibangun guna mendukung kegiatan masyarakat. Infrastruktur berkaitan dengan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras maupun perangkat lunak. Pembangunan infrastruktur diperlukan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan struktur dasar agar pembangunan daerah tercapai.

Salah satu sarana prasarana yang penting untuk kehidupan masyarakat adalah pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang maju dan tangguh.

Gambar II.51
Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum serta Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Demak



Sumber: Dinputaru Kab. Demak, BPS Kab. Demak

Pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, dilakukan penghitungan kembali luas kawasan kumuh di Kabupaten Demak di tahun 2020. Pada tahun 2021 ditetapkan SK Bupati Nomor 475.26/120 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Demak. Berdasarkan SK tersebut ditetapkan 16 kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luas total 211,602 ha. Luasan tersebut terbagi menjadi tiga kategori penanganannya, yaitu:

- Luasan kumuh <10 ha seluas 6,380 ha merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
- Luasan kumuh 10-15 ha seluas 62,333 ha merupakan kewenangan pemerintah provinsi; dan
- Luasan kumuh >15 ha seluas 142,889 ha merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Tabel II.14
Capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Demak Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luas kawasan kumuh yang	ha	316,04	171,09	116,39	211,60	174,12	159,51

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
belum tertangani							
Persentase penurunan kawasan kumuh	%	11,96	45,86	45,86	-181,70	17,71	24,62
Jumlah RTLH yang tertangani	Unit	1.519	2.145	2.567	1.739	4.179	2.449
Persentase kawasan permukiman layak huni	%	73,23	74,00	74,97	79,00	99,09	99,16
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	0	0	0	0	0	0
Akses Air Minum Layak	%	69,35	76,04	80,08	82,98	85,58	87,64

Sumber: Dinperkim Kab. Demak, Dinputaru Kab. Demak

Rumah tangga dengan akses hunian layak merupakan indikator untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan yang dilihat dari kriteria ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak. Realisasi rumah tangga dengan akses hunian layak hanya tersedia di tahun 2021-2023. Data di tahun 2021 sebesar 75,90 turun menjadi 70,94 di tahun 2022, kemudian meningkat kembali di tahun 2023 sebesar 71,88 yang menandakan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan rumah tangga dari sektor perumahan di Kabupaten Demak.

Gambar II.52
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Demak Tahun 2021-2023



Sumber: Dinperkim Kab. Demak

Kabupaten Demak memiliki dua terminal yaitu Terminal Bintoro dan Pucanggading yang dijadikan dasar perhitungan jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Data statistik menunjukkan adanya penurunan jumlah penumpang bus dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 jumlah penumpang sebanyak 362.593 jiwa, angka ini terus menurun hingga tahun 2022, yaitu mencapai 47.342 jiwa. Tahun 2023, jumlah penumpang mulai menunjukkan peningkatan sebesar 1,46% menjadi 48.033 jiwa.

Penurunan penumpang dikarenakan kecenderungan masyarakat beralih menggunakan jasa rental kendaraan pribadi roda empat dan roda dua serta menggunakan jasa *on-line*. Melihat data arus penumpang di Kabupaten Demak dengan kecenderungan menurun, diduga saat ini bus dan angkutan umum bukanlah sebuah moda yang menarik, dikarenakan usia moda transportasi layanan umum tersebut sudah tua (lebih 20 tahun) dan waktu tunggu penumpang yang terlalu lama di terminal. Serta mudahnya masyarakat mengajukan kredit dan program pemerintah berupa kendaraan sehingga membuat minat masyarakat untuk membeli mobil atau kendaraan meningkat karena terjangkau. Berikut capaian urusan Perhubungan Kabupaten Demak:

Tabel II.15

Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Kinerja lalu lintas kabupaten	Angka	0,46	0,30	0,19	0,21	0,22
Jumlah penumpang bus (yang masuk terminal Bintoro)	Jiwa	187.903	47.587	33.291	32.700	33.139
Jumlah penumpang bus (yang masuk terminal Pucang gading)	Jiwa	90.160	17.253	15.528	14.642	14.894
Jumlah penumpang	Jiwa	278.063	64.840	48.819	47.342	48.033

Sumber: Dinhub Kab. Demak

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Pemerintah Kabupaten Demak terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bersahabat dengan mengurangi hambatan-hambatan yang dapat menurunkan performa investasi, seperti mempermudah birokrasi dan adanya regulasi yang jelas. Penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan investor. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama dapat memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Ketahanan ekonomi dapat membantu meningkatkan PMTB dengan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat menarik investor untuk melakukan investasi di wilayah tersebut. Ketahanan sosial dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap keamanan dan stabilitas wilayah, yang dapat memberikan kepastian bagi investor dalam melakukan investasi. Sementara itu, ketahanan budaya dapat membantu meningkatkan daya tarik wilayah sebagai tujuan wisata atau sebagai tempat berinvestasi yang menarik bagi perusahaan yang ingin memasarkan produk atau layanannya kepada masyarakat lokal.

1. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Kondusivitas wilayah diperlukan untuk menjamin ketenteraman masyarakat dan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Demak. Penanganan kasus kriminalitas menjadi prasyarat terciptanya suasana yang kondusif, di samping juga penyelesaian potensi konflik dalam masyarakat. Satpol PP bertugas menciptakan kondusivitas wilayah bekerja sama dan berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam melaksanakan penegakkan Perda dan Perkada. Diketahui bahwa jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan pada tahun 2023 terproyeksi sebanyak 687 kasus dan terselesaikan sebanyak 953 kasus. Jumlah tersebut meningkat dari jumlah kasus dari tahun sebelumnya yaitu 733 kasus. Sementara tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketenteraman, ketertiban dan keindahan) sebanyak 704 kasus yang dilaporkan dan seluruhnya terselesaikan. Adapun anggota Satlinmas yang telah terbentuk dan terbina sampai tahun 2023 sebesar 105,88 persen.

Sebanyak 24 kejadian kebakaran juga dilaporkan pada tahun 2023, saat ini pelayanan masyarakat terhadap pemadaman kebakaran di Wilayah Kabupaten Demak kurang maksimal, kurangnya armada mobil kebakaran dan suplai air yang dimiliki saat ini menjadi salah satu penyebab kejadian kebakaran belum tertangani secara maksimal. Berikut gambaran ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Demak sudah sangat baik. Tercermin dari tidak adanya kasus konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) yang terjadi di Kabupaten Demak dari tahun 2018-2023.

Tabel II.16

Indikator Urusan Ketenteraman dan Ketertiban di Kabupaten Demak Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100	100
Persentase kejadian gangguan trantibun	%	96,36	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
linmas yang diselesaikan							
Cakupan petugas Linmas	%	111,18	110,40	110,40	115,25	105,88	105,88
Jumlah kejadian konflik SARA	Jumlah Konflik	0	0	0	0	0	0

Sumber: Satpol PP Kab. Demak

2. Jumlah Investor dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Berdasarkan data DPM PTSP, jumlah investor PMDN dan PMA selama kurun waktu enam tahun (2018-2023) mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat. Total jumlah investor pada tahun 2018 sebanyak 125 investor, menjadi 1.676 investor di tahun 2023. Meningkatnya jumlah investor pada tahun 2018 hingga 2023 dikarenakan antara lain adanya kemudahan pelayanan perizinan yang semakin baik dengan perizinan online. Semakin meningkatnya investor PMDN dan PMA diharapkan mampu memberi stimulus dan mendukung perekonomian di Kabupaten Demak, seperti pembukaan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan SDM dan juga teknologi. Meskipun pada tahun 2023 jumlah investor mengalami penurunan, hal ini diakibatkan adanya kekhawatiran calon investor terhadap kondisi Kabupaten Demak khususnya pada kawasan industri yang terdampak rob, begitu pun dengan jumlah UMK yang lebih tinggi dari kabupaten sekitar menjadi penyebab para investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Demak. Berikut secara lengkap capaian kinerja penanaman modal Kabupaten Demak tahun 2023.

Tabel II.17

Capaian Kinerja Pada Urusan Penanaman Modal Kabupaten Demak Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan penanaman modal	Angka	83,87	95,76	85,00	87,86	88,28	90,52
Rata-rata lama pengurusan perizinan berusaha	Hari	5	5	3	3	3	3
Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	Proyek	441	224	419	573	519	1.676
Nilai investasi PMDN	Miliar	980	12.673	4.711	5.384	2.495	2.315
Nilai investasi PMA	Miliar	300	331	1.069	89	602	1.197
Nilai total investasi PMA dan PMDN	Miliar	1.280	13.004	5.780	5.472	3.098	3.512

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase peningkatan investasi	%	-6,13	915,46	-55,55	-5,32	-43,40	13,38
Tingkat Pertumbuhan PMTB	%	5,53	5,54	9,77	3,98	2,65	7,90

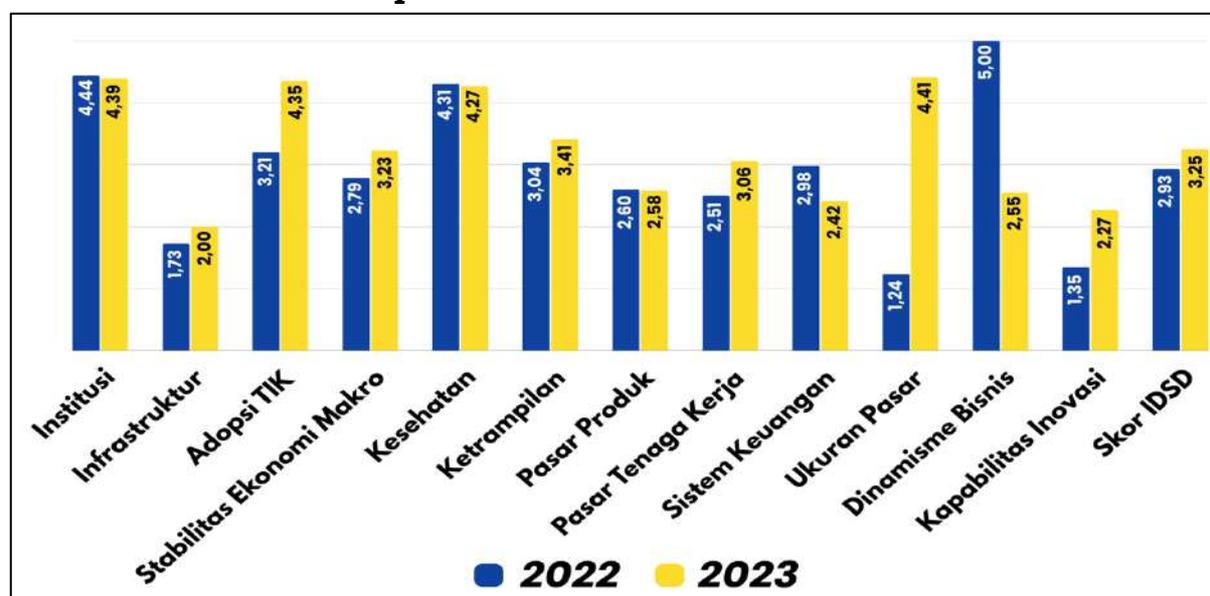
Sumber: DPM PTSP Kab. Demak

3. Indeks Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

IDSD Kabupaten Demak pada tahun 2022 memiliki capaian 2,93 meningkat menjadi 3,25 pada tahun 2023 dengan capaian tertinggi berada di pilar ukuran pasar yang mencapai indeks 4,41; pilar institusi (kapasitas institusi) dengan capaian indeks sebesar 4,39 dan pilar adopsi TIK dengan capaian indeks sebesar 4,35. Adapun capaian pilar yang rendah berada pada pilar infrastruktur dengan capaian indeks sebesar 2,00 dan pilar kapabilitas inovasi dengan indeks sebesar 2,27.

Gambar II.53
Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya
Kabupaten Demak Tahun 2022-2023



Sumber: BRIN, 2024

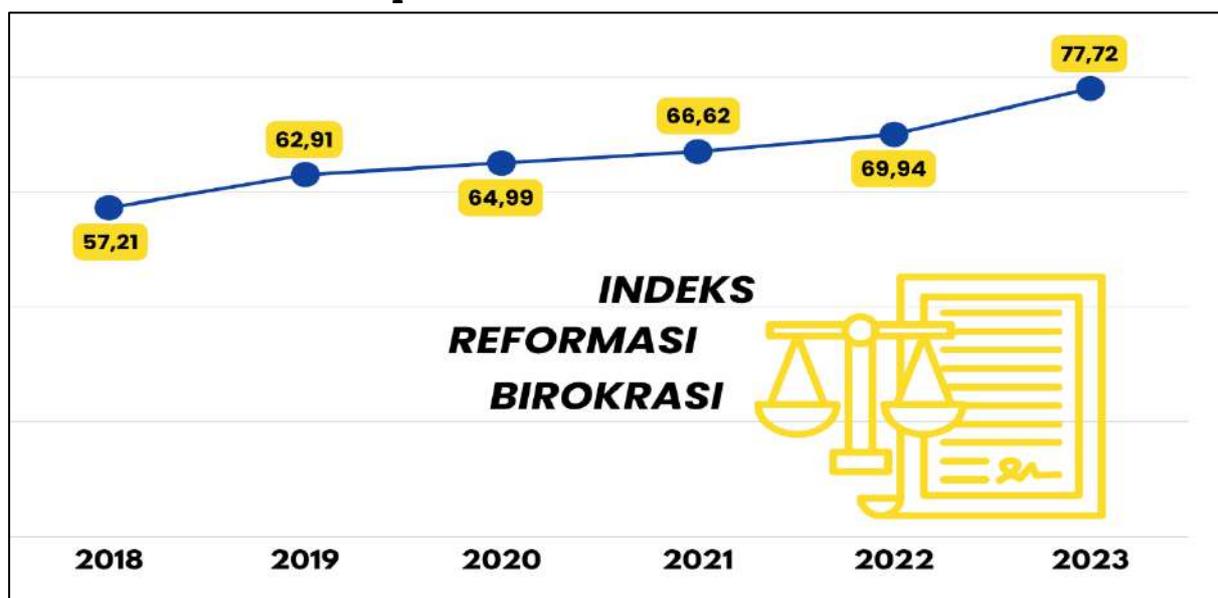
2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum akan menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab

Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan indikator yang merepresentasikan pelaksanaan atau implementasi reformasi birokrasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Demak berusaha untuk meningkatkan kinerjanya baik dari sisi manajemen ASN, tata kelola kinerja administrasi hingga pelayanan publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Adapun pencapaian IRB di Kabupaten Demak mengalami peningkatan di setiap tahunnya di mana pada tahun 2023 meningkat cukup signifikan hingga mencapai 77,72 jauh dibandingkan capaian tahun 2018 yang mencapai 57,21. Peningkatan tajam pada rentang tahun 2022 menuju 2023 diakibatkan oleh perubahan perhitungan pada tahun 2023.

Gambar II.54
Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Demak Tahun 2019-2023



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, 2024

Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Demak ini menunjukkan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di setiap tahunnya. Salah satu poin penting dalam pemerintahan daerah adalah pelaksanaan pembangunan yang akuntabel dengan penilaian SAKIP sebagai indikator yang menunjukkan pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Adapun pencapaian SAKIP di Kabupaten Demak mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga mencapai 69,08 pada tahun 2023, meningkat jika dibandingkan capaian 2019 sebesar 63,11.

Penggambaran keuangan daerah dapat dilihat dari Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesenambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk

melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Kabupaten Demak pada tahun 2021 memiliki DOFD sebesar 17,75 persen dan meningkat di tahun 2022 dan 2023 dengan capaian masing-masing sebesar 19,82 persen dan 21,02 persen. Penggunaan keuangan daerah pun juga memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian pada delapan tahun terakhir.

Indikator lain yang memperlihatkan tata kelola keuangan daerah adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Pencapaian IPKD di Kabupaten Demak juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir di mana pada tahun 2019 memiliki capaian 59,9596 dan meningkat di tahun 2023 mencapai 76,8070.

Tabel II.18

Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi

Pemerintahan Kabupaten Demak Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai SAKIP Daerah	-	60,50	63,11	64,95	66,4	68,96	69,08
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Derajat Otonomi Fiskal	Angka	15,97	17,25	18,84	18,81	19,86	21,02
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	angka	n/a	59,9596	67,8421	69,8288	71,6441	76,8070
Indeks Profesionalitas ASN	Angka	n/a	n/a	n/a	80,00	75,00	90,17
Indeks Sistem Merit	Angka	n/a	0,645	0,664	0,675	276	282
Indeks Persepsi Korupsi	Angka	n/a	3,9	3,916	3,256	3,728	2,88
Level Maturitas SPIP	Angka	3,000	3,075	3,075	2,950	3,043	3,014
Indeks Pelayanan Publik	Angka	n/a	n/a	n/a	3,79	3,99	4,26

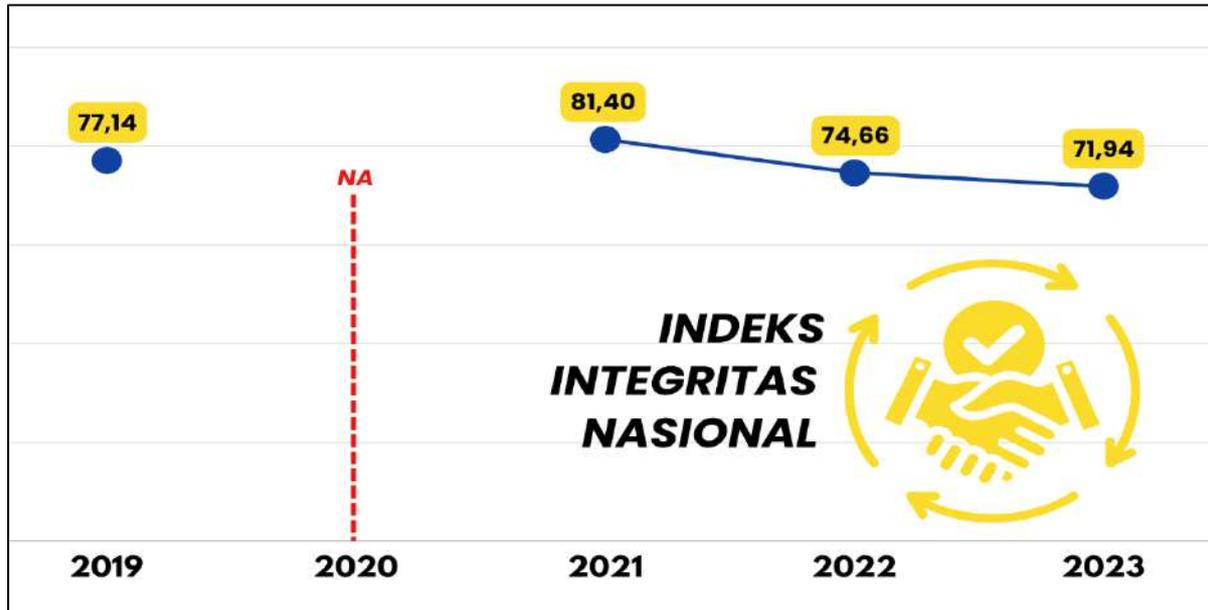
Sumber: Bappelitbangda Kab. Demak, Setda Kab. Demak, BPKPAD Kab. Demak, BKPP Kab. Demak, Inspektorat Daerah Kab. Demak

Dalam rangka mewujudkan percepatan reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang kepegawaian sebagai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, memiliki sasaran yaitu terwujudnya penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit adalah kebijakan dalam manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja secara adil dan wajar. Secara umum sistem merit di Kabupaten Demak mengalami kenaikan. Adapun setelah mengalami perubahan metodologi, capaian Indeks Sistem Merit di Kabupaten Demak mencapai 282 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang memiliki nilai sebesar 276. Selain itu, terdapat indikator Indeks Profesionalitas ASN yang mengalami kenaikan hingga mencapai 90,17 pada tahun 2023.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan survei eksternal kepada masyarakat terhadap persepsi korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Nilai IPK menjadi komponen pembentuk Indeks Reformasi Birokrasi yang diukur dari Indeks Integritas Pemerintah Daerah. Realisasi Indeks Integritas Kabupaten Demak tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan

pencapaian tahun 2021 dari 81,40 menjadi 74,66 dengan nilai rata-rata nasional 72. Penurunan kembali terjadi di tahun 2023 dengan capaian Indeks Integritas Kabupaten Demak menjadi 71,94.

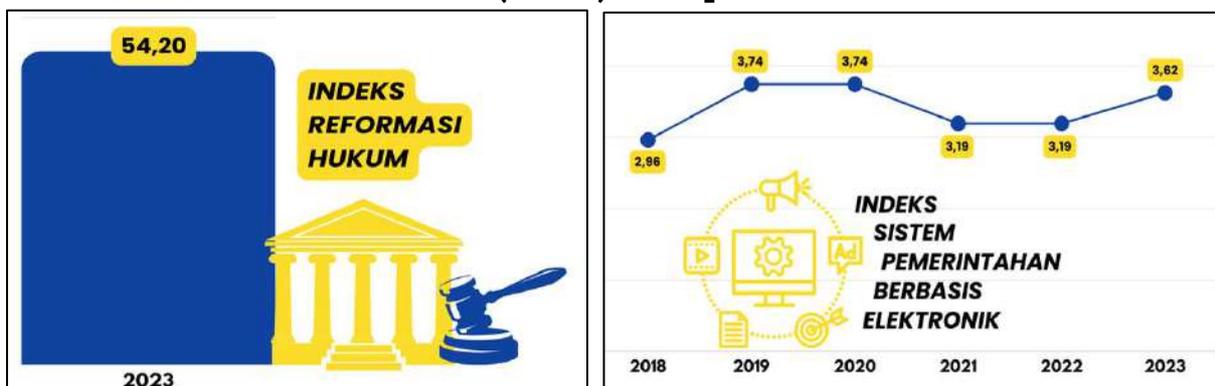
Gambar II.55
Indeks Integritas Nasional
Kabupaten Demak Tahun 2019-2023



Sumber: Inspektorat Kab. Demak

Pembangunan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan lebih adil. Proses ini mencakup berbagai aspek, termasuk pembaruan undang-undang, peningkatan akses terhadap keadilan, serta peningkatan kualitas penegakan hukum dan peradilan. Pembangunan hukum di Kabupaten Demak juga diupayakan peningkatannya di mana pada tahun 2023 memiliki capaian Indeks Reformasi Hukum sebesar 54,20.

Gambar II.56
Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Demak



Sumber: Setda Kab. Demak, Kominfo Kab. Demak

Pelayanan umum yang dikelola oleh pemerintah dapat diintegrasikan ke dalam platform *e-Government* yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara *online* untuk dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterjangkauan layanan. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu metrik yang mengukur tingkat

kesiapan dan kinerja pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Capaian Indeks SPBE Kabupaten Demak pun juga mengalami peningkatan di mana capaian pada tahun 2022 sebesar 3,19 meningkat menjadi 3,62 pada tahun 2023.

2.5 EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN DEMAK TAHUN 2006-2025

Pemerintah Kabupaten Demak melaksanakan evaluasi pembangunan jangka panjang sebagai upaya peningkatan pelaksanaan pembangunan ke depan yang maju dan berkelanjutan. Evaluasi dilaksanakan di seluruh periode pembangunan di mana pada tahap terakhir dilakukan evaluasi hingga tahun 2022. Adapun dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang tersebut, Kabupaten Demak memiliki visi RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK YANG SEJAHTERA, SEHAT DAN CERDAS DALAM LINGKUNGAN YANG AGAMIS DAN DEMOKRATIS”**. Sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Demak dengan rincian sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
- Misi 2 : Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- Misi 3 : Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan.
- Misi 4 : Mewujudkan kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan yang agamis dan demokratis.
- Misi 5 : Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintah yang baik.

Dokumen RPJPD Tahun 2006-2025 Kabupaten Demak masih bersifat kualitatif, sehingga untuk mengetahui kondisi ketercapaian pembangunan digunakan pendekatan kondisi indikator makro. Kondisi capaian kinerja indikator makro Kabupaten Demak tahun 2005, sebagai awal periode RPJPD, sampai dengan kondisi saat ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.19
Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan
Kabupaten Demak Tahun 2006-2022

No	Indikator Makro	Capaian Kinerja pada Awal Tahun Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan (2022)	Pertambahan/ Penurunan (%)	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,4	73,36	11,12	Terdapat kenaikan pada tahun berjalan (2022) dibandingkan tahun awal perencanaan (2005).

No	Indikator Makro	Capaian Kinerja pada Awal Tahun Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan (2022)	Pertambahan/ Penurunan (%)	Keterangan
2	Angka Kemiskinan	23,6	12,09	-48,77	Terdapat penurunan pada tahun berjalan (2022) dibandingkan tahun awal perencanaan (2005).
3	Angka Pengangguran	6,30	6,11	-3,02	Terdapat penurunan pada tahun berjalan (2022) dibandingkan tahun awal perencanaan (2005).
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,86	5,25	27,43	Terdapat kenaikan pada tahun berjalan (2022) dibandingkan tahun awal perencanaan (2005).
5	Pendapatan per Kapita (Rp)	N/A	N/A	N/A	*data tahun 2005 dan 2022 tidak tersedia
6	Ketimpangan Pendapatan	0,300	0,300	0,00	Terdapat kestabilan pada tahun berjalan (2022) dibandingkan tahun awal perencanaan (2005).
7	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	3,25	24,73	660,92	Terdapat kenaikan pada tahun berjalan (2022) dibandingkan tahun awal perencanaan (2005).

Sumber: Laporan Evaluasi RPJPD Kabupaten Demak, 2006-2025

Berdasarkan data tersebut, mayoritas capaian indikator makro menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan peningkatan dari nilai sebesar 69,4 di tahun 2005 menjadi 12,09 di tahun

2022. Tren positif juga ditunjukkan oleh indikator angka kemiskinan dan angka pengangguran. Angka kemiskinan Kabupaten Demak pada tahun 2005 sebesar 23,6 yang kemudian turun menjadi 12,09 di tahun 2022. Sementara itu, angka pengangguran turun dari angka 6,30 di tahun 2005 menjadi 6,11 di tahun 2022. Kenaikan juga terjadi pada indikator PDRB per kapita. PDRB per kapita juga meningkat dari 3,25 Juta Rupiah di tahun 2005 menjadi 24,73 Juta Rupiah di tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan kenaikan jika dibandingkan kondisi tahun 2005 dengan tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak pada tahun 2005 mencapai 3,86 persen dan pada tahun 2022 naik menjadi 5,25 persen. Sementara itu, untuk indikator Ketimpangan pendapatan tidak mengalami perubahan di tahun awal 2005 hingga tahun 2022 yaitu menunjukkan angka stabil sebesar 0,300, sedangkan untuk indikator Pendapatan per Kapita tidak dapat dibandingkan karena tidak adanya data di tahun 2005 dan tahun 2022.

Selain evaluasi terhadap capaian makro, evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja sasaran pokok di setiap tahapan. Tahap pertama pada periode 2006-2011, tahap kedua pada periode 2011-2016, dan tahap ketiga pada periode 2016-2021 dan tahap keempat pada periode 2021-2026. Kriteria penilaian realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut.

Tabel II.20
Kriteria Penilaian Kinerja

No	Predikat Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
2	Tinggi	76% ≤ 90%
3	Sedang	66% ≤ 75%
4	Rendah	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	≤ 50%

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Hasil dari evaluasi penilaian kinerja pada tiap tahapan periode RPJMD menunjukkan mayoritas indikator memiliki predikat penilaian “Tinggi”. Indikator dengan predikat ini berada pada kisaran 85% dari total keseluruhan indikator di tiap periode RPJMD Kabupaten Demak.

Tabel II.21
Rekap Tingkat Capaian Kinerja RPJMD pada Capaian Indikator Misi
RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2005-2025

PERIODE	2006-2011	2011-2016	2016-2021	2021-2026
MISI KE-1	71,83	95,16	93,27	73,44
MISI KE-2	100	76,65	100	80,91
MISI KE-3	68,98	100	97,05	97,23
MISI KE-4	99,22	98,15	99,03	98,8
MISI KE-5	59,23	77,48	100	99,27
RATA-RATA	79,60%	90,97%	97,58%	85,00%

Sumber: Laporan Evaluasi RPJPD Kabupaten Demak, 2006-2025

Jika dirata-rata, tingkat capaian kinerja RPJMD akan menghasilkan persentase sebagai berikut. Untuk periode I, rata-rata capaian kinerja indikator berada pada angka 79,60% di mana masuk predikat TINGGI. Sementara itu, untuk periode II, rata-rata nilainya sebesar 90,97% yang masuk predikat SANGAT TINGGI. Dan juga periode III masuk predikat TINGGI dengan nilai rata-rata sebesar 97,58%. Dan di periode IV rata-rata-rata nilainya sebesar 85,00% yang masuk pada predikat TINGGI.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan Pembangunan RPJPD Kabupaten Demak berdasarkan tiap sasaran pokok ialah sebagai berikut:

a. Sasaran Pokok 1 "Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi"

Dalam pelaksanaan Pembangunan RPJPD periode sebelumnya, dari hasil evaluasi terdapat beberapa faktor pendorong, di antaranya:

1. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengupayakan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat (melalui program bantuan sosial dan bantalan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah);
2. Terciptanya iklim investasi yang baik dengan dilakukannya deregulasi pemberian insentif dan kemudahan investasi;
3. Dominasi faktor pencaharian masyarakat Demak yang berasal dari sektor pertanian dan sektor kelautan perikanan yang menjadikan pendapatan masyarakat relatif merata;
4. Luasnya lahan pertanian di kabupaten Demak;
5. Sistem irigasi yang baik;
6. Penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang aktif;
7. Adanya sinergitas antara pemerintah kabupaten Demak dengan TNI/Polri;
8. Kondisi geografis kabupaten Demak relatif datar dan mudah diakses;
9. Globalisasi teknologi komunikasi yang mempermudah pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat di kabupaten Demak;

10. Kondisi geografis yang mempermudah akses jaringan telekomunikasi;

Adapun juga faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan RPJPD Kabupaten Demak, di antaranya:

1. Kondisi alam di pesisir pantura yang dampak atau imbas bencana rob menyebabkan perlambatan perekonomian dan munculnya kantong-kantong kemiskinan baru;
2. Hantaman pandemi Covid-19 yang berlangsung secara berturut-turut dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sehingga menyebabkan adanya pembatasan aktivitas ekonomi yang berdampak pada penurunan pendapatan;
3. Tingginya angka pengangguran;
4. Masih banyaknya pekerja musiman di sektor pertanian dan kelautan yang rentan terhadap dampak cuaca ekstrem yang berakibat tidak bisa memproduksi atau bekerja;
5. Masih banyaknya pekerja pabrik yang dirumahkan akibat dampak pandemi Covid-19;
6. Tingginya angkatan kerja yang tidak terserap di Kabupaten Demak;
7. Berkurangnya minat investor karena kawasan industri yang rawan banjir/rob;
8. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan per kapita kabupaten Demak mengalami kenaikan yang cukup baik sebesar 461% selama 20 tahun atau sebesar 23% per tahun, tetapi target pada RPJPD terlalu tinggi untuk dicapai dalam waktu 20 tahun;
9. Arah pengembangan Kabupaten Demak ke arah industri telah mengurangi porsi PDRB dari sektor pertanian, tetapi belum mampu mendorong sektor perdagangan untuk berkembang lebih cepat;
10. Kurangnya pendampingan oleh Pemda terkait pembangunan rumah layak huni (terutama kepada MBR), topografi di wilayah pesisir menyulitkan dalam penanganan;
11. Belum efektifnya satu data dalam pendataan RTLH;
12. Bertambahnya panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten (semula 426,51 km sampai dengan tahun 2021 menjadi 935,38 km pada tahun 2023);
13. Jalan kabupaten Sayung-Morodemak kondisi terendam banjir rob sepanjang 17 km;
14. Keterbatasan sumber air baku;

b. Sasaran Pokok 2 "Terwujudnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat"

Dalam pelaksanaan Pembangunan RPJPD periode sebelumnya, dari hasil evaluasi terdapat beberapa faktor pendorong, di antaranya:

1. Tersedianya sarana prasarana pelayanan kesehatan yang memadai;
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan yang efektif;

3. Keberhasilan program penurunan kematian bayi;
4. Pelayanan dan fasilitas kesehatan sudah merata;
5. Adanya inovasi dalam rangka penurunan AKB;
6. Jumlah paramedis yang semakin bertambah didukung dengan fasilitas pendidikan yang memadai;
7. Kualitas tenaga kesehatan yang berkompeten, SOP penanganan, dan adanya bantuan operasional kesehatan serta jaminan kesehatan bagi masyarakat;
8. Keterlibatan lintas sektor dalam mendukung program PHBS;
9. Dampak positif Covid-19 masyarakat lebih sadar dalam melakukan budaya hidup bersih dan sehat;

Adapun juga faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan RPJPD Kabupaten Demak, di antaranya:

1. Kondisi wanita usia subur yang anemia, kurang energi kalori, obesitas, mempunyai penyakit penyerta seperti *tuberculosis* dan lain-lain;
2. kemampuan ekonomi orang tua balita yang masih rendah, kebutuhan gizi balita belum terpenuhi secara lengkap, pola asuh;
3. Dalam 20 tahun, RS di Kabupaten Demak telah bertambah 2 unit. Namun, pembangunan Rumah Sakit membutuhkan anggaran yang tidak sedikit sehingga belum mampu memenuhi standar rasio RS;
4. kurangnya ketersediaan lahan milik pemerintah yang digunakan untuk pembangunan puskesmas;
5. bertambahnya jumlah penduduk per tahun;

c. Sasaran Pokok 3 "Terwujudnya Kualitas Pelayanan Pendidikan"

Dalam pelaksanaan Pembangunan RPJPD periode sebelumnya, dari hasil evaluasi terdapat beberapa faktor pendorong, di antaranya:

1. Tersedianya sarana prasarana pendidikan dan tenaga pendidikan;
2. Tersedianya sarana prasarana pendidikan dan tenaga pendidikan;
3. Kesadaran masyarakat, kemudahan akses pendidikan, adanya pendidikan kesetaraan;
4. Komitmen pemerintah dalam penanganan anak putus sekolah;
5. Komitmen pemerintah dalam pemenuhan standar pendidikan;
6. Pola pikir masyarakat terhadap dunia pendidikan semakin maju;

d. Sasaran Pokok 4 Terwujudnya Kehidupan Sosial Budaya dan Kemasyarakatan yang Agamis dan Demokratis"

Dalam pelaksanaan Pembangunan RPJPD periode sebelumnya, dari hasil evaluasi terdapat beberapa faktor pendorong, di antaranya:

1. Terbentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah bagi umat beragama dalam menyampaikan pendapat;
2. Penyelenggaraan rutin forum kerukunan umat beragama (FKUB);
3. Perkembangan teknologi, akses pendidikan dan kesehatan yang semakin baik;

4. Dukungan finansial pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan peserta keluarga berencana dengan metode kontrasepsi jangka Panjang;

Adapun juga faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan RPJPD Kabupaten Demak, di antaranya:

1. Masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap Perda/Perkada;
2. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundangan dan rendahnya kesadaran hukum oleh masyarakat;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang keluarga berencana dengan metode kontrasepsi jangka panjang;

e. Sasaran Pokok 5 "Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik"

Dalam pelaksanaan Pembangunan RPJPD periode sebelumnya, dari hasil evaluasi terdapat beberapa faktor pendorong, di antaranya:

1. Aturan hukum, penegakan hukum serta adanya kesadaran masyarakat menjunjung HAM;
2. Adanya kegiatan preventif berupa kegiatan pemantauan, penjagaan dan patroli di lokasi dan waktu rawan terjadinya kriminalitas serta sosialisasi kepada masyarakat untuk menggerakkan siskamling di lingkungannya.

Adapun juga faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan RPJPD Kabupaten Demak, di antaranya:

1. Baru terbentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) terpadu di tahun 2022 sehingga belum optimal beroperasi melayani masyarakat;
2. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
3. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan;
4. Belum sepenuhnya pelayanan publik mengikuti perkembangan teknologi;
5. Penyalahgunaan teknologi dalam;

Dari hasil analisis dan evaluasi kebijakan maupun capaian hasil pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Demak, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Sinkronisasi antara RPJPD Kabupaten Demak dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa Visi, Misi dan Sasaran Pokok telah sesuai;
2. Pencapaian indikator makro dari kondisi awal 2005 sampai dengan 2022 mengalami pertumbuhan yang positif. Indikator makro yang dimaksud adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita. Namun demikian, Ketimpangan Pendapatan tidak mengalami peningkatan atau tetap sebesar 0,300. Sedangkan indikator makro Pendapatan per kapita adanya diskontinuitas

- maka sudah tidak lagi menghitung Pendapatan Per Kapita. Sebagai ganti untuk memotret pendapatan penduduk menggunakan pendekatan PDRB Per Kapita;
3. Rata-rata kriteria penilaian evaluasi capaian pembangunan misi 1,2,3,4 dan 5 sebesar 85,00% dengan predikat kinerja “Tinggi”. Faktor-faktor yang mendorong sebagai berikut keberhasilan pemerintah dalam mengupayakan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Adanya keterpaduan dengan sektor lain dalam mendukung kinerja pemerintah dan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan program-program pembangunan;

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 dengan menganalisis faktor pendorong dan penghambat maka rekomendasi tindak lanjut ialah sebagai berikut :

1. Kajian kembali terhadap dokumen perencanaan dengan menjamin konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan;
2. Percepatan pengentasan kemiskinan;
3. Sinkronisasi program pembangunan kesehatan, pemenuhan kecukupan gizi dan kalori serta penanggulangan kemiskinan.
4. Untuk Fasilitas Kesehatan yang perlu ditingkatkan antara lain penguatan Puskesmas dan jaringannya, penguatan manajemen program dan sistem rujukannya. meningkatkan peran serta masyarakat;
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan;
6. Peningkatan upaya promotif PHBS;
7. Penyediaan sarana baca tulis baik konvensional maupun berbasis gadget untuk memudahkan akses serta komitmen Pemerintah Daerah;
8. Upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
9. Penegakan hukum bagi setiap pelanggar hukum dan pemberian pemahaman hukum masyarakat.

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut, yang biasanya timbul karena peristiwa kelahiran, kematian dan migrasi (gerak teritorial) dan mobilitas status. Dalam analisisnya, demografi mengedepankan analisis deskriptif dan komparatif berkesinambungan terhadap tren yang ada, pada setiap proses yang terjadi dan hasil yang ditimbulkan, dengan tujuan utama untuk mengembangkan bagian dari teori untuk menjelaskan peristiwa yang dibandingkan dan direncanakannya.

2.6.1 Proyeksi Demografi

Pada konteks pembangunan suatu wilayah, demografi dan perencanaan pembangunan daerah memiliki keterkaitan yang mendasar. Poin penting terkait hubungan demografi dan perencanaan pembangunan diarahkan pada pemenuhan infrastruktur dasar, khususnya pelayanan, kebijakan sosial ekonomi hingga ketenagakerjaan. Dengan memahami struktur demografi, pemerintah daerah dapat menilai sektor mana yang memerlukan perhatian lebih secara spasial maupun perencanaan ke depan, misalnya pendidikan untuk populasi muda, layanan kesehatan untuk populasi tua, atau peluang kerja bagi angkatan kerja muda.

Pada pembangunan infrastruktur, kondisi demografi mempengaruhi perencanaan infrastruktur, seperti jaringan transportasi, perumahan, air minum, dan sanitasi. Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola migrasi akan memengaruhi bagaimana infrastruktur harus diperluas atau ditingkatkan. Oleh karena itu, analisis demografi sangat membantu dalam menentukan lokasi yang sesuai untuk infrastruktur baru dan menilai kapasitas yang diperlukan.

Dari sisi sosial ekonomi, kondisi demografi memiliki peran cukup tinggi dalam perencanaan keluarga dan kebijakan populasi yang memengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, struktur usia penduduk dapat memengaruhi perencanaan ekonomi. Populasi muda yang besar dapat diarahkan ke sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi, sedangkan populasi tua memerlukan pelayanan kesehatan dan sosial yang lebih besar. Data demografi juga membantu dalam merancang kebijakan sosial, seperti program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Informasi ini membantu pemerintah dalam menentukan siapa yang memerlukan dukungan paling besar.

Demografi memengaruhi pasokan tenaga kerja suatu wilayah, khususnya dalam peningkatan kompetensi angkatan kerja lokal. Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan bagaimana menciptakan peluang kerja untuk populasi yang bertambah. Dalam hal ini, perencanaan harus memerhatikan tingkat pendidikan, keterampilan, dan pelatihan juga harus disesuaikan dengan profil demografi untuk memastikan tenaga kerja yang produktif.

Tabel II.22

Proyeksi Penduduk Kabupaten Demak 2025-2045 (Ribu Jiwa)

Penduduk Tahun 2023*	Proyeksi Penduduk				
	2025	2030	2035	2040	2045
1.246,06	1.265,05	1.318,47	1.360,34	1.391,97	1.414,29

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Demak, diolah

*: Data Dindikcapil Kab. Demak

Penduduk Kabupaten Demak diproyeksikan mencapai 1.414,29 ribu jiwa pada tahun 2045. Angka ini meningkat kisaran 178,05 ribu jiwa dibandingkan jumlah penduduk saat ini. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun ini menjadi salah satu modal dasar bagi pembangunan

Kabupaten Demak jika dapat dikelola secara optimal dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusianya. Berbagai kebutuhan harus dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sehingga aksesibilitas akan menjadi bagian dari kemudahan masyarakat Kabupaten Demak dalam menyejahterakan kehidupannya.

Jika dilihat dari jenis kelaminnya, maka terlihat bahwa penduduk di Kabupaten Demak didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki pada awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang. Pada tahun 2023, rasio jenis kelaminnya diproyeksikan mencapai 101,85 dan terus menurun hingga tahun 2045 rasio jenis kelaminnya diproyeksikan mencapai 99,55 sehingga kondisi dominasi jenis kelamin penduduk berubah di tahun 2045. Angka ini mengindikasikan bahwa di antara 100 penduduk perempuan, terdapat 99-100 penduduk laki-laki. Berikut ini adalah proyeksi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Demak hingga tahun 2045.

Tabel II.23

Proyeksi Penduduk Kabupaten Demak 2025-2045 (Ribuan Jiwa)

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023*	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	630,02	637,95	663,49	682,67	696,43	705,55
Perempuan	616,04	627,10	654,98	677,67	695,54	708,73
Sex Ratio	102,27	101,73	101,30	100,74	100,13	99,55

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Demak, diolah

*: Data Dindikcapil Kab. Demak

Struktur umur penduduk menggambarkan distribusi usia penduduk dalam suatu wilayah atau negara pada suatu titik waktu tertentu. Informasi ini penting dalam demografi karena dapat memberikan wawasan tentang karakteristik dan dinamika populasi. Salah satu fenomena yang terlihat pada proyeksi penduduk di Kabupaten Demak adalah peningkatan penduduk usia tua yang pada momen tertentu akan menjadi *aging population*. Fenomena ini terlihat dari semakin melebarnya struktur umur pada piramida bagian atas yang mengindikasikan usia harapan hidup masyarakat semakin tinggi. Adapun penduduk usia muda juga semakin mengalami peningkatan meskipun secara komposisi mengalami penurunan.

Tabel II.24

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Demak (Ribuan Jiwa)

Parameter	Penduduk Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	1.240,51	1.265,05	1.318,47	1.360,34	1.391,97	1.414,28
Komposisi Umur (Ribuan Jiwa)						

0-14	293,63	294,57	291,57	280,00	268,24	260,25
15-64	862,87	875,40	902,19	922,25	934,67	935,68
65+	84,00	95,09	124,72	158,09	189,06	218,36
<i>Dependency Ratio</i> (%)	43,76	44,51	46,14	47,50	48,93	51,15

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Demak, diolah

Pada awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Demak (tahun 2025), angka ketergantungan terlihat cukup rendah di angka 44,51 yang mengindikasikan bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 44-45 penduduk usia non produktif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Demak berada pada jendela kesempatan bonus demografi. Optimalisasi berbagai program pembangunan yang tepat dalam menyongsong kondisi ini tentu menjadi solusi tepat dalam akselerasi pencapaian visi jangka panjang. Adapun jendela bonus demografi di Kabupaten Demak akan terus terlaksana hingga periode ketiga dan pada periode keempat, bonus demografi sudah tidak terjadi karena angka ketergantungan yang sudah lebih dari 50.

2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Sarana (infrastruktur) adalah komponen penting dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah, negara, atau proyek. Sarana mencakup berbagai elemen fisik yang diperlukan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia, termasuk transportasi, perumahan, air minum, sanitasi, listrik, komunikasi, dan sebagainya. Dalam perencanaan pembangunan, kebutuhan sarana perlu diperhitungkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Demak, termasuk sebagai hasil dari pembangunan yang dilaksanakan.

1. Listrik dan Energi

Infrastruktur energi mencakup pasokan listrik, sumber energi terbarukan, dan distribusi energi. Ini diperlukan untuk menjalankan rumah tangga, bisnis, dan industri.

Tabel II.25
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Demak

Uraian	Existing Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	1.246,06*	1.246,06 *	1.265,05	1.318,47	1.360,34	1.391,97	1.414,29
Proyeksi Kebutuhan Listrik Rumah Tangga (Juta VA)	N/A	558,23	569,27	593,31	612,15	626,39	636,43

Uraian	Existing Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Kebutuhan Listrik Sarana Lingkungan (Juta VA)	N/A	223,29	227,70	237,32	244,86	250,55	254,57
Proyek Kebutuhan Listrik (Juta VA)	N/A	781,52	796,98	830,64	857,01	876,94	891,00

Catatan: *Sumber data Dindikcapil Kab. Demak

Kebutuhan listrik berdasarkan SNI 03-1733-2004 yaitu daya listrik minimum berada di angka 450 VA per jiwa untuk setiap unit rumah tangga dan 40% dari total rumah tangga digunakan untuk kebutuhan sarana lingkungan. Pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan listrik sebesar 796,98 juta VA; 2030 sebesar 830,64 juta VA; 2035 sebesar 857,01 juta VA; 2040 sebesar 876,94 juta VA dan di tahun 2045 sebesar 891,00 juta VA.

2. Air Minum

Penyediaan air minum untuk masyarakat adalah salah satu aspek penting dalam tata kota dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Akses yang memadai dan aman terhadap pasokan air minum adalah hak dasar manusia dan merupakan komponen kunci dalam menciptakan kondisi hidup yang sehat dan berkualitas bagi penduduk.

Tabel II.26

Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Demak

Uraian	Existing Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	1.246,06 *	1.246,06*	1.265,05	1.318,47	1.360,34	1.391,97	1.414,29
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Juta Liter)	N/A	69.151,59	70.205,47	73.170,07	75.493,70	77.249,04	78.487,72

Catatan: *Sumber data Dindikcapil Kab. Demak

Berdasarkan SNI 7831:2012 tentang perencanaan sistem penyediaan air minum, kebutuhan air minum pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 70.205,47 juta liter dan terus meningkat sampai tahun 2045 sebesar 78.487,72 juta liter.

3. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Infrastruktur perumahan mencakup pembangunan hunian yang aman, sehat, dan terjangkau. Ini adalah aspek penting dalam memenuhi

kebutuhan dasar penduduk dan menciptakan komunitas yang berkelanjutan.

Tabel II.27

Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Demak

Uraian	Existing Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	1.246,06*	1.246,06*	1.265,05	1.318,47	1.360,34	1.391,97	1.414,29
Proyeksi Kebutuhan Rumah (Unit)	N/A	248.102	253.010	263.694	272.068	278.394	282.858

Catatan: *Sumber data Dindukcapil Kab. Demak

Jumlah penghuni rumah diasumsikan rata-rata lima jiwa per rumah. Pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan sebesar 253.010 unit, tahun 2030 sebesar 263.694 unit, tahun 2035 sebesar 272.068 unit, tahun 2040 sebesar 278.394 unit, dan di tahun 2045 sebesar 282.858 unit. Dalam penyediaan unit perumahan, juga perlu dilihat kualitasnya apakah memenuhi standar kelayakan atau tidak sehingga perlu adanya perhatian pada aspek perumahan dan permukiman ini, khususnya penyediaan sarana dan prasarana utilitas dasar.

4. Fasilitas Pendidikan

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan. Infrastruktur pendidikan mencakup sekolah, perguruan tinggi, dan pusat pelatihan. Tenaga kerja yang terdidik dan terlatih cenderung lebih produktif dan dapat mengakses pekerjaan yang lebih baik. Adapun infrastruktur pendidikan TK pada tahun 2045 akan diproyeksikan sebesar 571, infrastruktur SD/MI sebesar 296, infrastruktur SMP/MTs sebesar 124, dan infrastruktur SMA/MA/SMK sebesar 83.

Tabel II.28

Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Demak

Uraian	Existing Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	1.246,06*	1.246,06*	1.265,05	1.318,47	1.360,34	1.391,97	1.414,29
5-6 Tahun	42.174	42.174	40.321	38.792	36.647	35.021	34.288
7-12 Tahun	126.961	126.961	117.903	119.448	114.728	108.845	104.605
13-15 Tahun	59.520	59.520	56.814	59.348	59.639	57.052	54.072
16-18 Tahun	54.484	54.484	56.352	57.416	60.189	58.685	55.754
Proyeksi Fasilitas Pendidikan							
•TK	624	703	672	647	611	584	571
•SD/MI	631	333	328	338	334	314	296

Uraian	Existing Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
•SMP/MTs	219	128	130	145	146	132	124
•SMA/MA/SMK	170	85	83	85	89	87	83

Catatan: *Sumber data Dindikcapil Kab. Demak

5. Fasilitas Kesehatan

Infrastruktur kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan, penting untuk kesejahteraan masyarakat dan produktivitas tenaga kerja. Kesehatan yang baik mendukung tenaga kerja yang kuat. Pada tahun 2045 diproyeksikan tersedia 8 unit rumah sakit. Jumlah puskesmas *existing* sejumlah 27 unit sampai dengan tahun 2035. Pada proyeksi tahun 2040 dan tahun 2045 bertambah masing-masing satu unit. Sementara puskesmas pembantu bertambah setiap periode RPJMD sehingga pada tahun 2045 mencapai 74 unit.

Tabel II.29

Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Demak

Uraian	Existing Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	1.246,06*	1.246,06*	1.265,05	1.318,47	1.360,34	1.391,97	1.414,29
Proyeksi Fasilitas Kesehatan							
▪ Rumah Sakit	5	5	6	7	8	8	8
▪ Puskesmas	27	27	27	27	27	28	29
▪ Puskesmas Pembantu	45	45	46	55	61	67	74
•Praktik Dokter	160	248	253	264	272	278	283
•Apotek/Rumah Obat	160	160	163	170	175	180	182

Catatan: *Sumber data Dindikcapil Kab. Demak

6. Lingkungan Hidup

Infrastruktur lingkungan seperti pengelolaan limbah dan sampah, perlindungan lingkungan, dan sumber daya alam yang berkelanjutan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel II.30

Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Demak

Uraian	Existing Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.246,06*	1.246,06*	1.265,05	1.318,47	1.360,34	1.391,97	1.414,29
Proyeksi Timbulan	267.884,52	282.991,34	288.589,53	300.775,97	310.327,56	317.543,16	322.634,91

Sampah (Ton)							
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	0	3	3	6	9	12	14

Catatan: *Sumber data Dindukcapi Kab. Demak

Pada tahun 2023 belum terdapat TPST namun baru memiliki TPS3R yang berada di Desa Tempuran (Kec. Demak), Desa Bogosari dan Desa Wonorejo (Kec. Guntur), Desa Gajah dan Desa Wilalung (Kec. Gajah). Pada tahun 2045 diproyeksikan terdapat 14 TPST.

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

2.7.1 Kabupaten Demak sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional

Ditinjau dari segi dokumen perencanaan spasial (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak), Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Demak. Pusat pertumbuhan tersebut bersifat dedikatif, di mana direncanakan secara terstruktur ataupun berdasarkan penetapan kawasan strategis baik proyeksi dari program nasional, regional maupun dari sudut pandang Pemerintah Kabupaten Demak sendiri.

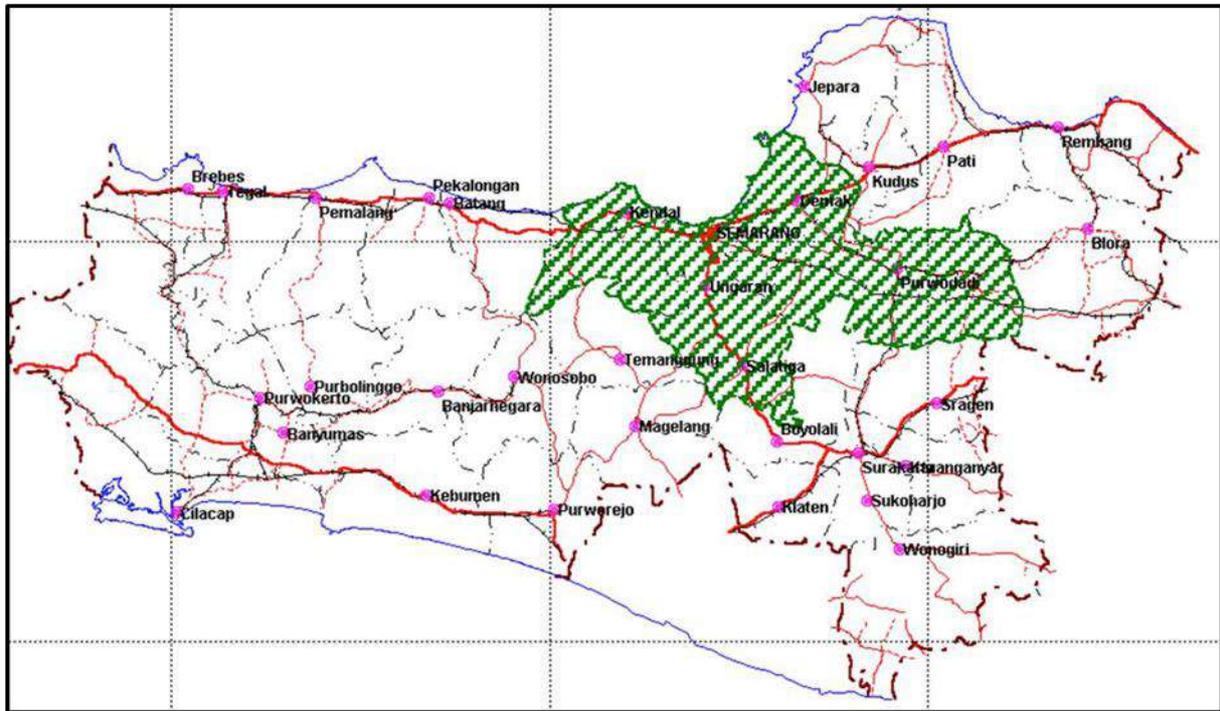
Dari sudut pandang RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2044 tentang, Kabupaten Demak memiliki kedudukan strategis secara nasional dan regional.

“PKN meliputi: Kawasan perkotaan Semarang – Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga Purwodadi (Kedungsepur)”.

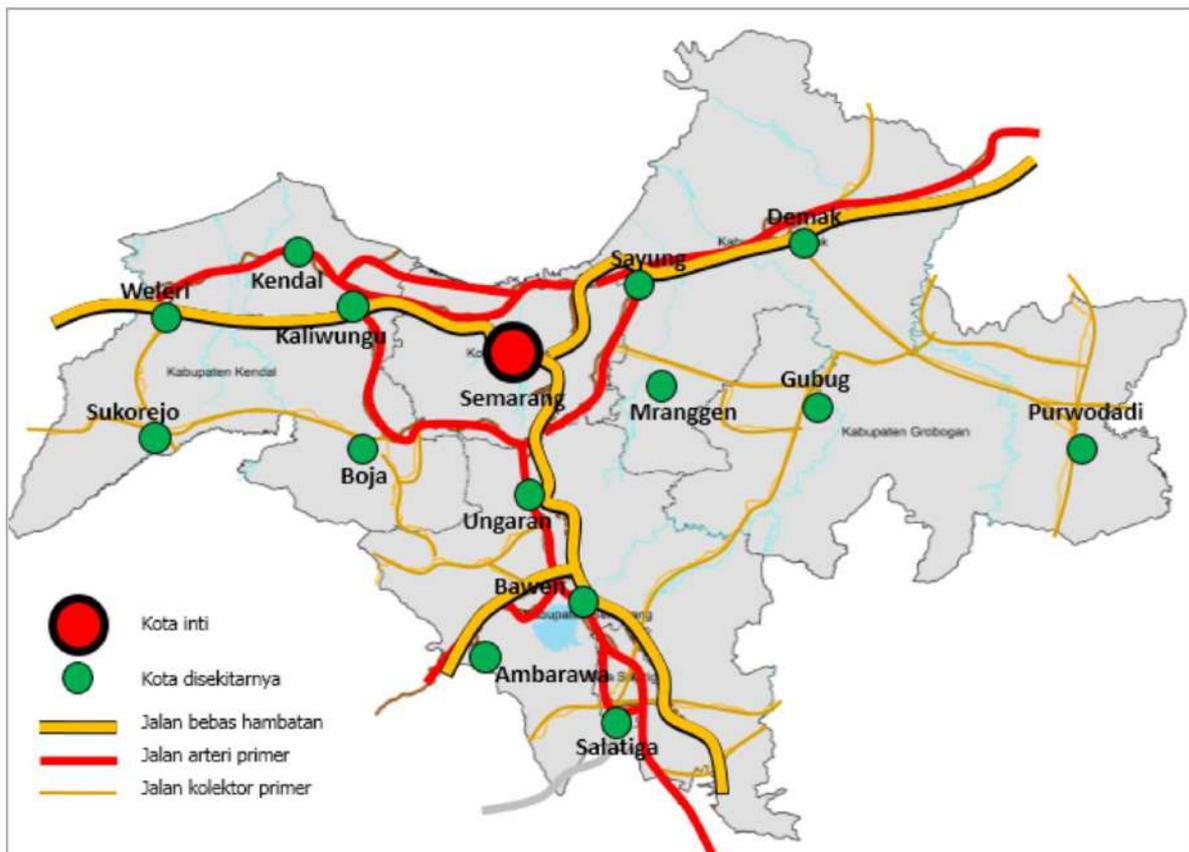
Dalam hierarki struktur Pusat-pusat kegiatan Kabupaten Demak sebagai PKN berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen. Dalam konteks Kedungsepur, Kabupaten Demak beserta kabupaten/kota lainnya, merupakan simpul dari interaksi keruangan yang tercipta dalam aglomerasi tersebut. Pergerakan manusia, barang, dan jasa yang merupakan salah satu bentuk interaksi yang juga dapat diketahui pola distribusi keruangan perkotaan antar wilayah juga terjadi di Kedungsepur.

Kota Semarang sebagai kota inti di Kedungsepur menjadi pusat tujuan Kabupaten – Kota di sekitarnya (*hinterland*) yaitu Kabupaten Kendal, **Kabupaten Demak**, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan untuk melakukan interaksi. Hal ini yang disebut juga sebagai daya tarik. Agregasi interaksi tersebutlah yang merupakan potensi daya saing regional Kedungsepur.

Gambar II.57
Deliniasi Kawasan Tertentu Kedungsepur (Bahan Tayang, Kerangka Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, KemenPUPR)



Gambar II.58
Cakupan 6 Kabupaten/Kota KSN Kedungsepur dan hierarki sistem pusat perkotaan (RKP Provinsi Jawa Tengah, 2019)

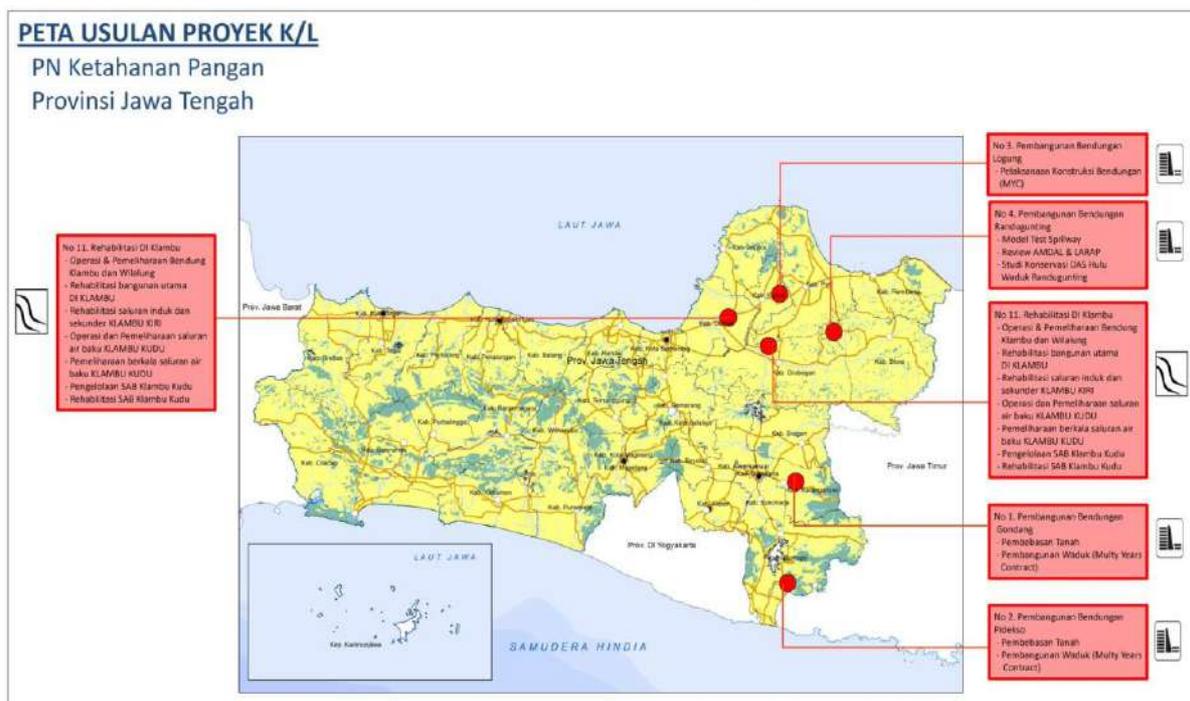


Dari segi transportasi kawasan Kedungsepur akan ditunjang oleh pengembangan jaringan transportasi berbasis Rel sehingga kawasan Kedungsepur dihubungkan oleh jaringan jalur kereta api regional meliputi :

- jalur Jogja – Solo – Semarang, jalur Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur), dan jalur Solo – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten (Subosukowonosraten);
- Rencana Reaktivasi Jalur KA meliputi jalur Purwokerto – Wonosobo, jalur Kalibodri - Kendal – Kaliwungu, jalur Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang – Tuban, jalur Demak – Blora, jalur Kudus – Bakalan, jalur Juwana – Tayu, jalur Rembang - Blora – Cepu, jalur Wirosari Kradenan, jalur Gambringan – Purwodadi, jalur Kedungjati – Tuntang – Ambarawa, jalur Ambarawa - Secang - Magelang - Yogyakarta, jalur Secang - Temanggung – Parakan, jalur Solo-Boyolali, jalur Mayong – Welahan, dan jalur Kutoarjo – Purworejo;

Gambar II.59

Peta Proyek Nasional Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Rehabilitasi di Klambu di Kabupaten Demak



Secara Regional, kawasan perkotaan yang tergabung dalam sirkuit Kedungsepur memiliki peran untuk menjadi simpul pusat pertumbuhan bagi wilayah-wilayah sekitarnya. Hal ini tertuang dalam kerangka arah kebijakan struktur ruang Kedungsepur :

1. Mengoptimalkan dan mengendalikan kawasan perkotaan inti Semarang dengan mendistribusikan peran dan fungsi ke kawasan perkotaan di sekitarnya
2. Menghubungkan pusat kegiatan regional dalam dan luar KDS dengan sistem jaringan jalan arteri primer dan bebas hambatan, jaringan jalur KA antar kota
3. Menghubungkan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya dalam lingkup Kawasan Perkotaan KDS dengan sistem

jaringan jalan kolektor primer dan jaringan jalur KA perkotaan yang dilayani oleh sistem angkutan massal

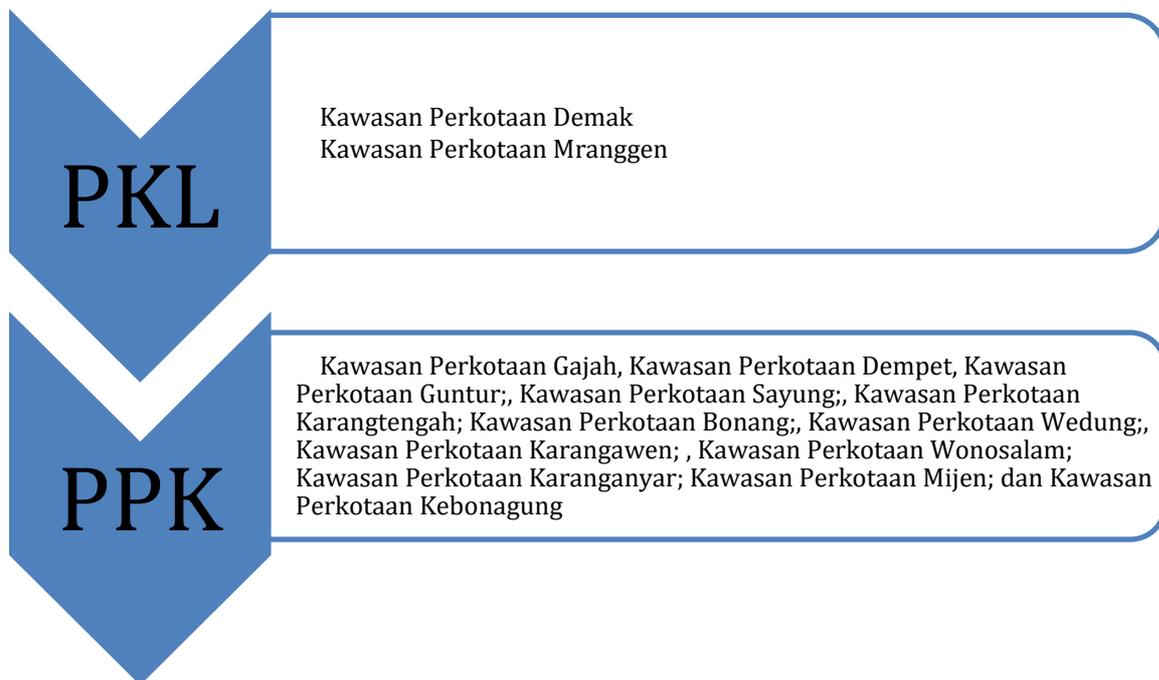
4. Mengembangkan sistem jaringan prasarana perkotaan yang bersifat regional kawasan dengan memperhatikan karakteristik fisik khususnya fisiografis kawasan, untuk SPAM regional dan TPA regional melalui wilayah pelayanan

Secara rinci, beberapa program pengembangan berkaitan dengan peranan Kabupaten Demak sebagai bagian dari KSN Kedungsepur terbagi ke dalam beberapa sektor antara lain :

1. Dalam sektor Pariwisata sebagai pusat pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata di Kawasan Perkotaan Demak
2. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan industri agro di Kawasan Perkotaan Sayung
3. Dalam sektor pertanian, pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Waduk Dolok; pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Waduk Jragung; pengembangan, peningkatan dan pemantapan sistem jaringan irigasi DI Klambu, DI Glapan, dan DI Sedadi; pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan irigasi DI Jragung
4. Sektor transportasi, pengembangan, peningkatan, dan pemantapan jalan bebas hambatan Semarang–Demak; pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Jalan By Pass Demak (Jalan Lingkar Demak)
5. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem pengendalian banjir dan rob Waduk Babon; pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem pengendalian banjir dan rob Waduk Jragung

Lebih lanjut, berdasarkan uraian RTRW Provinsi Jawa Tengah, Kawasan Perkotaan Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang – Purwodadi (Kedungsepur) merupakan salah satu Kawasan Strategis Prioritas Provinsi dengan sudut pandang kepentingan ekonomi.

Adapun KSP yang dimaksud meliputi KSP Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu KSP Industri Prioritas Provinsi berada di Kabupaten Rembang, **Kabupaten Demak**, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kebumen. KSP Industri Prioritas Provinsi bertujuan untuk mendorong pengembangan wilayah Provinsi dan mengurangi kesenjangan antar daerah Kabupaten/Kota.



Adapun pusat pertumbuhan lokal di Kabupaten Demak juga meliputi kawasan-kawasan yang diproyeksikan sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yang terletak di Kawasan Perkotaan Demak dan Kawasan Perkotaan Mranggen. Selain itu juga terdapat Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri atas Kawasan Perkotaan Gajah, Kawasan Perkotaan Dempet, Kawasan Perkotaan Guntur, Kawasan Perkotaan Sayung, Kawasan Perkotaan Karangtengah, Kawasan Perkotaan Bonang, Kawasan Perkotaan Wedung, Kawasan Perkotaan Karangawen, Kawasan Perkotaan Wonosalam, Kawasan Perkotaan Karanganyar, Kawasan Perkotaan Mijen, dan Kawasan Perkotaan Kebonagung.

2.7.2 Kawasan Strategis sebagai Pusat Pertumbuhan

Pengembangan pusat pertumbuhan di Kabupaten Demak juga distimulus melalui pengembangan Kawasan Strategis Nasional. Hal tersebut juga merupakan bagian integral dari identifikasi kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten Demak dan menjadi pusat pertumbuhan wilayah dari berbagai sudut pandang kepentingan khususnya kepentingan ekonomi.

Kawasan strategis wilayah terdiri atas:

- a. kawasan strategis nasional

Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi). Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang - Purwodadi (Kedungsepur). Hal ini perlu secara makro dipahami bahwa kawasan perkotaan Demak merupakan bagian integral dari KSN sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu KSN Kedungsepur.

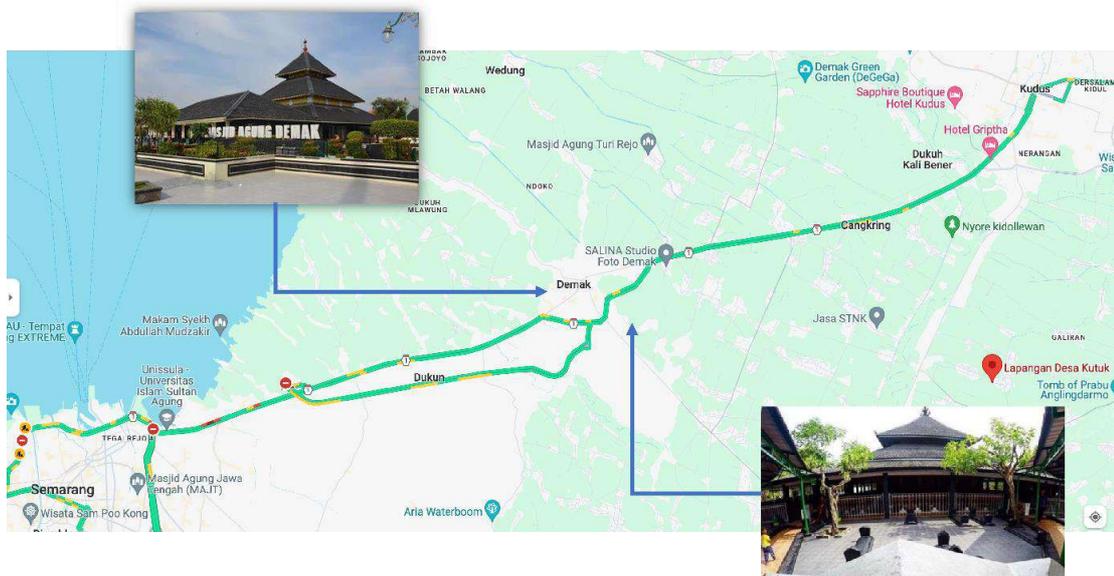
- b. kawasan strategis provinsi di Daerah;

kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Masjid Agung Demak memiliki daya tarik terhadap

wisatawan berupa nilai historis dan nilai spiritual. Nilai historis berhubungan dengan keberadaan Masjid Agung Demak sebagai bangunan masjid pertama di Jawa dan adanya benda-benda peninggalan sejarah pada masa Kerajaan Demak. Nilai religius berhubungan dengan orang yang membangun Masjid Agung Demak yakni Walisongo. Masjid Agung Demak sendiri terletak di Pusat Perkotaan Demak, di mana di sekeliling masjid telah dikembangkan fasilitas berupa pusat UMKM, parkir, dan penginapan.

Gambar II.60

Masjid Agung Demak Sebagai Simpul Daya Tarik Wisata Religi di Pusat Perkotaan Demak



c. kawasan strategis Daerah.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- i. kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karanganyar;
- ii. kawasan industri terpadu Sayung;

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Demak merupakan Kawasan Industri Demak mempunyai luas lahan \pm 1.150 Ha, dan merupakan Kawasan Industri terluas di Jawa Tengah & Jawa Timur. Terletak di tepi jalur pantura dan 25 menit dari Pelabuhan Tanjung Mas, dan dekat dengan rencana Jalan Lingkar Luar Semarang memberikan kemudahan aksesibilitas Kawasan Industri Demak. Dengan adanya dukungan infrastruktur tol Semarang-Demak yang menghubungkan wilayah-wilayah Kedungsepur sekaligus menghubungkan kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan lainnya akan semakin meningkatkan daya dukung strategis kawasan industri di Kabupaten Demak.

Gambar II.61
Peta Kawasan Industri di Sepanjang Koridor Arteri Primer,
Khususnya KI Sayung



- iii. kawasan wisata Pantai Surodadi di Kecamatan Sayung; dan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang.

Sebagai simpul strategis bagi Kabupaten Demak, Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak merupakan pelabuhan perikanan yang termasuk ke dalam klasifikasi pelabuhan tipe C menurut PER/MEN/KP/NO.8/2012. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut. Keberadaan fasilitas penunjang seperti Pelabuhan Morodemak merupakan embrio penting dalam membangun kerangka ekosistem perekonomian berbasis kelautan (Minapolitan). Hal ini sesuai dengan strategi pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Demak yang meliputi arah kebijakan pengembangan kawasan pesisir yang berbasis minapolitan, perlindungan terhadap kawasan yang terkena abrasi; pengembangan kawasan dan pengolahan perikanan; mengembangkan kawasan sebagai pelindung keanekaragaman hayati dan wisata alam.

Berdasarkan rencana pengembangan Kawasan Prioritas sebagai pusat pertumbuhan beserta model perkembangan dan arah perkembangan yang diharapkan pada 2025-2045 dalam rancangan RPJPD. Berkaitan dengan rencana Integrasi antara rencana pengembangan wilayah ke depannya RPJPD perlu mengakomodir dan mempertimbangkan agenda nasional serta regional yang diproyeksikan di Kabupaten Demak. Penguatan posisi Kabupaten Demak sebagai salah satu simpul Aglomerasi Kedungsepur juga telah diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2022 tentang



Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi). Disimpulkan bahwa secara garis besar, sektor-sektor penunjang pengembangan wilayah di Kabupaten Demak yang menjadi simpul aktivitas perekonomian terdiri atas sektor industri, pertanian, dan pengembangan kawasan perkotaan yang ke depannya menjadi representasi bagi pusat pelayanan, simpul transportasi, kegiatan perdagangan.



**PERMASALAHAN
DAN ISU
STRATEGIS**



03

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pembangunan daerah dalam proses pelaksanaannya secara berkelanjutan selalu memiliki ragam permasalahan seperti yang dapat dilihat pada hasil capaian kinerja yang belum optimal. Kondisi capaian yang belum optimal ini sekaligus menandakan bahwa terdapat faktor-faktor penghambat yang belum teridentifikasi secara baik atau belum terselesaikan secara tepat. Hal ini memunculkan suatu keharusan untuk melakukan identifikasi terhadap pokok masalah, sehingga dapat dilakukan kategorisasi terutama untuk menentukan permasalahan utama yang menghambat proses pembangunan. Hasil analisis ini selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan utama dalam penyusunan rencana pembangunan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Demak, selain menyoroti permasalahan yang ada di wilayah, juga memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Kabupaten Demak. Isu-isu yang ditemukan ini akan menjadi isu strategis tingkat kabupaten dengan memperhatikan isu-isu regional, nasional, dan internasional serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, maka diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif sehingga permasalahan dan hambatan dapat ditanggulangi sedini mungkin.

Analisis permasalahan dan isu strategis akan menjadi pijakan dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan. Dengan analisis permasalahan dan isu strategis yang jelas akan menghasilkan tujuan dan sasaran pembangunan yang jelas sehingga dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Demak.

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam merumuskan permasalahan pembangunan daerah, fokus akan diberikan pada identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah jangka panjang merupakan permasalahan makro, dengan analisis dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Prioritas permasalahan daerah ditetapkan berdasarkan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran pembangunan, terutama dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dengan mempertimbangkan pula prioritas yang diamanatkan oleh kebijakan Nasional/Provinsi yang bersifat mandatori.

Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada

masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Demak dalam 5 permasalahan pokok sebagai berikut.

Gambar III.1

Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak



Berdasarkan gambar di atas, permasalahan pembangunan daerah untuk RPJPD Kabupaten Demak tahun 2025-2045 dibagi ke dalam empat aspek, yang dapat dijabarkan sebagai berikut,

1. Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Aspek Demografi dan Geografi

Pembangunan daerah tidak akan bisa lepas dari permasalahan yang bersifat demografis dan geografis. Meningkatnya pertumbuhan penduduk akan berkontribusi pada peningkatan kebutuhan atas lahan, air bersih, dan berbagai kebutuhan yang berasal dari sumber daya alam. Begitu pula peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan lahan pertanian, perkebunan, dan ruang terbuka hijau menjadi berkurang atau beralih fungsi. Sementara itu, karakteristik suatu daerah, seperti topografi, iklim, dan posisi wilayah akan membentuk model interaksi manusia dengan lingkungan.

Secara khusus, kondisi geografis Kabupaten Demak yang berada di kawasan pesisir menyebabkan kerentanan terhadap bencana alam, seperti banjir, rob, dan abrasi pantai. Sementara itu secara demografis, potensi permasalahan juga muncul pada produksi limbah, baik limbah domestik, industri, atau pertanian. Dengan kata lain, aspek geografis dan demografis benar-benar berkaitan langsung dengan kondisi lingkungan hidup yang dialami oleh penduduk wilayah tersebut.

Melihat kondisi di atas permasalahan aspek pembangunan daerah yaitu **meningkatnya kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten**

Demak, hal ini tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: indeks kualitas pencemaran air, indeks kualitas pencemaran udara, dan indeks tutupan lahan. IKLH Kabupaten Demak berada pada **kategori baik** dengan nilai capaian pada tahun 2023 sebesar 72,26. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, Kabupaten Demak juga lebih rendah. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih di masa yang akan datang.

Permasalahan lingkungan dapat juga dilihat dari menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pada daya dukung air luas wilayah dengan status terlampaui secara keseluruhan adalah 68,35% atau 68.033 ha. Pada daya dukung pangan hasil perhitungan menunjukkan hampir semua kecamatan di Kabupaten Demak masih memiliki daya dukung untuk pangan. Pada daya dukung lahan terbangun menggunakan luasan lahan terbangun pada RTRW Kabupaten Demak, menunjukkan hasil bahwa pada tahun 2023 DDLB Kabupaten Demak sebesar 4,26 yang termasuk dalam kategori baik.

Kerusakan lingkungan di Kabupaten Demak juga diindikasikan dari bertambahnya kejadian bencana yang dialami oleh Kabupaten Demak. Bencana yang sering dialami oleh Kabupaten Demak adalah bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan, di antaranya kekeringan, banjir, kebakaran lahan, dan angin kencang/puting beliung. Kejadian kekeringan dan kebakaran menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Selain itu, bencana banjir masih menjadi ancaman tahunan di Kabupaten Demak.

Selain bencana di atas, fenomena alam yang menjadi perhatian khusus adalah banjir yang terjadi akibat naiknya permukaan air laut atau dikenal dengan istilah banjir rob. Kejadian rob dialami di hampir semua kabupaten/kota yang berada di pesisir pantai utara Jawa, termasuk Kabupaten Demak. Sampai dengan tahun 2021, garis pantai Kabupaten Demak yaitu 101,94 km, sementara pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 102,03 km. Hal ini menunjukkan terjadinya penambahan panjang garis pantai yang diakibatkan oleh abrasi. Naiknya permukaan air laut ini menjadi masalah yang sangat kompleks. Beberapa hipotesis yang mengemuka yaitu tingginya sedimentasi dari sungai-sungai yang bermuara di pantai utara Jawa, hilangnya ekosistem mangrove, adanya penurunan muka tanah (*land subsidence*) akibat pengambilan air tanah yang terus menerus, dan adanya perubahan iklim sehingga mengakibatkan permukaan air laut meningkat.

Perubahan iklim juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan kerusakan lingkungan. Salah satu penyebab perubahan iklim yaitu peningkatan emisi gas rumah kaca. Faktor penyebab terjadi peningkatan berasal dari limbah; *Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU)*, *Industrial Process and Production Use (IPPU)*, dan energi. Penyumbang terbesar untuk emisi rumah kaca adalah AFOLU sebesar 44% dan energi sebesar 49%. Pada tahun 2022 capaian Emisi Gas

Rumah Kaca di Kabupaten Demak sebesar 1.500,21 Gg CO₂ yang mengalami peningkatan sebesar 10,72% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh emisi dari sumber energi yang semakin bertambah.

2. Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan menjadi kunci utama dalam menentukan kondisi sosial kemasyarakatan. Secara ideal, hubungan antara kesejahteraan dan kemiskinan memiliki dinamika yang erat dalam membentuk landasan utama bagi keadaan sosial-ekonomi suatu masyarakat. Kualitas kesejahteraan akan tercermin dalam distribusi sumber daya, akses terhadap fasilitas dasar, dan kestabilan kondisi sosial. Dengan kata lain kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya adalah suatu keharusan. Untuk itu selalu dibutuhkan kondisi masyarakat yang sejahtera secara merata.

Salah satu penghalang pemerataan kesejahteraan dan sekaligus menjadi penyebab **masih rendahnya kesejahteraan masyarakat** di Kabupaten Demak adalah kondisi kemiskinan masyarakat. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin sebanyak 143,26 ribu jiwa (12,01 persen). Angka ini masih di atas Nasional dan Jawa Tengah. Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan kondisi infrastruktur dasar.

Masih tingginya tingkat kemiskinan salah satunya disebabkan belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak sebesar 5,01 persen melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yaitu sebesar 5,25 persen. Capaian ini berada di atas Provinsi Jawa Tengah (4,98 persen) namun masih berada di bawah Nasional (5,05 persen).

3. Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan faktor krusial dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebuah daerah yang memiliki daya saing tinggi mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Dengan demikian persoalan atau penghambat pembangunan dari aspek daya saing ini berkaitan dengan kualitas infrastruktur, SDM, dan akses terhadap teknologi dan pasar global.

Masih Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia di Kabupaten Demak dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia. IPM Kabupaten Demak yaitu 74,07, berada di peringkat ke 15 di antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata. Hal ini dikarenakan pembangunan kualitas SDM di Kabupaten Demak masih terkendala khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat.

Rendahnya daya saing sumber daya manusia juga dapat dilihat dari pembangunan gender, kualitas keluarga, dan pembangunan kebudayaan. Pembangunan gender Kabupaten Demak pada tahun 2023 sebesar 91,17 berada diperingkat 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Kualitas keluarga yang dapat dilihat dari indeks pembangunan keluarga sebesar 64,54 pada tahun 2023 di mana nilai ini masuk kategori berkembang.

Pada aspek daya kebudayaan, persoalan terlihat dari persentase kelompok kesenian yang aktif mengadakan pertunjukan hanya sebesar 18,25 persen, persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru bahasa daerah atau seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan sebesar 80,23 persen, persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan hanya sebesar 18,15 persen pada tahun 2023.

Selain faktor sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar di daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah tersebut. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya, jembatan, jaringan listrik, air bersih, dan sanitasi, sangat penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan infrastruktur yang baik, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi menjadi lebih mudah dan efisien. Hal ini tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga meningkatkan daya saing daerah secara keseluruhan. Kondisi-kondisi terkait dengan penyiapan infrastruktur di Kabupaten Demak masih perlu mendapatkan perhatian dengan lebih baik.

Selanjutnya, **belum optimalnya pemenuhan infrastruktur dasar** dapat dilihat pada kualitas jalan yang mendukung kemudahan akses masyarakat. Walaupun posisinya bersebelahan dengan ibu kota Provinsi, kondisi jalan di Kabupaten Demak juga masih ada kondisi permukaannya berupa kerikil dan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa belum terjadinya pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Demak.

Selain itu, panjang jalan kabupaten terus mengalami peningkatan dari segi kondisi baik, sedang, rusak ringan, maupun rusak berat. Walaupun terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kondisi jalan yang baik di Kabupaten Demak, tetapi peningkatan juga terjadi di jalan kondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Kondisi ini sangat terlihat pada tahun 2023 yaitu kondisi sedang di angka 276,43 km, rusak ringan 49,45 km, dan rusak berat di angka 47,25 km. Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten menunjukkan angka yang belum maksimal sebesar 88,57 persen serta persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten hanya sebesar 10 persen pada tahun 2023.

Kondisi geografi wilayah Kabupaten Demak yang terletak di pesisir pantai utara menjadi tempat bermuaranya beberapa sungai besar seperti Kali Tuntang, Kali Wulan, dan Kali Jajar. Namun, kualitas dan kuantitas air permukaan menjadi persoalan, mengingat air sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Demak memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi dengan keberlangsungan debit andalan rendah terutama pada saat musim kemarau. Sementara di wilayah pesisir pantai, kadar salinitas air yang tinggi akibat adanya rob maupun intrusi air laut ke darat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air baku.

Kondisi-kondisi lain yang terkait dengan infrastruktur dasar ini juga berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan mendasar lainnya seperti akses air minum layak. Akses untuk mendapatkan air minum layak di Kabupaten Demak belum terpenuhi sepenuhnya. Pada tahun 2023 akses air minum layak sebesar 92,26 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah (93,76).

4. Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Aspek Pelayanan Umum

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Demak menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Belum optimalnya tata kelola ini dapat menghambat implementasi kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang terintegratif dan adaptif sudah menjadi kebutuhan mendasar. Tetapi pada pelaksanaannya, proses layanan kepada masyarakat belum optimal meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. IRB Kabupaten Demak pada tahun 2023 tercatat sebesar 77,72 dan ini masih cukup rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah seperti Kota Semarang sebesar 84,14, Kota Magelang dengan angka 84,85, Kabupaten Kebumen sebesar 79,91, Kabupaten Klaten sebesar 78,38, dan Kabupaten Wonogiri sebesar 77,81.

Selain IRB, perlu juga untuk memerhatikan kualitas capaian dari sisi akuntabilitas kinerja pemerintahan yang dapat dilihat dari SAKIP. Kondisi capaian nilai SAKIP Kabupaten Demak yaitu sebesar 69,08 pada tahun 2023 masih terbilang rendah jika dibandingkan nilai SAKIP Provinsi Jawa Tengah sebesar 81,13. Indeks reformasi hukum terbilang cukup rendah yaitu di angka 54,20 jika dibandingkan dengan angka maksimal yaitu 100.

Kondisi di atas juga berhubungan dengan masih rendahnya kapasitas fiskal Kabupaten Demak sebesar 21,02 pada tahun 2023. Sumber keuangan Kabupaten Demak masih mengandalkan dana transfer. Jika melihat indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada tahun 2023 indeks menyentuh angka 3,62 dari nilai maksimal 5. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan berbasis elektronik belum optimal serta menjadi perhatian khusus mengingat digitalisasi dan layanan digital menjadi keharusan untuk

percepatan layanan. Percepatan layanan dibutuhkan agar layanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien.

Selain itu, berdasarkan hasil survei penilaian integritas (SPI), indeks integritas Nasional mengalami penurunan dari tahun 2021 di angka 81,40 dan tahun 2023 sebesar 71,94 jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 72,00. Sedangkan indeks persepsi korupsi mengalami penurunan di tahun yang sama dari 88,18 (skala 100) ke 82,60 (skala 100) (sumber: LHE RB Kab Demak 2022). Hal ini menandakan perlunya perbaikan terkait integritas dan tata kelola pemerintahan.

3.2 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis mencakup berbagai permasalahan yang menjadi perbincangan di tingkat internasional, nasional, dan regional karena relevansinya terhadap kondisi dan perihai yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memandang isu-isu strategis sebagai panduan utama dalam merancang program kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat dilakukan secara terstruktur, tepat, dan efisien.

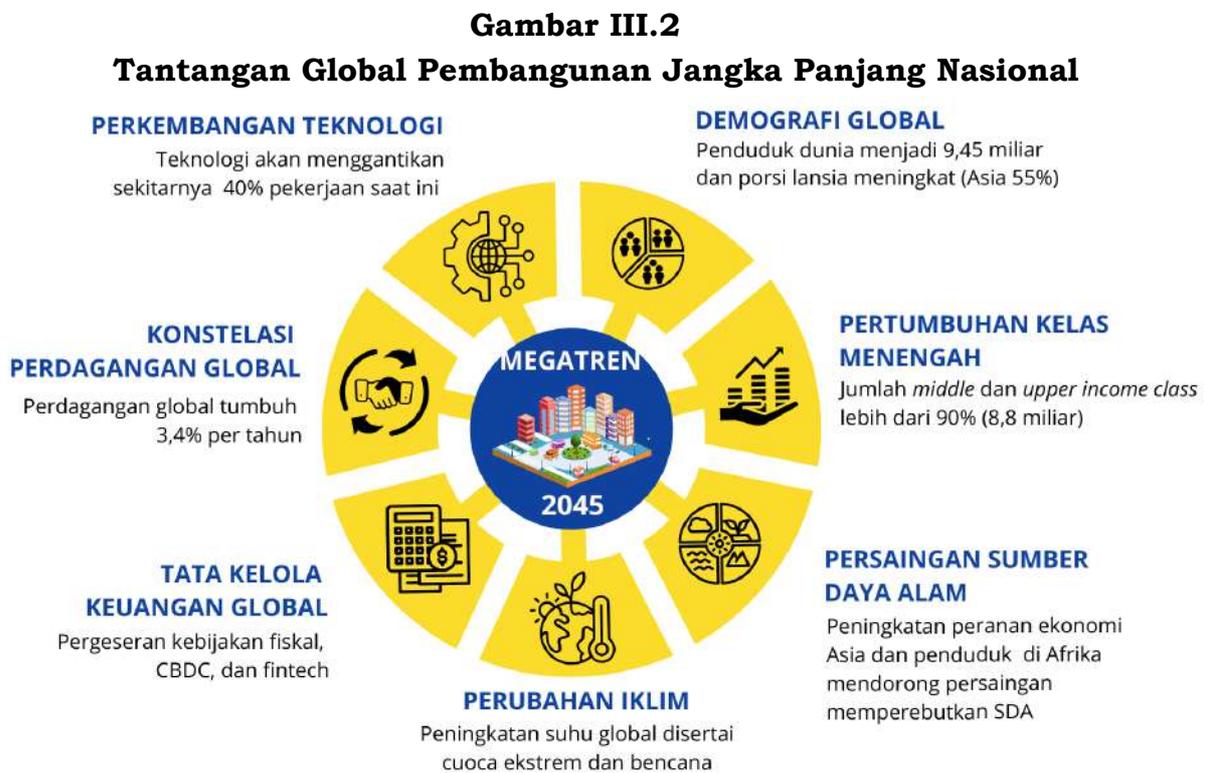
Dengan memberikan prioritas pada penanganan dan antisipasi terhadap isu-isu strategis, kita dapat menciptakan keunggulan tersendiri dalam meningkatkan peluang mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Namun sebaliknya, jika isu-isu strategis diabaikan, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka panjang menjadi langkah awal dalam merumuskan isu strategis.

Rumusan isu strategis melibatkan identifikasi isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Dengan demikian, kita dapat memahami kompleksitas isu-isu tersebut dan merancang strategi yang holistik untuk menghadapinya. Dengan mengakui pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah

3.2.1 Isu Strategis Internasional

Dalam dinamika pembangunan daerah, selalu muncul berbagai tantangan sejalan dengan perkembangan dan perubahan situasi yang memiliki dampak besar pada proses pembangunan tersebut. Penting untuk diakui bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga tantangan yang dihadapi dalam skala nasional juga menjadi isu yang signifikan dalam konteks pembangunan daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, terdapat penjelasan mengenai isu-isu dan tantangan

global yang akan dihadapi Indonesia, yang dikenal dengan istilah "Megatren". Beberapa poin Megatren ini telah dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Berkenaan dengan hal tersebut, tantangan global atau Megatren ini juga akan menjadi isu dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Kabupaten Demak dalam jangka panjang ke depan. Beberapa poin yang sesuai dengan Megatren global dan akan dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Demak dalam dua puluh tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1) Perkembangan Demografi Global

Perkembangan demografi global menjadi satu aspek krusial yang perlu menjadi perhatian utama dalam pembangunan Kabupaten Demak pada jangka panjang. Pembangunan yang berpusat pada penduduk atau *people-centered development*, menjadi pendekatan yang sangat relevan. Saat ini, pembangunan belum sepenuhnya berorientasi pada aspek kependudukan, terlihat dari tingginya laju dan jumlah penduduk, serta ketidakmerataan struktur dan kepadatan penduduk.

Perubahan struktur umur penduduk, sebagai hasil dari perkembangan demografi global, seharusnya dianggap sebagai peluang untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Penting untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi sebelum rasio ketergantungan meningkat. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Demak, pemahaman, tindak lanjut, dan kesiapan terhadap dampak demografi global harus diakui dan disiapkan.

Struktur penduduk yang didominasi oleh penduduk produktif dapat menjadi keunggulan bagi banyak negara, termasuk Kabupaten Demak, dalam proses pembangunan. Bonus demografi, di mana jumlah penduduk produktif

melebihi penduduk nonproduktif, menjadi potensi yang dapat dimaksimalkan melalui program dan kebijakan yang tepat, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan khusus daerah tersebut. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam memperhatikan kondisi penduduk saat merumuskan kebijakan agar kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran dengan tepat dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

2) Perkembangan Teknologi Informasi

Di era globalisasi ini, teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan pesat yang semakin mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Dengan perkembangan positif tersebut, sektor industri teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Kabupaten Demak, yang kaya sumberdaya, perlu memiliki kemampuan untuk mengikuti dan memanfaatkan setiap perkembangan teknologi dan komunikasi yang terjadi akibat globalisasi.

Untuk mencapainya, infrastruktur teknologi informasi harus dipersiapkan dengan matang agar seluruh masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkannya dalam pembangunan daerah. Perkembangan teknologi yang pesat tidak hanya memberikan manfaat dalam pelayanan publik, tetapi juga berperan dalam percepatan pembangunan ekonomi masyarakat. Pemerintah di seluruh negara perlu memiliki kemampuan untuk mengembangkan strategi dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi di semua aspek pembangunan daerah.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa pembangunan Kabupaten Demak ke depan dapat mengakomodasi setiap perkembangan teknologi yang diharapkan memberikan dampak positif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat secara menyeluruh.

3) Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*) yang Semakin Signifikan

Pertumbuhan kelas menengah bersifat intrinsik terhadap tingkat ekonomi dan proporsi ekonomi dalam suatu masyarakat. Kelas menengah dapat diartikan sebagai segmen masyarakat yang menunjukkan keamanan ekonomi dan memiliki kemungkinan rendah untuk mengalami kemiskinan. Dalam konteks ini, kelas menengah dapat didefinisikan sebagai strata ekonomi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan mereka secara layak dan mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Pertumbuhan kelas menengah ini bersifat berorientasi pada pengembangan ekonomi masyarakat, dianggap mampu menciptakan peluang ekonomi, namun demikian, juga memberikan tantangan yang signifikan dalam ranah aspek sosial kehidupan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan ekonomi masyarakat, perlu dilakukan peningkatan agar masyarakat dapat mencapai kelas yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi yang dapat diimplementasikan adalah melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk unggulan

daerah, yang kemudian dikombinasikan dengan penerapan teknik pemasaran melalui media sosial dan teknologi informasi. Melalui sinergi ini, diharapkan mampu terbuka peluang-peluang usaha baru yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kapasitas perekonomian mereka.

4) Dinamika dan Perubahan Konstelasi Perdagangan Global

Perubahan dinamika dalam konstelasi perdagangan global saat ini semakin meruncing, menghadirkan tantangan yang signifikan bagi perdagangan global secara menyeluruh, termasuk Indonesia. Terutama, wilayah-wilayah di Asia menempati posisi strategis baik dalam hal perdagangan maupun pemerintahan. Kompetisi ketat di pasar global memberikan dampak yang potensial terhadap pembangunan daerah, terutama di sektor perdagangan dan industri. Melihat tantangan ini, pemerintah daerah diharapkan untuk memperkuat daya saing produk unggulan setempat guna meningkatkan kinerja ekspor. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi daerah, mengingat pentingnya kontribusi sektor ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

5) Tata Kelola Keuangan Global

Tata kelola keuangan di tingkat global dan nasional menunjukkan dinamika yang terkait erat dengan perubahan struktur ekonomi dan demografi, sebuah fenomena yang dapat diyakini juga akan memengaruhi Kabupaten Demak. Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kabupaten Demak, bersama dengan dominasi usia muda dalam struktur demografi, memberikan indikasi kemungkinan pergeseran menuju *aging society* pada tahun 2045. Perubahan demografi ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas masyarakat dan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Selain itu, revolusi teknologi informasi telah mengubah paradigma tata kelola keuangan global dengan munculnya inovasi seperti bank digital, *fintech* (*financial technology*), dan transaksi tanpa uang tunai. Integrasi sistem IT dengan sektor perbankan membawa dampak positif berupa peningkatan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan. Namun, pertumbuhan cepat industri teknologi finansial juga membawa risiko yang signifikan, terutama ketika belum ada regulasi yang memadai. Ketidakstabilan potensial ini dapat menciptakan implikasi serius terhadap stabilitas keuangan di tingkat masyarakat maupun daerah.

6) Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya alam

Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi pendekatan vital dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Fenomena ini berpotensi meningkatkan tingkat akses masyarakat terhadap pemanfaatan SDA untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk kebutuhan akan air, bahan pangan, dan

energi. Namun, peningkatan ketergantungan ini berpotensi menciptakan kelangkaan SDA, yang pada akhirnya dapat memicu persaingan dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Memahami dampak potensial tersebut, penting untuk mengelola pemanfaatan SDA di daerah-daerah secara bijaksana. Inisiatif konservasi sumber daya alam dan integrasi teknologi pengolahan menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, ketersediaan SDA dapat dijaga dalam jangka panjang, memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat berlangsung secara berkelanjutan.

7) Perubahan Iklim (*Climate Change*)

Perubahan iklim menjadi hasil dari degradasi kelestarian ekosistem alam yang disebabkan oleh pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Implikasi perubahan iklim mencakup berbagai aspek seperti kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir, dan menjadi pemicu utama berbagai bencana alam. Salah satu potensi dampak yang dapat dihadapi oleh banyak daerah adalah peningkatan permukaan air laut, yang dapat berdampak pada mata pencaharian, tempat tinggal masyarakat, dan merugikan infrastruktur. Di samping itu, perubahan iklim juga memiliki efek pada kualitas hasil produksi panen tanaman pangan, berimplikasi pada peningkatan harga bahan makanan pokok, serta memengaruhi ketersediaan air bersih dan sanitasi.

Dalam konteks dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan lingkungan, penting untuk mengantisipasi isu perubahan iklim melalui perencanaan pembangunan yang bersifat ramah lingkungan, yang dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini perlu terus diimplementasikan secara global dalam upaya menyikapi perubahan iklim, melibatkan peran pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dapat berlangsung secara seimbang dengan menjaga kelestarian lingkungan.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya. Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional yang telah dijabarkan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, berikut merupakan isu strategis nasional:

1. Isu ekonomi:

Rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi

2. Isu sosial:

Kemiskinan menuju nol persen, akses, dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial

3. Isu tata kelola pemerintahan:

Pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas

4. Isu supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh

5. Isu ketahanan sosial budaya dan ekologi

6. Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi

7. Isu kesinambungan pembangunan:

Konsistensi perencanaan penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dengan mempertimbangkan segala potensi Negara Indonesia, isu dan dinamika tantangan pembangunan, dan berbagai kajian yang ada, maka Visi dan Misi RPJPN Indonesia Tahun 2025-2045 dijabarkan sebagai berikut:

Gambar III.3

Visi Indonesia Emas 2045



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Dengan visi di atas, maka diperlukan komitmen dan kejelasan apa saja yang harus dicapai sebagai ‘goals’ visi Indonesia Emas 2045 melalui 5 (lima) Sasaran Utama Visi Indonesia 2045, yaitu:

- 1) Pendapatan Per kapita setara negara maju
- 2) Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang
- 3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
- 4) Daya saing sumber daya manusia meningkat
- 5) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Berdasarkan visi dan misi di atas, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, yaitu:

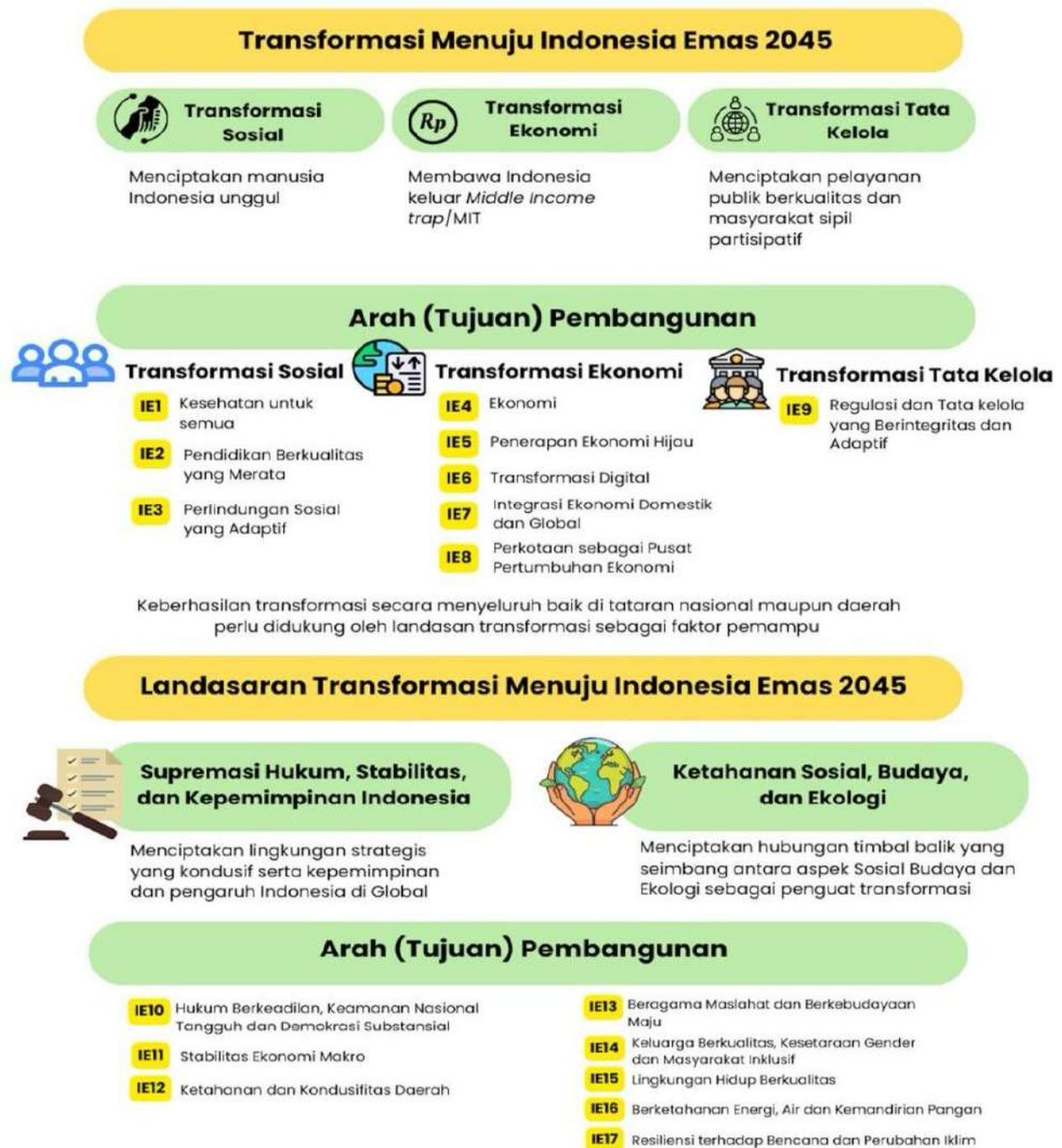
- 1) **Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
- 2) **Mewujudkan transformasi ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
- 3) **Mewujudkan transformasi tata kelola** untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- 4) **Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia** dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gantar kawasan.
- 5) **Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi** dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
- 6) **Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan** melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah
- 7) **Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
- 8) **Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas** yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, perlu adanya pendekatan pembangunan yang diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan dalam 17 arah pembangunan yang terbagi dalam 3

transformasi besar yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi Tata Kelola yang secara rinci dijabarkan dengan 17 arah pembangunan sebagai berikut:

Gambar III.4

17 (tujuh belas) arah pembangunan Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Demak harus memedomani dan memperhatikan kebijakan nasional yang dituangkan dalam RPJPN tahun 2025-2045. Dengan berdasarkan penjabaran visi, misi, sasaran utama dan arah pembangunan RPJPN di atas, dapat disimpulkan RPJPD Kabupaten Demak sudah memperhatikan kebijakan nasional. Secara umum RPJPD Kabupaten Demak sudah memiliki keterkaitan dengan misi RPJPN.

3.2.3 Isu Strategis Daerah

1) Telaahan RPJPD dan Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Pencapaian pembangunan Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh pencapaian Kab/Kota dalam lingkup Provinsi. Dalam rangka mendukung pembangunan Provinsi Jawa Tengah, maka kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Demak harus memperhatikan kebijakan pembangunan Provinsi. Menindaklanjuti hal tersebut maka beberapa urgensi dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan pembangunan pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah:
 1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat
 2. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah
 3. Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan
 4. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana
 5. Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
 6. Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat
 7. Belum optimalnya kondusivitas wilayah
 8. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi
- b. Isu pembangunan dalam pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah
 1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
 2. Ketahanan pangan yang berkelanjutan
 3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
 4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana
 5. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
 6. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat
 7. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

c. Visi dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah:

Gambar III.5

Visi Pembangunan Jangka Panjang Jawa Tengah 2025-2045



Sumber: RPJPD Tahun 2025-2045 Provinsi Jawa Tengah

Dari visi di atas, berikut ini adalah penjabaran secara lebih jelas mengenai pokok visi,

1. PENUMPU PANGAN DAN INDUSTRI NASIONAL

Jawa Tengah dengan faktor iklim, geologis dan letak geografis yang strategis memiliki potensi pertanian dalam arti luas, dan selama ini telah menunjukkan potensi sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia. Potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan di Jawa Tengah mampu memberikan kontribusi PDRB sektor pertanian peringkat tiga besar di Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki, Jawa Tengah dalam dua puluh tahun ke depan memiliki kemampuan untuk tetap menjadi penumpu pangan nasional dengan didukung oleh modernisasi pertanian yang berdasarkan riset, teknologi, pengembangan inovasi, SDM dan kelembagaan pertanian yang semakin meningkat kapasitasnya, serta pengendalian alih fungsi lahan.

Di sisi lain sejalan dengan transformasi ekonomi, pembangunan industri dalam dua puluh tahun ke depan fokus pada peningkatan nilai tambah secara signifikan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah. Hilirisasi menjadi faktor kunci karena mampu memberikan peningkatan nilai tambah komoditas, memperkuat nilai ekspor, menciptakan perluasan penyediaan lapangan pekerjaan, serta *multiplier effect* yang lain. Keberadaan kawasan strategis industri di sepanjang pantura menjadikan posisi Jawa Tengah menjadi sangat penting dalam rantai nilai industri Nasional.

2. MAJU

Jawa Tengah Maju merupakan bentuk upaya menjawab tantangan nasional sebagai kontributor perekonomian nasional untuk mencapai posisi nomor lima terbesar di dunia, serta menjawab isu strategis daerah yaitu

perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia. Jawa Tengah Maju akan menjadi Jawa Tengah yang memiliki perekonomian berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dengan tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, serta inovatif, mandiri dengan tidak ketergantungan, tangguh, didukung dengan wilayah yang kondusif.

Daya Saing: Perekonomian Jawa Tengah tahun 2045 mampu tumbuh bersaing dengan daerah lain terutama di wilayah Pulau Jawa, dan mampu berkontribusi tinggi pada perekonomian nasional. Jawa Tengah berdaya saing diwujudkan dengan pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah, ekonomi kreatif, dan hilirisasi berbasis riset dan teknologi, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup menuju pada perwujudan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Tumbuhnya perekonomian juga didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang mampu bersaing dengan sumber daya manusia daerah lainnya. Daya saing perekonomian daerah juga akan meningkat didukung dengan peningkatan kualitas, kapasitas dan pemerataan infrastruktur, keterpaduan dan integrasi antarmoda transportasi, pelayanan transportasi yang andal, nyaman, selamat, terjangkau dan berkelanjutan guna meningkatkan kelancaran perjalanan orang, distribusi barang dan jasa, mengurangi ketimpangan antarwilayah serta mendukung perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Modern: Jawa Tengah maju modern dengan masyarakat dalam tingkat peradaban tinggi dengan kemampuan pemanfaatan teknologi dan layanan terkini untuk memenuhi kebutuhannya. Infrastruktur juga didukung dengan teknologi yang modern yang memungkinkan masyarakat Jawa Tengah terhubung dengan global.

Inovatif: Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memperkuat perekonomian daerah adalah sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan mampu memanfaatkan teknologi terkini, yang mampu menciptakan inovasi produk dan layanan di berbagai sektor agar mampu berdaya saing tinggi di pasar global maupun nasional. Kemampuan inovatif ini juga menjadi penting dalam menghadapi segala persoalan dan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan global dan nasional.

Mandiri: Jawa Tengah mandiri digambarkan dengan kemampuan membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal. Jawa Tengah mandiri juga dilakukan dengan mengeksplorasi seluruh potensi ekonomi, politik, sosial, dan budaya untuk meningkatkan kekuatan sendiri, dengan tidak mengingkari realitas globalisasi atau mengisolasi diri dan menutup peluang kerja sama dengan berbagai pihak. dan dilakukan dengan kerja sama para pihak, dalam dan luar negeri. Kemandirian daerah salah satunya dengan kemandirian dalam penyediaan pangan, energi, dan produk-produk ekonomi lainnya.

Tangguh: Jawa Tengah yang maju juga digambarkan sebagai Jawa Tengah yang tangguh, mampu menghadapi tantangan dan krisis dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.

Aman: Rasa aman juga dibutuhkan dalam menciptakan kondisi Jawa Tengah yang maju. Perekonomian akan semakin meningkat dengan salah satu persyaratan adanya kondisi lingkungan yang kondusif. Rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat sebagai implikasi dari lingkungan yang kondusif akan mampu mendorong masyarakat lebih berkembang, produktif, dan mampu berkontribusi pada pembangunan daerah.

3. SEJAHTERA

Jawa Tengah Sejahtera digambarkan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga didukung dengan tersedianya prasarana sarana seperti perumahan, air bersih, prasarana sarana pelayanan publik, transportasi, dan teknologi, serta akses terhadap lingkungan hidup berkualitas dan sumber daya alam. Jawa Tengah Sejahtera juga dapat memberikan jaminan pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, serta hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, dan *tepo seliro*.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu pemenuhannya baik secara fisik dan non fisik harus dilakukan secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera secara berkesinambungan.

4. BERBUDAYA

Cita-cita menjadikan Jawa Tengah maju di tengah globalisasi dan modernisasi yang saat ini terjadi baik dari aspek teknologi maupun komunikasi berimplikasi terhadap lunturnya nilai-nilai luhur suatu bangsa dan berdampak pada perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat. Untuk itu, Jawa Tengah berbudaya menjadi salah satu cita-cita pembangunan Jawa Tengah 2045 dengan bagaimana membangun identitas Jawa Tengah dalam karakter, wajah, cerminan, dan kearifan lokal Jawa sebagai warisan leluhur masyarakat Jawa yang adiluhung berupa etika luhur, berbudi luhur, moral luhur, norma luhur ke dalam pola pikir dan ideologi masyarakat. Jawa Tengah berbudaya mewujudkan dalam perilaku masyarakat yang santun, memiliki tata krama tinggi, *tepo seliro*, *unggah ungguh*, dan kerukunan antarkelompok masyarakat.

Esensi dari konsep berbudaya adalah adanya perasaan seorang individu sebagai bagian integral dari kebudayaan miliknya serta kemampuan kebudayaan mendefinisikan dirinya sendiri sebagai sebuah sistem yang berbeda dengan kebudayaan yang lain. Berdasarkan hal tersebut maka

terdapat dua hal penting yang secara bersama-sama berperan bagi hadirnya identitas kebudayaan. *Pertama*, kemampuan masyarakat mengidentifikasi dirinya sebagai bagian kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari pola pikir, pola rasa dan tindakan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan dirinya sebagai bagian dari kebudayaan tertentu. *Kedua*, kemampuan suatu kebudayaan sebagai suatu obyek sekaligus subyek yang dinamis di tengah pergulatan interaksi kebudayaan. Hal terakhir ini dapat dilihat dari karakter, kekhasan dan atau ciri khusus di dalam aspek-aspek tertentu dari suatu kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai pembeda dengan ragam kebudayaan lain. Kedua hal tersebut secara bersama-sama menunjukkan karakteristik umum dan gagasan-gagasan yang dengan jelas menjadi penanda bagi munculnya identitas. Dari pemikiran tersebut dilihat dengan jelas bahwa apabila akan meneguhkan diri dengan identitas kebudayaan, maka mau tidak mau masyarakat harus mengaktualisasikan karakteristik umum bangsa Jawa dengan segenap nilai dan perwujudannya.

Jawa Tengah berbudaya juga akan terintegrasi dalam pembangunan manusia yang utuh dan berkarakter yang melibatkan individu, keluarga, masyarakat dalam semua sektor, baik sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Jawa Tengah yang berbudaya ini juga akan menjadi *kendali* akan kemajuan dan modernisasi yang tanpa batas pada semua sektor. Di samping itu, peran dan fungsi agama secara mendalam dan inklusif juga dapat mewujudkan Jawa Tengah yang berbudaya, dengan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan budaya masyarakat.

5. BERKELANJUTAN

Dengan semakin *menurunnya* daya dukung dan daya tampung lingkungan saat ini, sedangkan di sisi lain tuntutan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, maka menjadi penting untuk membangun daerah Jawa Tengah dengan terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang layak bagi kehidupan, dengan memperhatikan prinsip bahwa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat juga dinikmati oleh generasi yang akan datang, memperhatikan kearifan lokal, serta mempertimbangkan efek domino kerusakan lingkungan yang akan terjadi, serta meningkatnya dampak perubahan iklim. Jawa Tengah yang berkelanjutan akan menciptakan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik, mendapatkan lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman yang layak dan nyaman, bebas pencemaran air, udara, sampah, serta kondisi hutan dan lahan, sumber daya air baik air permukaan, air tanah, serta pesisir laut yang semakin terjaga dengan baik. Selain itu, Jawa Tengah berkelanjutan juga mempertimbangkan risiko bencana dalam setiap proses pembangunan mengingat Jawa Tengah memiliki potensi dan keterpaparan jenis bencana alam yang beragam.

Dalam mencapai visi tersebut, maka berikut akan dijabarkan upaya pencapaiannya dalam 8 (delapan) misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola;
4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro;
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8. Kesinambungan Pembangunan

Dalam pembangunan jangka panjang, terdapat tema pembangunan dalam empat tahapan pembangunan. Tema pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar III.6

Tema RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045



Sumber: RPJPD Tahun 2025-2045 Provinsi Jawa Tengah

d. Arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam RPJPD adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan untuk semua;
2. Pendidikan Berkualitas secara Inklusif;
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif;
4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
5. Penerapan Ekonomi Hijau;
6. Transformasi Digital;
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif;
10. Ketenteraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial;
11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
12. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah;
13. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter;

14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan gender, dan Masyarakat Inklusif;
15. Lingkungan Hidup Berkualitas;
16. Ketahanan energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
17. Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan Iklim

Dengan beberapa poin penjabaran dalam urgensi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan, bahwa permasalahan harus diperhatikan dan diintegrasikan dalam perencanaan jangka panjang Kabupaten Demak. Setelah memperhatikan beberapa penjabaran RPJPD Provinsi Jawa Tengah di atas, terlihat bahwa permasalahan dalam cakupan pembangunan jangka panjang Kabupaten Demak sudah diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Demak. Hal ini terlihat pada beberapa aspek permasalahan yang sudah sesuai dengan pembahasan dalam RPJPD Provinsi dan Kabupaten Demak, yang terlihat pada gambar kesesuaian permasalahan yang tertuang pada gambar sebagai berikut.

Gambar III.7
Keterkaitan Permasalahan
RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Demak



2) Telaah KLHS

Penyusunan RPJPD yang baik harus mempertimbangkan dampak positif terhadap lingkungan hidup sebagai bentuk dukungan implementasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperlukan untuk memastikan terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan di suatu wilayah.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada dokumen KLHS, dapat teridentifikasi mengenai hasil analisis daya dukung dan daya tampung

daerah Kabupaten Demak dengan lingkup pangan, air, dan lahan yaitu sebagai berikut:

- a. Daya dukung pangan Kabupaten Demak pada tahun 2023 adalah 2,88, sehingga berada di atas daya dukung pangan minimal daerah, yaitu sebesar 1. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Demak masih bisa mencukupi kebutuhan pangannya sendiri melalui produksi pangan di dalam daerah. Hal tersebut diproyeksikan akan terus bisa dilakukan Kabupaten Demak dalam mencukupi kebutuhan pangannya hingga akhir tahun masa proyeksi, yaitu tahun 2045 yang diperkirakan masih pada angka 2,14.
- b. Daya dukung air di Kabupaten Demak pada tahun 2023 adalah 0,84, sehingga berada di bawah batas minimal daya dukung air daerah, yaitu sebesar 1. Angka tersebut menunjukkan bahwa daya dukung air di Kabupaten Demak telah terlampaui atau buruk. Proyeksi daya dukung air berdasarkan skenario *Business As Usual* (BAU) menunjukkan daya dukung air di Kabupaten Demak akan terus menurun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang meningkatkan kebutuhan air akan tetapi secara bersamaan akan mengurangi ketersediaan air akibat alih fungsi lahan. Berdasarkan hasil proyeksi BAU daya dukung air di Kabupaten Demak pada tahun 2045 akan berada pada angka 0,34 yang menunjukkan bahwa daya dukung air di Kabupaten Demak pada tahun tersebut sudah terlampaui atau buruk. Kondisi daya dukung air terus mengalami penurunan hingga tahun 2045, dengan demikian diperlukan upaya atau strategi untuk menghadapi hal tersebut di antaranya yaitu:
 - Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku dengan mengurangi beban cemar pada air dari kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian;
 - Meningkatkan penangkapan air melalui pembangunan embung dan waduk;
 - Penerapan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air;
 - Penerapan insentif bagi kegiatan produksi baik pertanian maupun industri yang dapat menekan atau menghemat penggunaan air
- c. Daya dukung lahan terbangun Kabupaten Demak pada tahun 2023 adalah 4,26, sehingga berada di atas daya dukung minimal daerah, yaitu sebesar 3. Angka tersebut menunjukkan bahwa daya dukung lahan terbangun di Kabupaten Demak masuk dalam kategori baik karena berada di atas angka 3. Hal tersebut di proyeksikan akan terus menurun pada tahun 2045 berdasarkan proyeksi *Business As Usual* (BAU), yaitu sebesar 2,06. Angka tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2045 daya dukung lahan terbangun di Kabupaten Demak masuk dalam kategori bersyarat atau sedang. Dengan demikian perlu adanya upaya untuk mengatur hal tersebut sehingga daya dukung lahan terbangun di Kabupaten Demak terus terjaga. Kondisi daya dukung lahan terbangun mengalami penurunan hingga di bawah kategori ideal, dengan demikian

perlu dilakukan beberapa langkah strategi untuk menghadapi hal tersebut di antaranya yaitu:

- Pembangunan kawasan perkotaan yang kompak dengan mendorong penggunaan bangunan vertikal sesuai kemampuan lahan untuk efisiensi penggunaan lahan terutama untuk kawasan permukiman perkotaan;
- Penerapan 30% RTH pada kawasan terbangun terutama permukiman tetap menyediakan ruang terbuka.

Hasil analisis yang dilakukan pada 209 indikator TPB di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa sebesar 11% atau setara dengan 23 indikator TPB dalam status (SBT), yaitu indikator TPB sudah dilaksanakan dalam RPJPD tetapi belum tercapai. Kemudian sebanyak 44 indikator atau sebesar 21,1% indikator berstatus (SST) yang berarti bahwa indikator TPB sudah dilaksanakan dalam RPJPD dan sudah tercapai. Sementara itu, sebesar 51,2% indikator menunjukkan bahwa tidak/belum ada data terkait indikator tersebut (TAD). Indikator TPB yang belum dilaksanakan dalam RPJPD dan sudah maupun belum mencapai target nasional (TBC) sebesar 16,7%.

Berdasarkan capaian OPD terhadap indikator TPB daerah Kabupaten Demak, Dinas Kesehatan (Dinkes) merupakan OPD dengan jumlah indikator terbanyak, yaitu sebanyak 45 indikator. Dari 45 indikator tersebut sebanyak 3 indikator dalam status (SBT), yaitu indikator TPB sudah dilaksanakan dalam RPJPD tetapi belum tercapai. Kemudian sebanyak 12 indikator berstatus (SST) yang berarti bahwa indikator TPB sudah dilaksanakan dalam RPJPD dan sudah tercapai. Sementara itu, sebesar 19 indikator menunjukkan bahwa tidak/belum ada data terkait indikator tersebut (TAD). Indikator TPB yang belum dilaksanakan dalam RPJPD dan sudah maupun belum mencapai target nasional (TBC) sebanyak 11 indikator.

Upaya sinkronisasi antara prinsip pembangunan berkelanjutan dan RPJPD Kabupaten Demak terindikasi dari hubungan antara kelompok isu pembangunan berkelanjutan dan permasalahan Kabupaten Demak sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel III.1
Penyelarasan Kelompok Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Permasalahan RPJPD Kabupaten Demak

KLHS	RPJPD Kabupaten Demak
Kelompok Isu Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan
Masih tingginya tingkat kemiskinan	Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat
Masih belum proporsionalnya peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	
Masih rendahnya persentase anak yang menerima imunisasi	

KLHS	RPJPD Kabupaten Demak
Kelompok Isu Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan
Masih rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	
Masih rendahnya persentase penduduk memiliki akta kelahiran	
Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan	
Masih rendahnya peningkatan akses UMKM ke layanan keuangan	
Masih rendahnya partisipasi sekolah pada tingkat dasar	Masih rendahnya daya saing sumber daya manusia
Belum optimalnya peningkatan kompetensi keterampilan teknik angkatan kerja	
Masih rendahnya tingkat pemberdayaan perempuan	
Tingginya kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak	
Masih rendahnya jumlah pekerja di industri pariwisata	
Rendahnya proporsi anggaran riset pemerintah kepada pdb	
Masih adanya desa yang melakukan BAB	
Masih rendahnya penanganan sampah perkotaan	
Masih tingginya kerugian ekonomi akibat bencana	
Masih rendahnya kapasitas prasarana air baku untuk rumah tangga dan industri	Belum Optimalnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar
Masih rendahnya akses rumah tangga terhadap air layak minum	
Masih rendahnya akses rumah tangga pada sanitasi layak	
Masih rendahnya akses masyarakat terhadap hunian layak	
Rendahnya partisipasi perempuan DPRD	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
Belum optimalnya implementasi kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan publik	
Masih terbatasnya jumlah sertifikat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)	
Masih adanya kebijakan yang diskriminatif	
Masih rendahnya penawaran proyek dalam skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	
Belum optimalnya peningkatan indikator SDGs	

Tabel di atas menunjukkan bahwa kelompok isu strategis yang berasal dari KLHS memiliki korelasi dengan permasalahan-permasalahan RPJPD. Struktur ini perlu untuk disajikan sebagai dasar pertimbangan dalam membuat isu strategis. Penyelarasan juga dapat digunakan sebagai langkah komparatif terhadap telaah RTRW sebagaimana yang akan dibahas selanjutnya.

3) Telaah RTRW

Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kabupaten Demak tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak RTRW Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak tahun 2011-2031, maka, tujuan RTRW Kabupaten Demak adalah:

“Mewujudkan ruang wilayah Daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan”

Apabila merujuk pada tujuan RTRW Kabupaten Demak dalam Perda No. 6 tahun 2011 fokus utama pengembangan wilayah Kabupaten Demak tertuju pada sektor Pertanian dan Sektor Perikanan yang didukung oleh Perdagangan dan Jasa dan Industri. Namun, mengacu pada Perda Nomor 1 tahun 2020, maka tujuan pengembangan wilayah difokuskan pada sektor Pertanian dan sektor Industri sebagai komponen mendasar yang didukung oleh sektor perdagangan dan jasa dan pariwisata.

Tabel III.2
Perbandingan Antara Tujuan RTRW

	PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RANCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031	PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031
TUJUAN PENATAAN RUANG	Mewujudkan ruang wilayah daerah berbasis sektor pertanian dan perikanan yang unggul didukung sektor perdagangan dan jasa, Industri, usaha mikro kecil menengah, dan pariwisata	Mewujudkan ruang wilayah daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan, jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

Dari kerangka di atas, dapat dipahami bahwa fokus penataan ruang hingga tahun 2031 mendatang adalah pengembangan wilayah yang terfokus pada sektor pertanian dan juga sektor Industri. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan penting bagi penyusunan RPJPD Kabupaten Demak tahun 2025-2045 di mana aspek penataan ruang perlu menjadi bagian integral agar sektor kewilayahan dapat menjadi pengungkit arah pembangunan Kabupaten Demak hingga pada tahun 2045.

Dalam hal penelaahan terhadap RTRW, terdapat tiga aspek mendasar yang perlu digaris bawahi, yaitu struktur tata ruang, pola ruang dan kawasan strategis. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Kawasan strategis terdiri atas Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi. Dan Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.

Secara struktur ruang, Kabupaten Demak digambarkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang berada dalam aglomerasi Regional Kedungsepur. Adapun hierarki struktur ruang Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1. PKN merupakan bagian dari kawasan perkotaan Kendal – Demak – Ungaran –Salatiga–Semarang–Purwodadi (Kedungsepur) berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen.

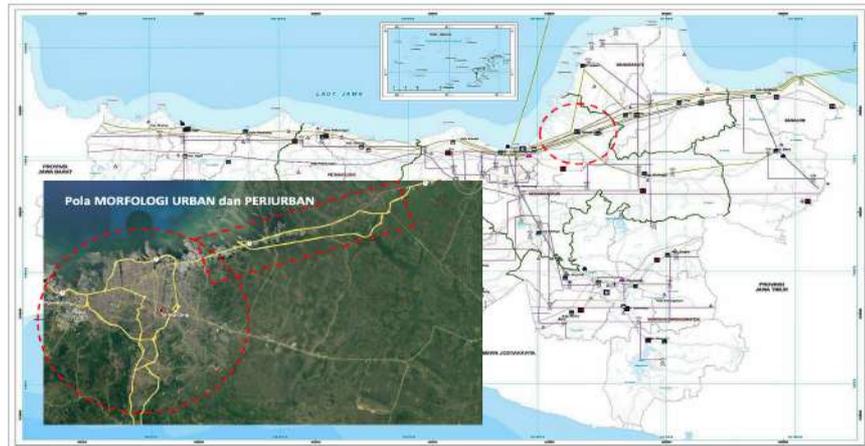
Kabupaten Demak berada pada koridor yang menghubungkan langsung dengan Kota Semarang di wilayah bagian barat. Meskipun dari sisi perkembangan perkotaan, Kabupaten Demak lebih condong sebagai peri-urban, namun potensi kesinambungan secara morfologis memungkinkan adanya potensi interaksi aktivitas antar kedua wilayah tersebut.

Gambar III.8

Konstelasi/Kedudukan Kabupaten Demak sebagai PKN

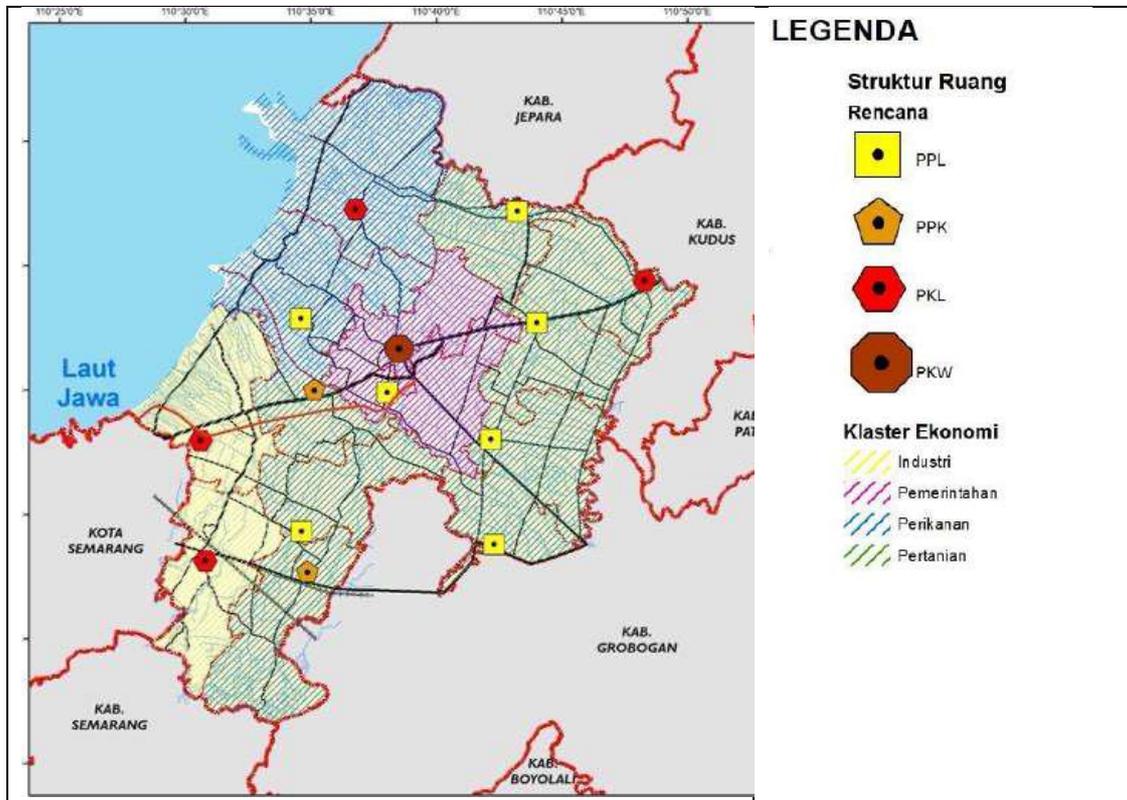
KONSTELASI REGIONAL & NASIONAL KARAKTERISTIK WILAYAH DALAM SKALA REGIONAL

- Identifikasi Konstelasi Regional memungkinkan pemetaan terhadap kedudukan suatu wilayah
- MORFOLOGI Kabupaten Demak sebagai Peri URBAN Metropolitan Semarang
- Sekaligus sebagai PUSAT PERTUMBUHAN BARU (The New Growth Pole)?



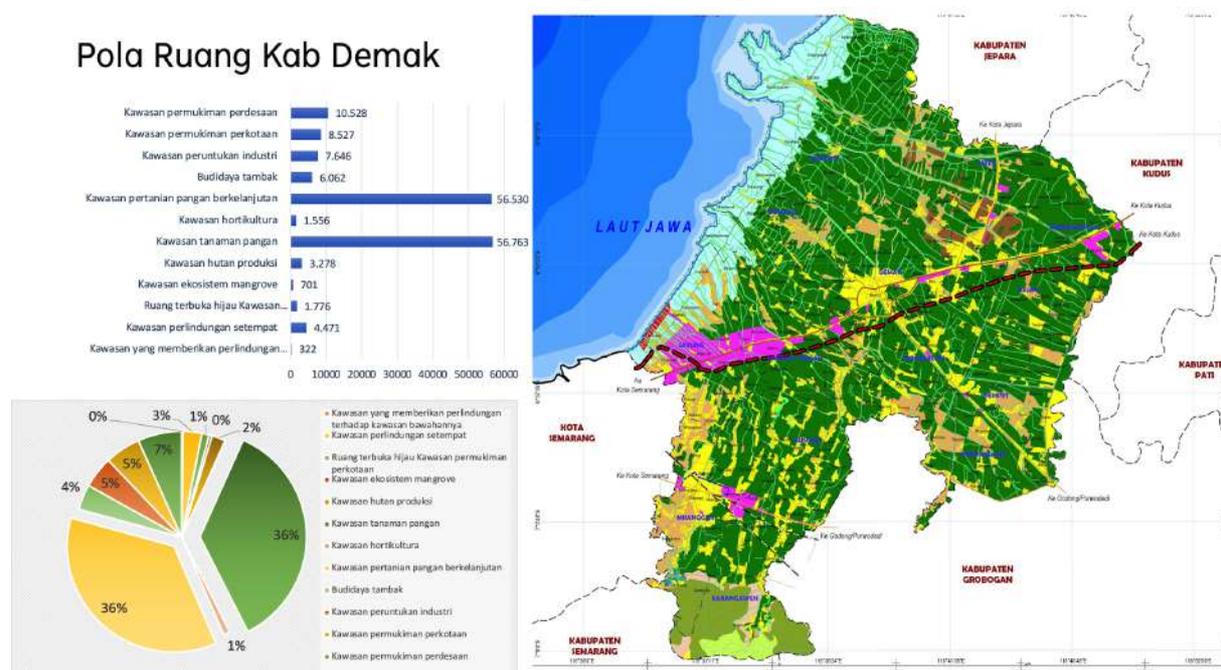
2. PKL meliputi:
 - a) Kawasan Perkotaan Demak; dan
 - b) Kawasan Perkotaan Mranggen.
3. PPK, meliputi:
 - a) Kawasan Perkotaan Gajah;
 - b) Kawasan Perkotaan Dempet;
 - c) Kawasan Perkotaan Guntur;
 - d) Kawasan Perkotaan Sayung;
 - e) Kawasan Perkotaan Karangtengah;
 - f) Kawasan Perkotaan Bonang;
 - g) Kawasan Perkotaan Wedung;
 - h) Kawasan Perkotaan Karangawen;
 - i) Kawasan Perkotaan Wonosalam;
 - j) Kawasan Perkotaan Karanganyar;
 - k) Kawasan Perkotaan Mijen; dan
 - l) Kawasan Perkotaan Kebonagung.

Gambar III.9
Ilustrasi Struktur Ruang Kabupaten Demak



Selanjutnya, dari sisi Pola Ruang yang merupakan wadah bagi terselenggaranya tujuan pengembangan wilayah dan implementasi dari struktur ruang wilayah. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

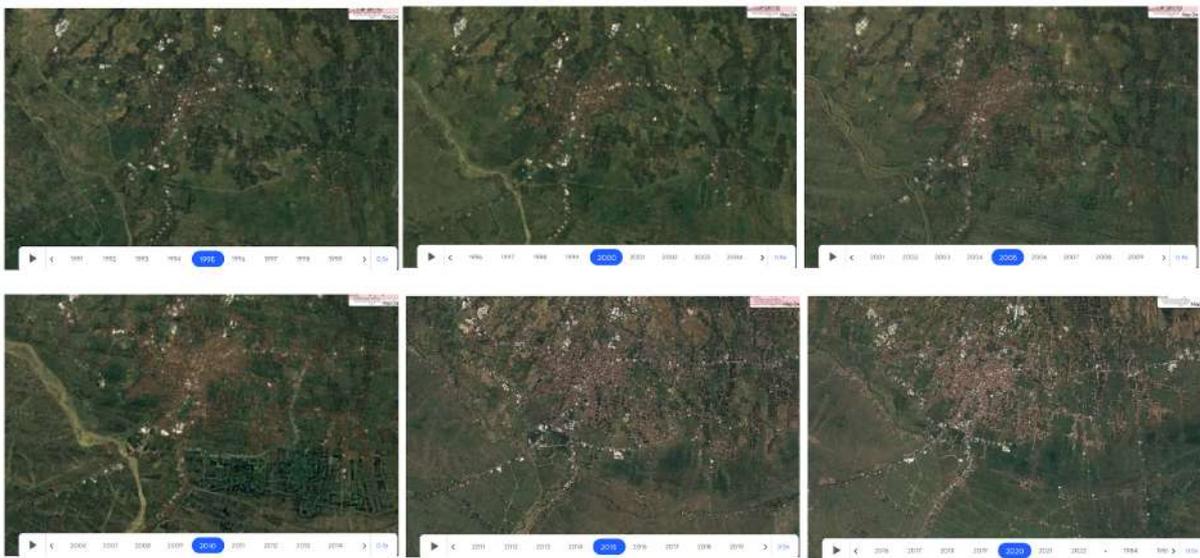
Gambar III.10
Alokasi Pola Ruang di Kabupaten Demak



Pola Ruang Kabupaten Demak pada dasarnya didominasi oleh Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan atau sekitar 36 persen dari okupansi pola ruang di Kabupaten Demak. Selanjutnya, alokasi pola ruang terbesar pada kawasan tanaman pangan dengan persentase yang hampir sama (36 persen).

Pola Ruang Kabupaten Demak selanjutnya tersusun atas alokasi pola ruang permukiman perdesaan (7 persen) dan perkotaan. (5 persen). Hal ini juga turut menandai adanya fenomena *urban sprawl* (pertumbuhan kota yang tidak terpadu, tersebar tidak merata) di Kabupaten Demak sehingga berpengaruh terhadap efisiensi sarana dan prasarana.

Gambar III.11
Fenomena *Urban Sprawl* di Kabupaten Demak



Lebih lanjut, Kabupaten Demak juga merupakan rumah bagi sektor Industri di Jawa Tengah. Secara peruntukkan ruang terdapat 7.646 kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan Industri di Kabupaten Demak. Selain itu saat ini juga terdapat Kawasan Industri Sayung (PT. Jatengland) dengan luas mencapai 300 Ha.

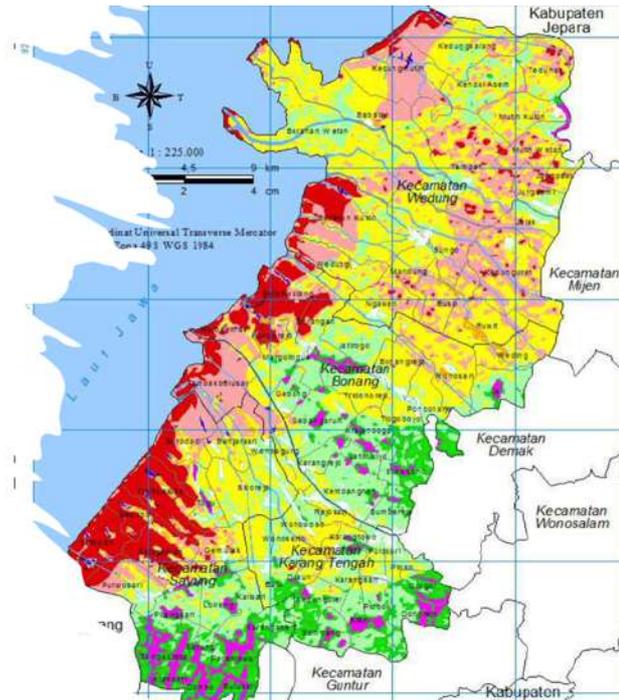
Isu penting dari sisi penataan ruang Kabupaten Demak adalah kondisi geografis Kabupaten Demak yang merupakan salah satu wilayah pesisir yang terletak di utara Jawa. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang dan berada pada koridor ekonomi Pulau Jawa menyebabkan perkembangan wilayah ini sangat cepat. Penambahan lahan terbangun ini memberikan beban tambahan pada tanah, padahal kondisi tanah pada wilayah ini adalah tanah yang masih muda. Tanah seperti ini masih belum terkonsolidasi dengan baik sehingga penambahan beban di atasnya menyebabkan terjadinya pemampatan. Selain itu, keberadaan kawasan permukiman dan industri juga menyebabkan meningkatnya aktivitas pemompaan air tanah, terutama pada kawasan industri dikarenakan kebutuhan airnya yang cukup banyak. Adanya beban di atas tanah dan rongga tanah akibat pengambilan air tanah kemudian memicu terjadinya fenomena penurunan muka tanah. Penurunan tanah di wilayah pesisir ini menyebabkan meningkatnya tinggi genangan akibat banjir pasang.

Peningkatan permukaan air laut di Kabupaten Demak hingga tahun 2010 mencapai rata-rata 3,2 mm per tahunnya sejak 1993. Kenaikan permukaan air laut menyebabkan tergenangnya lahan basah dan lahan rendah, erosi pantai, intrusi air tanah sehingga menimbulkan genangan banjir rob yang telah menyebabkan dampak negatif yang besar karena menghambat aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Demak.

Gambar III.12
Isu Terkait Bencana Rob dan Land Subsidence

Isu strategis penataan ruang Rob dan Land Subsidence

- Kecamatan Sayung sebagai salah satu PKN saat ini merupakan daerah rawan bencana Rob dan Land Subsidence sehingga perlu menjadi pertimbangan utama baik dalam Perencanaan Spasial maupun Aspasial
- Kawasan Kecamatan Sayung saat ini merupakan penopang aktivitas Industri namun memiliki Indeks Kerentanan yang sangat tinggi
- Penurunan tanah diperkirakan 7-8 cm per tahun
- Termasuk adanya Kawasan Industri Jatengland



Oleh karenanya, dalam konteks integrasi antara rencana tata ruang wilayah dan RPJPD, Isu bencana pesisir perlu diangkat, sehingga tercermin dalam salah satu misi ataupun program prioritas (sehingga dapat mengungkit efek lainnya). Isu strategis mengenai infrastruktur mitigatif atas permasalahan yang terjadi di Kabupaten Demak perlu menjadi program utama dengan skema pembiayaan APBN karena lintas wilayah. Pada saat tanggul terbangun maka dapat memicu aktivitas industri, marine industri, dan kawasan terbangun lainnya. Diharapkan bahwa pengembangan di Kabupaten Demak juga mengedepankan *Infill Development*: membangun pada daerah yang aman dan tidak mengusur (terutama perumahan) dalam konteks pesisir.

Selain hal di atas, hasil kajian sektoral sebelumnya menunjukkan bahwa *Urban Sprawl* kota Demak sudah mencapai 7 km, perlu kota satelit pendukung dengan tematik masing-masing misalnya kota pendidikan sisi barat Sport Center, kota jasa, dan logistik di selatan mendekati terminal, dsb. Lahan tersisa di dalam radius <math>< 5\text{ km}</math> dari inti kota terbatas, sebaiknya untuk alokasi perumahan skala menengah dan besar, sehingga kota tetap harmoni dan menyumbang pendapatan yang tinggi Dengan adanya *exit* tol di radius 3 km, akan semakin mempercepat naiknya kebutuhan pembangunan perumahan di Kota Demak.

Ditinjau dari segi potensi industri sebaiknya dalam perspektif 2045 mendatang, Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan penyediaan ruang industri (baik kawasan maupun peruntukan) di 4 sisi (Sayung, Karanganyar, Karangawen, dan Mijen), Industri kita berbasis sumber daya alam (*raw material*) dan *spill over* dari Kudus-Semarang-Jepara

3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Demak

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional dan provinsi, serta KLHS dan RTRW dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Demak yang akan ditangani dalam 20 tahun ke depan yang dijabarkan dalam empat aspek pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Isu Strategis pada Aspek Geografi dan Demografi

Isu strategis pada aspek geografi dan demografi perlu ditentukan untuk mengambil langkah serta strategi yang tepat terkait potensi dampak secara geografis dan demografis. Dari aspek geografi, pembahasan mengenai kualitas Sumber Daya Alam, kualitas aksesibilitas infrastruktur, kualitas infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam adalah poin-poin yang penting untuk dibahas. Sementara dari aspek demografi, pembahasan akan berhubungan dengan hal-hal terkait pertumbuhan dan distribusi penduduk dan dinamika pergeseran struktur demografi penduduk. Berikut ini adalah penjelasan isu-isu strategis terkait geografi dan demografi di Kabupaten Demak.

a. Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air

Kabupaten Demak tidak memiliki sumber mata air sehingga kebutuhan air paling banyak dipenuhi oleh aliran yang bersumber dari Waduk Kedungombo dan Rawapening. Sumber lainnya berasal dari air bawah tanah. Kedua sumber ini memiliki tantangannya masing-masing. Debit air sungai sangat dipengaruhi oleh pembagian air dari Waduk Kedungombo. Sering kali, Kabupaten Demak mengalami kekurangan air di musim kemarau. Sementara itu, pengambilan air bawah tanah dibatasi oleh aturan zonasi pengambilan air tanah (Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah). Kecamatan Sayung dan Karangtengah merupakan daerah zona merah pengambilan air tanah, padahal di wilayah tersebut terdapat wilayah industri yang membutuhkan pasokan air baku secara kontinu. Selain itu, kecamatan tersebut belum terlayani sambungan air perpipaan.

Dalam hal kualitas, Indeks Kualitas Air Kabupaten Demak masih tergolong baik (72,77). Namun, masih memiliki ancaman penurunan kualitas karena masuknya limbah ke badan air. Air baku masih perlu pemrosesan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Meskipun sudah memiliki PDAM, tetapi kualitas air yang dihasilkan belum siap minum.

b. Bencana Rob dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kabupaten Demak dialiri oleh sejumlah sungai yang turut menyumbang potensi bencana banjir. Wilayah Kabupaten Demak sebagian besar berada di daerah cekungan bekas rawa sehingga memiliki karakteristik tanah berlumpur. Kabupaten Demak menghadapi ancaman serius terkait dengan bencana rob (rob atau *tidal flood*). Bencana rob menjadi permasalahan yang mendesak karena kabupaten ini memiliki topografi datar dan terletak di dekat pantai, sehingga rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. Adanya rob akan merusak infrastruktur penting, seperti jalan dan pemukiman. Di samping itu rob juga berdampak pada hilangnya lahan pertanian dan perikanan serta menimbulkan kemacetan di jalur Pantura. Jika tidak segera tertangani maka dampaknya akan menenggelamkan beberapa kecamatan pada wilayah pesisir Kabupaten Demak.

Gambar III.13

Kawasan Terdampak Banjir dan Rob Pesisir Demak

KAWASAN PESISIR DEMAK

- 4 kecamatan : Sayung, Karangtengah, Bonang, & Wedung dan terdiri dari 22 desa di tepi pantai
- Luas kaw pesisir : 35.889 Ha → 14.663 Ha (40,8%) dari total Berpotensi Tergenang Banjir dan Rob

KAWASAN PERMUKIMAN

Total Luas Kawasan Permukiman di 4 Kecamatan 3.478 Ha, berpotensi terdampak banjir dan rob 743 Ha (21,4%)

KAWASAN PRODUKTIF LAINNYA

- Luas area Tambak 14.033 ha, berpotensi terdampak banjir dan rob 8.174 Ha atau (58%)
- Luas Area Pertanian 16.154 Ha, berpotensi terdampak banjir dan rob 3.156 Ha atau (19%)
- Luas Area Industri 338 Ha, berpotensi terdampak banjir dan rob 156 Ha atau (46%)



Gambar III.14
DAS Terkait Pesisir Demak



Gambar III.15
Tipologi Kawasan Pesisir



Kerusakan lingkungan hidup dapat terlihat dari meningkatnya kejadian bencana, seperti bencana kekeringan, banjir, kebakaran lahan, angin kencang/puting beliung. Perubahan iklim juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan kerusakan lingkungan. Salah satu penyebab perubahan iklim yaitu peningkatan emisi gas rumah kaca. Peningkatan emisi gas rumah kaca terutama disebabkan oleh emisi dari sumber energi yang semakin bertambah.

c. Pergeseran demografi masyarakat

Penduduk Kabupaten Demak diproyeksikan terus meningkat sampai tahun 2045, namun terjadi pergeseran demografi penduduk. Komposisi penduduk usia tua akan semakin bertambah sedangkan penduduk usia muda akan semakin berkurang. Pergeseran demografi penduduk juga berkaitan dengan meningkatnya derajat kesehatan yang berkontribusi pada membaiknya usia harapan hidup. Didasarkan pada hal ini, pelayanan untuk kelompok penduduk usia lanjut juga perlu untuk ditingkatkan termasuk infrastruktur pendukung.

Kondisi lain yang berpotensi terjadi dari pergeseran demografi adalah meningkatnya urbanisasi. Pergeseran demografi akan meningkatkan rasio ketergantungan, sehingga penduduk akan berusaha mencari tempat di mana tersedia lapangan pekerjaan (pusat perekonomian) untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Pergeseran demografi juga bisa menyasar pada proses urban desa, yaitu pergeseran desa-desa menjadi perkotaan yaitu dengan meningkatnya kepadatan penduduk, rasio pemukiman yang meningkat dibandingkan dengan sektor pertanian, dan aksesibilitas terhadap fasilitas urban (perkotaan). Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena akan membutuhkan beragam penyesuaian, terutama dalam persoalan struktur keluarga. Dengan demikian, pergeseran demografi masyarakat sangat berkaitan dengan strategi-strategi dalam aspek infrastruktur, layanan publik, dan struktur sosial yang adaptif.

d. Kemandirian pangan menuju hilirisasi industri yang berkelanjutan

Kemandirian pangan menghadapi tantangan berupa pemastian produksi pangan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatan produksi pertanian, diversifikasi tanaman, dan penggunaan teknologi tepat guna. Dengan adanya upaya memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi, program-program peningkatan produksi pangan menjadi sangat mungkin dilakukan. Dalam hal ini, pengembangan teknologi pangan untuk meningkatkan produksi dapat diarahkan menjadi produk industri jadi atau setengah jadi untuk dipasarkan. Selain itu, isu kemandirian pangan juga perlu memerhatikan keberlanjutan produksi pangan dengan upaya-upaya terkait keseimbangan ekosistem, hilirisasi industri hasil pertanian yang berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah.

2. Isu Strategis pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat yang baik dapat ditunjukkan dengan akses yang layak terhadap sumber daya tersedia dan akses terhadap layanan dasar yang dibutuhkan. Isu-isu strategis terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat juga akan berhubungan dengan kualitas hidup masyarakat, tingkat kebahagiaan, keadilan sosial kemasyarakatan, dan keterbukaan dalam mendapatkan sarana pengembangan diri. Untuk dapat mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera, berikut ini akan dipaparkan isu-isu terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat dengan lebih jelas.

a. Kemiskinan dan Kesempatan Kerja

Pembangunan di suatu wilayah, termasuk di Kabupaten Demak bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara unggul dan merata. Salah satu indikator kritis dalam menilai kesejahteraan sosial dan ekonomi adalah tingkat kemiskinan, yang diukur sebagai persentase penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Masih tingginya angka kemiskinan menjadi salah satu isu penting yang harus diperhatikan. Isu kemiskinan juga menjadi poros bagi permasalahan-permasalahan lainnya seperti angka pengangguran.

Kesempatan kerja dapat dilihat dari penyediaan lapangan kerja dan kemampuan pekerja untuk mengakses lapangan kerja. Penyediaan lapangan kerja utamanya sangat tergantung dari adanya usaha baru/pengembangan usaha melalui investasi. Kemampuan pekerja untuk mengakses lapangan kerja tergantung dengan *skill* dan pengetahuan yang dimiliki.

b. Kemandirian desa sebagai basis pemberdayaan masyarakat

Kemandirian desa menjadi isu krusial di Kabupaten Demak, di mana banyak desa masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan lokal. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat desa, yang dapat menghambat pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kemandirian.

Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai merupakan salah satu penyumbang rendahnya kemandirian desa. Penyediaan fasilitas kesehatan yang baik, pemberdayaan kader kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas hidup dan produktivitas di tingkat desa.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah penguatan ekonomi lokal. Banyak desa di Kabupaten Demak masih menghadapi tantangan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. Inisiatif pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, dukungan terhadap kelompok usaha kecil, serta fasilitasi akses pasar bagi produk lokal dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Diperlukan juga langkah-langkah untuk meningkatkan infrastruktur dasar, seperti jalan dan listrik, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian desa secara keseluruhan.

c. Transisi Epidemiologi

Transisi epidemiologi di Kabupaten Demak mencakup perubahan pola penyakit dan kesehatan masyarakat yang kompleks. Pergeseran ini mengindikasikan adanya transisi dari beban penyakit yang sebagian besar disebabkan oleh infeksi dan penyakit menular ke beban penyakit yang lebih banyak terkait dengan gaya hidup dan faktor non-menular. Dengan peningkatan kasus penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas, perlu adanya fokus lebih lanjut pada strategi promosi kesehatan dan pencegahan penyakit untuk mengatasi tren ini.

Kondisi kependudukan yang berubah dengan meningkatnya jumlah lansia dapat menciptakan tantangan tambahan. Peningkatan usia harapan hidup sering kali diiringi oleh peningkatan kasus penyakit kronis dan masalah kesehatan terkait usia. Begitu pula adanya tantangan perubahan penyakit menular kepada penyakit tidak menular sebagai penyebab morbiditas dan mortalitas masyarakat.

3. Isu Strategis pada Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing dalam pembangunan daerah sangat perlu untuk diperhatikan. Daya saing memiliki hubungan erat dengan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan nilai tambah, menarik penanaman investasi, keterbukaan lapangan kerja, dan secara umum pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Daya saing daerah akan berhadapan dengan kendala-kendala terkait pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, ekonomi, dan hal-hal mendasar lainnya. Secara lebih jelas, berikut adalah isu-isu strategis di Kabupaten Demak berdasarkan aspek daya saing daerah.

a. Sumber daya manusia yang berakhlak

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berakhlak menitikberatkan pada dimensi moral, etika, dan nilai-nilai keberadaban untuk membentuk karakter individu dan masyarakat secara ideal. Tantangan muncul dalam bentuk pendidikan karakter yang kurang mendalam, rendahnya keterlibatan masyarakat, kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik, keterbatasan akses terhadap materi pendidikan budi pekerti secara praktis, dan adanya kesenjangan sosial-ekonomi. Globalisasi juga menjadi tantangan yang serius dalam pengembangan SDM berakhlak. Adanya globalisasi menjadikan informasi yang masuk semakin deras, sehingga membutuhkan kemampuan literasi untuk dapat menyaringnya.

b. Peningkatan potensi investasi daerah berbasis komoditas unggulan lokal

Peningkatan potensi investasi berguna untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi di suatu daerah. Jumlah investasi yang besar akan memberikan dampak positif bagi meningkatkan daya saing suatu daerah. Meskipun demikian, persoalan investasi memiliki kondisi-kondisi yang kompleks dengan hambatan-hambatan yang cukup bervariasi. Secara umum isu terkait potensi investasi di Kabupaten Demak berkaitan dengan kondisi lingkungan yang cukup rentan dengan bencana alam (khususnya rob), fasilitas dasar seperti ketersediaan air baku, dan termasuk lahan yang dipandang produktif.

Kabupaten Demak memiliki komoditas unggulan lokal pada sektor pertanian, perikanan, industri, UMKM, dan pariwisata. Sebagian besar komoditas unggulan tersebut belum tergarap dengan baik. Untuk mengembangkan komoditas unggulan tersebut perlu adanya peningkatan investasi.

c. Penguatan daya saing wisata yang berbasis kearifan lokal/budaya, ekonomi kreatif, dan sektor unggulan daerah

Penguatan daya saing wisata diharapkan mampu menjadi lokomotif pengembangan sektor unggulan yaitu pertanian, perikanan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata itu sendiri. Keberadaan sektor pariwisata bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Selain memiliki potensi historis atau karakter budaya yang menarik bagi wisatawan, Kabupaten Demak juga menawarkan banyak pilihan wisata lainnya.

Kabupaten Demak, seperti banyak daerah di Indonesia, perlu mengoptimalkan peran pariwisata. Secara mendasar, Kabupaten Demak memiliki potensi wisata sejarah dengan keberadaan Masjid Agung Demak dan situs-situs bersejarah lainnya dengan potensi kearifan lokal. Meski demikian, pengembangan upaya-upaya pemasaran dan promosi pariwisata yang masih terbatas perlu dikembangkan dengan lebih baik. Beberapa hambatan yang menjadi tren dan isu adalah terkait infrastruktur pendukung, promosi yang efektif, serta pengelolaan destinasi yang berkolaborasi dengan sektor-sektor ekonomi lain.

Dari 17 sub sektor ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Demak baru ada 3 sub sektor yang sudah memiliki pola pengembangan yaitu kriya, pertunjukan, dan seni rupa. Pola pengembangan sub sektor ini akan menguatkan daya saing wisata di Kabupaten Demak.

d. Penataan Wilayah dan Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas yang Inklusif dan Berkelanjutan

Dalam konteks Penataan wilayah dan pemenuhan infrastruktur penunjang aksesibilitas yang inklusif dan berkelanjutan ini, beberapa tantangan muncul seperti ketidaksetaraan akses terhadap layanan publik dan infrastruktur. Pembangunan yang ada belum dapat dirasakan secara maksimal pada beberapa wilayah dan atau oleh sekelompok masyarakat seperti disabilitas, lansia, anak, perempuan, dan kaum marginal lainnya, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa penataan wilayah tidak meninggalkan sebagian masyarakat.

Saat ini masih ditemukan adanya bangunan-bangunan yang tidak sesuai RTRW (seperti pendirian bangunan di bantaran sungai dan pendirian permukiman di lahan hijau). Hal ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dan belum optimalnya penegakan aturan. Pada jangka panjang hal ini akan berdampak pada meningkatnya degradasi lingkungan.

Penataan wilayah perlu mempertimbangkan aspek ekonomi, khususnya dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pengembangan ekonomi lokal. Penataan wilayah tersebut diharapkan akan menurunkan ketimpangan wilayah sehingga terjadi inklusivitas.

e. Penciptaan dan Pemanfaatan Teknologi

Penciptaan dan pemanfaatan teknologi di Kabupaten Demak menghadapi sejumlah isu di masa mendatang jika tidak mendapat perhatian secara optimal. Tantangan utama dalam penciptaan dan pemanfaatan

teknologi adalah pesatnya perkembangan teknologi, kemampuan SDM dalam mengadopsi teknologi, dan ekosistem riset dan inovasi.

Perkembangan teknologi dalam beberapa dekade terakhir telah mengalami lonjakan yang sangat pesat, mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Mulai dari internet yang memungkinkan koneksi tanpa batas antar manusia di seluruh dunia, kecerdasan buatan yang mampu menganalisis data dalam hitungan detik, dan otomatisasi pada dunia usaha dan kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan pesatnya kemajuan ini, perlu diwaspadai terkait keamanan siber dan privasi data.

Kemampuan SDM dalam mengadopsi teknologi menjadi salah satu kunci penting dalam keberhasilan transformasi digital di berbagai sektor. Adopsi teknologi memerlukan lebih dari sekadar pemahaman teknis, dibutuhkan juga kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta akhlak yang baik. SDM harus mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan alat-alat teknologi baru, seperti kecerdasan buatan (AI), analisis data, dan platform digital, sehingga akan memberikan keunggulan kompetitif yang akhirnya akan menciptakan daya saing yang baik.

Pengembangan ekosistem riset dan inovasi menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing. Ekosistem riset dan inovasi adalah lingkungan yang mendukung dan mempercepat proses riset dan inovasi melalui kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, akademisi, industri (investor), media massa, serta masyarakat. Dalam ekosistem ini, ide-ide baru dapat berkembang, diuji, dan diimplementasikan dengan lebih cepat dan efisien. Riset dan inovasi juga memerlukan keberanian untuk mengambil risiko. Oleh karena itu, budaya yang mendorong riset dan inovasi, toleransi terhadap kegagalan, dan keterbukaan terhadap ide-ide baru sangat penting dalam menciptakan iklim riset dan inovatif yang kondusif.

4. Isu Strategis pada Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan publik memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Secara mendasar, pelayanan publik merupakan aspek yang paling dekat dan secara langsung berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Pelayanan publik juga merupakan muara dan juga fondasi bagi pembangunan di suatu daerah. Pelayanan publik yang berkualitas akan memberikan kenyamanan dan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, lingkungan daerah yang kondusif yang kolaboratif dan sinergis berhubungan langsung dengan aspek pelayanan publik.

a. Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Dinamis

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang merupakan penyelenggara pemerintahan harus dapat memastikan terlaksananya pelayanan yang responsif dan adaptif sehingga dapat menjawab dinamika kebutuhan aspirasi masyarakat. Kualitas layanan publik dan akuntabilitas menjadi aspek kunci dalam menciptakan pemerintahan yang responsif. Diperlukan peningkatan

kapasitas lembaga pemerintah untuk lebih fleksibel menghadapi perubahan dan berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat.

Penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perlu lebih didorong. Meningkatnya ruang partisipasi publik dalam perencanaan akan menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat masuk dalam program pemerintah.

Adaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi juga menjadi unsur integral dari tata kelola pemerintahan yang dinamis. Penerapan teknologi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, dan meningkatkan akses informasi. Kabupaten Demak perlu secara aktif memperbarui sistem tata kelola pemerintahannya agar dapat merespons dinamika kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dengan beberapa poin penjabaran dalam urgensi pembangunan jangka panjang Kabupaten Demak dua puluh tahun ke depan, bahwa isu strategis harus diperhatikan dan diintegrasikan dalam perencanaan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat pada beberapa aspek isu strategis yang sudah sesuai dengan pembahasan dalam RPJPD Provinsi dan Kabupaten Demak, yang terlihat pada gambar kesesuaian permasalahan dan isu yang tertuang pada gambar sebagai berikut.

Tabel III.3

Keterkaitan Isu Strategis

RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Demak

Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis Kabupaten Demak
Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Peningkatan potensi investasi daerah berbasis komoditas unggulan lokal
	Penguatan daya saing wisata yang berbasis kearifan lokal/budaya, ekonomi kreatif, dan sektor unggulan daerah
	Penciptaan dan pemanfaatan teknologi
	Kemandirian desa sebagai basis pemberdayaan masyarakat
Ketahanan pangan yang berkelanjutan	Kemandirian pangan menuju hilirisasi industri yang berkelanjutan
Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemenuhan kualitas dan kuantitas sumber daya air
	Penataan wilayah dan pemenuhan kualitas infrastruktur penunjang aksesibilitas yang inklusif dan berkelanjutan



Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis Kabupaten Demak
Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Bencana rob dan kerusakan lingkungan hidup
Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Sumber daya manusia yang berakhlak
	Transisi epidemiologi
	Pergeseran demografi masyarakat Kemiskinan dan kesempatan kerja
Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri manusia	Sumber daya manusia yang berakhlak
Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang responsif dan dinamis



**VISI DAN
MISI DAERAH**

04

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Dalam rangka berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045, yang menjadi aspirasi utama dalam implementasi pembangunan nasional jangka panjang dari tahun 2025 hingga 2045, Kabupaten Demak turut menyusun visi jangka panjang daerah. Dalam merencanakan masa depan, visi RPJPD mencerminkan aspirasi dan harapan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Demak pada akhir periode perencanaan dua puluh tahun mendatang.

Misi pembangunan merupakan penjabaran umum mengenai langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi yang dirumuskan dengan baik membantu memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang visi yang ingin dicapai dan merincikan tindakan konkret apa yang perlu dilakukan. Dalam penyusunan misi daerah, perhatian diberikan pada faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, yang memengaruhi pembangunan daerah. Misi ini dirancang untuk menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan dalam rangka mencapai visi jangka panjang daerah Kabupaten Demak.

Berdasarkan kerangka penyusunannya, visi dan misi jangka panjang daerah adalah aspirasi dan harapan masyarakat yang dijadikan sebagai landasan bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam proses perumusannya, keterlibatan masyarakat secara partisipatif sangat penting. Salah satu cara untuk melibatkan masyarakat adalah melalui metode kuesioner, *Focus Group Discussion* (FGD), Forum Konsultasi Publik (FKP), dan Musrenbang. Oleh karena itu, RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 mengakomodasi pendapat dan aspirasi masyarakat dalam pembentukan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Demak. Hal ini menegaskan komitmen untuk mengakomodasi beragam pandangan dan kebutuhan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Proses perumusan visi juga mempertimbangkan visi nasional, visi provinsi Jawa Tengah, serta merujuk pada dokumen RTRW dan KLHS.

4.1 VISI RPJPD KABUPATEN DEMAK

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Demak tahun 2025-2045 diharapkan sejalan dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu **Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**. Penentuan visi ini didasarkan pada beberapa faktor seperti, kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, perkembangan megatren global, dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Visi RPJPD Kabupaten Demak juga memperhatikan keselarasan visi Provinsi Jawa Tengah yaitu “**Jawa Tengah sebagai Penumpu**

Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan”.

Berdasarkan simpulan dari harapan masyarakat dan dengan memperhatikan visi dan misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, serta tujuan RTRW dan KLHS RPJPD, maka dapat dilihat kerangka logis perumusan visi Kabupaten Demak sebagai berikut:

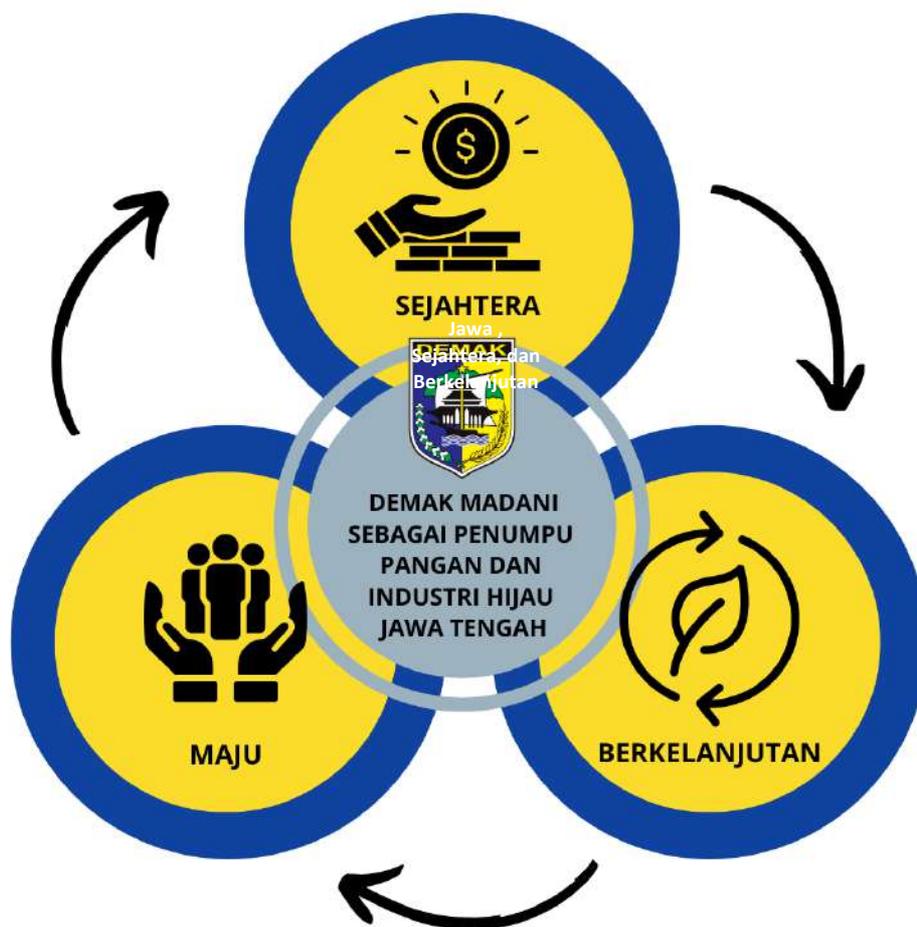


Berdasarkan kerangka berpikir pembangunan jangka panjang yang tergambar dalam *logical framework* di atas, dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan daerah periode sebelumnya, potensi daerah, permasalahan pembangunan daerah, isu dan tantangan global, harapan masyarakat berdasarkan hasil penjaringan aspirasi, tujuan RTRW, dan rekomendasi KLHS ditetapkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Demak tahun 2025-2045, yaitu:

“Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Kalimat visi yang telah dirumuskan ini menunjukkan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Demak dalam satu tema khusus yaitu Demak Madani sebagai penumpu pangan dan industri hijau Jawa Tengah dengan tiga pokok visi yaitu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Keterkaitan antar pokok visi di atas dapat dijelaskan melalui diagram berikut ini:

Gambar IV.2
Keterkaitan Antar Pokok Visi RPJPD Kabupaten Demak
Tahun 2025-2045



Untuk dapat menjelaskan dengan lebih komprehensif, berikut adalah penjelasan atas tema khusus dan pokok visi RPJPD Kabupaten Demak:

Tema Khusus: Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah

Madani dapat diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang beriman, cerdas, sehat, menguasai teknologi, berpegang pada nilai moral dan hukum sehingga tercipta kesejahteraan sosial ekonomi.

Tema khusus Penumpu Pangan Jawa Tengah sesuai dengan potensi Kabupaten Demak sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Sektor pertanian merupakan kontribusi terbesar kedua pada perekonomian Kabupaten Demak. Komoditas strategis pangan yang dimiliki Kabupaten Demak yaitu padi (Produksi terbesar ke-4 di Provinsi Jawa Tengah), kacang hijau (Produksi terbesar ke-2 di Provinsi Jawa Tengah), dan bawang merah

(Produksi terbesar ke-2 di Provinsi Jawa Tengah). Selain komoditas strategis, terdapat komoditas unggulan lokal seperti jambu, belimbing, dan sorgum.

Tema khusus Industri Hijau Jawa Tengah dapat dipahami sebagai inisiatif yang bertujuan untuk mengembangkan sektor industri yang ramah lingkungan. Sektor industri merupakan kontribusi terbesar pada perekonomian Kabupaten Demak. Dalam pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak diarahkan pada pengembangan kawasan industri berdasarkan prinsip mandiri, keberlanjutan, dan kelestarian alam.

1. Maju

Maju adalah kondisi di mana kondisi masyarakat Kabupaten Demak telah mencapai keunggulan dalam berbagai aspek kehidupan. Keunggulan ini mencakup aspek sumber daya manusia, kondisi wilayah yang aman secara sosial, dan pemerintahan yang tangguh dan handal. Pokok visi ini akan diarahkan kepada pembangunan Kabupaten Demak yang modern, inovatif, dan memiliki tingkat daya saing sumber daya manusia yang tinggi, sembari tetap secara sinergis mempertahankan identitas serta nilai-nilai lokal.

2. Sejahtera

Masyarakat Demak di masa depan akan menjadi masyarakat yang sejahtera perekonomiannya ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang diiringi dengan pemerataan dan pengurangan kemiskinan. Kesejahteraan ekonomi tersebut diwujudkan dalam perekonomian yang terus tumbuh, berdaya saing, inovatif, mandiri, dan dipastikan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak. Kesejahteraan harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga kemiskinan dan ketimpangan dapat ditekan secara signifikan.

3. Berkelanjutan

Berkelanjutan adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi seimbang dengan pembangunan sosial, kelestarian lingkungan hidup dan tangguh bencana. Pada masa-masa mendatang, pembangunan di Kabupaten Demak harus mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan dimaknai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, adil, dan seimbang dengan pembangunan sosial tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan juga akan diarahkan pada pembangunan yang memperhatikan mitigasi dan adaptasi bencana sehingga terwujud kondisi lingkungan dan masyarakat yang tangguh bencana.

Sesuai surat edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tanggal 17 April 2024 tentang Penyelarasan Rencana RPJPD Kabupaten/Kota dengan Rencana RPJPD Provinsi Jawa Tengah, visi kabupaten perlu diselaraskan dengan visi Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana berikut:

Tabel IV.1
Penyelarasan Pokok Visi RPJPD Kabupaten Demak dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045

VISI RPJPD Provinsi Jawa Tengah	Visi RPJPD Kabupaten Demak
“Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan”	“Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”
<p>Maju, meliputi substansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daya saing - Modern - Inovatif - Mandiri - Tangguh - Aman 	<p>Maju, meliputi substansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya manusia yang berdaya saing; - Modern; - Inovatif; - Tangguh; - Aman; - Handal <p>Sejahtera, meliputi substansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pendapatan; - Penurunan kemiskinan; - Pemerataan kesejahteraan; - Perekonomian yang berdaya saing - Inovatif; - Mandiri
<p>Berkelanjutan, meliputi substansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; - Risiko bencana 	<p>Berkelanjutan, meliputi substansi,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keseimbangan ekonomi-sosial-lingkungan; - Tangguh bencana
<p>Tema khusus: Penumpu Pangan dan Industri Nasional</p>	<p>Tema Khusus: Demak Madani sebagai Penumpu pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah</p>

Pencapaian Visi Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan terukur melalui sasaran visi sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia. Sasaran ini untuk mengetahui capaian visi maju dalam hal perwujudan masyarakat yang

- modern, inovatif, cerdas, sehat, memiliki tingkat daya saing sumber daya manusia yang tinggi dan tetap secara sinergis mempertahankan identitas serta nilai-nilai lokal. Indikator sasaran ini adalah Indeks Pembangunan Manusia;
2. Pemerintahan yang tangguh dan handal. Sasaran ini untuk mengetahui capaian visi maju dalam hal pemerintahan yang tangguh dan handal. Indikator sasaran ini adalah Kapasitas Institusi;
 3. Peningkatan pendapatan per kapita. Sasaran ini untuk mengetahui capaian visi sejahtera dalam hal perwujudan perekonomian yang terus tumbuh, berdaya saing, inovatif, dan mandiri. Indikator sasaran ini diukur melalui indikator PDRB per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan.
 4. Penurunan kemiskinan diiringi pemerataan kesejahteraan. Sasaran ini untuk mengetahui capaian visi sejahtera. Sasaran ini untuk menjawab harapan penurunan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pemerataan kesejahteraan. Indikator sasaran ini adalah Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Kontribusi PDRB Kabupaten Demak terhadap Provinsi Jawa Tengah.
 5. Penurunan intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*. Sasaran ini untuk mengetahui capaian visi berkelanjutan, yaitu adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Indikator sasaran ini adalah Penurunan Emisi (GRK) Kumulatif.

Gambar IV.3
Keterkaitan Visi dengan Sasaran Visi Kabupaten Demak



Dalam rangka menjamin keberhasilan pembangunan selama 20 tahun ke depan, maka ditetapkan target pada tiap indikator sasaran visi, sebagai berikut:

Tabel IV.2
Sasaran Visi, Indikator, dan Target RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	75,98	78,36	81,26	84,09	87,41
Pemerintahan yang tangguh dan handal	Kapasitas Institusi	4,41	4,48	4,56	4,65	4,75
Peningkatan Pendapatan Per Kapita	PDRB per kapita (Juta Rupiah)	29,58-29,99	39,34-41,08	58,83-63,72	87,48-98,29	137,32-161,28
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,85-5,32	4,7-5,5	5,5-6,3	5,2-6,0	4,6-5,4
	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	33,43	35,00	36,95	38,91	41,26
Penurunan kemiskinan diiringi pemerataan kesejahteraan	Tingkat Kemiskinan (%)	10,39-11,01	8,31-8,92	5,71-6,30	3,12-3,69	0,00-0,55
	Rasio Gini	0,300-0,308	0,294-0,304	0,288-0,300	0,277-0,296	0,260-0,290
	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah (%)	1,98	2,00	2,04	2,07	2,12
Penurunan Intensitas emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK Kumulatif (Ton CO2 eq)	224.790,77	4.099.730,66	8.943.405,53	13.787.080,40	19.599.490,24

Untuk memastikan terjadinya sinergitas antara visi pembangunan jangka panjang daerah dengan nasional, maka diperlukan penyesuaian antara visi RPJPD Kabupaten Demak, visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan Visi RPJMN sebagaimana yang dapat dilihat dalam gambar dan tabel berikut ini:

Gambar IV.4
Keterkaitan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJD Kabupaten Demak





Tabel IV.3

Persandingan Indikator Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kabupaten 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	GNI per Kapita (US\$)	5.500-5.520	23.000-30.300	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	49,30-49,73	230,77-276,24	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	PDRB per kapita (juta rupiah)	29,58-29,99	137,32-161,28
		Kontribusi PDB maritim (%)	8,1	15,00		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	57,59	222,31		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,85-5,32	4,6-5,4
		Kontribusi PDB manufaktur (%)	20,8	28,00		Kontribusi PDRB industri pengolahan (%)	33,88-34,06	40,71-41,71		Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan (%)	33,43	41,26
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0	0,5 - 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat kemiskinan (%)	9,00-9,66	0,25-0,75	Penurunan kemiskinan diiringi pemerataan kesejahteraan	Tingkat kemiskinan (%)	10,39-11,01	0,00-0,55
		Rasio gini	0,379 – 0,382	0,290 – 0,320		Rasio Gini	0,362-0,367	0,301-0,345		Rasio Gini	0,300-0,308	0,260-0,290
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28,5		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	8,25	6,82		Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah (%)	1,98	2,12
						Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,90-5,60	4,48-5,53				



No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kabupaten 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	<i>Global Power Index</i> (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Kapasitas Institusi (Angka)	4,59	4,92	Pemerintahan yang tangguh dan handal	Kapasitas Institusi	4,41	4,75
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,56	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia (Angka)	0,59	0,80	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	75,98	87,41
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	0,32	82,75	Penurunan intensitas emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK Kumulatif (ton CO2 eq)	224.790,77	19.599.490,24
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	83,00		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Angka)	75,68	79,58				

4.2 MISI RPJPD KABUPATEN DEMAK

Misi adalah pernyataan umum yang merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Rumusan misi yang efektif membantu menjelaskan dengan lebih jelas gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan langkah-langkah konkret yang akan diambil. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara pokok visi dan misi RPJPD Kabupaten Demak:

Gambar IV.5
Keterhubungan Antara Pokok Visi dan Misi
RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045

MAJU	SEJAHTERA	BERKELANJUTAN
<p>Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berketahanan Sosial Budaya</p> <p>Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan</p>	<p>Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif</p> <p>Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkeadilan</p>	<p>Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan Berbasis Ketahanan Ekologi dan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan</p>

Berdasarkan visi jangka panjang Kabupaten Demak tahun 2025-2045 yang telah ditentukan yaitu **“Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**, maka misi RPJPD Kabupaten Demak dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berketahanan sosial budaya

Misi kesatu dalam pencapaian visi Demak Maju adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berketahanan sosial budaya. Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai moral, religi, dan budaya luhur diharapkan dapat membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas tetapi juga berketahanan sosial dan budaya. Ketahanan sosial budaya dimulai dari lingkup masyarakat terkecil yaitu pembangunan keluarga yang berkualitas dan penanaman nilai-nilai kesetaraan gender dan inklusivitas. Sebagai landasan mewujudkan sumber daya manusia yang berketahanan sosial budaya dibutuhkan pembangunan manusia yang sehat.

2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan

Misi kedua dalam pencapaian visi Demak Maju adalah mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan. Transformasi tata kelola dilakukan melalui penguatan tata kelola kelembagaan, regulasi, ASN yang berintegritas dan adaptif, digitalisasi pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, dan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Transformasi tata kelola pemerintahan juga harus mampu menciptakan stabilitas dan kondusivitas wilayah.

3. Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif

Misi ketiga dalam visi Demak Sejahtera adalah mewujudkan transformasi ekonomi masyarakat yang inklusif diwujudkan melalui dua hal

yaitu meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi unggulan dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan. Peningkatan nilai tambah sektor ekonomi unggulan dilakukan melalui pengembangan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi. Penciptaan nilai tambah dilandaskan pada penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, serta integrasi ekonomi domestik dan global. Peningkatan nilai tambah sektor ekonomi harus dapat menciptakan pendapatan masyarakat secara signifikan serta terjadi pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan. Untuk menjaga peningkatan pendapatan masyarakat secara kontinu perlu adanya stabilitas pada ekonomi makro sehingga tercipta daya saing daerah yang unggul.

4. Mewujudkan transformasi sosial yang berkeadilan

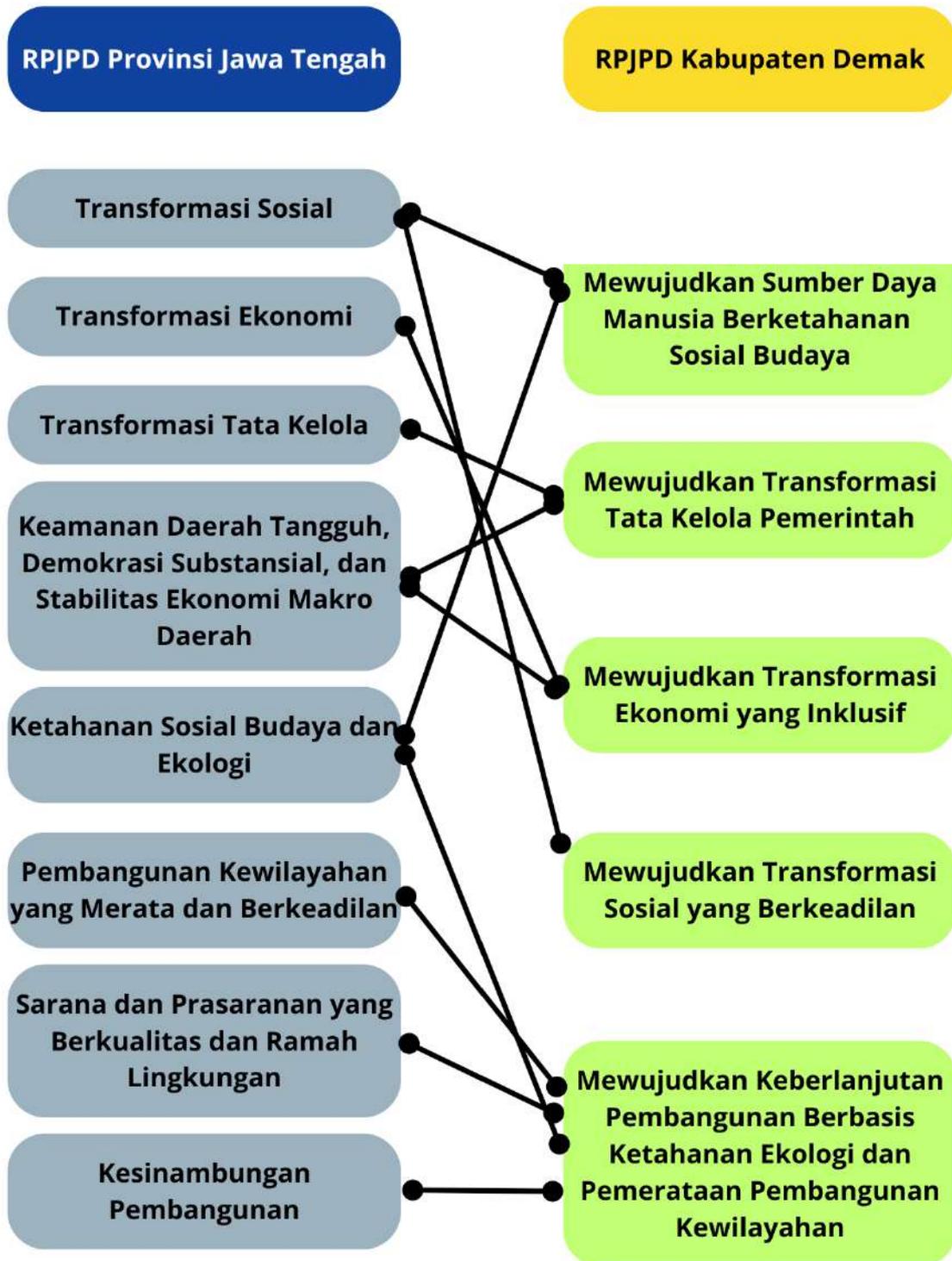
Misi keempat untuk mencapai visi Demak Sejahtera adalah mewujudkan transformasi sosial yang berkeadilan. Perekonomian tidak hanya sekedar tumbuh tetapi harus memperhatikan prinsip inklusivitas yaitu merata dan berkeadilan. Transformasi sosial meliputi upaya-upaya pengentasan kemiskinan. Dalam dua puluh tahun yang akan datang, tingkat kemiskinan Kabupaten Demak mendekati nol persen. Angka kemiskinan tersebut juga harus diiringi upaya pemerataan dan pengurangan kesenjangan antar kelas sosial. Untuk menyukseskan terjadinya transformasi sosial diwujudkan melalui perlindungan sosial yang adaptif di masyarakat.

5. Mewujudkan keberlanjutan pembangunan berbasis ketahanan ekologi dan pemerataan pembangunan kewilayahan

Misi kelima untuk mencapai visi Demak Berkelanjutan adalah mewujudkan keberlanjutan pembangunan berbasis ketahanan ekologi dan pemerataan pembangunan kewilayahan. Pembangunan kewilayahan perlu menerapkan asas pembangunan berkelanjutan dan kaidah inklusivitas. Pembangunan dilaksanakan secara merata baik dari segi wilayah ataupun kondisi sosial. Pembangunan harus memperhatikan dampak lingkungan dan mitigasi bencana sehingga terwujud kondisi lingkungan yang berkualitas; berketahanan energi, air, dan mandiri pangan; dan resiliensi terhadap bencana serta perubahan iklim.

Berdasarkan narasi di atas, maka penyelarasan antara misi RPJPD Kabupaten Demak dan misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar IV.6
Keterkaitan antara Misi RPJPD Kabupaten Demak dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2045





ARAH
KEBIJAKAN
DAN SASARAN
POKOK



05

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Dalam proses pencapaian visi dan misi jangka panjang memerlukan tema dan arah kebijakan sebagai petunjuk strategis setiap tahapan per lima tahun selama dua puluh tahun. Tema dan arah kebijakan dapat dijadikan arahan atau pedoman calon kepala daerah dalam merumuskan visi, misi, dan program politik. Tema dan arah kebijakan disusun menjadi tahapan-tahapan periode lima tahunan dan diterjemahkan ke dalam sasaran pokok serta indikator sebagai ukuran keberhasilan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Demak.

Tema pembangunan Kabupaten Demak dimulai dengan Penguatan Fondasi Transformasi (Tahap I), Percepatan Transformasi (Tahap II), Perwujudan Daya Saing Daerah (Tahap III), dan Perwujudan Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan (Tahap IV).

Gambar V.1
Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak



5.1.1 Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Penguatan fondasi transformasi pada tiap misi difokuskan pada tema-tema sebagai berikut:

A. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berketahanan Sosial Budaya

Pada tahap pertama mewujudkan sumber daya manusia yang berketahanan sosial budaya di Kabupaten Demak diarahkan pada **“Pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan”** dan **“Pemenuhan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas sosial budaya masyarakat”**.

Pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat memiliki akses yang merata dalam layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas secara tuntas. Hal ini penting dalam membangun masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif.

Pembangunan manusia juga harus memperhatikan kualitas sosial budaya masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan manusia tidak hanya untuk menciptakan manusia yang cerdas dan sehat, tetapi juga menciptakan masyarakat yang memiliki sistem moral dan etika yang sesuai dengan kebudayaan serta kebijaksanaan lokal.

B. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Pada tahap pertama mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Demak diarahkan pada **“Kelembagaan dan regulasi tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, dan digitalisasi pelayanan publik”**. Kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan pada periode pertama ini akan diarahkan pada tercapainya kualitas kelembagaan dan regulasi yang tepat fungsi sesuai dinamika. Pembangunan struktur dan regulasi yang fungsional, perlu diiringi dengan peningkatan kualitas ASN berbasis merit. Digitalisasi pelayanan publik perlu diperluas pada berbagai bidang sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Transformasi tata kelola pemerintahan juga harus terwujud pada terpeliharanya keamanan masyarakat dan kondusivitas wilayah.

C. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif

Pada tahap pertama mewujudkan transformasi ekonomi inklusif Kabupaten Demak diarahkan pada **“Inisiasi penerapan ekonomi hijau dan biru serta penguatan riset, inovasi, dan digitalisasi untuk mendorong peningkatan produktivitas”**. Transformasi ekonomi dimulai dengan inisiasi penerapan ekonomi hijau dan biru. Sistem ekonomi hijau merupakan praktik ekonomi yang mendorong aktivitas perekonomian rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Pada periode ini, riset inovasi harus dikuatkan dan didasarkan kepada keberlanjutan pembangunan. Kebijakan-kebijakan ini perlu diarahkan dengan memasukkan aspek digital yang mampu mendorong produktivitas di sektor ekonomi.

D. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkeadilan

Pada tahap pertama mewujudkan transformasi sosial yang berkeadilan di Kabupaten Demak diarahkan pada **“Pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif”**. Perlindungan sosial adalah suatu skema penjangaan sosial yang secara potensial memiliki tingkat efektivitas yang baik dalam mencegah dan menangani kerentanan sosial. Dengan adanya perlindungan sosial yang adaptif, diharapkan dapat menekan tingkat kemiskinan sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan.

E. Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan Berbasis Ketahanan Ekologi dan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan

Pada tahap pertama mewujudkan keberlanjutan pembangunan berbasis ketahanan ekologi dan pemerataan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Demak diarahkan pada **“Pemenuhan infrastruktur dan ketaatan penataan ruang wilayah dalam penanggulangan rob dan bencana”**. Infrastruktur tahan bencana merupakan aspek penting dalam upaya memitigasi risiko dan dampak bencana.

Bencana di Kabupaten Demak berdampak terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat khususnya banjir dan rob. Beberapa upaya dalam penanganan banjir dan rob di Kabupaten Demak yang perlu dilakukan di antaranya pembangunan tanggul laut, normalisasi sungai, pembuatan polder, konservasi *mangrove*, pembuatan bangunan adaptif bencana, dan pembuatan jalur mitigasi bencana. Rob juga telah menjadi perhatian nasional, di mana penanganan kawasan pantai utara Jawa telah tercantum di RPJPN Tahun 2025-2045

Untuk menekan terjadinya bencana, ketaatan pelaksanaan tata ruang wilayah juga perlu menjadi fokus perhatian. Pengelolaan tata ruang yang baik akan membantu meminimalisir risiko bencana seperti banjir, rob, abrasi pantai, dan *land subsidence*. Ketaatan penataan ruang juga termasuk dalam hal pemenuhan ruang publik dan ruang terbuka hijau. Pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan lahan perlu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pengawasan yang ketat serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan harus terus ditingkatkan.

5.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030-2034

Percepatan transformasi pada tiap misi difokuskan pada tema-tema sebagai berikut:

A. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berketahanan Sosial Budaya

Pada tahap kedua mewujudkan sumber daya manusia yang berketahanan sosial budaya di Kabupaten Demak diarahkan pada **“Percepatan pemenuhan SDM yang berkualitas dan siap berkarya”** dan **“Percepatan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas sosial budaya masyarakat”**.

Percepatan pemenuhan SDM yang berkualitas dimaksimalkan untuk dapat memenuhi kebutuhan SDM pada sektor unggulan Kabupaten Demak. SDM yang berkualitas ini diharapkan juga dapat menjadi wirausaha-wirausaha sehingga berdampak pada akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Percepatan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas sosial budaya masyarakat sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pembangunan difokuskan pada pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Dengan memahami karakteristik budaya masyarakat setempat, pembangunan dapat disesuaikan agar tidak merusak tatanan sosial yang telah ada. Selain itu, pembangunan yang menghormati budaya akan memperkuat identitas daerah, sehingga masyarakat tidak hanya mengalami

peningkatan ekonomi, tetapi juga merasa bangga terhadap warisan sosial budaya mereka.

B. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Pada tahap kedua transformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Demak diarahkan pada **“Kolaborasi kelembagaan, peningkatan kualitas regulasi, percepatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dan ASN yang kompeten dan berintegritas”**. Kolaborasi kelembagaan mencakup kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan media. Kerja sama antar-lembaga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Regulasi yang jelas dan berkualitas akan memberikan kepastian hukum sehingga keamanan dan kondusivitas wilayah dapat terjaga. Sementara itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan mempermudah akses masyarakat, meningkatkan transparansi, dan mengurangi potensi korupsi. Dalam mewujudkan hal ini, dibutuhkan ASN yang memiliki kompetensi tinggi dan juga melaksanakan tugas dengan penuh integritas.

C. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif

Pada tahap kedua transformasi ekonomi inklusif Kabupaten Demak diarahkan pada **“Percepatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dengan penerapan ekonomi hijau dan biru”**. Kebijakan-kebijakan yang akan dibuat pada periode kedua ini diarahkan pada akselerasi sektor pertanian, perikanan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata. Percepatan yang dimaksud akan dilaksanakan dengan menggunakan *framework* ekonomi hijau dan biru sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

D. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkeadilan

Pada tahap kedua transformasi sosial yang berkeadilan di Kabupaten Demak diarahkan pada **“Percepatan pengentasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi masyarakat”**. Dengan adanya pemenuhan perlindungan sosial pada tahap sebelumnya, pemerintah Kabupaten Demak harus merumuskan kebijakan yang mendukung percepatan pengentasan kemiskinan sehingga manfaat perlindungan sosial dapat dirasakan secara lebih luas dan menyeluruh.

E. Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan Berbasis Ketahanan Ekologi dan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan

Pada tahap kedua mewujudkan keberlanjutan pembangunan berbasis ketahanan ekologi dan pemerataan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Demak diarahkan pada **“Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung percepatan dan pengembangan ekonomi”**. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendorong percepatan dan pengembangan ekonomi sektor unggulan dengan tetap mempertimbangkan inklusivitas dan

ketahanan ekologi. Infrastruktur yang dibangun harus memperhatikan prinsip-prinsip tangguh bencana. Dengan infrastruktur yang memadai, dapat menarik lebih banyak investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

5.1.3 Arah Kebijakan Periode 2035-2039

Perwujudan daya saing daerah pada tiap misi difokuskan pada tema-tema sebagai berikut:

A. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berketahanan Sosial Budaya

Pada tahap ketiga mewujudkan sumber daya manusia yang berketahanan sosial budaya di Kabupaten Demak diarahkan pada **“Penguatan daya saing SDM yang kompetitif dan berperadaban”** dan **“Pemantapan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas sosial budaya masyarakat”**.

Kabupaten Demak berkomitmen untuk mengembangkan potensi SDM yang tidak hanya memiliki keterampilan dan pengetahuan tinggi, tetapi juga memiliki etika, moral, serta nilai-nilai kearifan lokal yang kuat. Di masa yang akan datang diharapkan dapat tercipta generasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, sambil tetap menjaga identitas dan kepribadian sebagai bangsa yang berperadaban.

B. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Pada tahap ketiga transformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Demak diarahkan pada **“Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, dan penguatan implementasi regulasi”**. Setelah berhasil menciptakan kolaborasi kelembagaan yang efektif pada tahap sebelumnya, kebijakan-kebijakan pemerintahan pada tahap ini diarahkan kepada penciptaan kualitas kelembagaan yang adaptif dengan implementasi regulasi secara tepat. Penguatan kelembagaan yang adaptif ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas sosial, menjaga keamanan serta kondusivitas wilayah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, kualitas SDM ASN juga harus semakin ditingkatkan agar lebih kompetitif dan mampu menjawab tantangan zaman.

C. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif

Pada tahap ketiga transformasi ekonomi inklusif Kabupaten Demak diarahkan pada **“Pemantapan ekonomi hijau dan biru, perluasan pusat pertumbuhan, dan penguatan branding daerah”**. Tahap ketiga ini merupakan tahapan pemantapan transformasi ekonomi di Kabupaten Demak yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada penciptaan dasar yang kuat untuk kemakmuran jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui pemantapan ekonomi hijau dan biru yang digunakan sebagai gagasan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pada tahap ini, Kabupaten Demak harus sudah dikenal sebagai penumpu pangan dan industri hijau di Provinsi Jawa Tengah.

Pusat pertumbuhan ekonomi tidak hanya didominasi pada kawasan perkotaan yang ada saat ini, tetapi harus mampu meluas dan menjangkau seluruh wilayah sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Dengan pendekatan yang inklusif, potensi daerah terpencil dan pedesaan dapat dioptimalkan.

D. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkeadilan

Pada tahap ketiga transformasi sosial yang berkeadilan di Kabupaten Demak diarahkan pada **“Pemantapan kesejahteraan masyarakat yang inklusif”**. Kesejahteraan masyarakat yang inklusif memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses program pembangunan, tanpa ada yang tertinggal atau terabaikan termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Upaya membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak karena bersifat lintas sektoral.

E. Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan Berbasis Ketahanan Ekologi dan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan

Pada tahap ketiga mewujudkan keberlanjutan pembangunan berbasis ketahanan ekologi dan pemerataan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Demak diarahkan pada **“Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kota Baru Berwawasan Lingkungan”**. Pembangunan pusat pertumbuhan kota baru dapat diarahkan untuk menghasilkan wilayah dengan karakteristik seperti pusat bisnis, pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat kebudayaan, pusat pariwisata, pusat industri dengan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan. Diharapkan hal ini akan dapat menjadi strategi yang kuat untuk mempercepat pembangunan dan menyebarkan manfaat ke wilayah yang mungkin belum berkembang dengan baik. Masing-masing kawasan pusat pertumbuhan akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga menjadi tematik yang kuat.

5.1.4 Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Perwujudan Kabupaten Demak madani sebagai penumpu pangan dan industri hijau yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan pada tiap misi difokuskan pada tema-tema sebagai berikut:

A. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berketahanan Sosial Budaya

Pada tahap keempat mewujudkan sumber daya manusia berketahanan sosial budaya di Kabupaten Demak diarahkan pada **“Terwujudnya masyarakat Demak yang Berdaya Saing dan Berperadaban”** dan **“Perwujudan Pembangunan Daerah yang Memperhatikan Kualitas Sosial Budaya Masyarakat”**. Masyarakat Demak pada periode terakhir pembangunan jangka panjang akan berada pada kondisi yang beriman, cerdas, sehat, menguasai teknologi, berpegang pada nilai moral dan budaya.

B. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Pada tahap keempat mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Demak diarahkan pada **“Tata Kelola**

pemerintahan yang bersih, responsif, dan adaptif dalam kerangka lingkungan bermasyarakat yang aman dan kondusif". Masyarakat Kabupaten Demak akan mendapatkan kualitas pelayanan publik yang prima serta terjaminnya keamanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut akan mendukung terpeliharanya kondusivitas dalam kehidupan sosial ataupun dalam aktivitas ekonomi.

C. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif

Pada tahap keempat mewujudkan transformasi ekonomi inklusif di Kabupaten Demak diarahkan pada **"Perwujudan masyarakat Demak yang sejahtera dalam kerangka perekonomian yang berkelanjutan"**. Masyarakat Kabupaten Demak dapat merasakan kesejahteraan secara merata. Sumber daya yang ada digunakan secara bijaksana agar dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya.

D. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkeadilan

Pada tahap keempat mewujudkan transformasi sosial yang berkeadilan di Kabupaten Demak diarahkan pada **"Perwujudan kesejahteraan masyarakat yang inklusif"**. Masyarakat Kabupaten Demak berada pada kondisi tingkat kemiskinan mendekati 0 (nol).

E. Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan Berbasis Ketahanan Ekologi dan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan

Pada tahap keempat mewujudkan keberlanjutan pembangunan berbasis ketahanan ekologi dan pemerataan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Demak diarahkan pada **"Perwujudan kawasan perkotaan yang nyaman, indah, dan terintegrasi"**.

Kabupaten Demak menjadi kota yang nyaman dan indah untuk ditinggali oleh masyarakat dengan ekologi yang lestari dan tangguh bencana. Berbagai wilayah di Kabupaten Demak terhubung secara fisik dan digital sehingga memudahkan mobilitas, lalu lintas informasi, serta interaksi antar wilayah. Pada tahap ini tidak ada lagi wilayah yang merasa termarginalkan.

5.2 SASARAN POKOK KABUPATEN DEMAK 2025-2045

Sasaran pokok disusun untuk menggambarkan pencapaian misi pada akhir masa pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dari arah kebijakan memiliki sejumlah indikator kinerja yang harus dicapai dalam empat periode per lima tahunan. Sasaran pokok dirumuskan berdasarkan kondisi awal pada tahun penyusunan dokumen jangka panjang dan menggambarkan target-target pada setiap akhir periode lima tahunan. Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Demak dijabarkan seperti berikut ini.

Sasaran Pokok 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Sehat

Pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata dan inklusif dalam rangka

menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas dan sehat difokuskan pada arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut:

DM 1. Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan produktif dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1) Perluasan upaya promotif-preventif melalui imunisasi dan deteksi dini, peningkatan literasi kesehatan, pembudayaan perilaku hidup sehat, pembiasaan olahraga, dan peningkatan kesehatan lingkungan; 2) Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; 3) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; 4) Pengendalian penyakit tidak menular serta percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan; 5) Percepatan penuntasan *stunting* dan permasalahan gizi melalui peningkatan ketahanan pangan dan pola konsumsi pangan; 6) Pemenuhan jumlah dan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan berkualitas; 7) Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan; 8) Pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan; 9) Penguatan riset, data dan informasi untuk mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti.

DM 2. Pendidikan Berkualitas secara inklusif

Pendidikan di Kabupaten Demak diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas merata pada seluruh lapisan masyarakat agar mendukung upaya perwujudan kesejahteraan. Dalam mewujudkan kondisi tersebut, kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Demak diarahkan pada arah kebijakan sebagai berikut: 1) Pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 2) Peningkatan dan pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; 3) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4) Penguatan kurikulum pendidikan yang berbasis kearifan dan budaya lokal, pengembangan talenta dan karakter, serta *digital literacy*; 5) Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.



Tabel V.1
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Sehat

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD III 2035-2039	RPJMD IV 2040-2045
Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas dan sehat	DM 1. Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,87	77,11	78,67	80,22	82,09
		Jumlah Kasus Kematian Ibu	12,00	10,00	8,00	5,00	2,00
		Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	7,50	6,77	5,86	4,95	3,86
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	90,00	93,00	95,00	96,00	100
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	90,00	91,00	92,00	93,00	95,00
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	98,71	98,87	99,07	99,27	99,50
	DM 2. Pendidikan Berkualitas secara inklusif	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):					
		a) Literasi Membaca SD/Sederajat	62,80	65,90	69,78	73,65	78,30
		b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	55,72	61,00	67,59	74,19	82,10
		c) Numerasi SD/Sederajat	53,49	61,18	70,80	80,42	91,96
	d) Numerasi SMP/Sederajat	33,01	41,15	51,33	61,51	73,73	



SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD III 2035-2039	RPJMD IV 2040-2045
		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	9,37	9,91	10,58	11,25	12,05
		Harapan Lama Sekolah	13,68	14,14	14,72	15,30	16,00
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	7,00	7,66	8,48	9,30	10,29
		Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	93,69	94,95	96,53	98,11	100

Sasaran Pokok 2. Meningkatnya aspek kebudayaan dalam pengembangan daya saing dan penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat

Pencapaian sasaran tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat memiliki karakter yang kuat dan cinta pada kebudayaan lokal sehingga tercipta daya saing dan ketahanan sosial budaya. Dalam rangka mewujudkan peningkatan aspek kebudayaan dalam pengembangan daya saing dan penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat diperlukan arah pembangunan dan arah kebijakan sebagai berikut:

DM 3. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter

Sektor kebudayaan dan pendidikan karakter di Kabupaten Demak diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki karakter budaya sehingga kebudayaan dapat terpelihara dari generasi ke generasi di tengah modernisasi dan globalisasi. Arah kebijakan dalam rangka mendukung arah pembangunan pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter adalah sebagai berikut: 1) Penguatan penanaman nilai-nilai budaya Jawa sejak dini dengan edukasi budaya Jawa mulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terkecil; 2) Internalisasi kurikulum kebudayaan Jawa di semua jenjang pendidikan, disertai peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam implementasi budaya Jawa pada anak-anak sekolah; 3) Edukasi di keluarga dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk mengajarkan identitas budaya Jawa melalui tutur kata sehari-hari, termasuk melakukan edukasi untuk para orang tua terkait pembelajaran kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari; 4) Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat; 5) Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat; 6) Penguatan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembentukan karakter masyarakat untuk memprioritaskan pendidikan kebudayaan dan kesenian; 7) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila; 8) Peningkatan budaya literasi di masyarakat.

DM 4. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Arah pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2) Edukasi tentang pentingnya perencanaan keluarga, metode kontrasepsi dan kesehatan reproduksi, serta peningkatan kapasitas dan ketrampilan keluarga; 3) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang; 4) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian,



kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; 5) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.



Tabel V.2

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Meningkatnya Aspek Kebudayaan Dalam Pengembangan Daya Saing dan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD III 2035-2039	RPJMD IV 2040-2045
Meningkatnya aspek kebudayaan dalam pengembangan daya saing dan ketahanan sosial budaya masyarakat	DM 3. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	82,32	85,61	89,71	93,82	98,75
		Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	18,21	21,26	25,07	28,89	33,46
		Jumlah pengunjung tempat bersejarah	2.250.000	2.650.000	3.150.000	3.650.000	4.250.000
		Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	18,96	20,68	22,83	24,97	27,55



		Tingkat pemanfaatan perpustakaan	0,67	1,44	2,40	3,37	4,52
	DM 4. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	64,18-66,12	67,24-69,27	71,06-73,21	74,88-77,14	79,47-81,87
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,37 - 0,36	0,35-0,32	0,32-0,26	0,29-0,21	0,26 - 0,14

Sasaran Pokok 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Responsif dan Adaptif

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan adaptif akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik dan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi dan pembangunan sosial. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok tersebut diperlukan arah pembangunan dan arah kebijakan sebagai berikut:

DM 5. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Arah pembangunan dalam rangka mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1) Penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, terintegrasi, serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat (*open government*); 2) Digitalisasi tata kelola pemerintahan; 3) Penguatan manajemen pemerintahan yang semakin adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko; 4) Penguatan kelembagaan yang efektif; 5) Akselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui penguatan manajemen ASN dan manajemen talenta secara efektif dan efisien; 6) Penguatan kolaborasi dan kerja sama antardaerah, antara daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perwujudan cita-cita pembangunan daerah; 7) Penguatan integritas setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat; 8) Penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi; 9) Peningkatan kualitas kebijakan berbasis data tunggal; 10) Penguatan pencegahan korupsi dan percepatan pemberantasan korupsi termasuk di dalamnya penguatan manajemen pengawasan.

DM 6. Ketenteraman dan Ketertiban serta Demokrasi Substansial

Arah pembangunan ketenteraman dan ketertiban serta demokrasi substansial dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1) Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas; 2) Penguatan kewaspadaan dini terhadap ancaman gangguan masyarakat; 3) Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat termasuk pendidikan politik kepada masyarakat; 4) Penegakan hukum yang berkeadilan; 5) Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.



Tabel V.3
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Responsif dan Adaptif

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD III 2035-2039	RPJMD IV 2040-2045
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Responsif dan Adaptif	DM 5. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	77,80	78,24	78,79	79,34	80,00
		Indeks Reformasi Hukum	54,20	61,36	70,31	79,26	90,00
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,65	3,82	4,03	4,25	5,00
		Indeks Pelayanan Publik	4,33	4,46	4,63	4,80	5,00
		Indeks Integritas Nasional	73,56	76,82	80,89	84,96	89,85
	DM 6. Ketenteraman dan Ketertiban serta Demokrasi Substansial	Jumlah Kejadian Konflik SARA	0	0	0	0	0

Sasaran Pokok 4. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Daerah

Meningkatnya nilai tambah dari sektor ekonomi unggulan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dalam upaya mewujudkan sasaran pokok tersebut, diperlukan arah pembangunan dan arah kebijakan sebagai berikut:

DM 7. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek dan inovasi menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang. Arah kebijakannya mencakup: 1) Penguatan budaya, iklim, dan karakter ilmiah; 2) Pengembangan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi yang berubah sangat pesat; 3) Pelibatan dunia usaha dalam rancangan proses bisnis iptek dan inovasi; 4) Penguatan dukungan sumber daya untuk memperkuat iptek dan inovasi; 5) Optimalisasi pemanfaatan iptek secara masif; 6) Pemberian apresiasi bagi masyarakat yang melaksanakan riset dan inovasi; 7) peningkatan kerja sama riset dan inovasi dengan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah lainnya, dan media; 8) Penguatan inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi.

Untuk menunjang produktivitas ekonomi diperlukan peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan arah kebijakan mencakup 1) Penguatan pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; 2) Penguatan sistem perlindungan tenaga kerja; 3) Penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan; 4) Penyediaan informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri; 5) Penuntasan pekerja anak.

Pada produktivitas ekonomi difokuskan pada sektor ekonomi unggulan daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Sektor Perindustrian

1) Penerapan prinsip-prinsip industri hijau; 2) Hilirisasi industri; 3) Sinkronisasi, integrasi, dan penyelarasan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan industri dengan nasional dan provinsi; 4) Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung industri pengolahan ramah lingkungan; 5) Penguatan integrasi rantai pasok antar industri; 6) Penguatan industri kecil dan menengah berbasis potensi lokal; 7) Pengembangan industri pengolahan berbasis teknologi, riset dan inovasi, dan ramah lingkungan; 8) Penguatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan agar lebih produktif, inovatif, kreatif, dan berdaya saing; 9) Digitalisasi industri pengolahan; 10) Penciptaan iklim usaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong produktivitas industri pengolahan; 11) Peningkatan/penguatan kawasan dan sentra industri.

Sektor UMKM

1) Peningkatan kualitas produk unggulan UMKM berbasis riset, inovasi, dan teknologi; 2) Fasilitasi perluasan akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha; 3) Peningkatan kelas UMKM melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM agar mampu mengembangkan produk UMKM yang dapat memenuhi selera pasar secara adaptif; 4) Akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM; 5) Penciptaan dan pengembangan wirausaha baru; 6) Penguatan koperasi produksi sebagai konsolidator UMKM terutama bagi usaha mikro kecil; 7) Perbaikan mekanisme pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam; 8) Peningkatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi; 9) Peningkatan produktivitas dan efisiensi BUMD.

Sektor Pariwisata

1) Membangun citra dan karakter kota untuk meningkatkan daya tarik pariwisata; 2) Pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan; 3) Penguatan promosi pariwisata; 4) Penguatan *multiplier effect* sektor pariwisata; 5) Peningkatan kualitas *event* dan destinasi wisata dengan perbaikan sarana prasarana dan pemenuhan konektivitas antar destinasi wisata; 6) Penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah; 7) Penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata; 8) Penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata; 9) Peningkatan kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif; 10) Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa; 11) Penyediaan infrastruktur yang memadai dan terjangkau untuk mendukung pengembangan kreativitas; 12) Peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif; 13) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan fasilitasi hak kekayaan intelektual; 14) Pengembangan dan penguatan jejaring komunitas kreatif; 15) Pengembangan sistem regulasi yang mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan) dan Perikanan

1) Pengembangan pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan; 2) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi hulu-hilir; 3) Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi untuk ekspor; 4) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan nelayan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi; 5) Penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi yang mendukung produktivitas pertanian dan perikanan serta daya saing produk pertanian dan perikanan; 6) Penyediaan sarana pertanian dan perikanan yang modern dan ramah lingkungan; 7) Pengembangan

ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, serta pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan; 8) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan; 9) Pengembangan petani dan nelayan muda agar terjadinya regenerasi secara berkelanjutan; 10) Pengembangan *urban farming*; 11) Korporasi pertanian dan perikanan melalui perluasan kelembagaan ekonomi petani/nelayan yang berbadan hukum dan sinergis dengan pembiayaan dan badan usaha lainnya.

DM 8. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Arah pembangunan integrasi ekonomi domestik dan global dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut: 1) Penguatan ekspor produk unggulan daerah; 2) Penguatan standarisasi produk-produk unggulan daerah sehingga mampu bersaing di pasar global dan nasional; 3) Mendorong investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif; 4) Peningkatan infrastruktur dasar berusaha; 5) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan untuk mampu menciptakan produk yang berdaya saing tinggi dan memasarkannya di pasar global maupun nasional; 6) Peningkatan efisiensi sistem logistik dengan memanfaatkan aglomerasi; 7) Penguatan iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah; 8) Pengendalian harga khususnya yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat.

DM 9. Penerapan Ekonomi Hijau

Arah pembangunan penerapan ekonomi hijau dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut: 1) Penguatan aksi pembangunan rendah karbon; 2) Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau; 3) Peningkatan ekonomi sirkuler dengan penekanan pada efisiensi sumber daya, pengurangan timbulan limbah dan emisi gas rumah kaca, perluasan kebijakan menuju 10 R (*refuse, rethink, reduce, reuse, recycle, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, and recover*); 4) Mendorong transisi energi terbarukan; 5) Penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor.

DM 10. Transformasi Digital

Arah pembangunan transformasi digital dilakukan melalui arah kebijakan transformatif berikut: 1) Penguatan sumber daya manusia melalui peningkatan literasi, keahlian, dan kompetensi digital; 2) Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); 3) Peningkatan digitalisasi di semua sektor ekonomi; 4) Pengembangan keterpaduan data; 5) Penguatan keamanan siber



Tabel V.4
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan
Target Terwujudnya Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Daerah

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD III 2035-2039	RPJMD IV 2040-2045
Meningkatnya nilai tambah sektor ekonomi unggulan daerah	DM 7. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	33,43	35,00	36,95	38,91	41,26
		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,33	3,76	4,30	4,84	5,48
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,10	2,56	3,13	3,70	4,39
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,30 - 4,40	4,86-4,08	4,31-3,68	3,76-3,28	3,10 - 2,80
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,16	60,98	63,26	65,54	68,27
		Return on Aset (ROA) BUMD (%)	3,50	3,75	4,06	4,38	4,75
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,35	3,05	3,92	4,79	5,84
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	192	233	298	380	509
		Kapabilitas Inovasi	2,3	2,64	3,07	3,49	4
	DM 8. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,08	29,11	29,14	29,17	29,21
	Disparitas Harga	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	



SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	<i>Baseline</i> 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD III 2035-2039	RPJMD IV 2040-2045
	DM 9. Penerapan Ekonomi Hijau	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO2eq)	224.790,77	4.099.730,66	8.943.405,53	13.787.080,40	19.599.490,24
	DM 10. Transformasi Digital	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	87,69	93,16	100,00	100,00	100,00

Sasaran Pokok 5. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Meningkatnya pendapatan masyarakat dimaksudkan untuk menjaga daya beli tetap terjaga diiringi peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam upaya mewujudkan sasaran pokok tersebut, diperlukan arah pembangunan dan arah kebijakan sebagai berikut:

DM 11. Stabilitas Ekonomi Makro

Arah pembangunan stabilitas ekonomi makro dapat dicapai melalui arah kebijakan yaitu: 1) Peningkatan produktivitas melalui peningkatan investasi dan kualitas SDM; 2) Peningkatan infrastruktur penunjang ekonomi; 3) Dukungan reformasi agraria dalam hal pemanfaatan tanah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; 4) Mendorong penguatan lembaga keuangan serta memperluas cakupan penyertaan modal; 5) Perluasan kemudahan akses kredit usaha bagi pelaku usaha sektor unggulan; 6) Mendorong koordinasi dengan *stakeholder* terkait keuangan; 7) Penguatan pengendalian inflasi daerah; 8) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah; 9) Pemanfaatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, dan optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD); 10) Sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah; 11) Mendorong pemanfaatan layanan jasa keuangan untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas; 12) Penyederhanaan regulasi untuk mendorong perekonomian; 13) Peningkatan perekonomian masyarakat berpendapatan rendah.

DM 12. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Arah pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui arah kebijakan berikut: 1) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas SDM lokal; 2) Pemenuhan dan pemerataan kebutuhan akses layanan dasar perdesaan; 3) Penguatan peran lembaga perekonomian desa melalui optimalisasi potensial lokal desa; 4) Penguatan kerja sama antar desa sebagai upaya pemerataan pusat pertumbuhan; 5) Percepatan penyediaan dan pemerataan kawasan permukiman dan rumah hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah; 6) Pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar merata di seluruh wilayah; 7) Peningkatan efisiensi sistem logistik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi; 8) Pemantapan kualitas pelayanan transportasi terutama angkutan umum untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta penerapan transportasi ramah lingkungan; 9) Pemenuhan kelengkapan jalan; 10) Peningkatan keselamatan transportasi.

DM 13. Daerah yang berdaya saing

Arah pembangunan daerah yang berdaya saing dilakukan melalui arah kebijakan berikut: 1) Penguatan riset dan inovasi di semua sektor pembangunan untuk meningkatkan produktivitas; 2) Penguatan *branding* daerah sebagai penumpu pangan dan industri hijau; 3) Peningkatan mutu dan daya saing produk sektor unggulan.

Tabel V.5
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD III 2035-2039	RPJMD IV 2040-2045
Meningkatnya pendapatan masyarakat	DM 11. Stabilitas Ekonomi Makro	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita Kabupaten (juta rupiah)	29,58-29,99	39,34-41,08	58,83-63,72	87,48-98,29	137,32-161,28
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,94	0,89	0,82	0,75	0,67
		Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	4,57	4,61	4,66	4,71	4,77
		Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB (%)	4,16	4,20	4,25	4,30	4,36
		Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	22,09-22,29	22,89-23,45	23,89-24,90	24,89-26,35	26,09-28,09
	DM 12. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Persentase Desa Mandiri (%)	13,99	19,09	25,47	31,85	39,51
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	74,44	79,55	85,94	92,33	100,00
		Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten (%)	89,83	91,60	93,82	96,04	98,70



SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD III 2035-2039	RPJMD IV 2040-2045
		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	15,00	30,00	37,00	43,00	50,00
	DM 13. Daerah yang berdaya siang	Indeks Daya Saing Daerah	3,36	3,59	3,87	4,16	4,50



Sasaran Pokok 6. Menurunnya Angka Kemiskinan Diiringi Pemerataan Kesejahteraan

Pengentasan kemiskinan penting untuk meningkatkan kualitas hidup individu, mengurangi penderitaan dan ketidaksetaraan, memperkuat stabilitas sosial dan politik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan mengurangi kemiskinan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan makmur. Dalam upaya mewujudkan sasaran pokok menurunnya angka kemiskinan diiringi pemerataan kesejahteraan diperlukan arah pembangunan dan arah kebijakan sebagai berikut:

DM 14. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Arah pembangunan perlindungan sosial yang adaptif dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut: 1) Peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui peningkatan akses permodalan, kesempatan kerja dan berusaha, kapabilitas SDM, investasi, dan produktivitas sektor unggulan; 2) Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui peningkatan bantuan sosial, perluasan penyediaan jaminan sosial, pemberian subsidi layanan dasar, bantuan pendidikan, dan menjaga stabilitas harga; 3) Mengurangi kantong kemiskinan melalui pemenuhan infrastruktur dasar khususnya bagi kelompok penduduk rentan, menumbuhkan pusat perekonomian baru, dan mengurangi risiko bencana; 4) Sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui pemanfaatan satu data kemiskinan dan pengarusutamaan perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan.



Tabel V.6
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Menurunnya Angka Kemiskinan Diiringi Pemerataan Kesejahteraan

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	<i>Baseline</i> 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD I 2035-2039	RPJMD I 2040-2045
Menurunnya angka kemiskinan diiringi pemerataan kesejahteraan	DM 14. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	10,39-11,01	8,31-8,92	5,71-6,30	3,12-3,69	0,00-0,55
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	41,54	47,54	55,04	62,54	71,54

Sasaran Pokok 7. Terwujudnya Pembangunan yang Ramah Lingkungan dan Mengarusutamakan Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Demak memastikan bahwa pembangunan juga menjamin perlindungan lingkungan di masa depan. Dalam upaya menuju perwujudan pembangunan ramah lingkungan serta memperhatikan pengelolaan lingkungan, diperlukan arah pembangunan dan arah kebijakan sebagai berikut:

DM 15. Lingkungan Hidup Berkualitas

Arah pembangunan menuju lingkungan hidup berkualitas dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut: 1) Penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan; 2) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 3) Pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah; 4) Perlindungan wilayah yang memberikan jasa lingkungan hidup atau fungsi ekologi atau keanekaragaman hayati serta pemulihan wilayah yang mengalami degradasi; 5) Kepatuhan pemanfaatan wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung; 6) Penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang; 7) Penguatan penyediaan sarana sanitasi aman bagi masyarakat; 8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan menjaga kearifan lokal untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.



Tabel V.7

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Pembangunan yang Ramah Lingkungan dan Mengarusutamakan Pembangunan Berkelanjutan

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD I 2035-2039	RPJMD I 2040-2045
Terwujudnya pembangunan yang ramah lingkungan dan mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan	DM 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,60	72,78	73,00	73,22	73,48
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	23,00	36,40	53,15	69,90	90,00
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	6,94	22,94	42,94	62,94	86,94

Sasaran Pokok 8. Terbangunnya Infrastruktur Dasar, Ekonomi, dan Sosial yang Berkualitas

Infrastruktur yang berkualitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong pemberdayaan sosial, serta menjamin keberlanjutan lingkungan. Dalam upaya perwujudan pembangunan infrastruktur dasar, ekonomi, dan sosial yang berkualitas diperlukan arah pembangunan dan arah kebijakan sebagai berikut:

DM 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Arah pembangunan berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok di atas dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1) Penguatan penyediaan sarana air minum aman bagi masyarakat khususnya air siap minum perpipaan; 2) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi; 3) Peningkatan kinerja sistem irigasi; 4) Peningkatan infrastruktur sumber daya air yang mampu menangkap air; 5) Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan peningkatan manajemen penggunaan air; 6) Pengembangan sumber air baku alternatif; 7) Peningkatan upaya konservasi air tanah; 8) Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan; 9) Penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan; 10) Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan; 11) Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*); 12) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu; 13) Mendorong upaya penghematan energi.



Tabel V.8
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan
Target Terbangunnya Infrastruktur Dasar, Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	<i>Baseline</i> 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD I 2035-2039	RPJMD I 2040-2045
Terbangunnya infrastruktur dasar, ekonomi dan sosial yang berkualitas	DM 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	0	4,00	19,00	45,00	100
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten (Angka)	57,21	62,71	69,58	73,46	77,21
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	6,76	5,77	4,54	3,31	1,83
		Indeks Ketahanan Pangan	89,45	90,30	91,35	92,41	93,68



Sasaran Pokok 9. Terciptanya Kondisi Lingkungan dan Masyarakat Yang Tangguh Bencana

Sasaran pokok ini melibatkan langkah-langkah untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana serta mengurangi dampaknya dengan cara yang berkelanjutan. Dalam upaya untuk mewujudkan sasaran pokok ini diperlukan arah pembangunan dan arah kebijakan sebagai berikut:

DM 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Arah pembangunan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dilaksanakan melalui arah kebijakan, yaitu: 1) Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti banjir, kekeringan, dan gempa bumi maupun bahaya lainnya; 2) Pengembangan mitigasi struktural (rekayasa teknologi, penyediaan sarana prasarana) dan non struktural (kebijakan dan regulasi) dalam rangka adaptasi perubahan iklim dan membentuk masyarakat yang tangguh bencana; 3) Pengembangan sistem pemulihan pasca bencana; 4) Peningkatan kapasitas dalam rangka adaptasi perubahan iklim melalui upaya adaptasi dan mitigasi; 5) Peningkatan upaya perlindungan pesisir dan mitigasi penurunan tanah .



Tabel V.9
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terciptanya Kondisi Lingkungan dan Masyarakat Yang Tangguh Bencana

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	<i>Baseline</i> 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD I 2035-2039	RPJMD I 2040-2045
Terciptanya kondisi lingkungan dan masyarakat yang tangguh bencana	DM 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	97,72-97,21	92,25-88,95	86,05-79,22	79,84-69,49	72,40 - 57,81

Tabel V.10
Keterkaitan Visi, Misi, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Target Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2025-2045

VISI	MISI	Arah Kebijakan				IUP (Indikator Utama Pembangunan)	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD III 2035-2039	RPJMD IV 2040-2045
		TEMA TAHAP I (2025-2029)	TEMA TAHAP II (2030-2034)	TEMA TAHAP III (2035-2039)	TEMA TAHAP IV (2040-2045)						
		Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan Transformasi	Perwujudan Daya Saing Daerah	Perwujudan Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Mewujudkan sumber daya manusia yang berketahanan sosial budaya	Pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan	Percepatan menuhan SDM yang berkualitas dan siap berkarya	Penguatan daya saing SDM yang kompetitif dan berperadaban	Terwujudnya masyarakat Demak yang berdaya saing dan berperadaban	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,87	77,11	78,67	80,22	82,09
						Jumlah Kasus Kematian Ibu	12,00	10,00	8,00	5,00	2,00
						Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	7,50	6,77	5,86	4,95	3,86
						Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	90,00	93,00	95,00	96,00	100



VISI	MISI	Arah Kebijakan				IUP (Indikator Utama Pembangunan)	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD III 2035-2039	RPJMD IV 2040-2045
		TEMA TAHAP I (2025-2029)	TEMA TAHAP II (2030-2034)	TEMA TAHAP III (2035-2039)	TEMA TAHAP IV (2040-2045)						
		Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan Transformasi	Perwujudan Daya Saing Daerah	Perwujudan Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
						Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	90,00	91,00	92,00	93,00	95,00
						Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	98,71	98,87	99,07	99,27	99,50
						Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):					
						a) Literasi Membaca SD/Sederajat	62,80	65,90	69,78	73,65	78,30



VISI	MISI	Arah Kebijakan				IUP (Indikator Utama Pembangunan)	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD III 2035-2039	RPJMD IV 2040-2045
		TEMA TAHAP I (2025-2029)	TEMA TAHAP II (2030-2034)	TEMA TAHAP III (2035-2039)	TEMA TAHAP IV (2040-2045)						
		Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan Transformasi	Perwujudan Daya Saing Daerah	Perwujudan Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
					b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	55,72	61,00	67,59	74,19	82,10	
					c) Numerasi SD/Sederajat	53,49	61,18	70,80	80,42	91,96	
					d) Numerasi SMP/Sederajat	33,01	41,15	51,33	61,51	73,73	
					Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	9,37	9,91	10,58	11,25	12,05	
					Harapan Lama Sekolah	13,68	14,14	14,72	15,30	16,00	
					Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	7,00	7,66	8,48	9,30	10,29	
					Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	93,69	94,95	96,53	98,11	100	



VISI	MISI	Arah Kebijakan				IUP (Indikator Utama Pembangunan)	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD III 2035-2039	RPJMD IV 2040-2045
		TEMA TAHAP I (2025-2029)	TEMA TAHAP II (2030-2034)	TEMA TAHAP III (2035-2039)	TEMA TAHAP IV (2040-2045)						
		Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan Transformasi	Perwujudan Daya Saing Daerah	Perwujudan Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		Pemenuhan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas sosial budaya masyarakat	Percepatan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas sosial budaya masyarakat	Pemantapan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas sosial budaya masyarakat	Perwujudan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas sosial budaya masyarakat	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	82,32	85,61	89,71	93,82	98,75
						Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	18,21	21,26	25,07	28,89	33,46
						Jumlah pengunjung tempat bersejarah	2.250.000	2.650.000	3.150.000	3.650.000	4.250.000



VISI	MISI	Arah Kebijakan				IUP (Indikator Utama Pembangunan)	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD III 2035-2039	RPJMD IV 2040-2045
		TEMA TAHAP I (2025-2029)	TEMA TAHAP II (2030-2034)	TEMA TAHAP III (2035-2039)	TEMA TAHAP IV (2040-2045)						
		Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan Transformasi	Perwujudan Daya Saing Daerah	Perwujudan Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
					Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	18,96	20,68	22,83	24,97	27,55	
					Tingkat pemanfaatan perpustakaan	0,67	1,44	2,40	3,37	4,52	
					Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	64,18-66,12	67,24-69,27	71,06-73,21	74,88-77,14	79,47-81,87	
					Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,37-0,36	0,35-0,32	0,32-0,26	0,29-0,21	0,26-0,14	



VISI	MISI	Arah Kebijakan				IUP (Indikator Utama Pembangunan)	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD III 2035-2039	RPJMD IV 2040-2045
		TEMA TAHAP I (2025-2029)	TEMA TAHAP II (2030-2034)	TEMA TAHAP III (2035-2039)	TEMA TAHAP IV (2040-2045)						
		Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan Transformasi	Perwujudan Daya Saing Daerah	Perwujudan Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan	Kelembagaan dan regulasi tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, digitalisasi pelayanan publik	Kolaborasi kelembagaan, peningkatan kualitas regulasi, percepatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dan ASN yang kompeten dan berintegritas	Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, penguatan implementasi regulasi	Tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif dan adaptif dalam kerangka lingkungan bermasyarakat yang aman dan kondusif	Indeks Reformasi Birokrasi	77,80	78,24	78,79	79,34	80,00
						Indeks Reformasi Hukum	54,20	61,36	70,31	79,26	90,00
						Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,65	3,82	4,03	4,25	5,00
						Indeks Pelayanan Publik	4,33	4,46	4,63	4,80	5,00
						Indeks Integritas Nasional	73,56	76,82	80,89	84,96	89,85
						Jumlah Kejadian Konflik SARA	0	0	0	0	0



VISI	MISI	Arah Kebijakan				IUP (Indikator Utama Pembangunan)	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD III 2035-2039	RPJMD IV 2040-2045
		TEMA TAHAP I (2025-2029)	TEMA TAHAP II (2030-2034)	TEMA TAHAP III (2035-2039)	TEMA TAHAP IV (2040-2045)						
		Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan Transformasi	Perwujudan Daya Saing Daerah	Perwujudan Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
	Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif	Inisiasi penerapan ekonomi hijau dan biru serta penguatan riset, inovasi, dan digitalisasi untuk mendorong peningkatan produktivitas	Percepatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dengan penerapan ekonomi hijau dan biru	Pemantapan ekonomi hijau dan biru, perluasan pusat-pusat pertumbuhan, dan penguatan branding daerah	Perwujudan masyarakat Demak yang sejahtera dalam kerangka perekonomian yang berkelanjutan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	33,43	35,00	36,95	38,91	41,26
						Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,33	3,76	4,30	4,84	5,48
						Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,30 - 4,40	4,86- 4,08	4,31- 3,68	3,76- 3,28	3,10 - 2,80
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,16	60,98	63,26	65,54	68,27
						Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,10	2,56	3,13	3,70	4,39
						Return on Aset (ROA) BUMD (%)	3,50	3,75	4,06	4,38	4,75



VISI	MISI	Arah Kebijakan				IUP (Indikator Utama Pembangunan)	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD III 2035-2039	RPJMD IV 2040-2045
		TEMA TAHAP I (2025-2029)	TEMA TAHAP II (2030-2034)	TEMA TAHAP III (2035-2039)	TEMA TAHAP IV (2040-2045)						
		Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan Transformasi	Perwujudan Daya Saing Daerah	Perwujudan Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
					Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,35	3,05	3,92	4,79	5,84	
					Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	192	233	298	380	509	
					Kapabilitas Inovasi	2,3	2,64	3,07	3,49	4	
					Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,08	29,11	29,14	29,17	29,21	
					Disparitas Harga	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	
					Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO ₂ eq)	224.790,77	4.099.730,66	8.943.405,53	13.787.080,40	19.599.490,24	
					Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	87,69	93,16	100,00	100,00	100,00	



VISI	MISI	Arah Kebijakan				IUP (Indikator Utama Pembangunan)	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD III 2035-2039	RPJMD IV 2040-2045
		TEMA TAHAP I (2025-2029)	TEMA TAHAP II (2030-2034)	TEMA TAHAP III (2035-2039)	TEMA TAHAP IV (2040-2045)						
		Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan Transformasi	Perwujudan Daya Saing Daerah	Perwujudan Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
						Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita Kabupaten (juta rupiah)	29,58-29,99	39,34-41,08	58,83-63,72	87,48-98,29	137,32-161,28
						Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,94	0,89	0,82	0,75	0,67
						Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	4,57	4,61	4,66	4,71	4,77
						Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB (%)	4,16	4,20	4,25	4,30	4,36
						Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	22,09-22,29	22,89-23,45	23,89-24,90	24,89-26,35	26,09-28,09



VISI	MISI	Arah Kebijakan				IUP (Indikator Utama Pembangunan)	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD III 2035-2039	RPJMD IV 2040-2045
		TEMA TAHAP I (2025-2029)	TEMA TAHAP II (2030-2034)	TEMA TAHAP III (2035-2039)	TEMA TAHAP IV (2040-2045)						
		Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan Transformasi	Perwujudan Daya Saing Daerah	Perwujudan Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
						Persentase Desa Mandiri (%)	13,99	19,09	25,47	31,85	39,51
						Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	74,44	79,55	85,94	92,33	100,00
						Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten (%)	89,83	91,60	93,82	96,04	98,70
						Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	15,00	30,00	37,00	43,00	50,00
						Indeks Daya Saing Daerah	3,36	3,59	3,87	4,16	4,50



VISI	MISI	Arah Kebijakan				IUP (Indikator Utama Pembangunan)	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD III 2035-2039	RPJMD IV 2040-2045
		TEMA TAHAP I (2025-2029)	TEMA TAHAP II (2030-2034)	TEMA TAHAP III (2035-2039)	TEMA TAHAP IV (2040-2045)						
		Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan Transformasi	Perwujudan Daya Saing Daerah	Perwujudan Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
Mewujudkan transformasi sosial yang berkeadilan	Pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif	Percepatan pengentasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi masyarakat	Pemantapan kesejahteraan masyarakat yang inklusif	Perwujudan kesejahteraan masyarakat yang inklusif	Tingkat Kemiskinan (%)	10,39-11,01	8,31-8,92	5,71-6,30	3,12-3,69	0,00-0,55	
					Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	41,54	47,54	55,04	62,54	71,54	
Mewujudkan keberlanjutan pembangunan berbasis ketahanan ekologi dan pemerataan pembangunan kewilayahan	Pemenuhan infrastruktur dan ketaatan penataan ruang wilayah dalam penanggulangan rob dan bencana	Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung percepatan dan pengembangan ekonomi	Pembangunan pusat pertumbuhan kota baru berwawasan lingkungan	Perwujudan kawasan perkotaan yang nyaman, indah dan terintegrasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,60	72,78	73,00	73,22	73,48	
					Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	23,00	36,40	53,15	69,90	90,00	
					Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	6,94	22,94	42,94	62,94	86,94	



VISI	MISI	Arah Kebijakan				IUP (Indikator Utama Pembangunan)	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029	RPJMD II 2030-2034	RPJMD III 2035-2039	RPJMD IV 2040-2045
		TEMA TAHAP I (2025-2029)	TEMA TAHAP II (2030-2034)	TEMA TAHAP III (2035-2039)	TEMA TAHAP IV (2040-2045)						
		Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan Transformasi	Perwujudan Daya Saing Daerah	Perwujudan Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
					Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	0	4,00	19,00	45,00	100	
					Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten (Angka)	57,21	62,71	69,58	73,46	77,21	
					Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	6,76	5,77	4,54	3,31	1,83	
					Indeks Ketahanan Pangan	89,45	90,30	91,35	92,41	93,68	
					Indeks Risiko Bencana (IRB)	97,72- 97,21	92,25-88,95	86,05-79,22	79,84-69,49	72,40 - 57,81	

PENUTUP

06



BAB VI PENUTUP

RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan arah pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Dokumen ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Demak untuk melanjutkan berbagai kebijakan pembangunan jangka panjang sebelumnya.

RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Demak. Dokumen ini juga menjadi pedoman utama bagi calon bupati dan calon wakil bupati dalam merumuskan visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi waktu satu tahunan.

RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan peraturan daerah. Perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan untuk mengawal implementasi RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

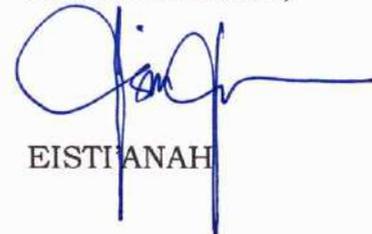
1. Kepala daerah terpilih (bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Demak) berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini dengan menjabarkannya dalam RPJMD sesuai tahapannya. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang RPJPD ini harus dikomunikasikan secara luas kepada seluruh instansi pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk dapat memahaminya secara mendalam dan dapat menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas pokok, dan fungsi masing-masing;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Demak, masyarakat, dan pelaku usaha secara bersama-sama mendukung konsistensi implementasi RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 dengan melakukan segala upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan untuk kemudian dilaksanakan melalui program, kegiatan pembangunan daerah, dan sistem insentif. Selain itu, diperlukan juga pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi implementasi RPJPD;
3. Konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pembiayaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas;
4. Unit satuan kerja vertikal setingkat maupun lembaga-lembaga lokal non pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non pemerintah

yang melakukan kegiatan di Kabupaten Demak serta berbagai komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya berkewajiban melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Demak untuk menyeraskan dan menjamin konsistensi terhadap RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;

5. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang. Hal yang dilakukan berada dalam lingkup pemantauan, supervisi, dan penilaian hasil pelaksanaan RPJPD guna menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang telah dipedomani;
6. Mekanisme perubahan yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Keberhasilan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 sangat tergantung pada komitmen dan konsistensi dari penyelenggara pemerintahan Kabupaten Demak. Untuk itu RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 perlu didukung partisipasi yang kuat dan demokratis dari masyarakat, dunia usaha, media massa, dan akademisi.

BUPATI DEMAK,



EISTI ANAH

LAMPIRAN METADATA RPJPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025-2045

Pada bagian ini dijabarkan metadata Indikator yang digunakan dalam RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045. Metadata ini terdiri dari nama indikator, satuan indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan, Interpretasi, dan sumber data. Penjabaran masing-masing metadata adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten
Satuan	Juta Rupiah
Definisi Operasional	PDRB Perkapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
Formulasi Perhitungan	$\text{PDRB Per Kapita} = \frac{\text{PDRB ADHB}}{\text{populasi PDRB ADHB}} = \frac{\text{PDRB Atas Dasar harga Berlaku}}{\text{Populasi}} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Regional}}{t}$ t = periode
Interpretasi	Semakin tinggi PDRB per kapita menunjukkan tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat
Sumber Data	BPS

2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Satuan	%
Definisi Operasional	Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Formulasi Perhitungan	$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB ADHK}_t - \text{PDRB ADHK}_{t-1}}{\text{PDRB ADHK}_{t-1}} \times 100\%$ PDRB ADHK= PDRB Atas Dasar Harga Konstan t = periode
Interpretasi	Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Sumber Data	BPS

3. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Rasio PDRB Industri Pengolahan
Satuan	%
Definisi Operasional	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari lapangan usaha Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB
Formulasi Perhitungan	$\text{Rasio PDRB Industri Pengolahan} = \frac{\text{Nilai Tambah Lapangan Usaha Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Rasio lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah lapangan usaha industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, semakin

	tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	BPS

4. Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan
Satuan	%
Definisi Operasional	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhandasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
Formulasi Perhitungan	Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk (sesuai perhitungan BPS)
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat
Sumber Data	BPS

5. Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Satuan	angka
Definisi Operasional	Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan pendapatan penduduk.
Formulasi Perhitungan	$Rasio\ Gini = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ <p>Keterangan: f_i = Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Y_i = Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.</p>
Interpretasi	Suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gini makin mendekati satu
Sumber Data	BPS

6. Kontribusi PDRB Kabupaten Demak terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Kabupaten Demak terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah
Satuan	%
Definisi Operasional	Menghitung kontribusi perekonomian Kabupaten Demak terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah
Formulasi Perhitungan	$Kontribusi\ PDRB\ Kab.\ Demak = \frac{PDRB\ ADHB_{Demak}}{PDRB\ ADHB_{Jawa\ Tengah}} \times 100\%$ <p>Keterangan: PDRB ADHB : Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku</p>

Interpretasi	Semakin besar persentase Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah menandakan semakin besar peran demak dalam perekonomian Jawa Tengah
Sumber Data	BPS

7. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah
Formulasi Perhitungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0-100); 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator; 3. Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan <i>cut off point</i> IKP
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Pangan menggambarkan semakin baik kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah
Sumber Data	Badan Pangan Nasional (BAPANAS)

8. Kapasitas Institusi

Nama Indikator	Kapasitas Institusi																																																
Satuan	Angka																																																
Definisi Operasional	Institusi memberikan ketentuan dalam bentuk peraturan tertulis (kebijakan) dan tidak tertulis (norma perilaku) yang memengaruhi pelaku ekonomi dalam membuat keputusan yang optimal. Keberadaan institusi yang kuat tidak hanya memfasilitasi transaksi ekonomi secara efisien, namun juga mencegah terjadinya sengketa sehingga menciptakan iklim bisnis yang kondusif.																																																
Formulasi Perhitungan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDIKATOR 2022</th> <th>INDIKATOR 2023</th> <th>SUMBER DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Kejadian pungutan liar</td> <td>Kejadian pungutan liar</td> <td>KemenkoPolhukam</td> </tr> <tr> <td>2. Tingkat pembunuhan</td> <td>Tingkat pembunuhan</td> <td>Mabes Poln</td> </tr> <tr> <td>3. Kejadian teror*</td> <td>Jumlah Penangkapan Terduga Teroris*</td> <td>BNPT</td> </tr> <tr> <td>4. Keandalan layanan kepolisian*</td> <td>Keandalan layanan kepolisian*</td> <td>Mabes Polri</td> </tr> <tr> <td>5. Modal sosial*</td> <td>Modal sosial*</td> <td>BPS</td> </tr> <tr> <td>6. Transparansi anggaran</td> <td>Transparansi anggaran</td> <td>BPK</td> </tr> <tr> <td>7. Kebebasan PERS*</td> <td>Kebebasan PERS*</td> <td>Dewan Pers Indonesia</td> </tr> <tr> <td>8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</td> <td>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</td> <td>KemenPAN-RB</td> </tr> <tr> <td>9. Kinerja instansi pemerintah</td> <td>Kinerja instansi pemerintah</td> <td>KemenPAN-RB</td> </tr> <tr> <td>10. Pelaksanaan reformasi birokrasi</td> <td>Pelaksanaan reformasi birokrasi</td> <td>KemenPAN-RB</td> </tr> <tr> <td>11. Upaya pencegahan korupsi</td> <td>Upaya pencegahan korupsi</td> <td>KPK</td> </tr> <tr> <td>12. Hak atas kepemilikan</td> <td>Hak atas kepemilikan</td> <td>Mabes Poln</td> </tr> <tr> <td>13. Kualitas administrasi pertanahan</td> <td>Kualitas administrasi pertanahan</td> <td>Kementerian ATR/BPN</td> </tr> <tr> <td>14. Stabilitas kebijakan berbisnis*</td> <td><i>Pindah ke pilar 4</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15. Tingkat pengelolaan lingkungan</td> <td>Tingkat pengelolaan lingkungan</td> <td>KLHK</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR 2022	INDIKATOR 2023	SUMBER DATA	1. Kejadian pungutan liar	Kejadian pungutan liar	KemenkoPolhukam	2. Tingkat pembunuhan	Tingkat pembunuhan	Mabes Poln	3. Kejadian teror*	Jumlah Penangkapan Terduga Teroris*	BNPT	4. Keandalan layanan kepolisian*	Keandalan layanan kepolisian*	Mabes Polri	5. Modal sosial*	Modal sosial*	BPS	6. Transparansi anggaran	Transparansi anggaran	BPK	7. Kebebasan PERS*	Kebebasan PERS*	Dewan Pers Indonesia	8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	KemenPAN-RB	9. Kinerja instansi pemerintah	Kinerja instansi pemerintah	KemenPAN-RB	10. Pelaksanaan reformasi birokrasi	Pelaksanaan reformasi birokrasi	KemenPAN-RB	11. Upaya pencegahan korupsi	Upaya pencegahan korupsi	KPK	12. Hak atas kepemilikan	Hak atas kepemilikan	Mabes Poln	13. Kualitas administrasi pertanahan	Kualitas administrasi pertanahan	Kementerian ATR/BPN	14. Stabilitas kebijakan berbisnis*	<i>Pindah ke pilar 4</i>		15. Tingkat pengelolaan lingkungan	Tingkat pengelolaan lingkungan	KLHK
INDIKATOR 2022	INDIKATOR 2023	SUMBER DATA																																															
1. Kejadian pungutan liar	Kejadian pungutan liar	KemenkoPolhukam																																															
2. Tingkat pembunuhan	Tingkat pembunuhan	Mabes Poln																																															
3. Kejadian teror*	Jumlah Penangkapan Terduga Teroris*	BNPT																																															
4. Keandalan layanan kepolisian*	Keandalan layanan kepolisian*	Mabes Polri																																															
5. Modal sosial*	Modal sosial*	BPS																																															
6. Transparansi anggaran	Transparansi anggaran	BPK																																															
7. Kebebasan PERS*	Kebebasan PERS*	Dewan Pers Indonesia																																															
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	KemenPAN-RB																																															
9. Kinerja instansi pemerintah	Kinerja instansi pemerintah	KemenPAN-RB																																															
10. Pelaksanaan reformasi birokrasi	Pelaksanaan reformasi birokrasi	KemenPAN-RB																																															
11. Upaya pencegahan korupsi	Upaya pencegahan korupsi	KPK																																															
12. Hak atas kepemilikan	Hak atas kepemilikan	Mabes Poln																																															
13. Kualitas administrasi pertanahan	Kualitas administrasi pertanahan	Kementerian ATR/BPN																																															
14. Stabilitas kebijakan berbisnis*	<i>Pindah ke pilar 4</i>																																																
15. Tingkat pengelolaan lingkungan	Tingkat pengelolaan lingkungan	KLHK																																															
Interpretasi	Institusi yang kuat merupakan pendorong fundamental bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.																																																
Sumber Data	Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)																																																

9. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.
Formulasi Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik
Sumber Data	BPS

10. Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Nama Indikator	Penurunan Emisi GRK Kumulatif
Satuan	TonCO ₂ eq
Definisi Operasional	Penurunan emisi GRK dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca pada empat sektor/sub sektor prioritas yaitu energi, AFOLU (<i>Agriculture Forest and Other Land Use</i>), limbah, dan IPPU (<i>Industrial Processes and Production Use</i>).
Formulasi Perhitungan	Data diolah dari nilai rekapitulasi dari pelaporan aksi PRK yang telah "Disetujui" atau "Difinalisasi" di titik tahun tertentu. Penurunan ini merupakan penurunan kumulatif.
Interpretasi	Capaian penurunan emisi GRK Kabupaten/Kota didapat dari implementasi dan pelaporan aksi penurunan emisi GRK oleh K/L dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) pada Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA)
Sumber Data	Aplikasi AKSARA BAPPENAS

11. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Nama Indikator	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)
Satuan	%
Definisi Operasional	Estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat yang dinyatakan dalam bentuk persentase
Formulasi Perhitungan	<p>Membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalornya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan</p> $PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$ <p>Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan dibawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan minimum energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>) f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu</p>

Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya
Sumber Data	BPS

12. Usia Harapan Hidup (UHH)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH)
Satuan	Tahun
Definisi Operasional	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu
Formulasi Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau Mortpack
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
Sumber Data	BPS

13. Jumlah Kasus Kematian Ibu

Nama Indikator	Jumlah Kasus Kematian Ibu
Satuan	Kasus
Definisi Operasional	Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan
Formulasi Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama
Interpretasi	Indikator Jumlah Kasus Kematian Ibu adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Kasus kematian ibu sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Kasus kematian ibu yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca persalinan; 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat; 3. Pendidikan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan; 4. Status Gizi: Kasus kematian ibu yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama

	kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu; 5. Kesadaran Masyarakat: Kasus kematian ibu yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Pelaporan MPDN (Dinkes)

14. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
Satuan	%
Definisi Operasional	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 b. Pendek: Zscore \geq -3,0 s/d Zscore < -2,0
Formulasi Perhitungan	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen(%); Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%)
Interpretasi	Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapamasalah serius, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama; Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak; Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting; Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak; Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting
Sumber Data	Survey Kesehatan Indonesia (SKI)

15. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*)

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)
Satuan	%
Definisi Operasional	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Formulasi Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasustuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis; 2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis
Sumber Data	Pelaporan (Dinkes)

16. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)
Satuan	%
Definisi Operasional	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Formulasi Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah
Sumber Data	Pelaporan (Dinkes)

17. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
Satuan	%
Definisi Operasional	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pesertajaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah
Formulasi Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%

Interpretasi	<p>Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan; 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas; 3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional; 4. Pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan
Sumber Data	BPJS Kesehatan

18. Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang)

18.a. Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) untuk Literasi Membaca

Nama Indikator	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Literasi Membaca SD/Sederajat; b. Literasi Membaca SMP/Sederajat
Satuan	%
Definisi Operasional	Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi . Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan
Formulasi Perhitungan	Jumlah peserta didik dengan kemampuan literasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi DIBAGI Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100%
Interpretasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksud dengan peserta didik adalah peserta didik yang tercatat dan mengikuti asesmen nasional pada satuan pendidikan formal maupun non formal yang berada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing; 2. Tingkat provinsi: pendidikan menengah dan pendidikan khusus (SMA/Sederajat, SMK/Sederajat, SDLB, SMPLB, SMALB); 3. Tingkat kabupaten/kota: pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kesetaraan (SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan Paket A, B dan C); 4. Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif"
Sumber Data	Kemendikbud (Rapor Pendidikan)

18.b. Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) untuk Numerasi

Nama Indikator	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) untuk: a. Numerasi SD/Sederajat; b. Numerasi SMP/Sederajat
Satuan	%
Definisi Operasional	Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi . Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan
Formulasi Perhitungan	Jumlah peserta didik dengan kemampuan numerasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standarkompetensi minimum untuk numerasi DIBAGI Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100%
Interpretasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksud dengan peserta didik adalah peserta didik yang tercatat dan mengikuti asesmen nasional pada satuan pendidikan formal maupun non formal yang berada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kotasesuai kewenangan masing-masing; 2. Tingkat provinsi: pendidikan menengah dan pendidikan khusus (SMA/Sederajat, SMK/Sederajat, SDLB, SMPLB, SMALB); 3. Tingkat kabupaten/kota: pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kesetaraan (SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan Paket A, B dan C); 4. Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif"
Sumber Data	Kemendikbud (Rapor Pendidikan)

19. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun

Nama Indikator	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
Satuan	Tahun
Definisi Operasional	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani
Formulasi Perhitungan	Lama sekolah penduduk ke- <i>i</i> DIBAGI Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (sesuai perhitungan BPS)
Interpretasi	Menempuh pendidikan dimaknai: Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak
Sumber Data	BPS

20. Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
Satuan	Tahun
Definisi Operasional	Harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang

Formulasi Perhitungan	Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t DIBAGI Jumlah penduduk usia i pada tahun t (sesuai perhitungan BPS)
Interpretasi	HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini
Sumber Data	BPS

21. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
Satuan	%
Definisi Operasional	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang dimaksud jenjang pendidikan tinggi meliputi: DI s.d.DIV; S1; S2; S2 Terapan atau S3
Formulasi Perhitungan	Jumlah penduduk 15 th ke atas yang lulus/berijazah pendidikan tinggi DIBAGI Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas DIKALI 100%
Interpretasi	Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif"
Sumber Data	BPS

22. Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun

Nama Indikator	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun
Satuan	%
Definisi Operasional	<ol style="list-style-type: none"> Merupakan cakupan penduduk usia 5-6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah; Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman Kanak- Kanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dan sejenisnya, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA)
Formulasi Perhitungan	Jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah DIBAGI Jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun padawilayah bersangkutan DIKALI 100%
Interpretasi	Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif"
Sumber Data	BPS

23. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulokbahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan
Satuan	%

Definisi Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa Jawa dan atau guru/tenaga pendidik yang mengajar ekskulkesenian dan atau kegiatan/kurikulum yang mengarusutamakan kebudayaan; 2. Satuan Pendidikan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota meliputi PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; 3. Guru Lokal Bahasa Daerah adalah Guru S1/D4 dengan kualifikasipendidikan Bahasa Daerah/Sastra Jawa; 4. Guru Kesenian adalah Guru dengan kualifikasi pendidikan seni S1/D4 dariperguruan tinggi universitas atau institut kesenian; 5. Kegiatan yang mengarusutamakan kebudayaan baik dalam kurikulumpelajaran maupun ekstra kurikuler; 6. Indikator tersebut tercapai jika memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan: a) Guru yang mengajar mulok bahasa daerah, b) Guru yang mengajar seni budaya, dan c) Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan kebudayaan di sekolah (baik melalui kurikulum atau ekskul)
Formulasi Perhitungan	Jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten/kota (PAUD, SD dan SMP) yang memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan DIBAGI Jumlah seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten/kota (PAUD, SD dan SMP) DIKALI 100%
Interpretasi	Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif"
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan

24. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan

Nama Indikator	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan
Satuan	%
Definisi Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan CB dan WBTB yang mendapatkan intervensi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan; 2. Definisi/makna dilestarikan mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (CB)
Formulasi Perhitungan	Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan DIBAGI Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Karya Budaya DIKALI 100%
Interpretasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini menggambarkan sejauh mana upaya yang dilakukan untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Jawa Tengah beserta nilai pentingnya; 2. Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Warisan Budaya; 3. Nilai maksimal indikator 100%, merupakan indikator "positif"
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan

25. Jumlah pengunjung tempat bersejarah

Nama Indikator	Jumlah pengunjung tempat bersejarah
Satuan	Orang

Definisi Operasional	Jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan, seperti museum, bangunan bersejarah, masjid, klenteng, gereja, makam, monumen, candi, situs, kawasan, dan lainnya
Formulasi Perhitungan	Jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan
Interpretasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini menggambarkan sejauh mana masyarakat mempunyai kepedulian dan mengapresiasi warisan budaya dan sejarah Jawa Tengah; 2. Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Warisan Budaya; 3. Tidak ada batasan nilai maksimal terhadap indikator ini, namun trendiharapkan meningkat dari tahun ke tahun; 4. Merupakan indikator "positif"
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan

26. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir

Nama Indikator	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir
Satuan	%
Definisi Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian; 2. Pertunjukan atau festival kesenian dapat berskala internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan selama para pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan/pendapatan/honor
Formulasi Perhitungan	Jumlah kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir DIBAGI Jumlah total keseluruhan kelompok kesenian yang tercatat DIKALI 100%
Interpretasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini menggambarkan sejauh mana para pelaku seni di Jawa Tengah dapat menjadikan kegiatan seni budaya sebagai salah satu sumber pendapatan/kesejahteraan; 2. Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Ekonomi Budaya dan Dimensi Ekspresi Budaya; <p>Nilai maksimal indikator 100%, merupakan indikator "positif"</p>
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan

27. Tingkat pemanfaatan perpustakaan

Nama Indikator	Tingkat pemanfaatan perpustakaan
Satuan	%
Definisi Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pemanfaatan perpustakaan dihitung dengan banyaknya pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari di tahun tersebut dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%; 2. Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan berasal dari kunjungan harian perpustakaan (onsite dan online) dan kunjungan pemustaka yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan; 3. Jumlah penduduk merupakan rilis BPS pada tahun yang sama; 4. Yang dimaksud dengan perpustakaan adalah perpustakaan

	kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Perguruan Tinggi dan Khusus
Formulasi Perhitungan	(Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari dalam setahun baik onsite maupun online/ Jumlah penduduk kabupaten/kota pada tahun yang sama) x 100%
Interpretasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini menggambarkan sejauh mana perpustakaan dimanfaatkan oleh penduduk; 2. Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Budaya Literasi; 3. Nilai maksimal indikator 100%, merupakan indikator "positif"
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perpustakaan dan BPS

28. Jumlah Kejadian Konflik SARA

Nama Indikator	Jumlah Kejadian Konflik SARA
Satuan	Kali
Definisi Operasional	Banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan
Formulasi Perhitungan	Jumlah kejadian konflik yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan
Interpretasi	Indikator jumlah kejadian Konflik SARA adalah ukuran yang digunakan untuk memantau hubungan antar sesama umat beragama yang dilandasi pada toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai, sehingga dapat membentuk hubungan berbangsa dan bernegara dengan baik dan dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan. Tidak adanya kejadian konflik SARA, maka dapat diinterpretasikan bahwa telah tingginya tingkat toleransi dan upaya dalam deradikalisasi telah berhasil
Sumber Data	Diolah dari Tim Penanganan Konflik Sosial, baik di tingkat Kabupaten/Kota serta tingkat Provinsi

29. Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)
Satuan	Angka
Definisi Operasional	IBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia
Formulasi Perhitungan	<p>Penghitungan IBangga menggunakan pendekatan tiga dimensi yang dibentuk dari 17 variabel. Langkah langkah penghitungan IBangga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghitung nilai agregasi masing masing variabel di level provinsi dan kabupaten/kota; 2. menghitung skor disetiap dimensi; 3. menghitung IBangga

Interpretasi	<p>Nilai IBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40; 2. IBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70; 3. IBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70
Sumber Data	BKKBN

30. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Satuan	Angka
Definisi Operasional	IKG adalah ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan ekonomi.
Formulasi Perhitungan	<p>Langkah penghitungan IKG (sumber BPS):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung Indeks Antardimensi untuk Perempuan dan Laki-Laki(Geometrik); 2. Menghitung Agregasi Harmonik Indeks Antardimensi Perempuan dan Laki-laki; 3. Menghitung Indeks Dimensi dengan Mengagregasi Indikator Perempuan dan Laki-laki (Aritmatik); 4. Menghitung Indeks Seluruh Dimensi (Rata-rata Geometrik dari rata-rata Aritmatik); 5. Menghitung Nilai IKG
Interpretasi	Nilai IKG berkisar antara 0-1. Semakin kecil angka IKG menunjukkan semakin kecil ketimpangan gender (semakin setara)
Sumber Data	BPS

31. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Satuan	%
Definisi Operasional	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum adalah persen bagi dari PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan dan penyediaan jasa makan dan minum
Formulasi Perhitungan	$\text{Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi} = \frac{\text{Nilai Tambah Penyediaan Akomodasi}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten Kota}} \times 100 \%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB, ceteris paribus. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata
Sumber Data	BPS, Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata

32. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara
Satuan	Orang
Definisi Operasional	Jumlah tamu wisatawan mancanegara
Formulasi Perhitungan	Data Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di daerah
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara di daerah tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata

Sumber Data	BPS, Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata
--------------------	--

33. Rasio Kewirausahaan Daerah

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan Daerah
Satuan	%
Definisi Operasional	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran
Formulasi Perhitungan	$(\text{Berusaha dibantu buruh tetap daerah} / \text{total angkatan kerja daerah}) \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha
Sumber Data	BPS dan Sektoral (Kemenkop RI, Diskopukm Provinsi dan Diskopukm Kab/kota)

34. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
Satuan	%
Definisi Operasional	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun
Formulasi Perhitungan	$(\text{Volume Usaha Koperasi Daerah} / \text{PDRB ADHB}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut
Sumber Data	BPS dan Sektoral (Kemenkop RI, Diskopukm Provinsi dan Diskopukm Kab/kota)

35. Return on Aset (ROA) BUMD

Nama Indikator	Return on Aset (ROA) BUMD
Satuan	%
Definisi Operasional	Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Formulasi Perhitungan	$(\text{Agregat laba bersih seluruh BUMD} / \text{Agregat aset seluruh BUMD}) \times 100\%$ Catatan: BUMD dalam hal ini adalah seluruh BUMD yang saham

	mayoritasnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, dan tidak termasuk BUMD yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
Interpretasi	Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	Laporan Keuangan BUMD, BPS

36. Disparitas Harga

Nama Indikator	Disparitas Harga
Satuan	%
Definisi Operasional	Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahanpokok tertentu antardaerah. 13 Komoditas Bapok (Barang Pokok): <ol style="list-style-type: none"> 1. Beras Medium 2. Gula Pasir 3. Minyak Goreng Kemasan Sederhana 4. Daging Sapi Paha Belakang 5. Daging Ayam Ras 6. Telur Ayam Ras 7. Tepung Terigu 8. Kedelai Impor 9. Cabe Merah Keriting 10. Cabe Rawit Merah 11. Bawang Merah 12. Bawang Putih Impor Kating 13. Ikan Kembung
Formulasi Perhitungan	$(\text{Harga komoditas di kabupaten kota} - \text{Harga komoditas di provinsi}) / \text{Harga komoditas di provinsi}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di Kabupaten/Kota dengan harga di Provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antarwilayah
Sumber Data	Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahunan di tingkat Kabupaten/Kota Kementerian Perdagangan, melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP)

37. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Satuan	%
Definisi Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB 2. Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan
Formulasi Perhitungan	$(PMTB / PDRB) \times 100\%$
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan
Sumber Data	BPS

38. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Satuan	%
Definisi Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 2. PDRB adalah penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan; 3. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah

Formulasi Perhitungan	$(\text{Penerimaan pajak daerah} / \text{PDRB}) \times 100\%$
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah
Sumber Data	BPS, SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah), LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

39. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB

Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB
Satuan	%
Definisi Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota. Kepemilikan yang dimaksud adalah Pemda kabupaten kota memiliki saham atas Bank Umum dan Bank Perekonomian rakyat tersebut.; 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan; 3. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu
Formulasi Perhitungan	$(\text{Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota} / \text{PDRB}) \times 100\%$
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan pada bank milik kabupaten/kota terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah
Sumber Data	Total DPK pada bank Milik Kabupaten/Kota: Laporan Keuangan (<i>Audited</i>) Perbankan PDRB: BPS

40. Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB

Nama Indikator	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB
Satuan	%
Definisi Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota. Kepemilikan yang dimaksud adalah Pemda kabupaten kota memiliki saham atas

	<p>Bank Umum dan Bank Perekonomian rakyat tersebut;</p> <p>2. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun (ADHB).</p> <p>3. Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu</p>
Formulasi Perhitungan	$(\text{Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB}) \times 100\%$
Interpretasi	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan milik daerah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota: Laporan Keuangan (<i>Audited</i>) Perbankan PDRB: BPS

41. Kapabilitas Inovasi

Nama Indikator	Kapabilitas Inovasi
Satuan	Angka
Definisi Operasional	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah nilai dari indikator pembentuk Pilar 12 dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kapabilitas Inovasi; Merupakan indikator pembentuk Pilar 12. Kapabilitas Inovasi level Kabupaten/Kota antara lain keanekaragaman tenaga kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, aplikasi merk dagang
Formulasi Perhitungan	Sesuai perhitungan BRIN
Interpretasi	<ol style="list-style-type: none"> Kapabilitas inovasi menggambarkan kemampuan dalam mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan melalui penerapan proses- proses secara tepat serta cepat dalam menanggapi perubahan teknologi; Penjelasan rinci dimensi dan indikator pembentuk daya saing, termasuk metadatanya dapat diakses di tautan https://awan.brin.go.id/s/jg296fjXHYCBPRZ
Sumber Data	BRIN

42. Persentase Desa Mandiri

Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri
Satuan	%
Definisi Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian DesaPDTT; 2. Jumlah perbandingan desa dengan kategori "mandiri" dengan jumlah keseluruhan desa yang dihitung berdasarkan hasil perhitungan Indeks Desa dengan sumber data Potensi Desa (PODES) dengan mencakup 6 (enam) dimensi yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa; 3. Indeks Desa dihitung oleh BPS menggunakan sumber data updating PODES 2019. Data jumlah desa mengikuti daftar yang dikeluarkan Kemendagri, hasil perhitungan Indeks Desa pada Bulan Juli setiap tahunnya; 4. Pemanfaatan Indeks Desa diarahkan pada pemanfaatan Indeks Desa dalam dokumen perencanaan nasional dan daerah, pengalokasian Dana Desa, dan penyusunan kebijakan pembangunan Desa Lainnya; 5. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik
Formulasi Perhitungan	<p>Sesuai perhitungan BPS Perhitungan Indeks Desa $ID = \sqrt[6]{D1 \times D2 \times D3 \times D4 \times D5 \times D6}$</p> <p>Keterangan: ID : Indeks Desa D : Dimensi</p>
Interpretasi	Semakin tingginya jumlah desa mandiri menunjukkan tingkat pembangunan desa yang semakin baik yang didukung dengan komponen pendukung yang termuat dalam 6 (enam) dimensi pengukurannya; Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik
Sumber Data	BPS dan Kementerian Desa PDTT

43. Tingkat Pengangguran Terbuka

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka
Satuan	%
Definisi Operasional	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja
Formulasi Perhitungan	$(\text{Jumlah pengangguran} / \text{jumlah angkatan kerja}) \times 100\%$

Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan ketersediaan di lapangan kerja antar kelompok tersebut
Sumber Data	Sakernas BPS

44. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Satuan	%
Definisi Operasional	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerjaperempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas
Formulasi Perhitungan	$(\text{Jumlah angkatan kerja perempuan} / \text{Jumlah penduduk perempuan usia 15 th keatas}) \times 100\%$
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksi pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial
Sumber Data	Sakernas BPS

45. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Satuan	%
Definisi Operasional	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja (Pekerja Penerima Upah/PPU, Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah/BPU yang memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja (Penduduk bekerja yang berusia 15-65 tahun)
Formulasi Perhitungan	$(\text{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan} / \text{Jumlah semesta penduduk bekerja}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan

46. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet
Satuan	%
Definisi Operasional	Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja
Formulasi Perhitungan	Jumlah rumah tangga dengan minimal satu anggota rumah tangga yang mengakses internet DIBAGI total rumah tangga DIKALI 100%
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya maka dapat digambarkan semakin baik kondisi akses internet di masyarakat
Sumber Data	BPS

47. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
Satuan	%
Definisi Operasional	<p>Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; 2. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. <p>Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat; 2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$; 3. Memiliki akses air minum layak; 4. Memiliki akses sanitasi layak
Formulasi Perhitungan	<p>Menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).</p> $\text{PHLTB (proksi)} = \text{JRTHLTB (proksi)} / (\text{JRT} \times 100)$ <ul style="list-style-type: none"> - PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; - RTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; - JRT: Jumlah rumah tangga
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS

48. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota
Satuan	%
Definisi Operasional	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap merupakan persentase dari panjang jalan Kabupaten/Kota yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten/kota. Perhitungan kondisi jalan mengacu pada SE Menteri 01/ SE/2023, SE Dirjen No 22/ SE/Db/ 2021, Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penggunaan Aplikasi <i>Provincial/Kabupaten Road Management System</i> Di Provinsi Jawa Tengah, pengambilan data kondisi jalan dilakukan
Formulasi Perhitungan	<p>Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap (Kewenangan Kabupaten/Kota) = (Panjang jalan kabupaten/kota yang dijaga dalam kondisi permukaan mantap / total panjang jalan kabupaten/kota) x 100%</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan kabupaten/kota kondisi mantap = Panjang jalan kabupaten/kota kondisi baik + panjang jalan kabupaten/kota sedang(dalam km); <p>Total panjang jalan kabupaten/kota dalam km dengan metode visual dan IRI, analisa hasil penilaian kondisi jalan tersebut diperoleh dari aplikasi PKRMS</p>
Interpretasi	
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum

49. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten

Nama Indikator	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten
Satuan	%
Definisi Operasional	<p>Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota.</p> <p>Pemenuhan minimal perlengkapan jalan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan minimal perlengkapan jalan adalah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, <i>guardrill</i>, penerangan jalan umum (PJU) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada jalan kabupaten/kota minimal sebesar 60% dari total kebutuhan ideal untuk masing-masing perlengkapan jalan dimaksud untuk 1 (satu) ruas jalan.</p> <p>Jenis dan ruang lingkup rambu, marka, <i>guardrill</i> dan APILL sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p>
Formulasi Perhitungan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota = (Jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan / Jumlah total ruas jalan kewenangan kabupaten/kota) x 100%

Interpretasi	<p>Indikator Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan (fasilitas keselamatan) jalan secara tuntas di 1 ruas jalan untuk setiap jenis perlengkapan jalan yang dimungkinkan berbeda-beda kebutuhannya (jenis dan/atau jumlahnya) pada setiap ruas jalannya.</p> <p>Hal ini berkontribusi untuk meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan di ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menjadi indikator ditingkat provinsi (Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan)</p>
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan

50. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Satuan	%
Definisi Operasional	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Formulasi Perhitungan	<p>PSA = ((JRTST+JRITPLT) : JRIS) x 100%</p> <p>PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTST = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRITPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRIS = Jumlah rumah tangga seluruhnya</p>
Interpretasi	<p>Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat</p>
Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS 2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR

51. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
Satuan	%
Definisi Operasional	<p>Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan;

	<p>2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (onpremises);</p> <p>3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan</p> <p>4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023</p>
Formulasi Perhitungan	<p>PASMPP= (JRTASMPP:JRT) x 100%</p> <p>PASMPP: Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan.</p> <p>JRTASMPP: Jumlah RT dengan akses air siap minum JP PDAM (telah aman/diuji sesuai Permenkes pada SR/sample setiap JDB/JDL)</p> <p>JRT: Jumlah RT dengan akses air minum JP PDAM</p>
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kinerja fasilitasi pemerintah daerah dalam penyediaan akses air minum perpipaan untuk rumah tangga diperkotaan yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS PDAM

52. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Satuan	Angka
Definisi Operasional	<p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mengamanatkan bahwa evaluasi kinerja sistem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktifitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan P3A. Penetapan kriteria penilaian kinerja sistem irigasi digambarkan dalam indeks sebagai berikut :</p> <p>Nilai indeks antara : 80 – 100 Kinerja Sangat Baik</p> <p>Nilai indeks antara : 70 – 79 Kinerja Baik</p> <p>Nilai indeks antara : 55 – 69 Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian</p> <p>Nilai indeks antara : < 54 Kinerja Jelek dan Perlu Perhatian</p>
Formulasi Perhitungan	<p>Mengacu ePAKSI Ditjen SDA Kementerian PUPR, penetapan kriteria penilaian kinerja sistem irigasi maka ditetapkan bobot maksimal penilaian setiap Aspek dan Indikatornya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Kondisi Prasaran Fisik (bobot maksimal 45) 2. Aspek Produktifitas Tanam (bobot maksimal 15) 3. Aspek Sarana Penunjang (bobot maksimal 10) 4. Aspek Organisasi Personalia (bobot maksimal 15) 5. Aspek Dokumentasi (bobot maksimal 5) 6. Aspek Kondisi P3A yang mencakup indikator (bobot maksimal 10) <p>Total nilai semua aspek maksimal 100</p>
Interpretasi	Indikator ini mengukur kinerja irigasi guna mendukung ketahanan pangan
Sumber Data	ePAKSI Ditjen SDA Kemen PUPR

53. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Formulasi Perhitungan	Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota yang tidak memiliki gambut adalah (PermenLHK No.27/2021): $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan rentang angka: 1. Sangat Baik : $90 \leq x \leq 100$ 2. Baik : $70 \leq x < 90$ 3. Sedang : $50 \leq x < 70$ 4. Kurang : $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Kurang : $0 \leq x < 25$ Keterangan: Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, dengan catatan tambahan berupa: 1. IKU: Penambahan parameter pm 2.5 sehingga nilai proyeksi IKU memiliki kecenderungan penurunan (terutama perkotaan); 2. IKA: Perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-INA (skala maks. 100, bukan berdasarkan indeks pencemar, dan tidak dibandingkan dengan kelas sungai); 3. IKL: 23 klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL (sebelumnya hanya 9) dan memasukkan faktor koreksi ekosistem gambut (FKEG) bagi kabupaten/kota dengan ekosistem gambut
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, dan tutupan lahan yang dilakukan oleh KLHK

54. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Satuan	%
Definisi Operasional	<p>Timbulan Sampah</p> <p>Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, <i>vermi composting</i>, <i>biodigester</i>, dan sebagainya; 2. Daur ulang materi (<i>material recovery</i>) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. <p>Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memroses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan Pendaur ulang rantai akhir.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.</p> <p>Catatan: Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari <i>waste recovery</i> sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (<i>recovery</i>) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.</p>

Formulasi Perhitungan	<p>Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah:</p> <p>Cara (1) $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)</p> <p>Cara (2) $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan daur ulang sampah(ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir olehsektor informal (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)</p> <p>Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari)</p> <p>Dalam Laporan Neraca Pengelolaan Sampah (dari SIPSN), data yangdigunakan untuk menghitung indikator ini adalah:</p> <p>Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) $= \left[\frac{\text{Jumlah Pendaaran Ulang Sampah (data Iic) + Pengolahan (data Iiif) } }{\text{Timbulan Sampah (data I)}} \right] \times 100$</p>
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Kabupaten/Kota
Sumber Data	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

55. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (IRB)
Satuan	Angka
Definisi Operasional	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan
Formulasi Perhitungan	$\text{Risiko} = \text{Ancaman} \times (\text{Kerentanan}/\text{Kapasitas})$

Interpretasi	<p>Pembagian kelas risiko berdasarkan angka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IRB < 13 adalah rendah 2. IRB 13 - 144 adalah sedang 3. IRB > 144 adalah tinggi <p>Keterangan: Berdasarkan Surat BNPB No. B 009/BNPB/PERB/SS.01.01/01/2023 perihal Metode Perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), agar pemerintah daerah melalui BPBD berfokus pada peningkatan kapasitas yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang berdasarkan 7 prioritas, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan Pengembangan sistem pemulihan bencana.
Sumber Data	Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dirilis oleh BNPB setiap tahun

56. Indeks Reformasi Birokrasi

Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah.
Formulasi Perhitungan	<p>Indeks Reformasi Birokrasi dinilai oleh Kemenpan RB dengan melihat pelaksanaan dua jenis Reformasi Birokrasi yaitu RB General dan RB Tematik.</p> <p>RB General memiliki bobot 100 RB Tematik memiliki bobot 20 sehingga total Indeks RB memiliki bobot 120</p>
Interpretasi	Dengan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi yang ada di daerah, diharapkan perwujudan demokrasi substansial atas asas kesetaraan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan akan semakin membaik
Sumber Data	Kementerian PAN-RB

57. Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidangnya hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional

Formulasi Perhitungan	<p>Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%; 2. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%; 3. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil revidu, dengan bobot 35%; 4. Penataan database PUU, dengan bobot 15%
Interpretasi	<p>Kategori Nilai/Angka Predikat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AA : >90 - 100 Istimewa 2. A : >80 - 90 Sangat Baik 3. BB : >70 - 80 Baik 4. B : >60 - 70 Cukup Baik 5. CC : >50 - 60 Cukup 6. C : >30 - 50 Buruk 7. D : 0 - 30 Sangat Buruk
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM

58. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Satuan	Angka
Definisi Operasional	<p>Definisi SEB Buku I: SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Adapun Definisi Operasional (Kepmen PANRB No. 739 Th 2023): Instrumen Evaluasi SPBE terdiri dari 4 (empat) Domain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domain Kebijakan Internal 2. Domain Tata Kelola SPBE 3. Domain Manajemen SPBE 4. Domain Layanan SPBE <p>Ruang lingkup Indikator Evaluasi SPBE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domain Kebijakan SPBE, terdiri dari 1 (satu) Aspek, yaitu Penguatan Kebijakan SPBE Internal yang memiliki turunan 10 (sepuluh) Indikator; 2. Domain Tata Kelola SPBE, terdiri dari 3 (tiga) Aspek, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Aspek Perencanaan Strategis, memiliki turunan 4 (empat) Indikator; b. Aspek TIK, memiliki turunan 4 (empat) Indikator; c. Aspek Penyelenggara SPBE, memiliki turunan 2 (dua) Indikator; 3. Domain Manajemen SPBE, terdiri dari 2 (dua) Aspek, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Aspek Penerapan Manajemen, memiliki turunan 8 (delapan) Indikator; b. Aspek TIK, memiliki turunan 3 (tiga) Indikator; 4. Domain Layanan SPBE, terdiri dari 1 Aspek, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, memiliki turunan 10 (sepuluh) Indikator; b. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, memiliki turunan 6 (enam) Indikator.

<p>Formulasi Perhitungan</p>	<p>Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungannilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:</p> <p>Rumus Indeks SPBE (dapat dilihat pada SEB Buku I Pedoman Penyelarasan Muatan RPJPD dengan RPJPN)</p> <p>Langkah Perhitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan perhitungan tingkat kematangan indikator-indikator pada 4 domain SPBE. Domain tersebut adalah Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan, Domain Layanan; 2. Masing-masing tingkat kematangan dikelompokkan/skor dalam 5 tingkatan(1 sampai dengan 5); 3. Hasil perhitungan dijumlah; 4. Jumlah hasil perhitungan tingkat kematangan pada masing-masing domain dikalikan bobot pada masing-masing domain. Bobot tersebut adalah Domain Layanan SPBE 45 %, Domain Kebijakan Internal SPBE 13 %, Domain Tata Kelola 25 % dan, Domain Manajemen SPBE 17 %; dan 5
<p>Interpretasi</p>	<p>Ukuran Tingkat Kematangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu); 2. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua); 3. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga); 4. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat); dan 5. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima). <p>Penghitungan Nilai Indeks Tingkat Kematangan SPBE Nilai indeks:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Indeks Aspek, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu aspek, dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot aspek tersebut; 2. Nilai Indeks Domain, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada domain tertentu, dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot domain tersebut; 3. Nilai Indeks SPBE, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan, dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. <p>Bobot Domain:</p> <p>Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE : 13,00%</p> <p>Domain 2 - Tata Kelola SPBE : 25,00%</p> <p>Domain 3 - Manajemen SPBE : 16,50%</p> <p>Domain 4 - Layanan SPBE : 45,50%</p> <p>Total Bobot : 100,00%</p> <p>Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 4,2 – 5,0 Memuaskan 2. 3,5 – < 4,2 Sangat Baik 3. 2,6 – < 3,5 Baik 4. 1,8 – < 2,6 Cukup 5. < 1,8 Kurang
<p>Sumber Data</p>	<p>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kepmen PAN RB No. 739 Tahun 2023 tentang Juknis</p>

Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

59. Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Indeks Pelayanan Publik merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan 6 Aspek pelayanan publik dengan metode sampling
Formulasi Perhitungan	Penilaian oleh KemenPAN-RB dilakukan melalui sampling Unit Pelayanan Publik dengan menilai 6 aspek beserta bobotnya sebagai berikut : 1. Aspek Kebijakan Pelayanan (30%) 2. Aspek Profesionalisme SDM (18%) 3. Aspek Sarpras Pelayanan Publik (15%) 4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik (15%) 5. Aspek Konsultasi dan Pengaduan (15%) 6. Inovasi (7%) dihitung dengan rumus : $\sum(\text{Nilai Aspek}(n) \times \text{Bobot Aspek}(n))$
Interpretasi	Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik : 0 - 1 = Gagal (F) 1,01 - 1,5 = Sangat Buruk (E) 1,51 - 2 = Buruk (D) 2,01 - 2,5 = Cukup (Dengan Catatan(C-)) 2,51 - 3 = Cukup (C) 3,01 - 3,5 = Baik (dengan Catatan (B-)) 3,51 - 4 = Baik (B) 4,01 - 4,5 = Sangat Baik (A-) 4,51 - 5 = Pelayanan Prima (A)
Sumber Data	Kementerian PAN-RB

60. Indeks Integritas Nasional

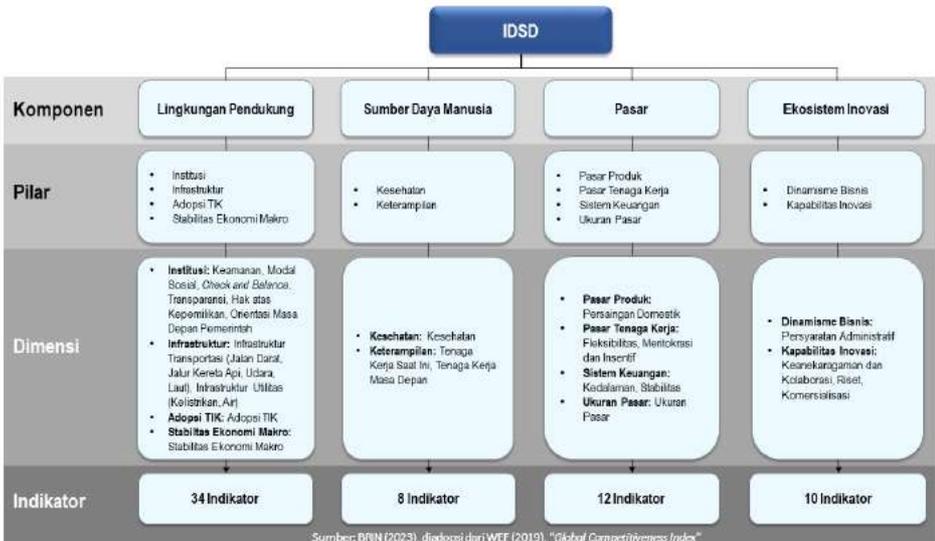
Nama Indikator	Indeks Integritas Nasional
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Indeks Integritas Nasional merupakan pemetaan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh K/L/PD. Berdasarkan hasil ukuran tersebut menjadi dasar untuk menyusun perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi
Formulasi Perhitungan	Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. 1. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/atau organisasi. formula : $(0,1707 X1 + 0,1619 X2 + 0,1288 X3 + 0,1396 X4 + 0,1184 X5 + 0,1602 X6 + 0,1204 X7)$ 2. Penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. formula : $0,0817 X1 + 0,0814 X2 + 0,0832 X3 + 0,0845 X4 + 0,0763 X5 + 0,0863 X6 + 0,0881 X7 + 0,0859 X8 + 0,0872 X9 + 0,0804 X10 + 0,0888 X11 + 0,0762 X12$ 3. Penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu formula : $0,3285 X1 + 3115 X2 + 3599 X3$ Formula penghitungan indeks integritas nasional $0,305 X1 + 0,328 X2 + 0,367 X3 - 0,20 (0,58X4 + 0,42X5)$ dimana:

	X1 Indeks Penilaian Internal X2 Indeks Penilaian Eksternal X3 Indeks Penilaian Eksper X4 Prevalensi Korupsi X5 Integritas Pelaksanaan SPI
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Integritas Nasional maka capaian upaya pencegahan korupsi semakin baik dan risiko korupsi semakin kecil. Begitupula sebaliknya
Sumber Data	Survei Penilaian Integritas KPK RI

61. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Nama Indikator	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
Satuan	%
Definisi Operasional	Ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut : 1. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. 2. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/ sedang/ menengah. 3. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan ketimpangan rendah
Formulasi Perhitungan	Sesuai perhitungan BPS
Interpretasi	
Sumber Data	BPS

62. Indeks Daya Saing Daerah

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah
Satuan	Angka
Definisi Operasional	IDSD sendiri merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.
Formulasi Perhitungan	 <p style="text-align: center; font-size: small;">Sumber: BPS (2023), diadopsi dari WEF (2019), "Global Competitiveness Index"</p>
Interpretasi	IDSD diharapkan menjadi data dasar dalam melakukan riset dan



	menyusun kebijakan terkait daya saing daerah di daerah
Sumber Data	Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)